



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Penegndalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah /Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 yang disusun dengan berpedoman RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis;
 - b. Pedoman bagi Daerah dalam rangka menyusun RKPD;
 - c. Acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2018-2023; dan
 - d. Acuan dasar bagi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan;

- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
- Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- Bab IX Penutup.

Pasal 4

RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka menyelenggarakan pembangunan di Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- b. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- c. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- d. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Kabupaten dalam jangka waktu berlakunya RPJMD.
- (2) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menyempurnakan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Guna menghindari terjadinya kekosongan perencanaan pada tahun 2024, RPJMD Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman untuk menyusun RKPD Tahun 2024 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2024-2028 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah Terpilih Periode Tahun 2024-2028.

Pasal 10

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini terdapat perubahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

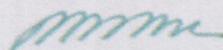
Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



HUBRIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAN SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (3, 19/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018-2023

I. UMUM :

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Bupati Hulu Sungai Selatan yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilyahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif .

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan melalui proses pendekatan secara teknokratis, politis, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial. Serta dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 akan menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 sebelum RPJMD Tahun 2024-2028 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3

BAB I

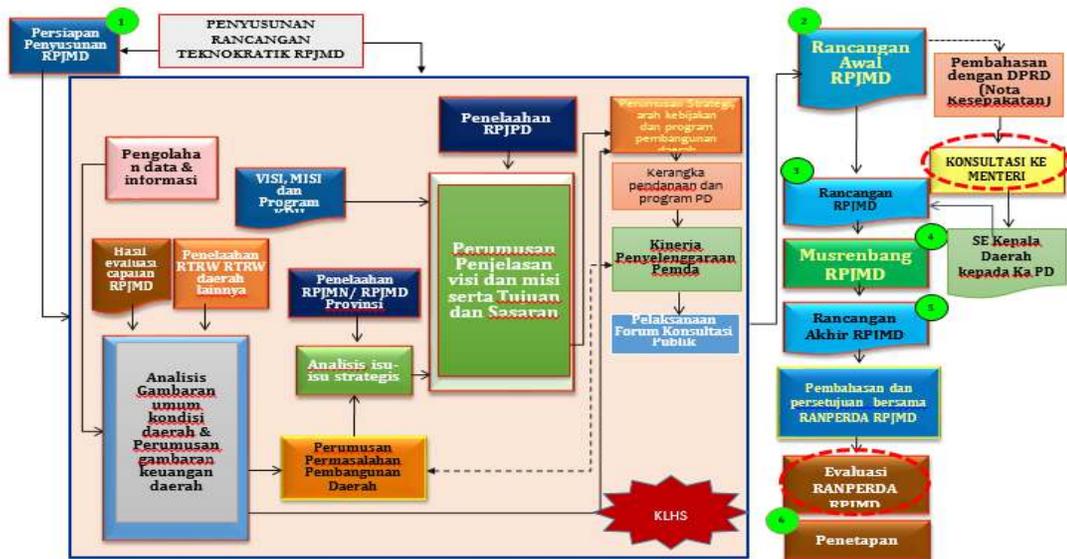
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Disusun berpedoman dengan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan terpilih periode 2018-2023. Tahapan penyusunan RPJMD melalui 6 (enam) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan RPJMD; 2) penyusunan rancangan awal RPJMD; 3) penyusunan rancangan RPJMD; 4) pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 5) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan 6) penetapan RPJMD. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal wilayah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, RPJMD ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian target-target yang secara lebih detail akan dibahas pada bab selanjutnya.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); dan
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

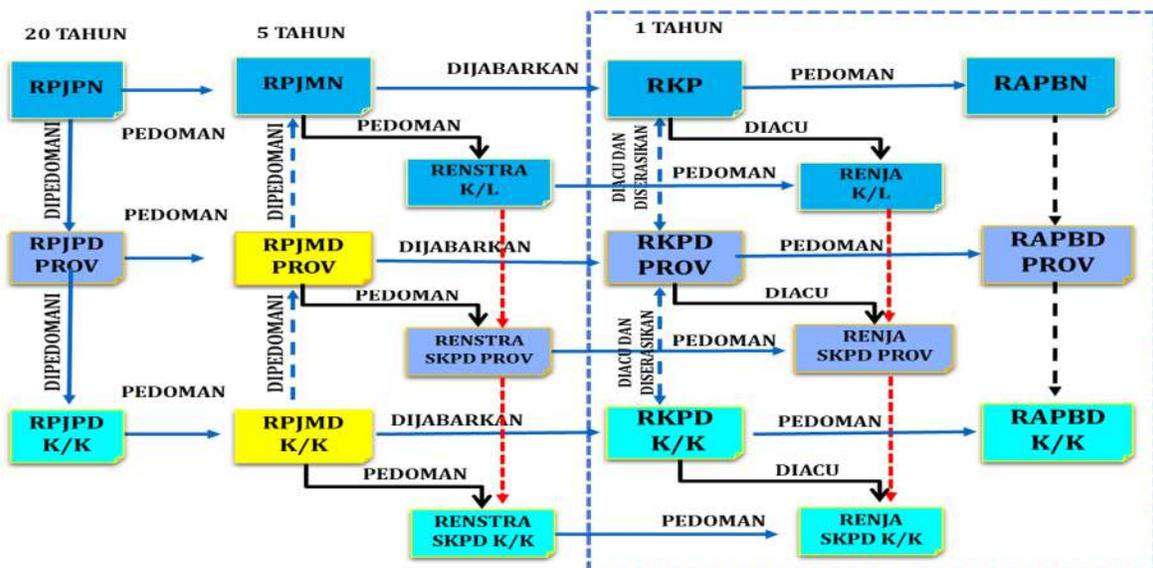
Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang

terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

1.3.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Lainnya

RPJMD disusun dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi, untuk menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan strategi serta program pembangunan. Selanjutnya, RPJMD akan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD. Secara bersamaan, baik RPJMD maupun Renstra PD akan digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang terinci ke dalam Rencana Kerja (Renja) PD.

Dokumen RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD daerah sekitar. Penjelasan tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya diuraikan berikut ini.



Gambar 1.2 Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah

1.3.1.1 RPJMD dengan RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD memuat arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yang akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD. Pembangunan jangka

menengah 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tahap pada periode keempat.

Penelaahan RPJPD dilakukan dengan menelaah sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta tingkat capaian kinerja sampai dengan periode penyusunan RPJMD. Hasil penelaahan sampai dengan periode terakhir dibandingkan dengan target kinerja sasaran pokok periode RPJMD yang akan disusun, menjadi bahan bagi penyusunan tujuan dan sasaran RPJMD.

1.3.1.2 RPJMD dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

1.3.1.3 RPJMD dengan RPJMD kabupaten/kota Lain

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RTRW

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanahkan setiap Rencana Tata Ruang (RTR), baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam penyusunannya harus memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota adanya integrasi antara RTR dengan kebijakan pembangunan. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan RPJMD, dan sekaligus RTRW kabupaten/kota juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD. RTRW berperan sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah, memberikan norma, batasan, dan arahan terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah, termasuk pengendaliannya sehingga harmonisasi antara RTRW dengan RPJMD dalam

perencanaan pembangunan daerah dapat menjamin pelaksanaan pembangunan daerah dengan baik. Dengan kata lain, RTRW harus dapat menjadi pedoman bagi perumusan RPJMD dan RPJPD di daerah.

1.3.3 Hubungan RPJMD dengan KLHS

Upaya pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Termasuk juga rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua dokumen operasional dalam perencanaan periode 2018-2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus mengacu pada RPJMD ini.

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, antara lain :

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah tahun 2018-2023.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana strategis antara tahun 2019 sampai tahun 2023.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBD antara tahun 2019 sampai tahun 2023.

4. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara tahun 2019 sampai tahun 2023.
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu 1) kinerja keuangan masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD, neraca daerah; 2) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi proporsi penggunaan anggaran dan 3) kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja, serta penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menyajikan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis dokumen RPJMD yang merupakan salah satu bagian terpenting dokumen, sehingga menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima).

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Dimana Visi dan misi akan dijabarkan secara lebih terperinci ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang ditetapkan untuk melaksanakan visi dan misi pembangunan dalam rangkai pencapaian yang tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang ditetapkan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan indikator kinerja penyelenggaraan daerah yang ditetapkan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi bagi daerah maupun perangkat daerah.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menyajikan penjelasan tentang pedoman transisi dan metode pelaksanaan tahunan atas RPJMD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Hal ini menjadi gambaran potensi dasar yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber daya untuk pengembangan di masa depan serta kelemahan-kelemahan yang harus diatasi.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak 135 Km sebelah utara ibu kota Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak keanekaragaman hayati yang melimpah. Tak ketinggalan pula kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat yang secara turun temurun dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini merupakan potensi pengembangan daerah yang harus digali sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki ciri-ciri tertentu, yang dapat diketahui dari luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografi, topografi, klimatologi, geologi dan jenis tanah, serta hidrologi. Yang akan diuraikan pada penjelasan berikut ini.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah 1.804,94 km² terbagi menjadi 11 wilayah administrasi Kecamatan, 144 Desa dan 4 Kelurahan dengan pusat pemerintahan sekaligus ibukotanya yakni Kota Kandangan.

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Sebelah timur : Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

Secara astronomis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak diantara $02^{\circ}29'59''\text{LS} - 02^{\circ}56'10''\text{LS}$ dan $114^{\circ}51'19''\text{BT} - 115^{\circ}36'19''\text{BT}$. Dan Kota Kandungan terletak pada $2^{\circ}47'\text{LS} - 115^{\circ}40'\text{BT}$ yang dilewati oleh Sungai Amandit, anak sungai dari Sungai Barito.

Posisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena pada bagian Timur terletak pada jalur arteri primer Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sedangkan bagian Barat jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.1.3 Topografi

Tinggi suatu tempat adalah tinggi tersebut yang diukur dari permukaan laut. Ketinggian suatu tempat berkaitan dengan naik turunnya temperatur/suhu udara, dimana semakin tinggi suatu tempat suhunya semakin menurun. Begitu pula sebaliknya semakin rendah suatu tempat suhunya akan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena terjadinya proses pemampatan dan perenggangan udara.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, daerah berbukit dengan lereng terjal (antara 25 sampai lebih dari 40%) mencapai luas hampir 12% dari total keseluruhan wilayah. Daerah perbukitan tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Padang Batung, Telaga Langsung, sebagian Sungai Raya dan yang paling luas terdapat di Kecamatan Loksado. Daerah dengan lereng terjal ini merupakan bagian dari jalur Pegunungan Meratus yang sebagian difungsikan sebagai kawasan lindung.

Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Ketinggian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
Kelas Lereng (%)		
0-2	128.057	70,95
2-15	20.737	11,49
15-40	19.090	10,58
>40	12.610	6,99
Kelas Ketinggian (m)		
0-7 m	105.198	58,3
7-25 m	18.254	10,1
25-100 m	16.590	9,2

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
100-500 m	27.546	15,3
500-1.000 m	11.226	6,2
> 1.000 m	1.680	0,9

Sumber: Kab. Hulu Sungai Selatan dalam Angka, 2017

2.1.1.4 Klimatologi

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan wilayah tropis, terletak di tengah Provinsi Kalimantan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara yang memiliki iklim tropis lembab dengan seringnya terjadi hujan di tengah musim kemarau panjang.

1. Rata-rata curah hujan selama tahun 2015 mencapai 187,78 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 3,0 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari sebesar 560,0 mm;
2. Rata-rata curah hujan selama tahun 2016 mencapai 243,84 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 91,49 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 390,38 mm;
3. Rata-rata curah hujan selama tahun 2017 mencapai 241,92 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 103,79 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 475,34 mm;
4. Rata-rata suhu udara selama tahun 2015 sebesar 27,5 derajat celcius. Suhu udara terendah terjadi pada bulan Maret sebesar 25,5 derajat celcius, sedangkan suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 29,7 derajat celcius;
5. Rata-rata suhu udara selama tahun 2016 sebesar 28,06 derajat celcius . Suhu udara terendah terjadi pada bulan April sebesar 27,09 derajat celcius, sedangkan suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 29,2 derajat celcius;
6. Rata-rata suhu udara selama tahun 2017 sebesar 28,55 derajat celcius . Suhu udara terendah terjadi pada bulan Januari dan Maret sebesar 27,35 derajat celcius, sedangkan suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 33,2 derajat celcius;

7. Rata-rata Kelembaban udara selama tahun 2015 sebesar 79,5 % . Kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 73 %, sedangkan kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 86 %;
8. Rata-rata Kelembaban udara selama tahun 2016 sebesar 78,46%. Kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 68,38 %, sedangkan kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 85,13 %;
9. Rata-rata Kelembaban udara selama tahun 2017 sebesar 78,93%. Kelembaban udara terendah terjadi pada bulan September sebesar 74,88 %, sedangkan Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 84,25 %.

**Tabel 2.3 Temperatur (°C) Kelembaban Udara (%)
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2016-2017**

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)			Rata-Rata Temperatur (°C)			Rata-Rata Kelembaban Udara (%)		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Januari	560,0	207,16	284,97	26,15	28,08	27,35	86	80,75	81,75
2	Februari	321,9	333,96	187,69	26,75	28,21	33,20	73	81,38	78,13
3	Maret	201,0	375,15	318,83	25,50	28,46	27,35	77	74,00	82,00
4	April	167,5	231,35	326,80	26,70	27,09	28,60	80	81,75	79,50
5	Mei	213,5	176,02	182,95	27,00	28,31	28,80	79	80,25	78,63
6	Juni	185,0	198,51	145,82	27,80	28,30	28,24	81	82,38	77,88
7	Juli	3,0	112,88	166,54	28,20	28,36	27,72	80	81,38	78,38
8	Agustus	16,0	91,49	103,79	27,30	27,86	27,89	82	72,50	77,63
9	September	34,0	172,38	127,21	27,80	27,81	28,77	77	75,63	74,88
10	Oktober	36,5	288,14	141,61	29,70	29,20	28,28	78	68,38	75,50
11	November	265,5	390,38	441,49	29,50	27,90	28,67	77	78,00	78,63
12	Desember	249,5	348,69	475,34	27,60	27,20	27,73	84	85,13	84,25

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka, 2016 dan 2017

2.1.1.5 Geologi Dan Jenis Tanah

Secara regional, daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian dari Cekungan Barito yang terbentuk pada Kala Eosen-Oligosen, pada kala itu terjadi penurunan daratan yang mengakibatkan genangan air laut (Transgresi). Satuan batuan yang terdapat di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dikelompokkan dalam formasi batuan dari yang paling tua ke muda adalah sebagai berikut : batuan tertua adalah Batuan Granit yang merupakan gabungan granodiorit dan diorite berumur Kapur Awal. Berdasarkan hasil

penelitian “Lembaga Penelitian Tanah” Bogor tahun 1974 di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 5 (lima) jenis tanah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Kecamatan	Jenis Tanah					Jumlah
		I	II	III	IV	V	
1	Padang Batung	950	11.251	8.192	-	-	20.393
2	Loksado	14.750	-	19.139	-	-	33.889
3	Telaga Langsung	700	2.694	-	2.414	-	5.808
4	Angkinang	-	-	-	5.840	-	5.840
5	Kandangan	-	220	-	10.451	-	10.671
6	Sungai Raya	3.670	-	150	4.276	-	8.096
7	Simpur	-	-	-	8.235	-	8.235
8	Kalumpang	-	-	-	13.507	-	13.507
9	Daha Selatan	-	-	-	24.619	22.625	47.244
10	Daha Utara	-	-	-	18.279	8.532	26.811
11	Daha Barat	-	-	-	-	-	0
Jumlah		20.070	14.165	27.481	87.621	31.257	180.494
Persentase		11,12	7,85	15,17		17,26	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Keterangan Jenis Tanah :

- I Komplek podsolik merah kuning pegunungan
- II Komplek podsolik merah kuning dataran
- III Komplek podsolik merah kuning lathosol dan lithosol
- IV Orgonosol gleihumus
- V Alluvial

2.1.1.6 Hidrologi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki sistem hidrologi yang terdiri dari sungai, danau dan rawa. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan umumnya berpangkal di Pegunungan Meratus dan berakhir di Laut Jawa setelah bergabung dengan Sungai Barito. Ditinjau dari kondisi hidrologi Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 25 Daerah Aliran Sungai (DAS). Berikut ini merupakan daftar DAS di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Hulu Sungai Selatan

No	Nama DAS	Sub-Sub DAS	Luas (ha)
1	Sub Das Amandit	Amandit (C1-B1)	31,28
2	Sub Das Amandit	Amandit (A1-A2)	18,85
3	Sub Das Amandit	Amandit (A2-A3)	25,97
4	Sub Das Amandit	Amandit (A3-A4)	11,09
5	Sub Das Amandit	Amandit (A4-A5)	11,13
6	Sub Das Amandit	Amandit (A5-A6)	29,76
7	Sub Das Amandit	Amandit (A6-A7)	20,99
8	Sub Das Amandit	Amandit (A7-A8)	18,14
9	Sub Das Amandit	Amandit (A8-A9)	67,99
10	Sub Das Amandit	Amandit (A9-A10)	59,58
11	Sub Das Nagara	Penahayan	6,20
12	Sub Das Nagara	Mangkiki	20,00
13	Sub Das Nagara	Piranim	15,70
14	Sub Das Nagara	Nii	9,80
15	Sub Das Nagara	Harayun	56,10
16	Sub Das Nagara	Tariban	35,90
17	Sub Das Nagara	Atib	5,20
18	Sub Das Nagara	Maniani	14,70
19	Sub Das Nagara	Malinau	54,90
20	Sub Das Nagara	Mandapai	28,60
21	Sub Das Nagara	Lok Bahari	35,90
22	Sub Das Nagara	Panakulan	50,70
23	Sub Das Nagara	Malutu	21,20
24	Sub Das Nagara	Bangakrung	51,10
25	Sub Das Nagara	Anjadihuma	31,30
	Total		732,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014

2.1.2 Penggunaan Lahan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki hutan yang cukup luas meskipun setiap tahun mengalami penurunan karena adanya berbagai eksploitasi lahan, industrialisasi wilayah, hingga pembukaan lahan baru untuk pemukiman. Luas wilayah hutan saat ini mencapai 55.382,33 Ha dengan persentase sebesar 30,68% disusul oleh Padang (Semak, Alang, Rumput) dengan luas 53.829,44 Ha atau 29,82%. Berikut luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diketahui dari tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2017

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Kampung	5.161,18	2,86
2	Industri	-	-
3	Pertambangan	-	-
4	Sawah	44.294,00	24,54
5	Ladang	8.983,00	4,98
6	Kebun Campuran	1.744,25	0,97
7	Perkebunan (Kebun Karet)	10.906,94	6,04
8	Padang (Semak, Alang, Rumput)	53.829,44	29,82
9	Hutan	55.382,33	30,68
10	Rawa	192,86	0,11
11	Tanah Terbuka	-	-
12	Lain-lain	-	-
Jumlah		180.494,00	100,00

Sumber: Kab. Hulu Sungai Selatan dalam Angka Tahun 2017

2.1.2.1 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap, meliputi Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Sungai Raya, dan Kecamatan Telaga Langsat;
- 2) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Daha Utara;
- 3) Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan basah yang meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Simpur, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Telaga Langsat, Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Angkinang, dan Kecamatan Daha Selatan;
- 4) Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan kering/tegalan yang meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Telaga Langsat, Kecamatan Padang Batung, dan Kecamatan Loksado;

- 5) Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas kawasan peruntukan pertanian Hortikultura jenis komoditas buah-buahan berupa semangka yang meliputi Kecamatan Telaga Langsung, Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Daha Utara;
- 6) Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas kawasan peruntukan pertanian hortikultura jenis komoditas sayur-sayuran yang meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Telaga Langsung, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Angkinang, dan Kecamatan Padang Batung;
- 7) Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri atas perkebunan karet meliputi Kecamatan Telaga langsung, Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Loksado, Kecamatan Sungai Raya, dan Kecamatan Angkinang;
- 8) Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri atas perkebunan kelapa sawit meliputi Kecamatan Angkinang, Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kandangan, dan Kecamatan Simpur;
- 9) Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri atas perkebunan kayu manis berada di Kecamatan Loksado;
- 10) Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri atas perkebunan kelapa meliputi Kecamatan Simpur, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Telaga Langsung, Kecamatan Kandangan, dan Kecamatan Angkinang;
- 11) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas perternakan sapi potong pada daerah sentra sapi meliputi Kecamatan Simpur, Kecamatan Kalumpang, dan Kecamatan Sungai Raya;
- 12) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas perternakan sapi potong pada daerah pengembangan meliputi Kecamatan Kandangan, Kecamatan Padang Batung, dan Kecamatan Angkinang, Kecamatan Telaga Langsung, dan Kecamatan Loksado;
- 13) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas perternakan kerbau rawa meliputi Kecamatan Daha Barat, dan Kecamatan Daha Utara;
- 14) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas peternakan kambing meliputi seluruh Kecamatan;

- 15) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas peternakan domba meliputi Kecamatan Kandangan, dan Kecamatan Daha Selatan;
- 16) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas peternakan ayam buras dan ayam ras meliputi seluruh Kecamatan;
- 17) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas peternakan itik pada daerah sentra meliputi Kecamatan Daha Utara;
- 18) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas peternakan itik pada daerah pengembangan meliputi Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Simpur, dan Kecamatan Angkinang;
- 19) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas perikanan tangkap yang terdapat di sekitar sungai besar dan danau meliputi Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Simpur, dan Kecamatan Kalumpang;
- 20) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas budidaya perikanan pada pengembangan kawasan perikanan kolam meliputi Kecamatan Kandangan, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Kalumpang;
- 21) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas budidaya perikanan pada pengembangan kawasan perikanan keramba meliputi Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara, dan Kecamatan Daha Barat;
- 22) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas pengolahan ikan meliputi Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Kandangan, dan Kecamatan Kalumpang;
- 23) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas perikanan minapolitan berada di Desa Muning Kecamatan Daha Selatan;
- 24) Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas mineral logam seperti emas berada pada Kecamatan Loksado. Mineral logam seperti mangan meliputi Desa Tambak Pipi'I, dan Desa Mawangi, Kecamatan Padang Batung. Mineral logam seperti mangan meliputi Desa Malaris, Desa Haruyan, Desa Bumbuyanin, Desa Kamawakan, Desa Sungai Tinggiran, dan Desa Sungai Landuyan Kecamatan Loksado;
- 25) Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas mineral bukan logam seperti pasir kuarsa berada pada Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung. Mineral bukan logam seperti fosfat meliputi Desa Gunung Batu Laki, Desa Gunung Batu Bini Kecamatan Padang Batung, Desa

Gunung Liang Mandala, dan Desa Gunung Burit Sanga Kecamatan Telaga Langsat. Mineral bukan logam seperti lempung meliputi Desa Karang Jawa, Desa Jambu Hulu, Desa Madang, Desa Pandulangan di Kecamatan Padang Batung, Desa Angkinang Kecamatan Angkinang, Desa Mandala, Desa Ambutun, Desa Taniti, dan Desa Pakuan Kecamatan Telaga Langsat;

- 26) Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas batuan seperti Marmer berada pada Desa Datar Kedayang, Desa Gunung Langara, dan Desa Gunung Kantawan Kecamatan Loksado. Batuan seperti granit berada di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado. Batuan seperti Andesit berada di Kecamatan Loksado. Batuan seperti gabbro berada di Kecamatan Padang Batung. Batu seperti basalt berada di Kecamatan Loksado. Tanah liat berada pada Desa Haratai Kecamatan Loksado, Desa Padang Batung, dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung. Tanah urung berada pada Desa Karang Jawa, Desa Jambu Hulu, Desa Madang, Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung, Desa Angkinang Kecamatan Angkinang, Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya, Desa Mandala, Desa Ambutun, Desa Taniti, dan Desa Pakuan Kecamatan Telaga Langsat. Kerikil berpasir alam (sirtu) berada di Desa Padang Batung, dan Desa Tambak Pipi'l Kecamatan Padang Batung. Batu gamping meliputi sepanjang Sungai Amandit di Kecamatan Padang Batung, dan sepanjang Sungai Amandit di Kecamatan Sungai Raya. Terdiri atas batu bara seperti bitumen padat berada pada Desa Gunung Batu Laki, Desa Gunung Batu Bini, Desa Tayub, Desa Mandapati di Kecamatan Padang Batung, Desa Gunung Liang Mandala, Desa Gunung Burit Sanga di Kecamatan Telaga Langsat, Desa Datar Kedayang, Desa Haratai, dan Desa Tanuhi di Kecamatan Loksado;
- 27) Kawasan peruntukan industri, terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri Dodol Kandangan meliputi Desa Kapuh Kecamatan Simpur, Desa Telaga Bidadari, Desa Hamalau, Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya, Desa Gambah Luar, Desa Kandangan Barat, dan Desa Kandangan Utara Kecamatan Kandangan. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri kerupuk berada di Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri ikan kering berada pada Desa Bangkau Kecamatan Kandangan, Desa Bago Tanggul Kecamatan Kalumpang, Desa Muning,

dan Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri propeler berada pada Desa Panggandingan, dan Desa Pekapuran Kecil Kecamatan Daha Utara. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri imitasi berada di Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri pandai besi berada pada Desa Sungai Pinang, dan Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri gerabah berada di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri kue kering berada pada Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya, dan Desa Kapuh Kecamatan Simpur. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri anyaman bambu berada pada Desa Malinau, Desan Ulang, dan Desa Panggungan Kecamatan Loksado. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri anyaman purun berada pada Desa Balimau, dan Desa Karang Bulan Kecamatan Kalumpang. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri kumpang parang berada pada Desa Sarang Halang, dan Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri gula merah berada meliputi Desa Jambu Hulu, Desa Jambu Hilir Kecamatan Kandangan, Desa Baru Hulu, Desa Baru Tengah, Desa Asam-Asam, Desa Tamiyang, Desa Karasikan, Desa Batang Kulur Kanan, Desa Batang Kulur Kiri, dan Desa Bumi Berkat Kecamatan Sungai Raya;

- 28) Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas pariwisata budaya seperti wisata budaya lokal meliputi Balai Adat Dayak di Kecamatan Loksado, Rumah Adat Banjar Bumbungan Tinggi di Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan, Rumah Adat Banjar Gajah Manyusu di Desa Amawang Kecamatan Kandangan, Upacara Aruh Ganal di Hulu Sungai Selatan, Seni Tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Lomba Jukung Tradisional (Perahu Naga) di Kecamatan Daha Selatan, Olahraga Tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalang Hadangan di Kecamatan Daha Utara. Terdiri atas pariwisata budaya seperti wisata budaya sejarah meliputi Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Desa Ni'ih Kecamatan Loksado, Tugu Peringatan Penyusunan Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV di Kecamatan Telaga Langsung, Tugu Peringatan Peristiwa Pemencaran Pasukan ALRI Divisi

IV 10 Mei 1949 di Pagat Batu Desa Batu Bini Kecamatan Padang Batung, Tugu Gencatan Senjata Antara Gubernur Tentara ALRI Divisi IV dengan NICA di Kecamatan Sungai Raya, Monumen Mandapai, Upacara HUT ke-IV RI 17 Agustus 1949 di Desa Mandapai Kecamatan Padang Batung, Tugu Palagan Nagara 2 Januari 1949 di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara, Tugu Garis Demarkasi di Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung, Tugu Peringatan Markas Daerah Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Jelatang Kecamatan Padang Batung, Gedung Juang Devisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya, Situs Benteng Madang di Desa Madang Kecamatan Padang Batung, Situs Amuk Hantarukung di Desa Hantarukung Kecamatan Simpur, Makam Tumpang Talu di Kandangan Barat Kecamatan Kandangan, Kubur Anam di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya, Makam Singakarsa di Jln. Singakarsa Kecamatan Kandangan, Makam Aluh Idut di Jln. Aluh Idut Kecamatan Kandangan, dan Makam Ning Bulang di Desa Hantarukung Kecamatan Simpur. Terdiri atas pariwisata budaya seperti wisata budaya religi meliputi Mesjid Su'ada di Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur, Makam H. M Said di Desa Simpur Kecamatan Simpur, Makam Datu H. Abbas di Desa Simpur Kecamatan Simpur, Kubah Datu Durabu di Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang, Kubah Taniran di Desa Taniran Kecamatan Angkinang, Makam Keramat Datu H.M Rais di Desa Loknyiur Kecamatan Angkinang, Makam Datu Daha Kecamatan Daha Utara, Makam Surgi Tuan di Desa Pasungkan Kecamatan Daha Utara, Makam Habib Ibrahim Desa Mandala Kecamatan Daha Utara, Makam Tuan Guru H. Ali di Desa Pandansari Kecamatan Daha Selatan, Makam Habib Lumpangi di desa Lumpangi Kecamatan Loksado. Terdiri atas pariwisata budaya seperti wisata budaya alam meliputi Wisata Alam Loksado di Kecamatan Loksado, Air Terjun Haratai di Kecamatan Loksado, Air Panas Tanuhi di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado, Gunung Kentawan di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado, Danau Bangkau di Desa Kecamatan Kandangan, Delta dan Dam Sungai Amandit di Desa Malutu Kecamatan Padang Batung, Riam Anai di Desa Lok Lahung Kecamatan Loksado, Air Terjun Kilap Api di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado, Air Terjun Uring di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado, Air Terjun Tangkaramin di Desa Malinau

Kecamatan Loksado, Air Terjun Tinggiran Hayam di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado, Air Panas Mandapai di Desa Bini Kecamatan Padang Batung, dan Telaga Bidadari di Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya;

- 29) Kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas permukiman perkotaan meliputi Kawasan Perkotaan Kandangan di Kecamatan Kandangan, Kawasan Perkotaan Angkinang di Kecamatan Angkinang, Kawasan Perkotaan Sungai Raya di Kecamatan Sungai Raya, Kawasan Perkotaan Nagara di Kecamatan Daha Selatan dan Daha Utara, Kawasan Perkotaan Simpur di Kecamatan Simpur, Kawasan Perkotaan Loksado di Kecamatan Loksado. Terdiri atas permukiman perdesaan berada di semua permukiman di luar kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten;
- 30) Kawasan peruntukan lainnya, terdiri atas perdagangan dan jasa meliputi Pasar Los Batu Kecamatan Kandangan, Pasar Nagara Kecamatan Daha Selatan, Pasar Hewan Kecamatan Angkinang. Dan kawasan pertahanan dan keamanan seperti kawasan Militer Angkatan Darat berada di Kecamatan Kandangan, dan Rayon Militer Darat tersebar di wilayah Kabupaten. Dan juga terdiri atas pertahanan dan keamanan seperti kawasan kepolisian berada pada kepolisian resort di Kecamatan Sungai Raya, dan Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten.

2.1.2.2 Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

- 1) Kawasan Hutan Lindung, meliputi : Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung, dan Kecamatan Telaga Langsat.
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi : Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung, dan Kecamatan Telaga Langsat.
- 3) Kawasan perlindungan setempat, meliputi : Danau Bangkau di Kecamatan Kandangan, Danau Paharangan di Kecamatan Daha Utara, Danau Pantai Ulin di Kecamatan Simpur, Danau Muning Dalam di Kecamatan Daha Selatan, Danau Bago Tanggul di Kecamatan Kalumpang, dan Danau Bajayau Lama di Kecamatan Daha Barat.

- 4) Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH) publik, meliputi lapangan olah raga, taman pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan, rel kereta api, dan sungai. Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH) privat, berupa kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat, dan swasta yang ditanami tumbuhan.
- 5) Kawasan suaka alam dan cagar budaya.
 - a. Kawasan Suaka Alam berada di Cagar Alam Gunung Kantawan berupa Kecamatan Loksado.
 - b. Kawasan Cagar Alam Budaya dan Ilmu Pengetahuan meliputi Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi di Kecamatan Daha Selatan; Masjid Su'ada di Kecamatan Simpur; Benteng Madang di Kecamatan Padang Batung; Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Desa Ni'ih; Makam Tumpang Talu di Kecamatan Kandangan; Kubur Anam di Kecamatan Sungai Raya; Rumah Bersejarah H. Kaspul Anwar di Kecamatan Padang Batung; Rumah Bersejarah H. Abdul Kadir di Kecamatan Padang Batung;
- 6) Kawasan rawan bencana alam.
 - a. Bencana Longsor, meliputi: Kecamatan Loksado di Desa Hulu Banyu, Kecamatan Padang Batung di Desa Batu Laki, Kecamatan Telaga Langsat di Desa Hamak, dan Hamak Utara;
 - b. Bencana Banjir, meliputi :
 - Kecamatan Kandangan di Desa Jambu Hilir, Desa Baluti, Desa Sungai Kupang, Desa Sungai Paring, Desa Lungau;
 - Kecamatan Kalumpang di Desa Kalumpang, Desa Karang Paci, Desa Balanti, dan Desa Balimau;
 - Kecamatan Angkinang di Desa Telaga Sili-Sili, Desa Sungai Hanyar, Desa Angkinang, Desa Angkinang Selatan, Desa Bakarung;
 - Kecamatan Sungai Raya di Desa Sungai Raya Selatan, Desa Tanah Bangkang, Desa Manggala;
 - Kecamatan Padang Batung di Desa Malutu, Desa Batu Laki, Desa Malilingin, Desa Jelatang, Desa Batu Bini, Desa Karang Jawa Muka;
 - Kecamatan Telaga Langsat di Desa Mandala, Desa lok Binuang, Desa Pakuan Timur, Desa Gumbil; dan

- Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara, dan Kecamatan Daha Barat.
- 7) Kawasan lindung lainnya, meliputi :
- Reservaat Danau Bangkau di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan;
 - Reservaat Sungai Jarum di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan; Kawasan Rawa Simpurn di Tanggul Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpurn;
 - Kawasan Bago Tanggul di Desa Bago Tanggul Kecamatan Kalumpang;
 - Kawasan Bajayau Lama di Desa Bajayau Lama Kecamatan Daha Barat; dan
 - Kawasan Muning Dalam di Desa Muning Dalam Kecamatan Daha Selatan.

2.1.3 Demografi

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

2.1.3.1 Jumlah dan Struktur Penduduk

Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu daerah, provinsi, atau negara, dapat dilakukan berbagai cara, seperti sensus penduduk, registrasi atau pencatatan dan survey. Struktur penduduk atau juga disebut susunan penduduk akan digambarkan dalam piramida penduduk.

2.1.3.1.1 Jumlah Penduduk

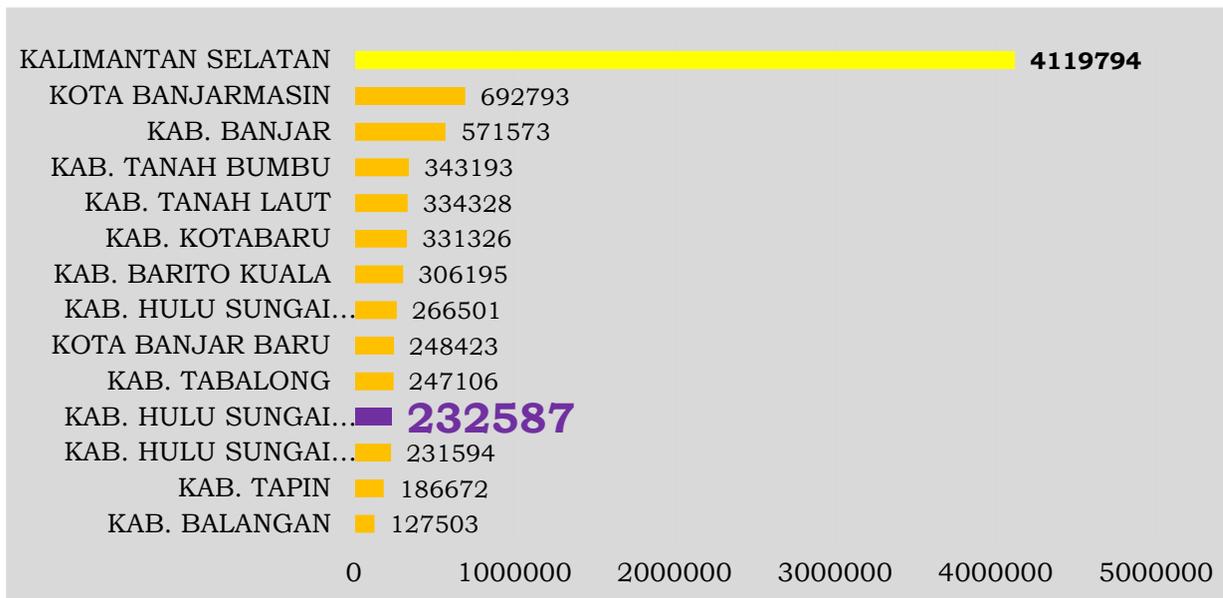
Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data Perkembangan Jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat diketahui pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2013-2017

Kecamatan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PADANG BATUNG	20.337	20.603	20.847	21.092	21.330
LOKSADO	8.582	8.715	8.839	8.968	9.094
TELAGA LANGSAT	9.362	9.493	9.619	9.750	9.882
ANGKINANG	17.342	17.537	17.718	17.905	18.090
KANDANGAN	48.583	49.181	49.737	50.293	50.840
SUNGAI RAYA	17.014	17.204	17.379	17.558	17.737
SIMPUR	14.311	14.436	14.550	14.668	14.785
KALUMPANG	6.212	6.263	6.309	6.357	6.402
DAHA SELATAN	40.823	41.395	41.939	42.498	43.050
DAHA BARAT	7.563	7.685	7.799	7.915	8.029
DAHA UTARA	31.485	31.962	32.417	32.885	33.348
Kab. Hulu Sungai Selatan	221.614	224.474	227.153	229.889	232.587

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan (Data diolah)

Jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 dapat diketahui pada gambar dibawah ini.



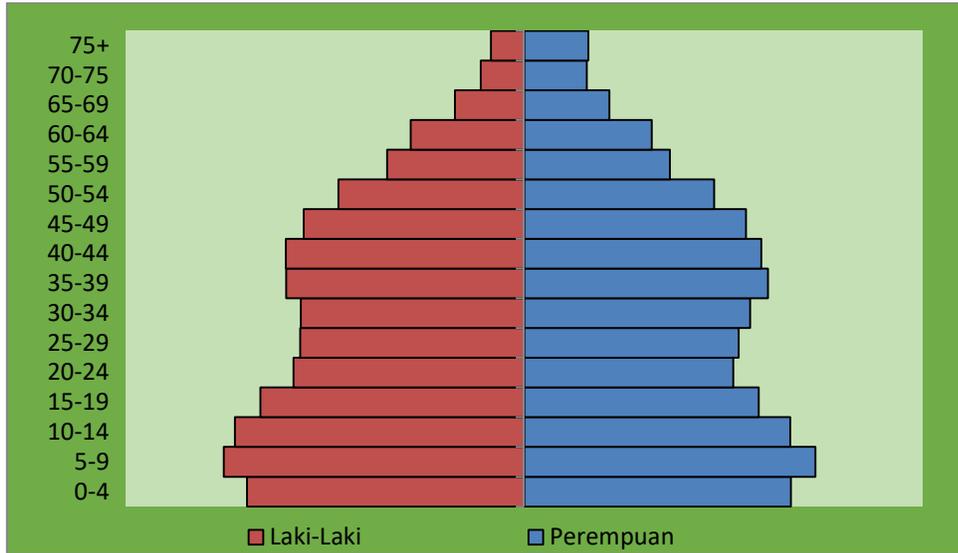
Sumber :BPS KalSel (data diolah)

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kab/Kota Di Kalsel Tahun 2017 (Jiwa)

2.1.3.1.2 Struktur Penduduk

Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk baik untuk dianalisis mengenai produktifitas umurnya maupun berhasil tidaknya program-program kependudukan selama ini. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat bahwa sebagian besar

penduduk berada pada usia produktif dimana pada usia muda paling sedikit jumlah penduduknya kemudian semakin bertambah usia semakin banyak penduduknya hingga berumur 75 tahun ke atas.

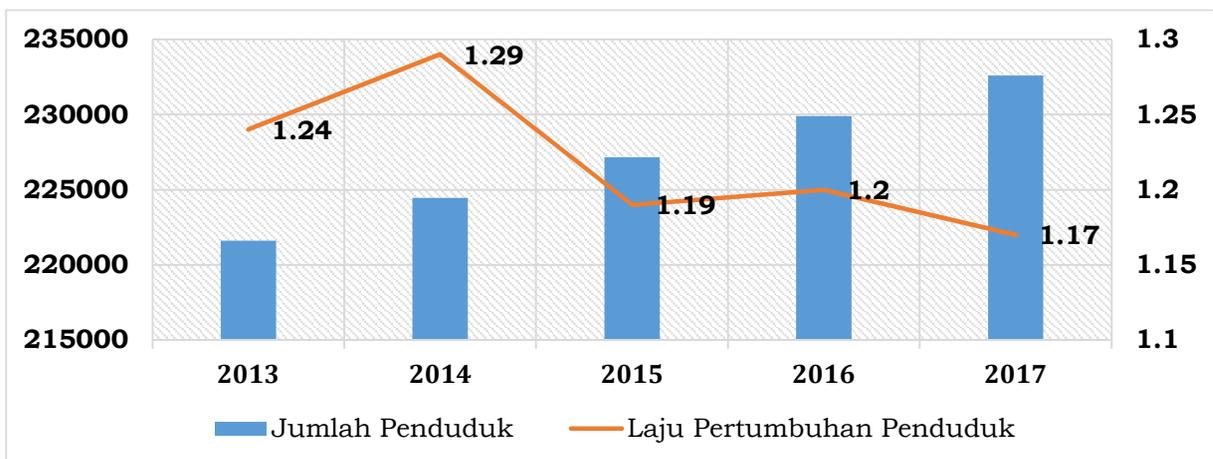


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

2.1.3.2 Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama kurun waktu 5 tahun mengalami pertumbuhan yang positif, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhannya di Kab. Hulu Sungai Selatan, Tahun 2013-2017

2.1.3.3 Distribusi Penduduk

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2016 jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan dan laki-laki hampir setara yaitu perempuan sebanyak 114.997 jiwa, sedangkan laki-laki sebanyak 114.892 jiwa. Angka tersebut menjadikan *sex ratio* penduduk mencapai 99,91. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin, *sex ratio* dan kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

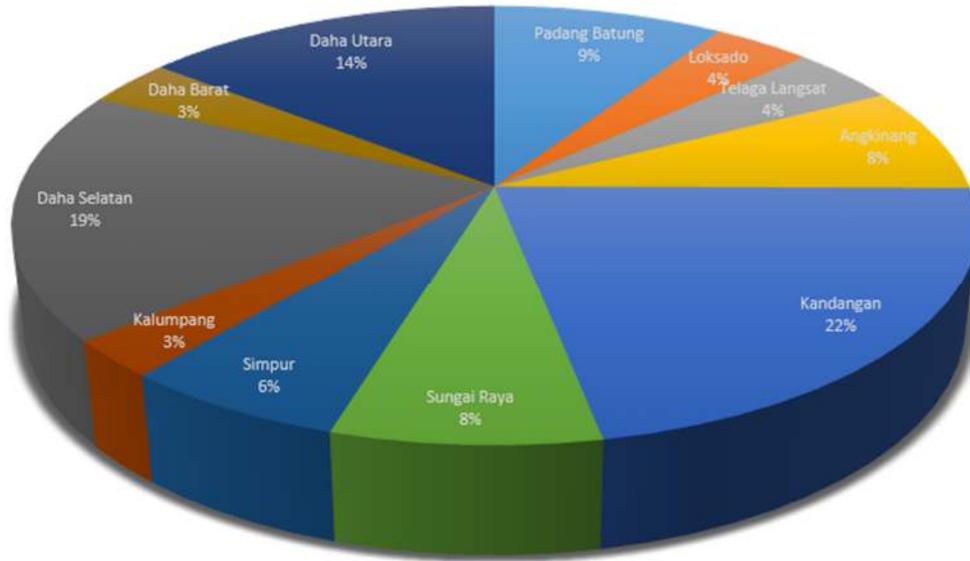
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2016

No	Kecamatan	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk	Pertumbuhan Penduduk 2010-2016 (%)
		Laki-laki	Perempuan	Total			
1	Padang Batung	10.561	10.531	21.092	100,28	103	1,30
2	Loksado	4.570	4.398	8.968	103,91	26	1,49
3	Telaga Langsat	4.938	4.812	9.750	102,62	168	1,34
4	Angkinang	8.983	8.922	17.905	100,68	307	1,10
5	Kandangan	24.986	25.307	50.293	98,73	471	1,22
6	Sungai Raya	8.632	8.926	17.558	96,71	217	1,10
7	Simpur	7.207	7.461	14.668	96,60	178	0,84
8	Kalumpang	3.208	3.149	6.357	101,87	47	0,79
9	Daha Selatan	21.386	21.112	42.498	101,30	132	1,37
10	Daha Barat	4.081	3.834	7.915	106,44	53	1,57
11	Daha Utara	16.340	16.545	32.885	98,76	123	1,48
	Hulu Sungai Selatan	114.892	114.997	229.889	99,91	127	1,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Kenaikan jumlah penduduk setiap tahun secara otomatis juga meningkatkan kepadatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tahun 2016 mencapai 127 jiwa per km² yang berarti terdapat 127 jiwa penduduk bermukim dalam kawasan seluas 1 km².

Sementara untuk kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kandangan dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Loksado.

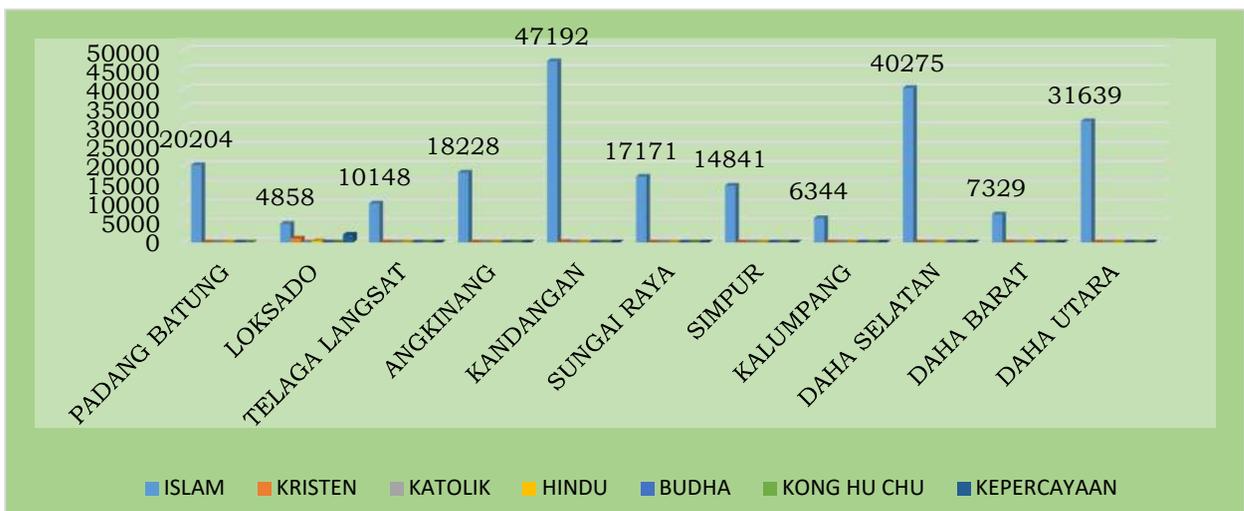


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Gambar 2.5 Distribusi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

2.1.3.4 Komposisi dan populasi Masyarakat

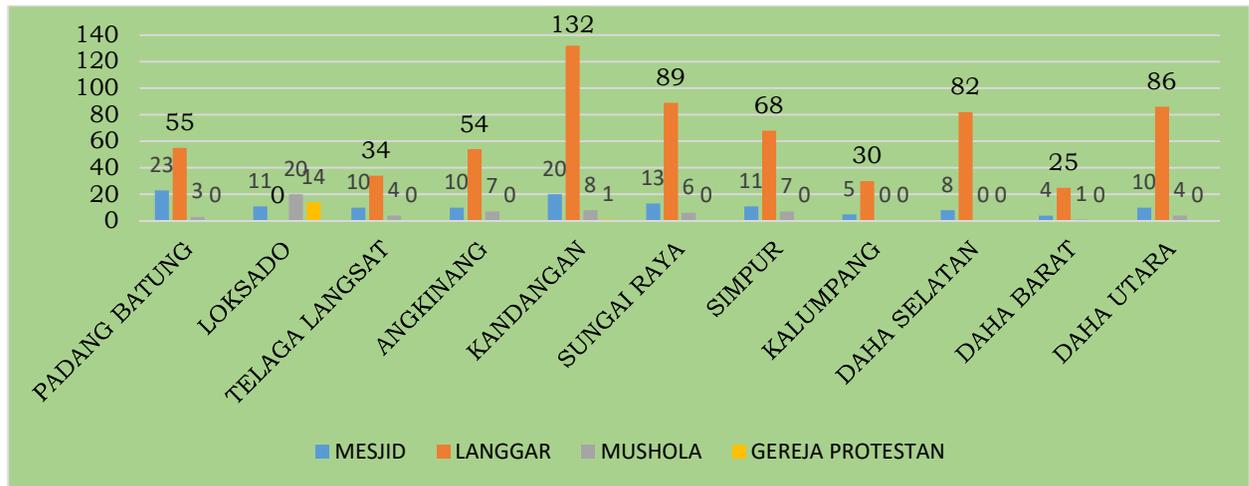
Berdasarkan agama yang dianut, tahun 2017 terdapat 98,39 persen penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan beragama Islam, dan selebihnya adalah Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan lainnya. Selain agama-agama tersebut sebagian kecil penduduk Hulu Sungai Selatan, terutama di Kecamatan Loksado, menganut kepercayaan lainnya yaitu Kaharingan.



Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2018

Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Yang Dianut di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

Jumlah tempat peribadatan seperti mesjid, mushola, langgar dan gereja protestan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017.



Sumber : BPS, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2018

Gambar 2.7 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan Di Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 232.587 jiwa yang terdiri atas 116.327 jiwa penduduk laki-laki dan 116.260 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,06.

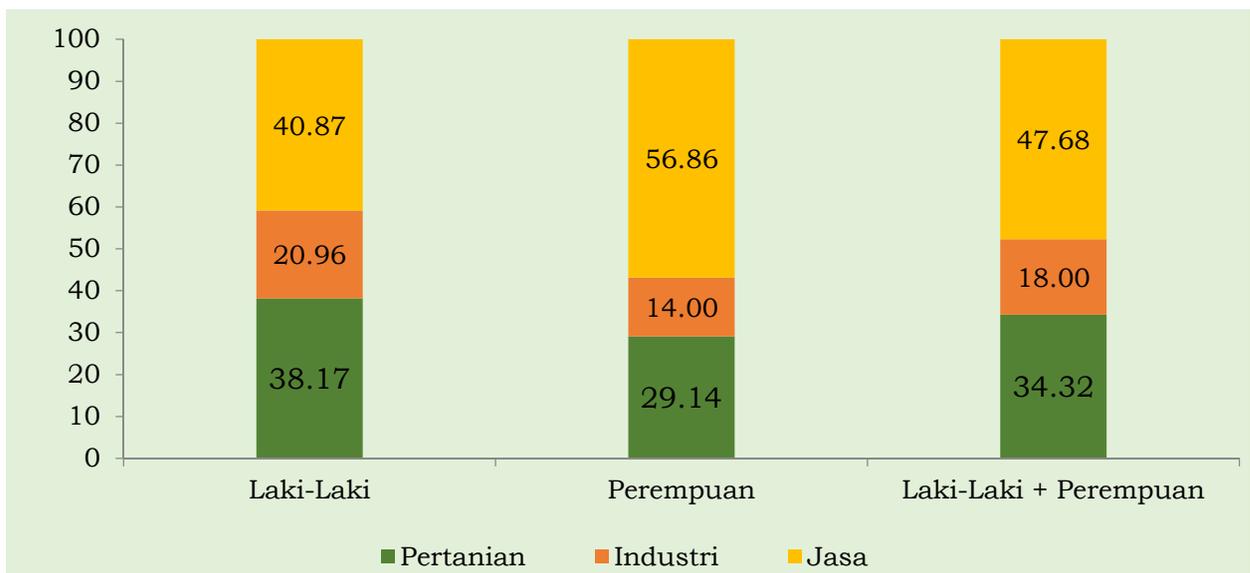
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2017

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2015	2016	2017
1	0 – 4	21.113	20.800	20.491
2	5 – 9	21.620	22.011	22.287
3	10 – 14	20.524	20.706	20.918
4	15 – 19	18.668	18.708	18.781
5	20 – 24	16.702	16.615	16.563
6	25 – 29	16.641	16.587	16.516
7	30 – 34	17.026	16.984	16.915
8	35 – 39	18.171	18.152	18.148
9	40 – 44	17.455	17.714	17.907
10	45 – 49	15.760	16.223	16.670
11	50 – 54	13.211	13.679	14.162
12	55 – 59	9.691	10.185	10.650
13	60 – 64	8.047	8.541	9.089
14	65 – 69	5.343	5.571	5.828
15	70 – 74	3.733	3.855	3.999
16	> 75	3.448	3.558	3.663
Jumlah		227.153	229.889	232.587

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2018

Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 1,17 persen. Meskipun demikian, laju pertumbuhan penduduk tahun 2017 lebih kecil dari pada tahun 2016.

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar berada di daerah pedesaan. Meskipun demikian, pada tahun 2017 secara rinci jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan sektor lapangan usaha, maka sebagian besar yang dominan adalah jasa pada sektor perdagangan besar/eceran, rumah makan/restoran dan hotel, sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi dan jasa perusahaan, serta sektor jasa kemasyarakatan dan lainnya. Dari keseluruhan jumlah penduduk yaitu mencapai 232.587 jiwa. Secara terperinci jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan sektor lapangan usaha, diuraikan dalam gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 2.8 Pekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

Sedangkan menurut kelompok tingkat pendidikan hingga tahun 2017 masih didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SD/Sederajat yaitu sebesar 61,9 % dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017, dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	%
1.	Belum / Tidak Sekolah	3,59
2.	SD / Sederajat	61,9
3.	SLTP / Sederajat	14,65
4.	SLTA / Sederajat	13,81
5.	Diploma	1,26
6.	Sarjana	4,79
Jumlah		100

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang yang perlu dikembangkan antara lain sektor pertanian, dengan luas lahan sawah 52.591 Ha. Potensi produksi pangan terutama dapat dilihat dari cukup besarnya jumlah lahan sawah produktif yang subur.



Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 2.9 Produksi Menurut Jenis Tanaman di Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2017

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu daerah tujuan wisata favorit di Kalimantan Selatan, karena secara geografis berada pada kawasan pegunungan, sungai, dan rawa. Sehingga memiliki objek wisata yang beragam dan alam yang sangat indah, seperti kawasan pegunungan Meratus yang dibawahnya mengalir sungai-sungai dengan air yang jernih, air terjun dan riam, dan sumber air panas alami. Seni budaya serta adat istiadat yang khas, beragam, dan terpelihara dengan baik. Pariwisata menjadi salah satu faktor penunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan melalui konsep "*ecotourism*" serta *Diamond Triangel* dalam konsep pengelompokan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP).

Konsep *Eco-Tourism* yaitu konsep pembangunan pariwisata yang dilakukan dengan mengoptimalkan dan sekaligus melestarikan potensi alam dan budaya khas Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara berkelanjutan dengan pengembangan pariwisata menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

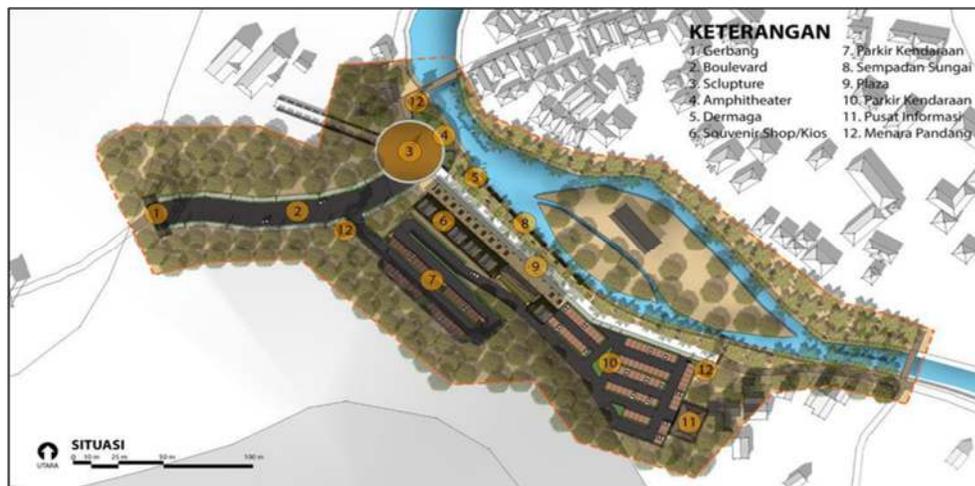
- a. Melindungi lingkungan yang dimanfaatkan;
- b. Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kegiatan masyarakat;
- c. Menyajikan produk bermuatan pembelajaran, pendidikan dan rekreasi dari nilai-nilai karakteristik (alam dan budaya lokal);
- d. Memberi sumbangan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah;
- e. Menekan sejauh mungkin dampak negatif yang ditimbulkan dari rangkaian kegiatan pariwisata.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga diarahkan melalui pengembangan pariwisata terpadu berbasis kawasan strategis cepat tumbuh dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Sinergitas dan pengintegrasian antar/lintas urusan dalam pemerintahan akan dimaksimalkan, khususnya dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkonsep 3A (Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi) pada wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata.

Pemanfaatan potensi SDA, SDM lokal, seni budaya dan adat khas dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengembangan pariwisata dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan (masyarakat, pengusaha, BUMN/BUMD, pemerintahan desa, pemerintah Kabupaten, pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat) secara bersinergi, terkoordinasi dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga memberikan ruang yang luas bagi desa untuk memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya baik dalam pengelolaan daya tarik/atraksi wisata, peningkatan aksesibilitas, amenities dan pemanfaatan peluang usaha jasa pariwisata melalui badan usaha milik desa dan pemberdayaan kelompok sadar wisata.

Pemasaran pariwisata dilakukan berdasarkan pertimbangan kemudahan aksesibilitas dan potensi jenis atraksi wisata, maka konsep Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok :



Sumber :Dok. Lap. Akhir Rencana Induk dan Rencana Detail KSPN Loksado

Gambar 2.10 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Loksado

2.1.4.1 Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I

WPP I Merupakan kawasan alam (pegunungan, hutan, dan pertanian) yang sesuai untuk kegiatan wisata petualangan (adventure) dengan menikmati pemandangan alam. Disamping itu, juga terdapat kelompok dan masyarakat adat asli Dayak Pegunungan Meratus.

WPP I merupakan kawasan prioritas I dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berada di Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Telaga Langsat, dengan kawasan pengembangan utama yaitu Loksado yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS).

Dengan ditetapkannya KSPN Loksado, fokus pengembangan pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan di kawasan WPP I ini lebih dahulu diarahkan untuk menjadikan Loksado sebagai destinasi wisata yang memenuhi standar dan mampu bersaing di level nasional melalui peningkatan sarana dan

prasarana pariwisata dengan memperhatikan konsep 3A (Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi).

Di kawasan utama kecamatan Loksado (Desa Loksado) perlu dibangun sebuah ruang terbuka yang berfungsi sebagai zona penyambutan/lokasi untuk bersantai dan istirahat bagi wisatawan sebelum dan sesudah melakukan aktifitas berwisata. Sesuai dengan dokumen rencana induk dan rencana detail KSPN Loksado, maka dalam pengembangan amenitas di kawasan Loksado diperlukan penataan terhadap bangunan-bangunan yang ada di tepi sungai dan pemulihan kembali Delta Amandit sebagai zona santai untuk wisatawan.

Dalam pengembangan pariwisata di kawasan Loksado perlu juga disusun pewilayahan dengan menetapkan zonasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata termasuk di antaranya pengambil alihan lahan-lahan yang dinilai merupakan lokasi potensial untuk pengembangan pariwisata.

Sinergitas antara berbagai urusan pemerintahan dalam pengembangan pariwisata di WP I berdasarkan konsep 3A, setidaknya mencakup :

- a. Pengembangan *ecotourism*, *edu tourism*, *ethnic tourism* dan penyelenggaraan festival-festival dengan skala provinsi dan nasional, seperti jungle trekking, air terjun, air panas Tanuhi, festival Loksado, bamboo rafting, rumah adat/balai, dan upacara pesta adat/aruh ganal.
- b. Peningkatan jalan menuju destinasi pariwisata/obyek wisata sesuai dengan lingkup kewenangan secara berjenjang dari level pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
- c. Pengembangan usaha kecil dan menengah, fasilitasi jaringan permodalan dan legalitas usahanya.
- d. Pemberdayaan komunitas masyarakat adat.
- e. Pengembangan kawasan terpadu pariwisata desa.
- f. Pemanfaatan sumberdaya hutan, perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan konservasi.
- g. Pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan peningkatan upaya kebersihan lingkungan.
- h. Rehabilitasi dan peningkatan pelayanan di bidang perhubungan seperti penyediaan rambu-rambu dan peningkatan tipe pelayanan terminal Loksado.
- i. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan seluler di kawasan Loksado.

- j. Pembinaan terhadap masyarakat, kelompok sadar wisata dan pelaku usaha jasa pariwisata melalui bentuk-bentuk sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenisnya serta pemberian materi-materi khusus kepariwisataan pada pelajar di semua level pendidikan.
- k. Pengembangan kawasan yang dapat dijadikan museum rumah Adat Dayak, yang berisi kekhasan wilayah Loksado.

2.1.4.2 Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) II

WPP II merupakan wilayah dengan dataran dan rawa, sebagian berada di wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai zona penghubung. WPP II melingkupi Kecamatan Kandangan, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Angkinang, Kecamatan Simpur, dan Kecamatan Kalumpang. Pengembangan pariwisata di wilayah ini diarahkan pada pengembangan wisata religi, wisata kuliner, wisata perkotaan, dan wisata minat khusus. Ada beberapa makam ulama besar, mesjid yang bernilai sejarah, kawasan kuliner khas “Ketupat Kandangan”, beberapa wisata buatan, wahana permainan dan taman kota.

Mendukung fungsinya sebagai zona penghubung, pada WPP II perlu adanya *Tourism Information Center* (TIC) dalam rangka memberikan kemudahan wisatawan terhadap akses informasi destinasi wisata dan mengarahkan pola perjalanannya sesuai paket-paket yang sudah disiapkan.

Pada wilayah ini juga perlu dikembangkan usaha jasa pariwisata, penyediaan galeri sentra industri kecil dan menengah sebagai upaya dalam pengembangan pemasaran dan pemenuhan kebutuhan wisatawan untuk berlibur dan belanja oleh-oleh/souvenir.

2.1.4.3 Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) III

WPP III merupakan wilayah yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari rawa dan sungai, yang melingkupi Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan dan Daha Barat. Pengembangan pariwisata di wilayah ini diarahkan pada pengembangan wisata religi, susur sungai dan kerbau rawa, kerajinan dan industri kecil dan menengah.

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan wisata religi perlu dilakukan penataan sarana, prasana dan aksesibilitas diarahkan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung melalui peningkatan obyek, kualitas jalan dan penyediaan lahan parkir. Disamping itu juga diberikan fasilitasi untuk pengembangan sumber daya pengelolanya.

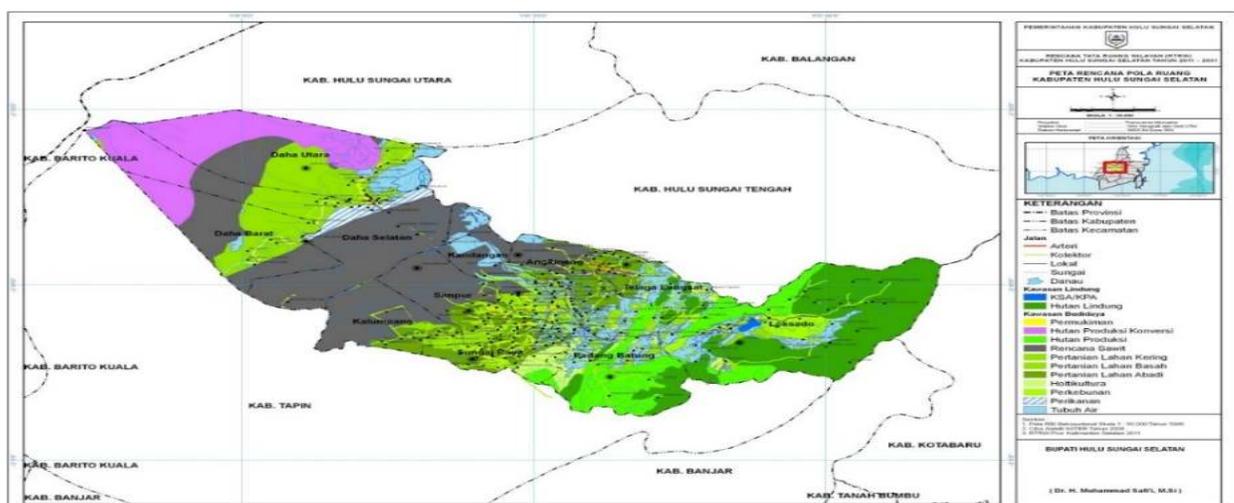
Pengembangan wisata susur sungai dan kerbau rawa merupakan atraksi yang unik dengan perpaduan budaya masyarakat tepi sungai dan daerah rawa. Pengembangan dermaga, moda transportasi dan kegiatan pembinaan masyarakat merupakan kegiatan yang dapat dilaksanakan, selain pentingnya juga melakukan penataan bangunan dan ruang terbuka di tepi sungai.

Paket wisata yang dikembangkan diarahkan untuk menghubungkan antara berbagai potensi wisata yang ada di WPP III dengan potensi industri yang sangat beragam di wilayah tersebut seperti, aneka industri berbahan baku logam, pembuatan gerabah, kerajinan pandai besi, perkapalan, potensi perikanan, potensi pertanian musiman, dan potensi lain yang sudah digeluti masyarakatnya sejak dahulu.

2.1.5 Wilayah Rawan Bencana

Morfologi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar >65% merupakan daerah dataran, hal ini sangat riskan akan terjadi bencana banjir disebabkan daerah hulu dari Sungai Amandit yaitu daerah Loksado merupakan hutan yang kian lama akan semakin gundul akibat dari penebangan hutan yang kurang terkontrol.

Mengingat daerah Kecamatan Loksado dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Batung merupakan daerah dengan satuan geomorfologi perbukitan berelief sedang hingga terjal yaitu dengan kemiringan lereng mencapai $> 36^\circ$, maka sering terjadi bencana tanah longsor yang sangat berbahaya terutama dekat dengan pemukiman dan jalan penghubung antar desa.



Sumber : RTRW Kab. HSS Tahun 2013–2032

Gambar 2.11 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kawasan rawan bencana secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- Kawasan rawan longsor, meliputi :
 - Kecamatan Loksado di Desa Hulu Banyu;
 - Kecamatan Padang Batung di Desa Batu Laki.
 - Kecamatan Telaga Langsung di Desa Hamak dan Hamak Utara
- Kawasan rawan banjir, meliputi:
 - Kecamatan Kandangan terdiri dari desa : Desa Jambu Hilir, Desa Baluti, Desa Sungai Kupang, Desa Sungai Paring. Desa Lungau.
 - Kecamatan Kalumpang terdiri dari desa : Desa Kalumpang. Desa Karang Rati, Desa Balanti, Desa Balimau.
 - Kecamatan Angkinang terdiri dari desa : Desa Telaga Sili-sili, Desa Sungai Hanyar, Desa Angkinang, Desa Angkinang selatan, Desa Bakarung.
 - Kecamatan Sungai Raya terdiri dari desa : Desa Sungai Raya Selatan, Desa Tanah Bangkang, Desa Ida Manggala.
 - Kecamatan Padang Batung terdiri dari desa : Desa Malutu, Desa Batu Laki, Desa Malilingin, Desa Jelatang, Desa Batu Bini, Desa Karang Jawa Muka.
 - Kecamatan Telaga Langsung terdiri dari desa : Desa Mandala, Desa Lok Binuang, Desa Pakuan Timur, Desa Gumbil
 - Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara, dan Kecamatan Daha Barat.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Selama kurun waktu tahun 2013-2017 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013-2017, berturut-turut pada besaran yang relatif stabil.

Tabel 2.11 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Kostan dan Berlaku, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

Tahun	ADHB (Juta Rupiah)	ADHK (Juta Rupiah)
2013	3.801.446,16	3.334.465,09
2014	4.258.173,45	3.527.586,59
2015	4.782.062,67	3.740.951,26
2016	5.210.032,20	3.968.468,58
2017	5.671.876,13	4.211.711,57

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan peningkatan PDRB daerah. Di akhir tahun 2013 PDRB ADHB Hulu Sungai Selatan Rp 3,801 triliun, tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 4,258 triliun, meningkat lagi menjadi Rp 4,782 triliun pada tahun 2015, pada tahun 2016 terus meningkat menjadi Rp 5,210 triliun, dan terakhir meningkat menjadi Rp 5,671 triliun pada tahun 2017. Sedangkan capaian PDRB ADHK pada tahun 2013 sebesar Rp 3,334 triliun, meningkat menjadi Rp 3,527 triliun pada tahun 2014, meningkat menjadi Rp 3,740 triliun di 2015, naik menjadi Rp. 3,968 Triliun di tahun 2016, pada tahun 2017 mencapai Rp. 4,211 Trilyun.

Sedangkan untuk laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun, sedangkan inflasi adalah suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung naik.

Kecenderungan tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu inflasi Banjarmasin. Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Pada tahun 2013 mengalami inflasi sebesar 6,98%, inflasi tersebut meningkat menjadi 7,16% pada tahun 2014, dan turun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 menjadi 5,03%, turun lagi menjadi 3,68% pada tahun 2016, dan terakhir meningkat menjadi 3,82%.

Tabel 2.12 Inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

Kota Inflasi	Inflasi (Umum) Tahun (Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tanjung	-	8,80	6,69	2,18	2,40
Banjarmasin	6,98	7,16	5,03	3,68	3,82
Kalimantan Selatan	-	-	6,69	2,18	3,82
Indonesia	8,38	8,36	3,35	3,02	-

Sumber : BPS Kalsel (data diolah), 2018

Untuk kota inflasi Tanjung pada tahun 2014 mengalami inflasi sebesar 8,80% (yoy), inflasi tersebut menurun menjadi 6,69% (yoy) pada tahun 2015, dan turun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 menjadi 2,18% (yoy) dan terakhir meningkat menjadi 2,40% (yoy).

Untuk kota inflasi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 mengalami inflasi sebesar 6,69% (yoy), inflasi tersebut menurun menjadi 2,18% (yoy) pada tahun 2016, dan terakhir meningkat menjadi 3,82% (yoy).

Untuk kota inflasi Indonesia pada tahun 2013 mengalami inflasi sebesar 8,38% (yoy), inflasi tersebut menurun menjadi 8,36% (yoy) pada tahun 2014, dan turun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 menjadi 8,35% (yoy) dan terakhir menurun lagi menjadi 3,02% (yoy).

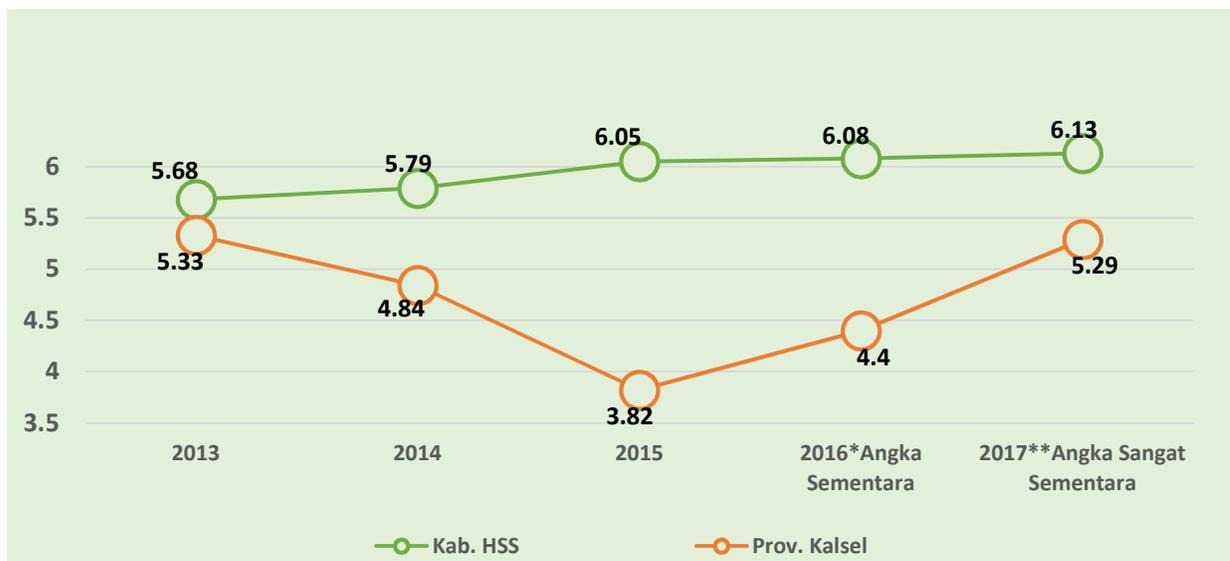
Pada tahun 2017 penyumbang utama inflasi pada tahun 2017 berasal dari kelompok bahan makanan 2,50%, dan terkecil terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,06% .



Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Dalam Angka Tahun 2017

Gambar 2.12 PDRB Per Kapita Berdasarkan ADHB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami kenaikan yang relatif signifikan setiap tahunnya. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Capaian indikator PDRB per kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebesar Rp 17,153 juta, meningkat pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 menjadi Rp 18,969 juta, pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi Rp 21,052 juta, terus meningkat menjadi Rp 22,663 juta pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 24,386 juta.



Sumber : Prov. Kalimantan Selatan dalam Angka Tahun 2018 dan Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2013-2017

Kenaikan PDRB perkapita setiap tahunnya juga berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang juga tiap tahunnya meningkat, pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu

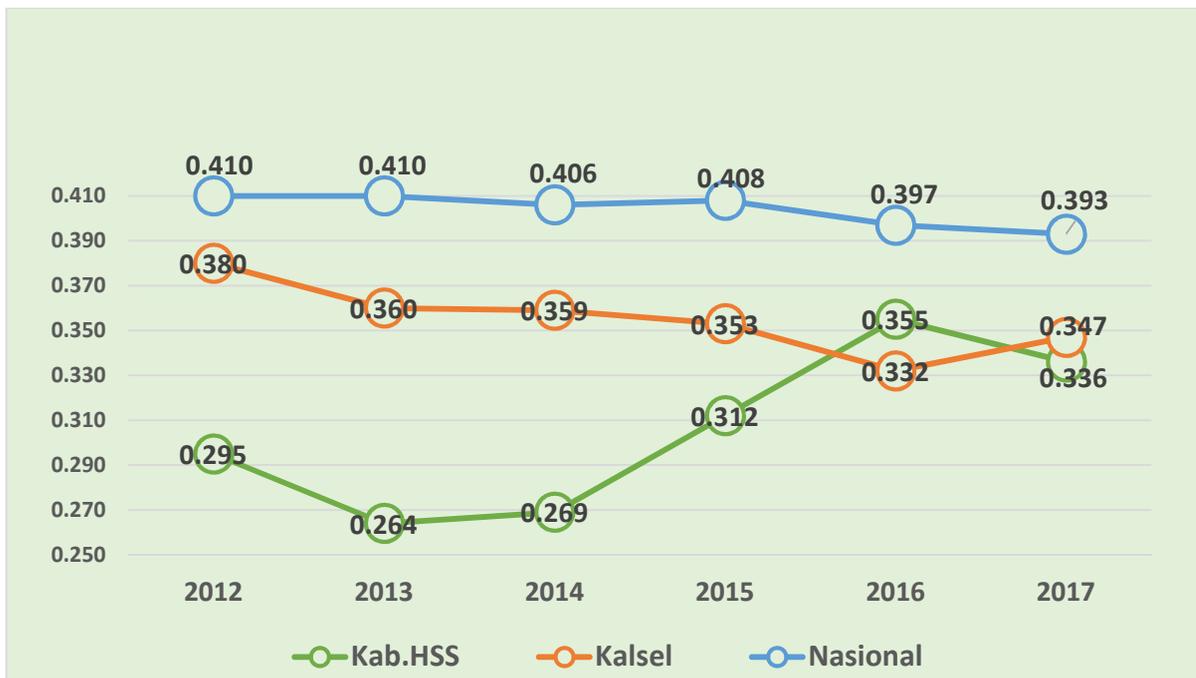
Sungai Selatan sebesar 5,68% yang juga berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 5,79%, di tahun 2015 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,05%, di tahun 2016 capaian pertumbuhan ekonomi tetap mengalami kenaikan meskipun tidak banyak sebesar 6,08% dan tahun 2017 naik kembali menjadi sebesar 6,13%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami konstan, dan juga pertumbuhan ekonomi setiap tahun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan.

Pergerakan ekonomi Hulu Sungai Selatan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dikontribusi paling banyak oleh pertambangan dan penggalian dengan kontribusi rata-rata 19,24%, termasuk didalamnya sub sektor mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batu bara.

Sementara itu, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, meskipun tidak dominan dalam memberi kontribusi ekonomi Hulu Sungai Selatan, namun menjadi juga mengangkat tumbuhnya perekonomian. Sektor ini pada tahun 2017 tumbuh 9,56 persen. Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi unggulan utama, hanya tumbuh rata-rata 2,06 persen.

Sedangkan pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Hulu Sungai Selatan, ditentukan oleh sub sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum yang ditunjang dari berkembangnya pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Peningkatan PDRB Perkapita serta Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak menjamin adanya sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu indikator peningkatan pembangunan suatu daerah selain melihat dari faktor pertumbuhan ekonomi perlu dilihat pula tingkat pemerataannya yang dapat dilihat melalui indeks gini. Indeks gini merupakan salah satu ukuran pemerataan ekonomi atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang nilai indeksnya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Pada Gambar di bawah ini adalah capaian indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2012-2017.



Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka Tahun 2018

Gambar 2.14 Perkembangan Indeks Gini Kab. Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, Tahun 2012-2017

Data series indeks gini dari tahun 2016 hingga tahun 2017 menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sempat mengalami kenaikan sebesar 0.043 pada tahun 2015 dari 0.312 dan pada tahun 2016 menjadi 0.355. Kenaikan indeks gini tersebut berhasil ditekan kembali sehingga pada tahun 2017 besar nilai indeks gini kembali turun menjadi 0.336.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya melalui berbagai upaya dan berbagai pendekatan. Salah satu cara untuk melihat tingkat kesejahteraan sosial adalah melihat nilai Indeks Pembangunan Manusia yang dibentuk dari tiga dimensi yaitu Dimensi Kesehatan meliputi Indeks Kesehatan, Dimensi Pendidikan meliputi Indeks Pendidikan yang meliputi Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, serta yang terakhir adalah Dimensi Ekonomi yaitu Pengeluaran Perkapita.

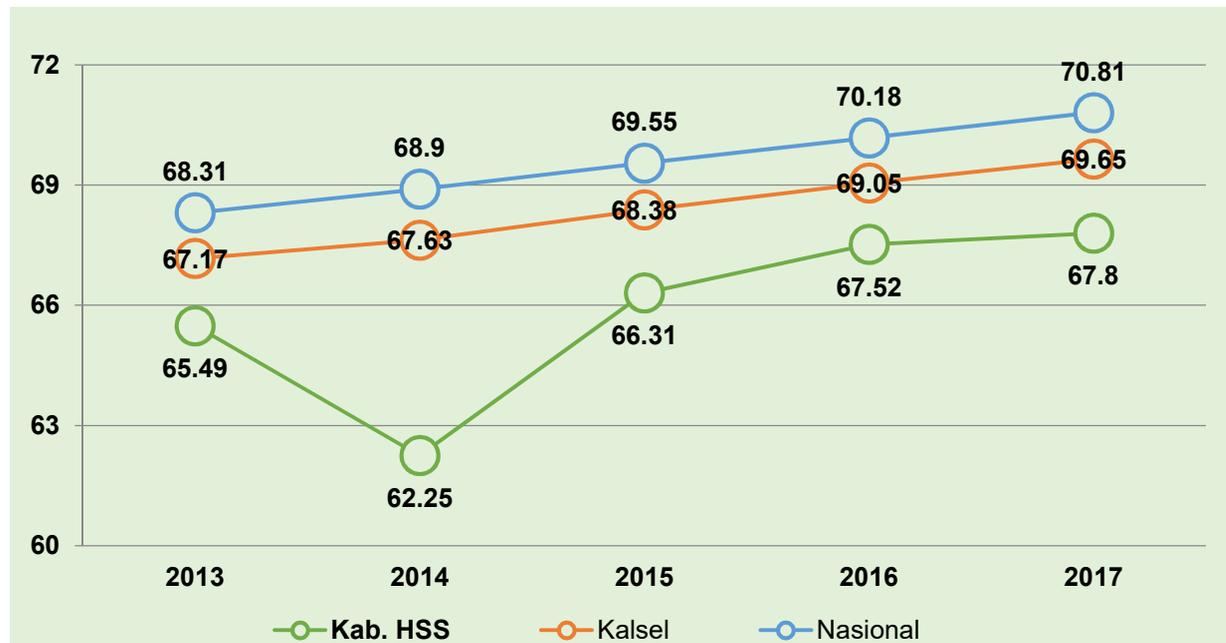
Tabel 2.13 Dimensi IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

Komponen Pembentuk IPM	Pemerintah	Tahun					Demensi
		2013	2014	2015	2016	2017	
Angka Harapan Hidup	Hulu Sungai Selatan	63.64	64.14	65.38	65.39	63.55	Kesehatan
	Kalimantan Selatan	67.47	67.8	67.92	68.02	67.35	
	Kalimantan Selatan	10.665	10.748	10.891	11.307	11.600	
Rata-rata Harapan Lama Sekolah	Hulu Sungai Selatan	11.35	11.68	11.83	12.02	12.05	Pendidikan
	Kalimantan Selatan	11.67	11.96	12.21	12.29	12.46	
Rata-rata Lama Sekolah	Hulu Sungai Selatan	7.05	7.21	7.67	7.68	7.71	Pendidikan
	Kalimantan Selatan	7.59	7.60	7.76	7.89	7.99	
Pengeluaran Perkapita	Hulu Sungai Selatan	11.006	11.077	11.161	11.623	11.890	Ekonomi
	Kalimantan Selatan	10.665	10.748	10.891	11.307	11.600	

Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka, 2018

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang disusun dengan menggunakan pendekatan model adaptasi dari *The United Nations Development Programme (UNDP)* dalam menghitung *Human Development Index (HDI)*.

Berikut IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat perkembangannya pada gambar dibawah ini.



Sumber : Prov. Kalimantan Selatan Dalam Angka 2018

Gambar 2.15 Perkembangan Angka IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2013-2017

Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu pertumbuhan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga harus diperhatikan lebih intensif lagi karena jika dilihat trend pertumbuhannya, IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki penurunan dari tahun 2013-2014.

Sedangkan jika dilihat dari dimensi pembentuknya, pada dimensi kesehatan yaitu Angka harapan hidup (AHH) di Hulu Sungai Selatan fluktuatif setiap tahunnya. AHH tersebut juga masih berada dibawah AHH Provinsi Kalimantan Selatan. Pada dimensi Ekonomi yaitu pada angka pengeluaran perkapita di Hulu Sungai Selatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 juga lebih rendah dibandingkan angka pengeluaran perkapita Provinsi Kalimantan Selatan. Pada dimensi pendidikan, seluruh komponen penyusunnya yang meliputi Rata-rata Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2013 hingga tahun 2017 memiliki tren naik setiap tahunnya. Namun walaupun memiliki tren naik setiap tahunnya, nilai pada kedua indeks tersebut masih berada dibawah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Detail ketercapaian seluruh indikator ketenagakerjaan dari tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.14 Realisasi Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun	Kasus	4	6	6	8	2
2	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Persen	68,47	65,27	69,65	0	71,38
3	Pencari kerja yang ditempatkan	Orang	61	80	482	564	709
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,42	2,64	2,84	-	2,02

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan data capaian tersebut, kondisi partisipasi masyarakat dalam mengisi kesempatan kerja masih belum optimal sehingga memerlukan upaya pengentasan pengangguran yang tepat. Kondisi ini dapat dilihat dari dua indikator yang menjadi tolok ukur pembangunan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Realisasi capaian tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013 sebesar 68,82%, tahun 2014

sebesar 65,27%, tahun 2015 sebesar 69,65 dan tahun 2017 sebesar 71,38%.

Kondisi ini serupa dengan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang pada tahun 2013 sebesar 4,22%, tahun 2014 turun menjadi 2,64% kemudian naik 2,84% di tahun 2015, dan turun lagi pada tahun 2017 menjadi 2.02%. Artinya kondisi partisipasi kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada pada kondisi cukup ideal dengan melihat peluang kerja yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk lokal secara baik. Kenaikan ini terjadi karena pergeseran dari sektor pertanian ke sektor jasa serta perkembangan bidang pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program pembangunan seperti pelatihan bahasa asing, internet marketing, *job fair* untuk mendukung penyiapan tenaga kerja di sektor jasa.

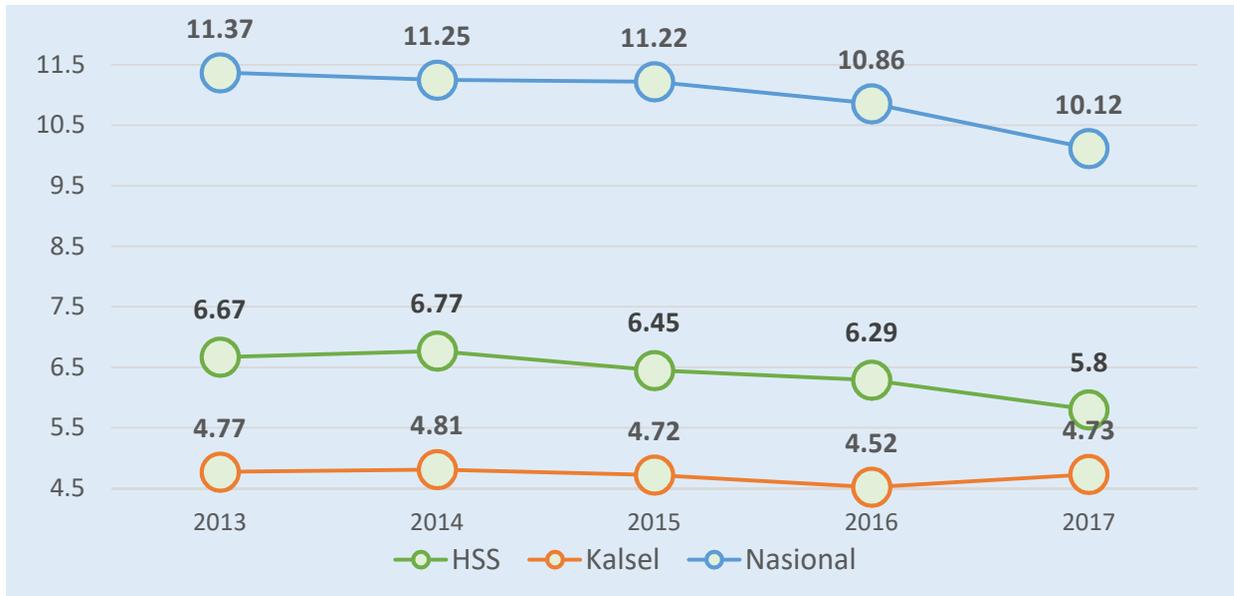
Pada indikator pencari kerja yang ditempatkan perkembangan setiap tahun cukup fluktuatif, tahun 2013 sebesar 61 orang, meningkat tahun 2014 sebesar 80 orang, tahun 2015 sebesar 482 orang, tahun 2016 sebesar 564 orang dan tahun 2017 sebesar 709 orang.

Urusan ketenagakerjaan juga memberikan gambaran terkait hubungan pekerja dan pengusaha. Hal ini menjadi penting dikarenakan dapat menunjukkan tingkat kenyamanan pekerja yang dapat diukur melalui indikator angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun. Capaian indikator tersebut pada tahun 2013 sebesar 4 kasus, tahun 2014 sebesar 6 kasus, tahun 2015 tetap sebesar 6 kasus, pada tahun 2016 sebesar 8 kasus, dan pada tahun 2017 sebesar 2 kasus. Artinya angka ini masih menunjukkan rendahnya potensi sengketa pekerja dengan pengusaha. Perihal yang menjadi penyebab persengketaan pekerja dan pengusaha adalah masalah pengupahan dan adanya hak-hak pekerja lainnya yang belum terpenuhi. Namun dengan melihat angka capaian terdapat permasalahan internal yaitu adanya satuan ukuran antara target dan realisasi tidak sama sehingga menghasilkan angka yang besar. Oleh karena itu, upaya tindak lanjut ke depan adalah meningkatkan pemberian sosialisasi terhadap perusahaan atas hak-hak pekerja secara berkesinambungan. Ketercapaian indikator sengketa memang masih tergolong kurang ideal karena lebih disebabkan hubungan internal pekerja dan pengusaha.

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek

yang mempengaruhinya. Persoalan kemiskinan merupakan fenomena global, karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik disetiap tahunnya. Seperti tersaji dalam gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kalsel (data diolah) Tahun 2018

Gambar 2.16 Tingkat Kemiskinan di Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalsel dan Nasional Tahun 2013-2017

Namun jika dibandingkan dalam level regional, angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong cukup rentan mengingat angka persentase kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan hanya 4,73% pada tahun 2017.

Pada gambar diatas terlihat bahwa ditahun 2013 tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 6,67%. Kemudian di tahun 2014 angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetap berada pada angka 6,67%. Ditahun 2015 turun di angka 6,45%. Kembali turun menjadi 6,29% ditahun 2016 ditahun 2017 turun lagi menjadi 5,8%. Hal ini merupakan hal yang positif, mengingat aspek penentu angka kemiskinan sangatlah kompleks diantaranya adalah kondisi sandang, pangan dan papan penduduk, tingkat pendidikan, dan derajat kesehatan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (*Family Based-Policy*), rumah tangga miskin, Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin menurut

individu (sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga miskin). Dan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, yang bertujuan membiasakan para rumah tangga miskin untuk berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk rasa solidaritas sosial dan meningkatkan peran aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu satuan wilayah terkecil seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) untuk berperan dalam meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana prasarana sosial dasar.

Penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok rumah tangga miskin yang ada di antara para anggotanya yang produktif dan mempunyai usaha mikro dan kecil. Sehingga mereka dapat meningkatkan akses mereka kepada permodalan, teknologi dan pasar, sehingga peningkatan pendapatan dapat lebih besar lagi. Strategi ini menyediakan bantuan modal atau kredit mikro kepada kelompok rumah tangga miskin yang berada dalam satu satuan wilayah terkecil seperti RT atau RW.

Selain itu implementasi pembangunan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan inklusif, penguatan kelembagaan dan reorientasi kebijakan, menjadi pilar utama strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun hasil dari berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut telah menunjukkan sisi manfaat pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada tabel berikut dapat diketahui perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2.15 Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,67	6,77	6,45	6,29	5,8
.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	0,76	0,81	0,76	0,62	0,83
3	Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen	0,17	0,22	0,15	0,10	0,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga dapat diketahui dari pengelolaan kebudayaan dengan indikator meliputi jumlah grup kesenian, jumlah gedung, Data situs yang ditangani, serta pengelolaan pemuda dan olahraga meliputi Jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olah raga. Adapun capaian fokus tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.16 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2016	2017
A	Kebudayaan					
1	Jumlah grup kesenian	Grup	88	92	115	135
2	Jumlah gedung	Gedung	5	5	5	5
B	Pemuda dan Olahraga					
1	Jumlah klub olahraga	Klub	90	90	102	102
2	Jumlah gedung olahraga	Gedung	12	12	12	12

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2018

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang utama pembangunan yang merupakan pelayanan wajib oleh pemerintah daerah dalam pembangunan. Sedangkan kondisi pelayanan pilihan, yaitu yang menyangkut pelayanan pilihan oleh pemerintah daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh semua daerah, terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Yang dalam penyelenggaraan pelayanannya memiliki standar pelayanan minimal atau SPM. Urusan wajib pelayanan dasar

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diuraikan pada penjelasan dibawah ini.

2.3.1.1.1 Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan merupakan urusan wajib sebagai upaya untuk mencapai salah satu misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2018 yakni “Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya”.

Pada Urusan Pendidikan, terdapat beberapa indikator meliputi Angka Partisipasi kasar (APK), Angka Partisipas Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melek Huruf (AMH).

Tabel 2.17 Perkembangan APK, APM, APS, dan Angka Melek Hurup Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	APK						
	- SD/MI/Paket A	Persen	107,12	112,93	111,13	113,80	109,67
	- SMP/MTs/ Paket B	Persen	75,99	79,50	86,99	89,21	86,53
	- SMA/SMK/MA/ Paket C	Persen	57,50	65,51	57,34	80,24	65,76
2	APM						
	- SD/MI	Persen	98,06	98,73	95,37	98,09	99,28
	- SMP/MTs	Persen	73,15	74,27	71,05	74,74	77,15
	- SMA/SMK/MA	Persen	51,45	54,48	43,48	59,15	57,03
3	Angka Putus Sekolah						
	- SD/MI	Persen	28	23	14	26	34
	- SMP/MTs	Persen	23	13	13	17	59
	- SMA/SMK/MA	Persen	4	5	0	31	103
4	Angka Melek Huru	Persen	96	98,14	98,83	98.19	99,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Susenas 2013-2017

Adapun capaian kinerja indikator urusan pendidikan Tahun 2013-2017 adalah seperti pada tabel diatas. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena jumlah murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 15 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SMP atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 12 tahun tetapi telah masuk SMP. Adapun capaian kinerja indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2017 pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana

pada tahun 2013 mencapai 107,12%, meningkat menjadi 112,93% pada tahun 2014, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 111,13%, meningkat kembali menjadi 113,80% ditahun 2016, dan menurun lagi menjadi 109,67% di tahun 2017. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs capaian APK pada tahun 2013-2017 juga mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana pada tahun 2013 mencapai 75,99%, meningkat menjadi 79,50% di tahun 2014, kembali mengalami peningkatan menjadi 86,99% di tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 89,21% di tahun 2016 dan mengalami penurunan menjadi 86,53% di tahun 2017. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA capaian APK pada tahun 2013-2017 mengalami tingkatan fluktuatif pada setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 mencapai 57,50%, meningkat menjadi 65,51% ditahun 2014, setelah itu turun menjadi 57,34% ditahun 2015, meningkat kembali menjadi 80,24% di tahun 2016 dan kembali mengalami penurunan menjadi 65,76% di tahun 2017. Capaian APM pada tahun 2013-2017 pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana pada tahun 2013 mencapai 98,06%, meningkat lagi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 menjadi 98,73%, menurun menjadi 95,37% di tahun 2015, meningkat menjadi 98,09% di tahun 2016, dan meningkat kembali menjadi 99,28% di tahun 2017. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs capaian APM pada tahun 2013-2017 juga mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana pada tahun 2013 mencapai 73,15%, mengalami peningkatan di tahun berikutnya yaitu tahun 2014 menjadi 74,27%, kemudian turun menjadi 71,05% pada tahun 2015, meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 74,74%, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 77,15%. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA capaian APM pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi fluktuatif pada setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 mencapai 51,45%, meningkat menjadi 54,48% di tahun 2014, turun menjadi 43,48% ditahun 2015, meningkat lagi menjadi 59,15% di tahun 2016 dan kembali mengalami penurunan menjadi 57,03% di tahun 2017.

Capaian APS pada tahun 2013-2017 pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana pada tahun 2013 mencapai 28, menurun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 menjadi 23, menurun menjadi 14 di tahun 2015, meningkat menjadi 26 di tahun 2016, dan meningkat kembali menjadi 34 di tahun 2017. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs capaian APS pada tahun 2013-2017 juga mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana pada tahun 2013 mencapai 23, mengalami penurunan di

tahun berikutnya yaitu tahun 2014 menjadi 13, kemudian pada tahun 2015 tetap di angka 13, meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 17, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 59. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA capaian APS pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi fluktuatif pada setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 mencapai 4, meningkat menjadi 5 di tahun 2014, turun menjadi 0 di tahun 2015, meningkat lagi menjadi 31 di tahun 2016 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 103 di tahun 2017.

Sedangkan Realisasi angka melek huruf tahun 2013-2017 perkembangannya cukup bervariasi. Tahun 2013 sebesar 96%, tahun 2014 menurun menjadi 98,14%, tahun 2015 meningkat menjadi 98,83%, angka melek huruf kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 98,19% dan tahun 2017 kembali meningkat menjadi 99,06%.

Penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa aspek tujuan diadakannya indikator kinerja urusan. Diantaranya adalah indikator yang digunakan untuk melihat tingkatan partisipasi pendidikan, melihat sejauh mana tingkat buta huruf masyarakat, melihat ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik dan melihat ketersediaan sarana prasarana penunjang pendidikan.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi usia penduduk 25 tahun sudah menyelesaikan semua pendidikan formal. Capaian Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 pada angka 7,05, tahun 2014 pada 7,21 dan 2015 sebesar 7,67 dan tahun 2016 sebesar 7,68 tahun dan pada tahun 2017 sebesar 7,71. Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Realisasi pencapaian indikator mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan 2014 di berbagai jenjang.

Angka partisipasi sekolah untuk SD/MI telah mencapai target yang ditentukan dari setiap tahunnya, tahun 2013 mencapai 99,12%, meningkat lagi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 menjadi 99,56%, naik lagi menjadi 99,98% di tahun 2015, menurun menjadi 98,93% di tahun 2016, dan meningkat kembali menjadi 99,49% di tahun 2017.

Indikator rasio ketersediaan sekolah untuk SD/MI terhadap penduduk usia sekolah pada tahun 2013 sebesar 1,15%, tahun 2014 sebesar 1,13%, tahun 2015 sebesar 1,13%, tahun 2016 sebesar 1,13% dan tahun 2017 menjadi 1,14%.

Untuk SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tahun 2013 sebesar 0,47%, tahun 2014 sebesar 0,46%, tahun 2015 sebesar 0,49%, tahun 2016 sebesar 0,50% dan tahun 2017 menjadi 0,49%.

Untuk SMA/SMK/MA rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tahun 2013 sebesar 0,18%, tahun 2014 sebesar 0,19%, tahun 2015 sebesar 0,20%, tahun 2016 sebesar 0,20% dan tahun 2017 menjadi 0,20%.

Selanjutnya adalah indikator dalam urusan pendidikan meliputi rasio guru/murid pada tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Untuk SD/MI rasio guru terhadap murid tahun 2013 sebesar 9,65%, tahun 2014 sebesar 10,51%, tahun 2015 sebesar 8,54%, tahun 2016 sebesar 8,58%, dan tahun 2017 sebesar 8,63%. Sedangkan untuk rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMP/MTs tahun 2013 sebesar 9,56%, tahun 2014 sebesar 10,03%, tahun 2015 sebesar 8,60%, tahun 2016 sebesar 10,08%, tahun 2017 sebesar 13,10%. Untuk SMA/SMK/MA rasio guru terhadap murid tahun 2013 sebesar 8,41%, tahun 2014 sebesar 8,64%, tahun 2014 sebesar 11,64%, tahun 2015 sebesar 13,59%, tahun 2017 sebesar 12,90%.

Sedangkan untuk rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata untuk jenjang SD/MI tahun 2013 sebesar 1,35%, tahun 2014 sebesar 1,42%, tahun 2015 sebesar 1,58%, tahun 2016 sebesar 1,55% dan tahun 2017 sebesar 1,14%. Untuk rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata untuk jenjang SMP/MTs tahun 2013 sebesar 2,35%, tahun 2014 sebesar 2,36%, tahun 2015 sebesar 2,51%, tahun 2016 sebesar 2,19% dan tahun 2017 sebesar 2,02%. Untuk rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata untuk jenjang SMA/SMK/MA tahun 2013 sebesar 2,28%, tahun 2014 sebesar 2,39%, tahun 2015 sebesar 2,20%, tahun 2016 sebesar 2,07% dan tahun 2017 sebesar 1,93%.

Realisasi penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) tahun 2013-2017 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perkembangannya cukup bervariasi dari tahun ke tahun, tahun 2013 sebesar 98,47%, capaian tahun 2014 menurun menjadi 98,08%, tahun 2015 sebesar 98,12%, ditahun 2016 meningkat menjadi 98,77% dan tahun 2017 sebesar 98,83%. Hal ini dikarenakan adanya gerakan pemberantasan Tiflisme yang melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk pelibatan guru bersertifikasi untuk menjadi tutor bagi warga belajar.

Fasilitas pendidikan juga menjadi indikator dalam urusan pendidikan.

Fasilitas pendidikan ini dapat dilihat dari kondisi bangunan sekolah yang baik. Meningkatnya capaian kondisi bangunan baik pada setiap jenjang pendidikan tentunya tidak terlepas dari upaya rehabilitasi bangunan yang dilakukan pada setiap tahunnya.

Realisasi indikator pendidikan anak usia dini (PAUD) mengalami capaian yang fluktuatif. Capaian target tersebut tentunya tidak terlepas dari semakin tingginya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya terutama pendidikan untuk anak usia dini. Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang (kelas/tingkat) terakhir. Kelulusan terkait dengan erat dengan mutu proses pembelajaran. Siswa dapat lulus jika proses pembelajaran bermutu sehingga daya serap mereka bagus dan lulus ujian akhir. Siswa dapat lulus jika proses pembelajaran bermutu sehingga daya serap mereka bagus sehingga lulus ujian akhir. Dalam 3 tahun terakhir Angka Kelulusan Siswa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menunjukkan tren perkembangan yang positif, dengan adanya kenaikan disetiap tahunnya. Tingginya Angka Kelulusan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pemberian pelayanan yang baik, motivasi yang tinggi, serta semangat tinggi para guru untuk mengantarkan anak didiknya dengan baik.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam memastikan masyarakat usia sekolah mengenyam pendidikan disetiap jenjang, transisi antar jenjang sangat rawan meningkatkan angka putus sekolah. Oleh sebab itu indikator melanjutkan sangat penting guna memastikan masyarakat usia sekolah melanjutkan pendidikan hingga pada jenjang tertinggi. Peningkatan kinerja Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap tahun, tidak terlepas dari adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah. Capaian kinerja indikator rasio lembaga SD, SMP, SMA berakreditasi A di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013- 2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Capaian kinerja indikator rasio lembaga SD, SMP, SMA berakreditasi A di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentunya juga dipengaruhi oleh tenaga pendidik dan pengajar yang profesional, capaian lulusan setiap tahun serta fasilitas yang disediakan di sekolah. Perkembangan realisasi indikator kinerja urusan pendidikan dapat diketahui dari tabel dibawah ini.

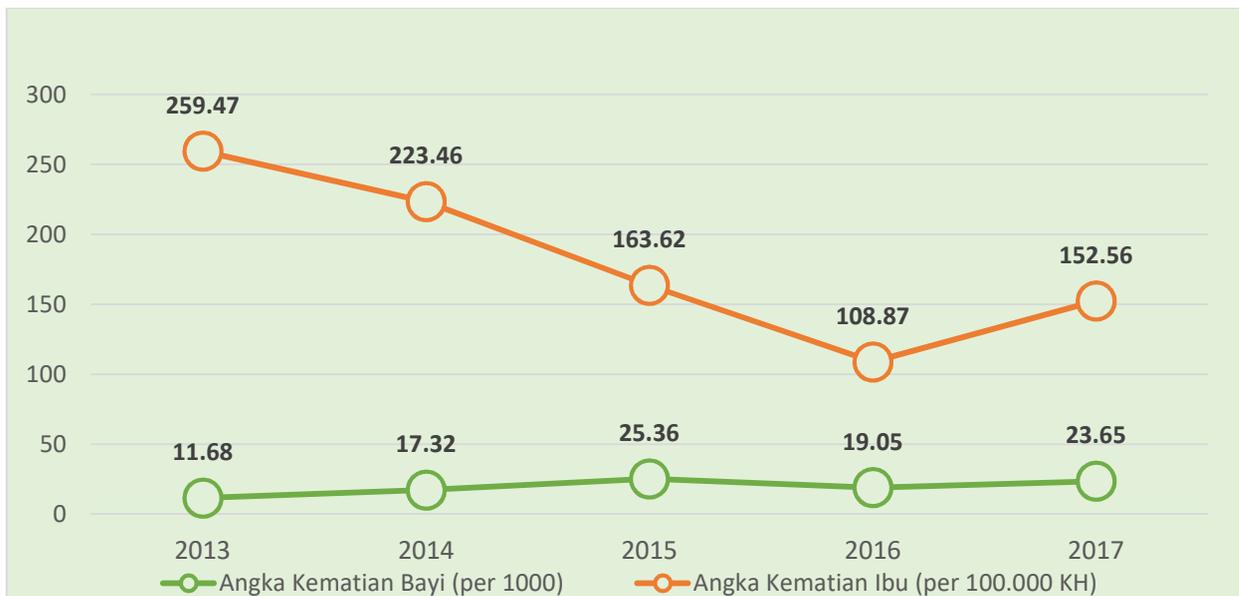
Tabel 2.18 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sekolah Dasar (SD/MI)						
Angka partisipasi sekolah	Persen	99,12	99,56	99,98	98,93	99,49
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Persen	1,15	1,13	1,13	1,13	1,14
Rasio guru/murid	Persen	9,65	10,51	8,54	8,58	8,63
Rasio guru/murid per kelas rata-rata	Persen	1,35	1,42	1,58	1,55	1,14
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)						
Angka partisipasi sekolah	Persen	85,77	95,28	90,14	91,25	91,12
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Persen	0,47	0,46	0,49	0,50	0,49
Rasio guru terhadap murid	Persen	9,56	10,03	8,60	10,08	13,10
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Persen	2,35	2,36	2,51	2,19	2,02
Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)						
Angka partisipasi sekolah	Persen	53,75	61,26	61,11	72,66	65,53
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Persen	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20
Rasio guru terhadap murid	Persen	8,41	8,64	11,64	13,59	12,90
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Persen	2,28	2,39	2,20	2,07	1,93
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	98,47	98,08	98,12	98,77	98,83
Fasilitas Pendidikan						
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	34,32	43,5	46,56	50,49	56,7
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	47,61	58,76	62,24	62,85	72,98
Angka Kelulusan						
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	98,2	99,8	94,6	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen			32,60	15,91	13,81
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen				87,50	87,91
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen				84,60	86,41

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.3.1.1.2 Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan hal mutlak untuk diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Beberapa cara untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat adalah melalui Angka kematian Bayi (AKB) dan Ibu melahirkan, serta angka Usia Harapan Hidup. Angka kematian bayi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2013-2017 memiliki nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2013 sebesar 11.68 dari 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 17.32 dari 1000 kelahiran hidup. Namun AKB kembali naik cukup signifikan di tahun 2015 hingga mencapai angka 25.36 kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2016, AKB kembali turun menjadi 19.05 kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup. AKB kembali naik cukup signifikan di tahun 2017 hingga mencapai angka 23.65 kematian bayi setiap kelahiran 1000 hidup. Perkembangan angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 2.17 Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

Berbeda dengan AKB yang mencapai nilai tertingginya pada tahun 2015, Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) justru mencapai angka tertinggi pada tahun 2013 yang mencapai 259.47 kematian ibu melahirkan dari 100000 kelahiran hidup.

Namun angka tersebut sudah berhasil turun kembali di tahun 2014 walaupun tidak sekecil angka pada tahun 2016. Pada tahun 2014 AKI sebesar 223.46 dari 100000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2015 AKI hanya sebesar 163.62 dari 100000 ibu melahirkan hidup, pada tahun 2016 AKI berada pada angka terkecilnya dibandingkan dari tahun 2013-2017 yang sebesar 108.87 dari 100000 ibu melahirkan hidup, dan pada tahun 2017 AKI kembali naik menjadi 152.56 dari 100000 ibu melahirkan. Trend AKI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga masih menunjukkan kecenderungan turun pada tahun 2013-2016.

Berdasarkan pada perbandingan kedua grafik tersebut dapat dilihat bahwa antara AKB dan AKI kurang menunjukkan keselarasan karena terdapat beberapa pola pergerakan data yang bertolak belakang seperti pada tahun 2013-2015. Perbedaan pola tersebut mengindikasikan bahwa AKB yang tinggi khususnya pada tahun 2015 tidak disebabkan karena faktor persalinan atau pada proses melahirkan melainkan faktor lainnya diluar faktor proses persalinan.

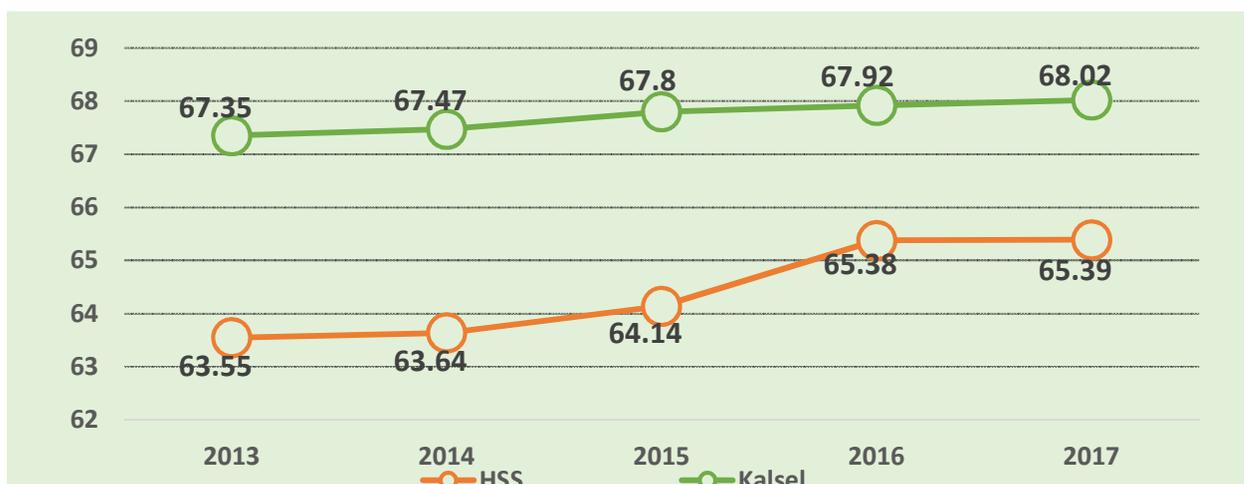
Data terkait kematian bayi lebih menunjukkan adanya keselarasan jika disandingkan dengan data terkait persentase balita gizi buruk, pola yang dimiliki kedua data tersebut hampir semuanya linier setiap tahunnya.



Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam angka 2018

Gambar 2.18 Jumlah Gizi Buruk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011-2017

Kondisi tersebut menunjukkan terdapat indikasi bahwa angka kematian bayi yang tinggi dari tahun 2013 hingga tahun 2017 turut disebabkan karena gizi buruk atau asupan gizi yang diberikan kepada bayi masih kurang berkualitas atau belum sesuai dengan kebutuhan gizi untuk menunjang pertumbuhan bayi selama usia 0-59 bulan. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2013-2017 sudah cukup baik karena cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun kenaikan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2016. Pada Tahun 2013 Angka Harapan Hidup berada di 63.55 tahun, meningkat pada tahun berikutnya yakni mencapai 63.64 tahun pada tahun 2014, pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 64.14 tahun, dan meningkat secara signifikan pada tahun 2016 menjadi 65.38 tahun, dan meningkat lagi pada tahun 2017 menjadi 65.39 tahun.



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 2.19 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2017

2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan pada urusan pekerjaan umum memiliki beberapa indikator diantaranya adalah Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan Rasio Jaringan Irigasi.

Tabel 2.19 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Total panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	256,45	360,05	358,87	366,27
2	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	88,52	89,72	85	89

Sumber: LKPJ Bupati Hulu Sungai Selatan Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2013-2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dari tahun 2014-2017 memiliki capaian yang fluktuatif, namun memiliki kecenderungan meningkat. Sedangkan indikator di bidang pengairan, Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup fluktuatif.

Untuk capaian indikator Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013 sebesar 13.641 buah, pada tahun 2014 sebesar 14.812 buah, pada tahun 2015 sebesar 15.382 buah, pada tahun 2016 sebesar 16.276 buah, dan pada tahun 2017 sebesar 16.906 buah. Kedepannya cakupan layanan air bersih pedesaan dan perkotaan perlu ditingkatkan. Pemanfaatan sumber air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih perlu pengelolaan yang terpadu.

Secara umum penataan ruang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah cukup baik, luas wilayah produksi dan kawasan industri berkembang secara selaras. Sedangkan perkembangan wilayah perkotaan menunjukkan peningkatan yang dinamis, meskipun cukup lambat. Berdasarkan paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ruang untuk pembangunan infrastruktur perlu mengacu dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kedepan pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

2.3.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Kebutuhan perumahan di kawasan perkotaan cenderung meningkat dengan pesat karena semakin meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan masyarakat akan perumahan dan permukiman semakin tinggi sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang. Perkembangan capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat diketahui dari tabel berikut ini.

Tabel 2.20 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2017

No	Indikator	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	5,56	5,50	5,43	27,94
2	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,85	1,02	1,10	1,17
3	Rasio rumah layak huni	85,819	84,69	84,839	86,162
4	Jumlah Penduduk (Jiwa)	224.474	227.153	229.889	232.587
5	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	6,928	8,648	12,534	12,534
6	Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan	0,78	0,78	0,92	1,37

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. HSS

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2014 sebesar 5,56 namun mengalami penurunan hingga tahun 2017 yaitu sebesar 27,94. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2014 sebesar 0,85 dan mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga pada tahun 2017 sebesar 1,17. Rasio rumah layak huni pada tahun 2014 sebesar 85,819 mengalami fluktuasi antara tahun 2015-2016 dan pada tahun 2017 mencapai sebesar 86,162, pada Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2014 sebesar 6,928 , rasio tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 8,648 per satuan luas

wilayah. Rasio tersebut kembali naik menjadi 12,534 pada tahun 2016, dan menjadi 12,534 pada tahun 2017. Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.18 dibawah. Pada tabel tersebut terlihat rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan cenderung naik setiap tahunnya. Pada tahun 2013 tercatat rasio sebesar 0,72 per satuan bangunan, pada tahun 2014 rasio tersebut naik menjadi 0,78. Rasio tersebut tidak mengalami peningkatan hingga tahun 2015 tetap pada nilai rasio sebesar 0,78, kembali naik menjadi 0,92 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 1,37.

2.3.1.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban umum ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perkembangan jumlah aparat yang menangani ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan kasus pelanggaran K3 dan kondisi ketertiban umum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat diketahui dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.21 Perkembangan Jumlah Aparat Yang Menangani Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat, Tahun 2013-2017

NO	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah polisi pamong praja	48	53	63	67	91
2	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2:10.000	2:10.000	3:10.000	3:10.000	4:10.000

Sumber: Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.1.1.6 Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti teknologi dan sumber daya ekonomi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di masyarakat baik itu terkait anak/orang tua terlantar hingga tuna wisma. Jumlah penyandang permasalahan sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah menerima bantuan dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	4,01	5,08	6,15	7,22	8,29
2	Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	2,02	2,52	3,02	3,52	4,02
3	Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	0,07	0,24	0,41	0,58	0,75
4	Tingkat Perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	71,44	72,08	72,72	73,36	74
5	Jumlah PMKS penerima bantuan	Orang	3.804	4.333	6.969	9.971	8.563

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dari tabel diatas dapat diketahui terjadi peningkatan pelayanan sosial terhadap PMKS dalam kurun waktu antara tahun 2013-2017 mengalami peningkatan jumlah yang memperoleh bantuan.

2.3.1.2 Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diuraikan pada penjelasan berikut ini.

2.3.1.2.1 Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun). Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Tabel 2.23 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2014-2017

No.	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen			3,18	3,15
2	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	Persen			36,77	42,76
3	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Persen			20	25
4	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen			36,87	38,42
5	Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	Lowongan			64,28	65,62
6	persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan	Persen			2	3
7	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	Persen			0,13	0,20
8	Persentase Pekerja/Buruh Yang terdaftar Jamsostek	Persen			-	0,33
9	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	Perusahaan			0,37	0,42
10	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Laport Ketenagakerjaan	Perusahaan			15	15
11	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan pelaporan Ketenagakerjaan	Perusahaan			25	15

Sumber : DisnakerkopUKP Kab. Hulu Sungai Selatan

Perkembangan capaian indikator kinerja urusan ketenagakerjaan dapat diketahui pada tabel 2.23, pada indikator jumlah lowongan pekerjaan baru pada

tahun 2016 terdapat 64,28 lowongan, dan persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, pada tahun 2016 hanya sebesar 20%, kondisi ini disebabkan oleh belum sebandingnya perluasan lapangan kerja dengan pertumbuhan angkatan kerja, serta kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar. Sehingga upaya tindak lanjut yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah yakni meningkatkan jalinan kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan yang didukung pula dengan penyebaran informasi lowongan kerja secara online, serta meningkatkan pelatihan keterampilan kepada pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis pada anak mengakibatkan rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat.

Pancasila, dan UUD 1945 telah menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.

Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui program pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Capaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diketahui dari tabel berikut.

Tabel 2.24 Realisasi Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Orang	3.116	3.745	3.561	3.200
2	Partisipasi perempuan di lembaga Swasta	Orang	553	550	558	550
3	Jumlah KDRT	Kasus	0	2	1	5
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen	0	0	0	0
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)	Orang	4	4	4	4
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)	Orang	2.871	3.012	2.927	2.516
7	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	kasus	0	2	1	5

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pada indikator partisipasi perempuan di lembaga swasta dan indikator rasio KDRT capaiannya selalu mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari beberapa langkah kemajuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan *launching* Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menuju Kabupaten Layak Anak. Dan telah dilaksanakan pula sosialisasi KLA ke seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.25 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	Persen	100	100	100	100
2	Persentase penanganan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100
3	Persentase Kecamatan Layak Anak	Persen	0	9,09	27,27	100
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	-	60,41	61,77	60,38
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	-	88,89	89,36	89,08
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100
7	Kabupaten Layak Anak	Kreteria	-	-	-	Pratama

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.3.1.2.3 Pangan

Pembangunan pangan pada dasarnya merupakan bagian dari ketahanan bangsa. Sesuai dengan kesepakatan global yang dituangkan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) yang terdiri atas 8 tujuan, 18 target dan 48 indikator menegaskan bahwa pada tahun 2015, setiap negara telah menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuh dari kondisi tahun 1990. Untuk mencapai tujuan tersebut, Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke IX, 2008, merekomendasikan perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk setempat dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Untuk menjaga ketersediaan pangan telah dilakukan upaya mempertahankan luas lahan sawah. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat	ton	26,180	49,653	54,653	59,653
2	Tingkat Konsumsi Pangan Utama Beras	Kg/thn	27.610.302	25.039.075,2	26.263.688	23.723.874
3	Tingkat Konsumsi Pangan Daging	Kg/thn	1.265.006	1.397.366	1.487.447	1.232.711,10
4	Tingkat Konsumsi Pangan Ikan	Kg/thn	11.120.442	11.416.823,4	12.092.161	12.385.257,75
5	Persentase Pangan Segar yang tercemar	persen	0	0	0	0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.3.1.2.4 Pertanahan

Jumlah sertifikat hak milik (SHM) secara detail dapat dilihat pada tabel diatas. Secara umum sertifikat hak milik (SHM) mengalami kenaikan setiap tahunnya, mengingat jumlah sertifikat pada tahun 2014 hanya 698 lembar dan pada tahun 2017 mencapai 4460 lembar. Selain jumlah lahan yang bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara juga harus diselesaikan dengan baik. Pada tabel dibawah dapat dilihat bahwa penyelesaian kasus tanah negara

dapat ditangani dengan baik.

Pada tabel dibawah ini dapat diketahui capaian jumlah SHM dan penyelesaian kasus tanah negara.

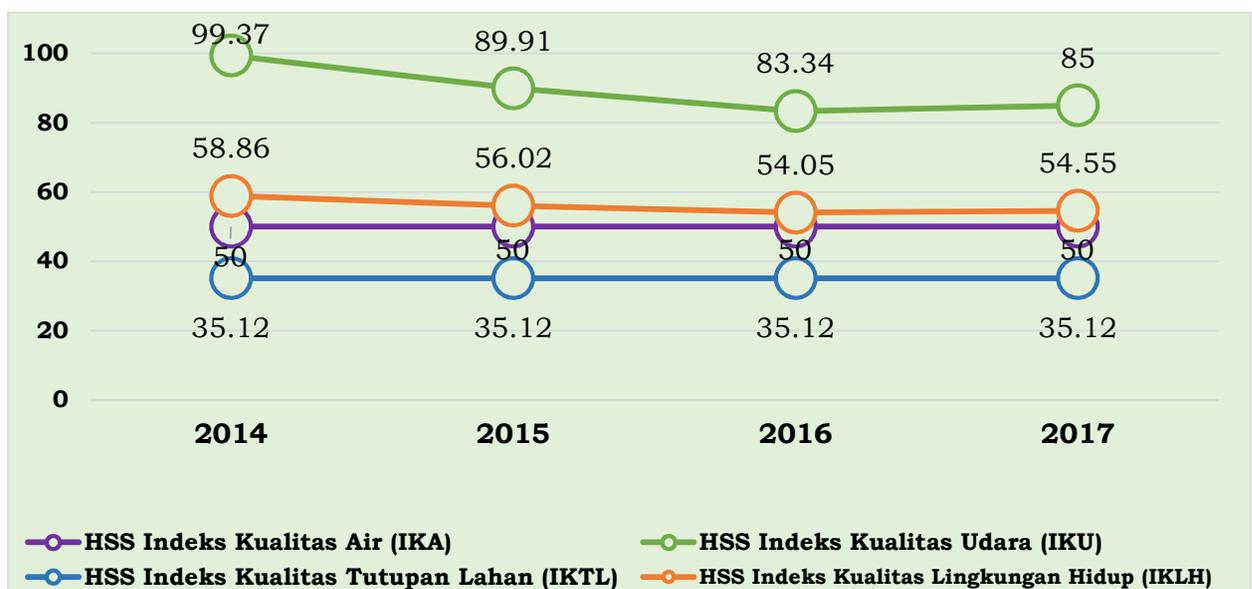
Tabel 2.27 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Sertifikat Hak Milik	Lembar	698	698	3960	4460
2	Kasus Tanah Negara	Persen	100	100	100	100

Sumber: LKPJ Bupati Hulu Sungai Selatan Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2013-2018

2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup

Indeks lingkungan hidup memiliki beberapa klasifikasi meliputi nilai “30” sampai dengan “50” sama dengan tercemar berat, lebih besar dari “50” hingga “70” berarti lingkungan tercemar ringan, “70” dan lebih besar dari “70”, berarti kualitas lingkungan hidup sangat baik. Seperti data yang tercantum pada grafik dibawah, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami tren penurunan. Perkembangan indeks kualitas lingkungan hidup dapat diketahui pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 2.20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

Pada tahun 2014 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dicapai sebesar 58.86, turun menjadi 56.02 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 IKLH kembali turun walaupun tidak begitu signifikan sebesar 54.05 karena masih belum mampu melebihi IKLH tahun 2014, dan pada tahun 2017 naik menjadi 54.55. Sumbangan pencemaran udara dari NO₂ dan SO₂ yang meningkat menyebabkan penurunan IKLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu agenda pembangunan penting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*). Dukungan kinerja pemerintahan terangkum dalam indikator- indikator urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.28 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	1,1	1,06	1,02	1,01
2	Jumlah bayi berakte kelahiran (%)	96,41	96,99	98,09	97,95
3	Jumlah pasangan berakte nikah	1537	1592	1572	1190
4	Kepemilikan KTP (%)	95,56	99,49	99,49	107,21
6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan data diatas, secara umum ketercapaian pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menunjukkan tren positif. Sebagaimana tren capaian indikator-indikator sub urusan kependudukan yaitu rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, kepemilikan KTP, ketersediaan database kependudukan skala provinsi, penerapan KTP Nasional berbasis NIK secara rata-rata mengalami capaian yang relatif stabil. Indikator rasio penduduk ber-KTP per satuan

penduduk pada posisi tahun 2014 1 : 1,1 pada tahun 2015 turun menjadi 1 : 1,06 pada tahun 2016 tahun 1 : 1,02 dan pada tahun 2017 sebesar 1 : 1,01. Bayi yang memiliki akte kelahiran juga memiliki tren fluktuatif, tercatat pada tahun 2014 sebesar 96,41% yang memiliki akte kelahiran. Prosentase meningkat pada tahun 2015 menjadi 96,99% dan terus meningkat hingga tahun selanjutnya hingga menjadi 98,09% pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 97,95%.

Ketidakstabilan perkembangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sosialisasi yang kurang masif, masih kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan dinas terkait. Selain indikator yang menunjukkan realisasi yang kurang optimal terjadi pada indikator rasio pasangan berakte nikah. Capaian realisasi indikator tersebut pada tahun 2014 adalah 1537, namun pada tahun 2015 naik menjadi 1592 dan turun sedikit pada tahun 2016 menjadi 1572. Adapun dua indikator selanjutnya yaitu ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK menunjukkan kondisi ketercapaian yang dapat disebut 100% pada tahun 2013 sampai 2017. Artinya kondisi ketercapaian indikator kepemilikan KTP dan Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk mendukung adanya konsistensi ketersediaan data kependudukan skala provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan data penyusunan database bidang kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dipertahankan dengan baik.

Pelayanan publik masih menjadi isu penting yang relevan menjadi sasaran pembangunan di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Sebab pelayanan publik merupakan unsur inti dalam sistem masyarakat modern.

Tujuan pelayanan publik adalah untuk menyediakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pelayanan terbaik adalah pelayanan yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan terbaik akan membawa implikasi terhadap kepuasan publik atas pelayanan yang diterima. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indeks tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari

aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berikut gambaran capaian IKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013- 2017.



Sumber: LKPJ Bupati Hulu Sungai Selatan Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2013-2018

Gambar 2.21 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

Capaian IKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan terealisasi 79,3% ditahun 2014, meningkat menjadi 79,32% di tahun 2015, di tahun 2016 meningkat signifikan sebesar 81,06%, dan pada tahun 2017 kembali meningkat sebesar 81,13%. Capaian IKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong masih kurang meskipun setiap tahun mengalami peningkatan.

2.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat desa, dengan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat terwujud masyarakat desa yang berdaya dari aspek kualitas SDM, berdaya dari aspek ekonomi dan berdaya dari aspek lingkungan yang berkualitas. Dengan 3 aspek tersebut terwujud dapat tumbuh kemandirian masyarakat desa dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Pelaksanaan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat desa bertumpu pada beberapa tujuan yaitu: 1). Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa, 2). Mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi desa, 3). meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi

permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya. 4). Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan 5). Meningkatkan peran serta perempuan kegiatan usaha ekonomi produktif dan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Adanya unit kegiatan ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) dan beberapa BKM/LKM sangat membantu dalam pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Keberadaan usaha ekonomi desa simpan pinjam dan BKM/LKM ini sangat bergantung dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berikut jumlah UED-SP dan BKM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 dan 2015 masing – masing Kecamatan.

Tabel 2.29 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persen	62	62	64	65
2	Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	Persen	65	65	67	68
3	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	Persen	-	-	-	25
4	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	Persen	-	-	-	75

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk atau warga suatu negara bisa di definisikan dalam 2 hal, yaitu : 1. Orang yang tinggal di daerah tersebut. 2. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut dan mempunyai bukti surat kewarganegaraan tetapi milih tinggal di negara lain.

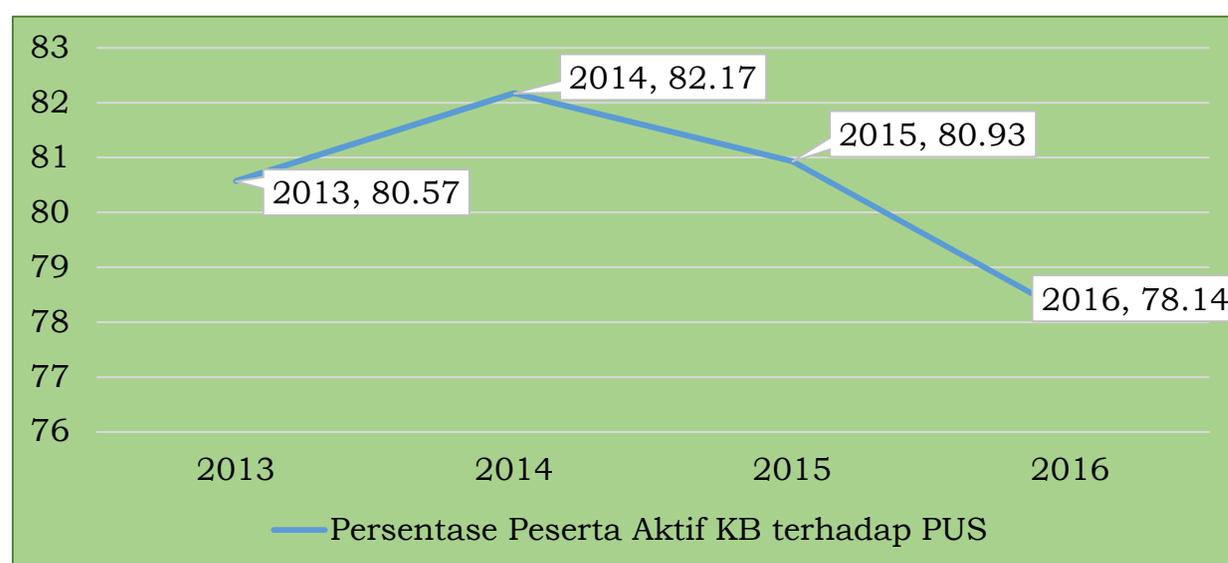
Keluarga berencana (KB) ialah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Jumlah anak dalam sebuah keluarga

yang dianggap ideal adalah dua anak. Adapun perkembangan Sarana KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diketahui dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.30 Sarana Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Klinik KB	Klinik	28	26	26	26
2	Jumlah PPKBD	Persen	148	148	148	148

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan

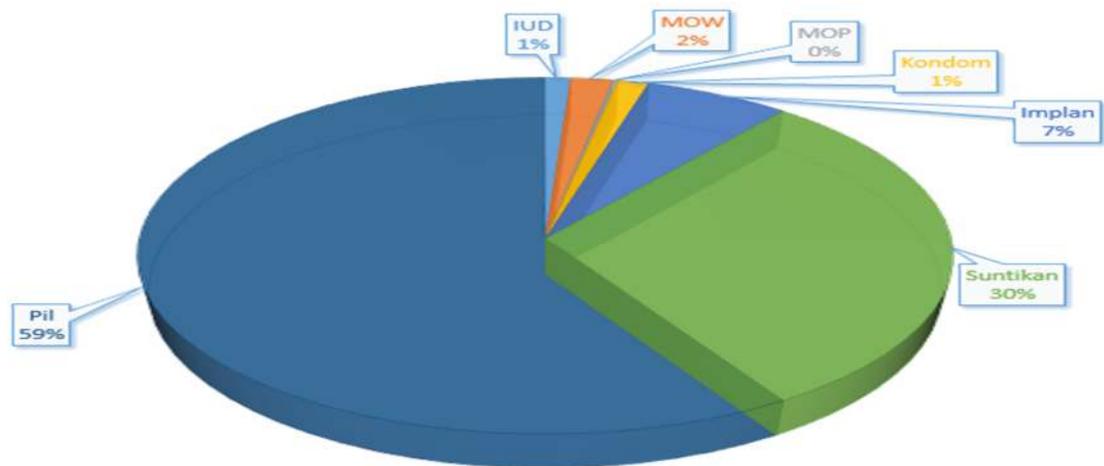


Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 2.22 Persentase Akseptor KB Terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

Persentase peserta aktif KB terhadap pasangan usia subur (PUS) pada tahun 2013 sebesar 80,57%, meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar 82,17% dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 80,93%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan lagi menjadi 78,14%.

Persentase akseptor KB menurut pemakaian jenis alat kontrasepsinya, sebagian besar akseptor KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan Pil KB sebesar 59% sebagai pilihan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Sedangkan yang kedua adalah Suntik KB dengan persentase akseptor sebesar 30%.



Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 2.23 Persentase Akseptor KB Menurut Pemakaian Jenis Alat Kontrasepsi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

Program Keluarga Berencana yang telah lama dicanangkan, telah dilaksanakan berkesinambungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan jumlah penduduk dapat terkendali. Pada tabel dibawah dapat dilihat indikator kinerja yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.31 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Cakupan PUS peserta KB aktif	Persen	82,17	80,93	78,14	
2	Cakupan peserta KB baru	Orang	9.093	10.641	-	-
3	Persentase jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	Persen	26,72	26,72	-	-
4	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	-	92,51	93,14	-
5	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	-	2,62	2,61	2,4
6	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	-	77,44	78,14	76,51
7	Persentase rata-rata usia kawin pertama \leq 20 tahun	Persen	-	-	48,9	50,97
8	Persentase bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) yang aktif	Persen	-	-	25,34	28,25

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.3.1.2.9 Perhubungan

Urusan perhubungan diselenggarakan untuk menjaga kondisi kelancaran arus barang dan jasa yang melewati wilayah ataupun didalam wilayah. Kelancaran di darat, sungai dan rawa.

Terminal merupakan salah satu komponen prasarana dalam transportasi, terminal berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dalam sistem angkutan. Terminal dapat dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi. Perkembangan indikator kinerja urusan perhubungan dapat diketahui pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi	Persen	75	75	100	100
2	Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di jalan protokol pada saat jam sibuk	km/jam	30	30	40	40
3	Persentase angkutan umum yang laik jalan	Persen	83,11	86,12	89,61	84,52
4	Persentase pengemudi angkutan umum yang memiliki SIM umum sesuai dengan kendaraannya	Persen	83,11	86,12	89,61	84,52
5	Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di jalan	Persen	8,27	6,46	4,81	2,86
6	Persentase pendapatan retribusi parkir umum	Persen	52,14	43,23	117,55	151,53
7	Persentase pendapatan retribusi terminal	Persen	88,96	95,07	96,37	72,68
8	Persentase pendapatan retribusi pelayanan pelabuhan	Persen	100	120,21	114	176,26
9	Persentase pendapatan retribusi PKB	Persen	112,45	125,44	145,58	94,97
10	Persentase angkutan sungai dan danau yang laik layar	Persen	73,44	82,71	91,46	88,13

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diselenggarakan dalam upaya memberikan pelayanan komunikasi dan informatika secara luas, dan transparan kepada masyarakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan kemajuan teknologi pada jaringan komunikasi saat ini, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mendorong upaya percepatan ketersediaan jaringan komunikasi melalui internet untuk masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengakses layanan internet yang lebih cepat dan lebih luas.

Selain itu juga untuk mewujudkan transparansi dan kemudahan informasi yang

diterima oleh masyarakat luas, maka Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan integrasi dan digitalisasi pada beberapa sistem informasi yang ada pada perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai selatan. Beberapa inovasi pada sistem informasi yang berbasis teknologi komunikasi dan informatika yang telah banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Daerah. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat diketahui pada tabel berikut ini.

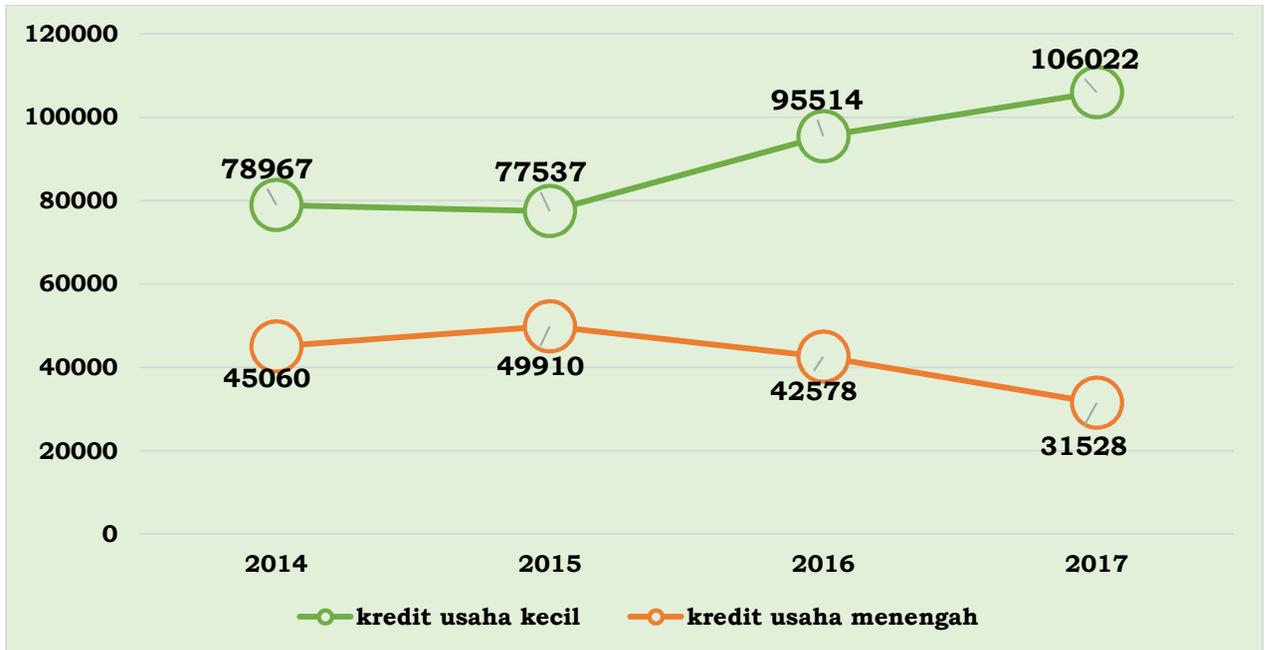
Tabel 2.33 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Persentase informasi dari pemerintah yang terproteksi dari penyalahgunaan pemberitaan	Persen				77,7
2	Persentase Pemenuhan informasi pemerintahan pada server center Diskominfo	Persen				0
3	Persentase fasilitas umum yang sudah memiliki wifi	Persen				75
4	Persentase layanan pengaduan masyarakat secara elektronik yang ditanggapi tepat waktu	Persen				104,86
5	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persen				100
6	Persentase kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi	Persen				77,78

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan wajib yang selanjutnya adalah terkait koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM). Kinerja urusan tersebut dapat dilihat melalui empat indikator meliputi : Persentase koperasi aktif (%), Jumlah UKM non BPR/LKM UKM, Jumlah BPR/LKM, dan Usaha Mikro dan Kecil. Perkembangan realisasi empat indikator tersebut selama empat tahun dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kab. Hulu Sungai Selatan

Gambar 2.24 Indikator Kredit Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

Pada Gambar 2.24 dapat dilihat bahwa perkembangan indikator UKM cenderung mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Indikator yang mengalami penurunan hanya kredit usaha menengah pada tahun 2016.

2.3.1.2.12 Penanaman Modal

Capaian dalam urusan penanaman modal adalah untuk meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN. Keberhasilan indikator ini dapat dilihat dari Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), Rasio daya serap tenaga kerja, Peningkatan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah). Pertumbuhan pesat investasi asing (PMA) dan domestik (PMDN) Provinsi Kalimantan Selatan ternyata menetes ke daerah. Semakin membaiknya kondisi dan iklim investasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ternyata menjadi lokomotif yang turut mempercepat pertumbuhan investasi berskala nasional PMDN/PMA di daerah termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Investasi dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih sangat dibutuhkan dalam memberdayakan setiap sumber daya baik manusia maupun alam. Berikut ini adalah data investasi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017.

Jumlah investor PMDN/PMA mengalami peningkatan, tahun 2014 sebanyak 4 investor, Tahun 2015 sebanyak 4 investor, tahun 2016 sebanyak 3 investor dan tahun 2017 meningkat sebanyak 7 investor. Kenaikan jumlah

investor tersebut tidak berpengaruh positif terhadap nilai investasi PMDN/PMA. Hal ini dikarenakan ketidakstabilan inflasi. Adapun Jumlah nilai investasi PMDN/PMA tahun 2014 sebesar 1.310 miliar rupiah, tahun 2015 sebesar 1.319 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 16,27 miliar rupiah dan tahun 2017 sebesar 23,752 miliar rupiah.

Tabel 2.34 Capaian Indikator Kinerja Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Jumlah investor PMDN/PMA	Investor	4	4	3	7
2	Jumlah nilai investasi PMDN/PMA	Milyar Rp	1,3108	1,319	16,27	23,752

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “*event*” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh

sekelompok masyarakat olahraga yang bekerja sama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Jumlah organisasi olahraga dihitung dari jumlah organisasi olahraga yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “*event*” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olahraga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perkembangan capaian indikator kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35 Capaian Indikator Kinerja Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Organisasi Pemuda	Organisasi	25	25	26	26
2	Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	27	27	27	27
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	3	5	8	10
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	Kegiatan	6	8	9	13

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.3.1.2.14 Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan Lampiran Permendagri No 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen statistik daerah, seperti :

- Buku “Kabupaten Dalam Angka”
- Buku “Kecamatan Dalam Angka”
- Buku “Statistik Daerah”.

Ketiga dokumen di atas disusun melalui kerjasama Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Badan Pusat Statistik dan diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penyusunan ketiga buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Buku Kabupaten Dalam Angka

Merupakan buku informasi yang menyajikan data terkini terkait dengan kondisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari antara lain: kondisi geografis, jumlah penduduk, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum daerah, dan lain-lain.

Buku Kecamatan Dalam Angka

Merupakan buku informasi yang menyajikan data terkini terkait dengan kondisi kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari antara lain: kondisi geografis, jumlah penduduk, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum daerah, dan lain-lain.

Buku Statistik Daerah

Merupakan buku informasi yang menyajikan potret terkini dinamika sosial ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui beberapa indikator terpilih yang juga dilengkapi dengan visualisasi gambar dan uraian singkat.

Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Persentase Dokumen aktif statistik sektoral yang tersedia	Persen				75

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan

2.3.1.2.15 Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan persandian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014-2017 dapat diketahui pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Persentase Informasi dari Pemerintah Daerah yang terproteksi dari Penyalahgunaan Pemberitaan	Persen	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan

2.3.1.2.16 Kebudayaan

Kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Kebudayaan merupakan identitas dan ciri khas serta menjadi lambang dari kepribadian suatu bangsa atau daerah.

Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi ini, namun demikian pembangunan kebudayaan harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sehingga terwujud karya-karya seni budaya yang memiliki kepribadian. Disisi lain kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan (estetika) dan mewujud dari proses pengendapan makna relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya.

Berkaitan dengan aktivitas berkesenian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berikut ini gambaran perkembangan jumlah grup/kelompok kesenian yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu 2014 – 2017, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.38 Perkembangan Jumlah Grup/Kelompok Kesenian di Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No	Jenis Kesenian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Kuda Gipang	10	10	5	5
2	Band, dangdut, dan keyboard	9	9	18	24
3	Teater	5	5	6	8
4	Seni T tutur Madihin	1	1	2	3
5	Musik Panting	5	5	7	11
6	Wayang Gong	2	2	2	2
7	Wayang Kulit	6	6	6	6
8	Wayang Orang	1	1	1	1
9	Mamanda	2	2	3	3

No	Jenis Kesenian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
10	Rebana/Kasidah	7	7	7	7
11	Sinoman Haderah	2	2	2	4
12	Seni Tari	4	4	11	12
13	Seni Lukis	2	2	2	3
14	Musik Suling Bambu	1	1	1	2
15	Musik Tradisional Kurung-kurung	2	2	3	3
16	Seni Tutur Balamut	1	1	1	1
17	Habsyi	10	12	15	16
18	Seni Bajapin	3	4	5	5
19	Seni Beladiri Tradisional Kuntau	15	16	18	19
	Jumlah	88	92	115	135

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah grup/kelompok kesenian meningkat dari 88 grup pada tahun 2014 menjadi 135 grup pada tahun 2017. Sedangkan untuk jumlah pagelaran seni yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan jumlah pengunjung pagelaran untuk periode tahun 2014 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39 Jumlah Pagelaran Kesenian, Jumlah Pengunjung Pagelaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2017

No	Pagelaran Kesenian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Kali	Orang	Kali	Orang	Kali	Orang	Kali	Orang
1	Mamanda	2	450	2	750	1	500	1	2000
2	Musik Panting	3	600	3	1000	2	1000	5	3000
3	Tari Tradisional	10	250	10	5000	7	6000	10	8000
4	Japin	2	450	1	250	2	750	1	2000
5	Balamut	2	450	3	1000	1	500	3	4000
6	Madihin	2	450	3	1000	1	500	-	-
7	Musik Religi/Habsyi	3	600	5	1500	1	500	4	4000
9	Japin Cerita	-	-	1	300	-	-	-	-
10	Wayang Kulit	2	1500	2	1500	-	-	-	-
11	Car Free Sunday	-	-	20	3000	20	5000	10	500
12	Aruh Sastra Kalsel	1	1000	1	1000	1	2000	-	-

No	Pagelaran Kesenian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Kali	Orang	Kali	Orang	Kali	Orang	Kali	Orang
13	Tari Kolosal	1	1500	1	1500	1	12001	1	1500
14	Festival Tari	1	600	1	600	1	600	1	1000
15	Lomba Lagu Banjar	1	500	1	500	-	-	-	-
16	Lomba Bakisah	1	500	1	500	-	-	-	-
17	Lomba Teater	1	500	-	-	-	-	-	-
18	Lomba Habsyi	1	500	1	500	-	-	-	-
19	Lomba Cipta Lagu Banjar	-	-	1	300	-	-	-	-
20	Pagelaran Kuntau	2	500	1	300	1	200	-	-
21	Lomba Vokal Grup	1	500	-	-	-	-	-	-
22	Lomba Baca Pusisi	1	500	-	-	-	-	-	-
23	Musik Keyboard	1	750	1	500	3	1000	3	2000
24	Festival Kuntau	1	2000	1	2000	-	-	1	2500
	Jumlah	39	14.100	60	23.000	42	21.550	40	35.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan jumlah pengunjung pagelaran dari tahun 2014 – 2017 cukup signifikan angkanya meskipun jumlah pagelaran mengalami fluktuatif angkanya. Dari data di atas dapat disimpulkan adanya apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap seni budaya daerah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.3.1.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat yang didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, disusun menurut sistim tertentu, bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Banyaknya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang berada di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.40 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Persentase Pemustaka Per Tahun	Persen	1,5	2	4,5	12,19
2	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Judul	9.395	9.895	10.395	13.290
3	Persentase Perpustakaan Desa dan Kelurahan	Persen	31,60	46,97	48,32	48,99
4	Persentase Perpustakaan Desa dan Kelurahan yang aktif	Persen	-	-	20	20

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.3.1.2.18 Kearsipan

Pengelolaan Arsip secara baku adalah pengelolaan arsip yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan:

1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara nasional;
2. Menyediakan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. Mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan aturan yang ada;
4. Melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. Menciptakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang dinamis sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;

6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya.

Dan untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyelenggarakan pelayanannya meliputi beberapa indikator yaitu, Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menerapkan Pengelolaan Arsip dan Aksesibilitas Retrieval Arsip. Capaian indikator kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 -2017

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menerapkan Pengelolaan Arsip	Persen	-	-	7	13
2	Aksesibilitas Retrieval Arsip	Menit	-	-	60	30

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Hulu Sungai Selatan

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pelayanan urusan pilihan, yaitu menyangkut pelayanan pilihan oleh pemerintah Daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Daerah. Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyelenggarakan urusan pilihan yang diuraikan pada penjelasan berikut ini.

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan perikanan darat (air tawar), terbagi atas usaha perikanan budidaya dan usaha perikanan tangkap. Usaha perikanan budidaya meliputi kegiatan budidaya ikan (pembenihan dan pembesaran) dengan sistem pemeliharaan di kolam, karamba/jaring apung, dan minapadi. Sedangkan usaha perikanan tangkap merupakan kegiatan penangkapan ikan di perairan umum rawa dan sungai.

Pada tahun 2016, secara umum geliat subsektor perikanan di Kabupaten

Hulu Sungai Selatan mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, perkembangan subsektor ini di dominasi oleh hasil perikanan budidaya dengan nilai produksi mencapai Rp. 192.445.148.015,00 dan diikuti oleh sektor perikanan tangkap sebesar Rp. 246.309.914,00

Tabel 2.42 Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (ton) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2014-2016

Tahun	Sektor Perikanan	
	Perikanan Tangkap (ton)	Perikanan Budidaya (ton)
2014	7.298,80	-
2015	7.981,70	8.426,99
2016	8.225,40	9.610,41

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.3.2.2 Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor riil yang memberikan keunggulan lebih dalam pengembangan potensi perekonomian wilayah terutama bagi masyarakat sebagai bagian dari penunjang sektor pariwisata. Adanya pengembangan pariwisata akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian dalam peningkatan perekonomian daerah dengan cara meningkatkan taraf perekonomian rumah tangganya masing-masing. Pengembangan pariwisata juga tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi obyek wisata yang layak untuk diperhitungkan sebagai daya tarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Potensi Keanekaragaman DTW yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat diketahui dari tabel berikut ini.

Tabel 2.43 Potensi Keanekaragaman DTW Kabupaten Hulu Sungai Selatan

JENIS DTW	NAMA OBYEK	LOKASI	DAYA TARIK WISATA
DTW Alam			
1	Air Terjun Uring	Desa Kemawakan Kec Loksado	Air terjun bertingkat tiga
2	Air Terjun Haratai	Desa Haratai Kec Loksado.	Ditempuh dengan jalan kaki dari Balai Haratai + 15 menit melewati hutan bambu, perkebunan karet, dan kayu manis. Air terjun tersebut bertingkat tiga

JENIS DTW	NAMA OBYEK		LOKASI	DAYA TARIK WISATA
				dengan ketinggian masing-masing + 15 meter
	3	Air Terjun Tangkaramin	Desa Malinau Kec Loksado.	Air terjun bertingkat tiga
	4	Air Terjun Tinggiran Hayam	Desa Kamawakan Kec.Loksado	Air terjun bertingkat tiga
	5	Air Terjun Kilap Api	Desa Tanuhi Kec.Loksado	Air terjun bertingkat
	6	Riam Anai	Desa Lok Lahung Kec.Loksado	Air terjun bertingkat satu
	7	Goa Berangin/Batu Laki	Desa Malutu Kec. Padang Batung	Terdapat goa-goa lainnya
	8	Goa Batu Bini	Desa Batu Bini Kec. Padang Batung	Terdapat goa-goa lainnya
	9	Goa Mandala	Desa Mandala Kec. Telaga Langsat	Terdapat goa-goa lainnya
	10	Sumber Air Panas Batu Bini	Desa Batu Bini Kec. Padang Batung	Sumber air panas bumi
	11	Sumber Air Panas Tanuhi	Desa Tanuhi Kec.Loksado	Sumber air panas alami dan ada cottage peristirahatan; Kurang lebih 8 Km sebelum. Terdapat 10 unit (untuk 20 orang) cottage dengan arsitektur unik yang dilengkapi dengan kolam renang, kolam air panas berendam, kolam air panas gelembung, cafetaria, kantor pengelola, jalan dan jembatan, sanitasi, dan loket pos jaga, lapangan tenis, serta tempat santai/istirahat. Keunggulan yang dapat dirasakan di sini adalah selain menikmati air panas, berenang, berolahraga, juga dengan leluasa dapat memandang alam Loksado yang dikelilingi dengan pegunungan
	12	Gunung Kantawan	Desa Muara Hatip	Cagar alam <i>tracking</i> dengan pemandangan alam pegunungan
	13	Telaga Bidadari	Kec. Sungai Raya	Telaga di komplek permukiman dengan kepercayaan khusus
	14	Danau Bangkau	Kec.Kandangan	
	15	Delta dan Dam Sungai Amandit	Desa Malutu Kec.Padang Batung	
	16	Air Terjun Bainah	Kampung Kuangan, Desa Baliring	Air Terjun
	17	Air Terjun Hampang Datu	Kampung Hampang Batu, Desa Padang Batung	Air Terjun
	18	Air Terjun Riam Menangis	Kampung Lokbahan, Desa Malilingin	Air Terjun
	19	Air Terjun Riam Menanti	Kampung Tambak Pipi'i, Desa Batu Laki	Air Terjun
	20	Banyu Landas	Desa Kaliring	Sungai arus deras dengan batu-batuan alam besar di sisi kiri dan kananya. Sangat cocok untuk wisata arung jeram
	21	Bendungan Amandit	Desa Malutu	Bendungan yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata
	22	Bukit Amor	Desa Batu Laki	Wisata bukit sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata
	23	Bukit Kucing/ Bukit Taleweh	Kampung Lokbahan/ Desa Malilingin	Wisata bukit sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata

JENIS DTW	NAMA OBYEK		LOKASI	DAYA TARIK WISATA
	24	Bukit Kudai	Kampung tambak Pipi'i, Desa Batu Laki	Wisata bukit sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata
	25	Bukit Mualak/ Bukit Pinata	Kampung Lokbahan, Desa Malilingin	Wisata bukit sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata
	26	Bukit Sarai	Kampung Pariangan, Desa Malilingin	Wisata bukit sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata
	27	Bukit Separo	Desa Batu Laki	Wisata bukit sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata
	28	Goa Kelelawar	Desa Batu Laki	Wisata goa
	29	Gunung Batu Balai	Kampung Tayub, Desa Madang	Wisata gunung sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata
	30	Gunung Batu Bini	Desa Batu Bini	Wisata gunung sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata
	31	Gunung Batu Laki	Desa Batu Laki	Wisata gunung sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata
	32	Gunung Hampang Datu	Desa Padang Batung	Wisata gunung sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata
	33	Gunung Paluh/ Gunung Katam	Kampung Tambak Pipi'i, Desa Batu Laki	Wisata gunung sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata
	34	Sumber Air Panas Lokbahan	Desa Malilingin	Wisata air panas sebagai obyek wisata dengan khasiat menyembuhkan penyakit
	35	Wisata Balanting Sungai Amandit	Desa Batu Laki	Wisata arung jeram dengan lanting
	36	Air Terjun Sumarga/ Air Terjun Sumarangi	Desa Hamak Timur, Kec. Telaga Langsung	Air Terjun
	37	Batu Balumut	Desa Gumbil, Kec. Telaga Langsung	Obyek wisata alam yang unik
	38	Bendungan Telaga Langsung	Desa Telaga Langsung, Kec. Telaga Langsung	Bendungan yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata
	39	Bukit Batu Baduduk	Desa Gumbil, Kec. Telaga Langsung	Wisata bukit sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata
	40	Batu Baganding	Desa Ulang	Obyek wisata alam yang unik
	41	Air Terjun Itihan	Desa Halunuk	Wisata air terjun
	42	Air Terjun Malanghit	Desa Ulang	Wisata air terjun
	43	Air Terjun Manding Baangin	Desa Kamawakan	Wisata air terjun
	44	Air Terjun Mandin Tangkaramin	Desa Malinau	Wisata air terjun
	45	Air Terjun Pemandian Anggang	Kampung Tariban, Desa Hulu Banyu	Wisata air terjun
	46	Air Terjun Rampah Baganding	Desa Ulang	Wisata air terjun
	47	Air Terjun Rampah Jelatang	Kampung Loa Panggang, Desa Lok Lahung	Wisata air terjun
	48	Air Terjun Rampah Lambin	Kampung Loa Panggang, Desa Lok Lahung	Wisata air terjun
	49	Air Terjun Rampang Langsang	Desa Ulang	Wisata air terjun

JENIS DTW	NAMA OBYEK		LOKASI	DAYA TARIK WISATA
	50	Air Terjun Rampah Menjangan	Kampung Loa Panggang, Desa Lok Lahung	Wisata air terjun
	51	Air Terjun Rampah Muyih	Kampung Muara Hatip, Desa Hulu Banyu	Wisata air terjun
	52	Air Terjun Riam Barajang	Desa Lok Lahung	Wisata air terjun
	53	Bamboo Rafting/ Balanting Paring	Desa Lok Lahung	Wisata arung jeram dengan bambu
	54	Bukit Langgara	Desa Lumpangi	Wisata bukit sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata
	55	Graha Sungai Amandit	Kampung Muara Hatip, Desa Hulu Banyu	Wisata sungai amandit
	56	Gunung Batu Bangkai	Kecamatan Loksado	Wisata gunung sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata
	57	Gunung Kentawan	Kampung Muara Hatip, Desa Hulu Banyu	Wisata gunung sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata
	58	Gunung Tatapan	Desa Halunuk	Wisata gunung sebagai tempat untuk menikmati pemandangan dan dilengkapi fasilitas wisata
	59	Bendungan Telaga Langsung	Desa Telaga Langsung	Bendungan yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata
	60	Danau Bajayau Lama	Desa Bajayau Lama	Wisata alam danau
	61	Danau Muning	Desa Muning Dalam	Wisata alam danau
	62	Danau Paharangan	Desa Paharangan	Wisata alam danau
	63	Batu Baranak/ Balai Adat Amas	Desa Pantai Ulin	Wisata alam unik
DTW Budaya				
	1.	Danau Bago Tanggul	Desa Bago Tanggul	Wisata alam danau
	2.	Kerajinan Logam/ Kuningan	Kec. Daha Utara / Daha Selatan	Cara pembuatan logam
	3.	Pembuatan Badan Kapal	Kec. Daha Utara / Daha Selatan	Industri pembuatan kapal
	4.	Kerajinan Aksesoris Perhiasan	Kec. Daha Selatan	Cara pembuatan aksesoris
	5.	Kerajinan Mandau	Kec. Daha Selatan	Cara pembuatan mandau
	6.	Industri Kerupuk	Desa Bamban Kec. Angkinang	Pembuatan krupuk dari ubi kayu
	7.	Kerajinan Gerabah	Kec. Daha Selatan	Pembuatan gerabah dari tanah liat
	B. Balai/Rumah Adat			
	1	Rumah Adat Banjar	Desa Tibung Raya Kec. Kandangan	Bangunan rumah adat Khas Banjar
	2	Rumah Adat Banjar Gajah Menyusu	Desa Amawang, Kec. Kandangan	Rumah adat
	3	Rumah Adat Banjar Bumbungan Tinggi	Desa Habirau, Kec. Daha Selatan	Rumah adat
	4	Rumah Toko Terapung	Kec. Daha Utara	Rumah adat
	5	Baiai/Rumah Adat Bukit/ Dayak	Kec. Loksado	Rumah adat yang digunakan dalam kegiatan adat/ kepercayaan

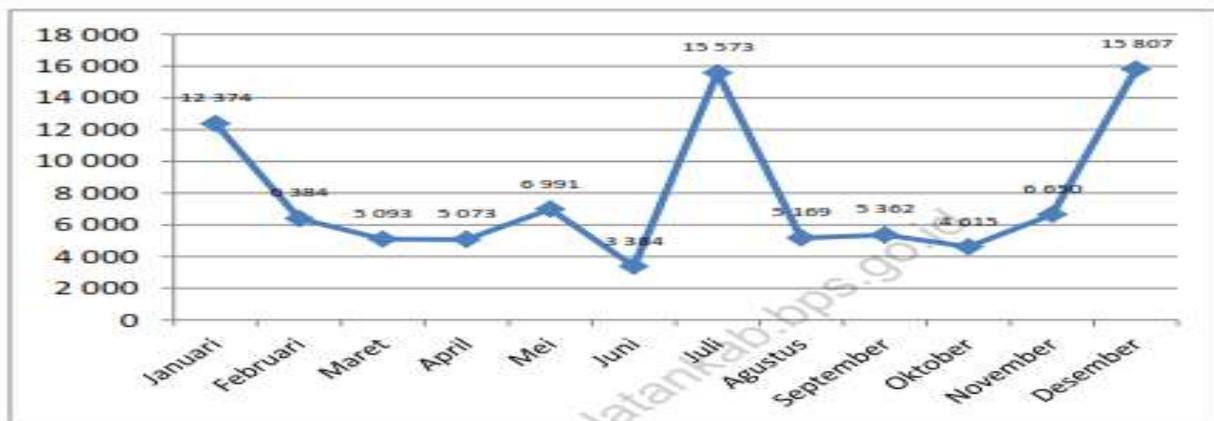
JENIS DTW	NAMA OBYEK		LOKASI	DAYA TARIK WISATA
	6	Kalang Kerabau	Desa Pandak Daun Kec. Daha Utara	
	C.	Festival/Event		
	1.	Festival Pengantin Balanting	Kec. Loksado	Festival pasangan pengantin yang diarak menyusuri sungai dengan rakit lengkap dengan para pengaraknya, bebunyian, dan hiasan bak pawai di jalan raya
	2.	Festival Lanting	Kec. Loksado	Festival Lanting dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	3.	Upacara Aruh Ganal	Kabupaten HSS	Aruh Ganal artinya Kenduri Besar, dilaksanakan secara besar-besaran oleh seluruh warga kampung dan dihadiri oleh warga kampung lainnya, dalam rangka ungkapan rasa syukur atas karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sekaligus memohon hasil tahun ke depan mendapat panen yang melimpah, dijauhkan dari bahaya dan makhluk perusak tanaman
	4.	Seni Tradisional	Kabupaten HSS	-
	5.	Lomba Jukung Tradisional (Perahu Naga)	Kecamatan Daha Selatan	-
	6.	Olahraga Tradisional	Kabupaten HSS	-
	7.	Kalang Hadangan	Kecamatan Daha Utara	-
	D.	Minat Khusus		
	1.	Tracking dan Arung Jeram (bamboo rafting)	Kec. Loksado	Jelajah dan rafting khusus menggunakan rakit bambu menelusuri keindahan di sepanjang sungai Amandit
	2.	Tracking dan Perahu/Jukung	Sei Negara Kec. Daha Selatan	Jelajah di area rawa dengan menggunakan perahu/jukung
	3.	Kawasan Perikanan/Pemancingan	Kec.Kandangan/Daha Utara/Selatan/Kalumpang	Minat khusus wisata pemancingan di area rawa
	4.	Kerbau Rawa	Desa Pandak Daun Kec. Daha Utara	Obyek wisata satwa kerbau yang ditenakkan masyarakat sehari-hari berenang di rawa-rawa. Obyek wisata ini dapat ditemui di sebuah danau kecil di Desa Pandak Daun, sekitar 4 Km dari Nagara. Kawasan tersebut juga merupakan kawasan pemancingan tradisional, lahan terbuka yang sunyi dapat memunculkan inspirasi. Untuk mencapai ke tempat tersebut, sangatlah mudah dengan naik klotok hanya membutuhkan waktu ± 20 menit. Waktu yang tepat pergi kesana adalah jam 6 sore. Keistimewaan dari pengembangbiakan Kerbau Kalang ini adalah kandang-kandangannya dibangun diatas tumpukan batang-batang yang tersusun menyilang rnencaapai ketinggian 2-3 meter
	5.	Areal Hutan Kota di Komplek RSUD	Kec. Kandangan	Merupakan area hijau terbuka yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai RTH Publik kota
DTW Sejarah Perjuangan	1.	Monumen 17 Mei 1949	Kec. Kandangan	Monumen bernilai sejarah perjuangan nasional
	2.	Gedung Juang	Desa Hamalau Kec. Padang Batung	Museum sejarah Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan
	3.	Situs Benteng Madang	Desa Madang Kec. Padang Batung	Benteng bersejarah dengan anak tangga lebih dari 400 buah dan dapat dijelajahi dengan menggunakan mobil dengan jarak + 8 Km dari Kota Kandangan
	4.	Situs Amuk Hantarukung	Desa Hantarkurung	-

JENIS DTW	NAMA OBYEK	LOKASI	DAYA TARIK WISATA
		Kecamatan Simpur	
	5. Makam Tumpang Talu	Kandangan Barat Kecamatan Kandangan	-
	6. Kubur Anam	Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya	-
	7. Makam Singakarsa	Jl. Singakarsa Kec. Kandangan	-
	8. Makam Aluh Idut	Jl. Aluh Idut Kec. Kandangan	-
	9. Makam Ning Bulang	Desa Hantarkurung Kecamatan Simpur	-
	10. Tugu Peringatan Penyusunan Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV	Kecamatan Telaga Langsung	-
	11. Tugu Peringatan Peristiwa Pemencaran Pasukan ALRI Divisi IV 10 Mei 1949	Pagat Batu Desa Batu Bini Kec. Padang Batung	
	12. Tugu Gencatan Senjata Antara Gubernur Tentara ALRI Divisi IV dengan NICA	Kecamatan Sungai Raya	-
	13. Monumen Mandapai	Desa Mandapai Kec. Padang Batung	Upacara HUT ke IV RI 17 Agustus 1949
	14. Tugu Palagan Negara 2 Januari 1949	Desa Hakurung Kec. Daha Utara	-
	15. Tugu Garis Demarkasi	Desa Karang Jawa Kec. Padang Batung	-
	16. Tugu Peringatan Markas Daerah Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan	Desa Jelatang kec. Padang Batung	-
DTW Religius	1. Mesjid Su'ada	Desa Wasah Hilir Kec. Simpur	Wisata area masjid
	2. Makam Keramat Datu Taniran	Desa Taniran Kec. Angkinang	Makam bersejarah, berjarak + 8 km dari ibukota kabupaten; nama sebenarnya dari obyek ini adalah Makam Al Allamah Syekh H. Sa'dudin.
	3. Makam Keramat Datu Ahmad	Desa Balimau, Kec. Kalumpang	Makam bersejarah; berjarak + 15 km dari ibukota kabupaten; nama sebenarnya dari obyek ini adalah Makam Al Allamah Syekh Ahmad
	4. Makam Keramat Datu H. Rais	Desa Loknyiur Kec. Angkinang	Makam keramat
	5. Makam Tumpang Talu	Desa Hantarukung	Makam bersejarah; berjarak + 7 km dari ibukota kabupaten; meliputi Makam Kusuma Bangsa Bukhari, H. Matamin, Landuk dan Pangeran Yuya
	6. Makam H.M.Said	Desa Simpur Kec. Simpur	Makam keramat
	7. Makam Datu H. Abbas	Desa Simpur Kec. Simpur	Makam keramat
	8. Kubah Datu Durabu	Desa Kalumpang Kec. Kalumpang	Makam keramat

JENIS DTW	NAMA OBYEK		LOKASI	DAYA TARIK WISATA
	9.	Makam Datu Daha	Kecamatan Daha Utara	Makam keramat
	10.	Makam Surgi Tuan	Desa Pasungkan Kec. Daha Utara	Makam keramat
	11.	Makam Habib Iberahim	Desa Mandala Kec. Daha Utara	Makam keramat
	12.	Makam Tuan Guru Haji Ali	Desa Pandan Sari Kec. Daha Selatan	Makam keramat
	13.	Makam Habib Lumpangi	Desa Laumpangi Kec. Loksado	Makam keramat

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan baik domestik maupun mancanegara mencapai 89.551 wisatawan dimana sebelumnya pada tahun 2015 sebanyak 60.102 wisatawan yang berkunjung. Penurunan jumlah kunjungan ini bisa disebabkan berbagai macam faktor. Hal ini menuntut pemerintah untuk terus berupaya dan berinovasi agar semakin banyak wisatawan yang tertarik berkunjung.



Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2017

Gambar 2.25 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2016

2.3.2.3 Pertanian

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi pertanian yang sangat besar sebagai modal dasar pergerakan roda perekonomian daerah, sehingga menjadikan pertanian menjadi salah satu sektor dominan dalam pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan kontribusi PDRB sebesar 27,41% terhadap perekonomian daerah. Sektor pertanian memiliki keunggulan dalam mewujudkan *sustainability development* karena sektor tersebut merupakan sektor yang menggali potensi sumber daya alam terbarukan. Meskipun sekarang pertambangan dan penggalan mendominasi struktur perekonomian, namun sektor pertanian juga memiliki *power* yang

tidak kalah besarnya dengan sektor pertambangan dan penggalian tersebut sehingga *shifting* sektor ekonomi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

1. Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi oleh tanaman padi baik ladang maupun sawah yang memiliki produksi mencapai 260.888 ton pada tahun 2016. Selain itu, komoditas ubi jalar juga cukup memiliki dominasi dalam produksi tanaman pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni memiliki panen sebanyak 9.711 ton pada tahun 2016.

Tabel 2.44 Luas Panen, Produksi, serta Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2014-2016

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)			Produksi (Ton)		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Padi Sawah	41.363	41.284	44.485	197.511	210.442	231.859
2	Padi Ladang	6.124	5.862	6.965	21.648	22.508	29.029
3	Jagung	376	1.104	105,5	1.335	5.093	440
4	Kedelai	16	28	2	19	36	2
5	Kacang Tanah	482	335	636	577	447	849
6	Kacang Hijau	23	25	29	25	26	29
7	Ubi Kayu	132	83	106	1.864	1.174	1.491
8	Ubi Jalar	247	231	357	6.138	5.944	9.711
No	Jenis Tanaman	Produktivitas (Kuintal/Ha)					
		2014	2015	2016			
1	Padi Sawah	47,75		50,97	52,12		
2	Padi Ladang	35,35		38,40	41,67		
3	Jagung	35,51		46,13	41,74		
No	Jenis Tanaman	Produktivitas (Kuintal/Ha)					
		2014	2015	2016			
5	Kacang Tanah	11,97		13,33	13,35		
6	Kacang Hijau	10,87		10,49	10,25		
7	Ubi Kayu	141,21		141,46	140,64		
8	Ubi Jalar	248,50		257,31	272,10		

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2. Hortikultura

Pada subsektor hortikultura, terdapat dua komoditas besar yakni komoditas buah-buahan dan sayuran. Pada komoditas buah-buahan

didominasi oleh tanaman semangka dengan produksi 352.380 kuintal disusul duku dengan produksi sebanyak 115.614 kuintal. Sedangkan pada komoditas sayuran, pada tahun 2016 didominasi oleh tanaman cabe besar (56.394 kuintal) dan tomat (36.301 kuintal).

Tabel 2.45 Jenis Buah, Produksi dan Produktivitasnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2016

No	Jenis Buah	Jumlah Tanaman Baru	Jumlah Tanaman yang Menghasilkan	Produksi	Produktivitas
1	Alpukat	-	592	356	0,60
2	Belimbing	-	1.170	1.231	1,05
3	Duku	500	99.246	115.614	1,16
4	Durian	171	4.823	3.819	0,79
5	Jambu Air	-	434	111	0,26
6	Jambu Biji	-	3.062	31	0,01
7	Jeruk Besar	-	-	-	-
8	Jeruk Siam	275	14.739	5.864	0,39
9	Mangga	3	5.563	2.747	0,49
10	Manggis	75	16.163	354	0,02
11	Nanas	-	4.181	295	0,07
12	Nangka	-	4.087	5.980	1,46
13	Pepaya	421	1.744	1.149	0,65
14	Pisang	7.085	33.638	62.610	1,86
15	Rambutan	130	15.176	22.390	1,47
16	Salak	-	-	-	-
17	Sawo	5	1.623	1.503	0,92
18	Semangka	-	1.481*	352.380	237,93**
19	Sirsak	-	-	-	-
21	Sukun	-	-	-	-

Keterangan : *Ha **)Kuintal/Ha

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tabel 2.46 Produksi Delapan Komoditas Tertinggi Sayuran Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2016

No	Jenis Tanaman	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Cabe Besar	56.394	490	115,09
2	Tomat	36.301	293	123,89
3	Cabe Rawit	31.790	244	130,29
4	Mentimun	10.781	96	112,30
5	Terung	6.679	152	43,94
6	Kacang Panjang	6.302	136	46,34
7	Bawang Merah	2.556	37	69,08
8	Buncis	1.845	53	34,81

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2017

3. Perkebunan

Pada subsektor perkebunan didominasi tanaman kelapa sawit pada tahun 2016 masih tinggi yakni sebesar 10.473 ton dan diikuti tanaman karet sebesar 9.857 ton. Tingginya produksi komoditas kelapa sawit di regional Pulau Kalimantan karena permintaan kelapa sawit dengan produk olahannya memiliki nilai jual yang cukup tinggi untuk meningkatkan perekonomian daerah. Namun masih terdapat isu-isu negatif terhadap dampak pengembangan perkebunan sawit ini terhadap lingkungan hidup sehingga pemerintah daerah harus memberi perhatian khusus mengenai permasalahan tersebut. Perkembangan produksi tanaman perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diketahui dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.47 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (ton), Tahun 2015- 2017

No	Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao
1	Padang Batung	4.774	1.516	743	81	1	79
2	Loksado	6.556	105	1.043	59	2	-
3	Telaga Langsat	2.066	185	313	23	-	-
4	Angkinang	466	324	279,5	3	-	82
5	Kandangan	270	1.263	331	0,8	-	48
6	Sungai Raya	1.177	2.067	120	3	1	29
7	Simpur	187	2.147	33	4	-	17
8	Kalumpang	10	645	20	2	-	5
9	Daha Selatan	-	-	20	-	-	-
10	Daha Barat	-	-	50	-	-	-
11	Daha Utara	-	-	-	-	-	-
Hulu Sungai Selatan							
2017		15.508	8.252	2.952,5	175,8	4	260
2016		15.455	8.163	2.949	176	4	276
2015		15.373,15	8.352,54	2.985	178,47	5,94	376,5
No	Kecamatan	Cengkeh	Kemiri	Kapuk	Aren	Kayu Manis	
1	Padang Batung	31	47	-	113	-	
2	Loksado	24	1.768	-	11	2.647	
3	Telaga Langsat	-	1	-	24	-	
4	Angkinang	-	-	3	23	-	
5	Kandangan	2	-	7	16	-	

6	Sungai Raya	2	-	-	46	-
7	Simpur	-	-	-	7	-
8	Kalumpang	-	-	10	12	-
9	Daha Selatan	-	-	-	-	-
10	Daha Barat	-	-	-	-	-
11	Daha Utara	-	-	-	-	-
Hulu Sungai Selatan 2017		59,00	1.816	20,00	252,00	2.647
2016		59,00	1.816	19,00	250,00	2.578
2015		63,81	1.819,85	19,61	249,43	2571

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka, Tahun 2018

4. Peternakan

Jenis ternak yang dominan, baik yang dipelihara, dipotong, maupun diproduksi daging adalah sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, dan itik. Informasi populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2016

No	Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
1	Padang Batung	-	433	-	-	28	-	-
2	Loksado	-	12	-	-	32	-	572
3	Telaga Langsat	-	508	-	-	150	-	-
4	Angkinang	-	350	-	-	818	10	-
5	Kandangan	-	783	-	-	763	-	-
6	Sungai Raya	-	1.150	-	-	294	-	-
7	Simpur	-	1.386	-	-	329	-	-
8	Kalumpang	-	365	-	-	59	-	-
9	Daha Selatan	-	20	-	-	12	-	-
10	Daha Barat	-	-	350	-	-	-	-
11	Daha Utara	-	4	630	-	53	-	-
Hulu Sungai Selatan 2016		-	5.011	980	-	2.538	10	572
2015		-	4.836	930	-	2.753	-	572
2014		-	4.689	892	-	2.901	-	682
2013		-	4.550	844	-	2.750	-	925

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tabel 2.49 Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2016

No	Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
1	Padang Batung	187.953	250	96.750	7.861
2	Loksado	86.280	-	-	2.442
3	Telaga Langsat	246.786	-	155.330	84.699
4	Angkinang	222.151	-	47.258	22.606
5	Kandangan	31.826	1.200	294.800	37.840
6	Sungai Raya	79.731	-	235.500	95.840
7	Simpur	114.786	600	146.700	110.784
8	Kalumpang	77.297	-	95.750	81.833
9	Daha Selatan	64.895	-	-	29.540
10	Daha Barat	17.271	-	-	52.119
11	Daha Utara	11.618	-	-	94.755
Hulu Sungai Selatan 2016		1.140.594	2.050	1.072.088	620.319
2015		1.140.600	-	1.072.115	612.459
2014		1.304.888	-	1.228.501	789.031
2013		2.633.249	-	1.094.813	973.972

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tabel 2.50 Indikator Sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Persen	47,75	50,97	52,12	50,28
2.	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB	Persen	4,37	4,03	4,87	25,78
3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	20,17	18,81	17,39	18,4
4.	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,37	4,03	4,87	2,06
5.	Jumlah bina kelompok petani	Kelompok	911	911	911	919
6.	Nilai Tukar Petani	Persen	99,83	99,99	97,52	96,69
7.	Pertumbuhan sub sektor peternakan dalam PDRB	Persen	9164	9091	9111	9437

Sumber: LKPJ Bupati Hulu Sungai Selatan Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2013-2018

2.3.2.4 Perdagangan

Dalam berdagang, kualitas barang maupun jasa sangat berpengaruh terhadap daya saing barang produksi di pasar. Oleh Karena itu pemerintah daerah telah mendorong kearah perbaikan daya saing kualitas sarana prasarana distribusi perdagangan, peningkatan pelaku usaha perdagangan non formal menjadi pelaku pedagang formal. Hal diatas diharapkan mampu meningkatkan PAD sub sektor perdagangan. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2016 dapat diketahui dari tabel berikut.

Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2016

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1.	Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal	Persen	47,75	50,97	52,12	50,28
2.	PAD sub sektor perdagangan (kemetrolagian)	Persen	4,37	4,03	4,87	25,78
3.	Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Persen	20.17	18.81	17.39	18.4
4.	PAD sub sektor perdagangan (Pelayanan Dasar)	Persen	4,37	4,03	4,87	2,06

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.3.2.5 Industri

Perindustrian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami perkembangan yang menunjukkan sisi positif dalam membentuk struktur perekonomian wilayah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian makro di Kalimantan Selatan cukup dominan dimana besarnya mencapai 8,16 persen distribusi sektor tersebut terhadap PDRB. Perkembangan sektor ini tidak lain dikarenakan sejumlah potensi ekonomi yang berada di wilayah Kalimantan Selatan seperti sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia, hingga investor yang menanamkan modalnya untuk kepentingan bersama.

Tabel 2.52 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Menurut Jenis Industri di Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2016

Industri Kecil dan Menengah		Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Rp)
A	Formal			
	Industri Pangan	74	472	28.358.260
	Industri Sandang	10	15	1.255.500
	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	66	649	19.837.000
	Industri Logam dan Elektronika	86	570	8.602.850
	Industri Kerajinan dan Umum	27	175	6.785.250
B	Informal			
	Industri Pangan	4.434	11.446	12.398.850
	Industri Sandang	179	271	1.003.250
	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	566	1.377	6.383.500
	Industri Logam dan Elektronika	719	2.140	10.526.230
	Industri Kerajinan dan Umum	5.295	8.023	5.010.660
Total		11.556	25.138	100.161.350

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2017

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran umum tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa salah satu prioritas pembangunan Kalimantan Selatan adalah “Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi & Sosial Budaya”. Begitu juga dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menitik beratkan pada pengembangan sektor agrobisnis melalui urusan pertanian. Urusan Pertanian ini bertujuan untuk meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian.

Secara umum struktur ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbentuk dan di dominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Peran sektor pertanian terhadap seluruh kegiatan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 47,68%. Hal ini dikarenakan penduduk Kabupaten Hulu

Sungai Selatan sebagian besar berada di daerah pedesaan.

Mata pencaharian didominasi oleh bidang pertanian dan perkebunan, yakni mencapai 16,95% dari keseluruhan jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan mata pencaharian. Sehingga peran pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki dua peran sekaligus tantangan, yakni mendukung pemenuhan pangan bagi penduduk Hulu Sungai Selatan serta memberikan lapangan kerja bagi rumah tangga tani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagai sektor yang menjadi tumpuan bagi ketahanan pangan dan mata pencaharian sebagian rakyat, maka pembangunan pertanian merupakan generator bagi pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Potensi pertanian secara umum dapat ditinjau dari potensi sumber daya produksi dan potensi pasar. Potensi produksi pangan terutama dapat dilihat dari cukup besarnya jumlah lahan sawah produktif yang subur. Berdasarkan pemanfaatan lahan yang digunakan oleh petani, mulai dari kawasan selatan ke arah utara yang melebar ke arah barat merupakan daerah potensi tanaman bahan makanan. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan capaian indikator produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar yang meningkat dari realisasi tahun 2014 yaitu 47.75%, menjadi 50.94 pada tahun 2015, pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 52.12% dan turun pada tahun 2017 menjadi 50.28%.

Realisasi di tahun 2015-2017 mengalami peningkatan tidak signifikan, hal ini dikarenakan besarnya jumlah lahan sawah produktif yang subur saat ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh kondisi tanah yang kekurangan organik, dan hama penyakit. Selain itu, tidak signifikannya kenaikan realisasi ini juga dikarenakan oleh kondisi alam yang tidak menentu, terbatasnya aspek permodalan, serta sistem tebas dan ijin pada lumbung. Dengan demikian upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna meningkatkan produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya secara signifikan dengan cara peningkatan intensifikasi berkelanjutan yang ditekankan pada pemulihan lahan serta sarana dan prasarana produksi.

Pada indikator kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB tahun 2014 sebesar 4,37% mengalami penurunan pada angka 4,03% di tahun 2015, pada tahun 2016 kembali meningkat mencapai 4,87% dan tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 25,78%. Kondisi yang fluktuatif demikian disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan rendahnya nilai tukar pertanian dibandingkan dengan nilai tukar non agraris. Sehingga upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja urusan

pertanian pada periode berikutnya adalah dengan mengimplementasikan regulasi secara konsisten serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian (terutama pangan).

Kondisi yang sama juga terjadi pada capaian indikator jumlah sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB di tahun 2014 dari 22.652.2, di tahun 2015 menjadi 26.365.76, namun pada tahun 2016 kembali meningkat hingga mencapai 29.591.04 dan tahun 2017 tercapai sebesar 30.734.94. Tidak stabilnya kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB dikarenakan komoditas perkebunan masih didominasi dengan tanaman tua yang cenderung kurang produktif. Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut yakni dengan memfasilitasi kelompok perkebunan melalui sarana dan pembibitan, serta diversifikasi komoditas dan peremajaan tanaman. Hal ini guna menghadapi tantangan persaingan harga komoditas di pasar global yang cenderung fluktuatif.

Para pemuda masih banyak yang enggan terjun sebagai tenaga kerja di sektor pertanian, sehingga tidak menutup kemungkinan kelangkaan atau menurunnya tenaga kerja sektor pertanian terjadi. Di sisi lain, ketidaksignifikannya kenaikan kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB juga dikarenakan menurunnya produktivitas tanah dan komoditas. Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka perlu perbaikan manajemen kelembagaan kelompok tani serta meningkatkan produktivitas lahan dan komoditas.

Pada indikator cakupan bina kelompok petani menunjukkan peningkatan dari realisasi tahun 2013 yaitu 26,6%, menjadi 26,96% pada tahun 2014, kembali meningkat pada tahun 2015 menjadi 26,99% dan tahun 2016 tercapai 27,15%. Meskipun demikian capaian ini masih tergolong kecil, sebab partisipasi kelompok tani masih rendah dan terbatasnya tenaga penyuluh. Sehingga peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi petani sangat diperlukan sebagai upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator nilai tukar (*term of trade*) dari produk pertanian terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani maupun biaya produksi dan pembentukan barang modal. Pada indikator nilai tukar petani menunjukkan peningkatan dari realisasi tahun 2014 yaitu 99,83%, menjadi 99,99% pada tahun 2015, mencapai 97,52% pada tahun 2016 dan tahun 2017 capaian sebesar 96,69%. Peningkatan yang terjadi pada realisasi nilai tukar petani pada tahun 2014-2017 berarti semakin tinggi daya beli petani di pedesaan. Namun permasalahan yang masih dihadapi

oleh petani yakni mahalannya harga sarana produksi pertanian dan fluktuatifnya harga komoditas pertanian. Sehingga upaya tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah dengan memberikan subsidi atau insentif bagi petani.

Pada indikator capaian pertumbuhan sub sektor peternakan dalam PDRB selama tahun 2014-2017 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 capaian indikator ini sebesar 9164, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 9091, pada tahun 2016 kembali naik menjadi 9111, dan pada tahun 2017 capaian ini naik menjadi sebesar 9437.

Dapat disimpulkan secara umum, indikator kinerja urusan pertanian telah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pembangunan pengairan ditujukan untuk menunjang produksi pertanian, khususnya untuk meningkatkan produksi pangan.

Sebagai upaya agar daya saing daerah dapat meningkat dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian dapat terwujud maka upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan intensifikasi secara berkelanjutan serta penekanan pada sarana dan prasarana produksi padi atau bahan utama pangan lokal;
- b. Upaya secara konsisten terhadap upaya mempertahankan ketahanan pangan daerah melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan pemberian subsidi dan insentif bagi petani;
- c. Fasilitasi kelompok pertanian/perkebunan melalui sarana dan pembibitan, diversifikasi komoditas dan peremajaan tanaman;
- d. Perbaikan manajemen dan kelembagaan kelompok tani, meningkatkan produktivitas lahan dan komoditas; dan
- e. Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi petani.

Kemampuan ekonomi daerah menggambarkan kapasitas ekonomi daerah memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Pada indikator perhubungan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan

untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Tahun 2013 -2014 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 0,005 dan sebesar 0,004 di tahun 2015-2017. Nilai rasio panjang jalan tersebut menunjukkan bahwa panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih mampu menampung jumlah kendaraan/ arus barang dan jasa disektor perekonomian.

Secara ekonomi hal tersebut menunjukkan ketersediaan infrastruktur jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih baik dan mampu menampung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan untuk indikator Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/terminal per tahun, tahun 2013 sebanyak 3.520 orang, tahun 2014 sebanyak 3.320 orang, tahun 2015 sebanyak 3.633 orang, dan tahun 2016 sebanyak 2.794 orang. Dan pada tahun 2017 sebanyak 3.208 orang. Peningkatan jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan distribusi barang dan jasa yang semakin tumbuh. Pada indikator tata ruang, ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong baik.

Luas wilayah produktif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013-2014 sebesar 112.263,61 Ha, ditahun 2015 meningkat menjadi sebesar 121.310,52 Ha dan tidak bertambah sampai dengan tahun 2017, perkembangan luas wilayah produktif dapat diketahui dari tabel berikut ini.

Tabel 2.53 Luas Wilayah Produktif Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

No.	Jenis Pengguna Lahan	Satuan	Luas Wilayah Produktif				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Sawah	Ha	33.452,3	33.452,3	44.294,00	44.294,00	44.294,00
2	Ladang	Ha	11.369,41	11.369,41	8.983,00	8.983,00	8.983,00
3	Kebun Campuran	Ha	1.744,25	1.744,25	1.744,25	1.744,25	1.744,25
4	Kebun Karet	Ha	15.838,03	15.838,03	10.906,94	10.906,94	10.906,94
5	Hutan	Ha	49.859,62	49.859,62	55.382,33	55.382,33	55.382,33
Jumlah		Ha	112.263,61	112.263,61	121.310,52	121.310,52	121.310,52

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Untuk luas lahan perkotaan, tahun 2013 sebesar 2.138 Ha, dan tidak mengalami penambahan luas sampai dengan tahun 2015. Tahun 2016 sebesar 3.064,00 Ha dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar 8.947,2 Ha.

Tabel 2.54 Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

No.	Kawasan Perkotaan	Satuan	Luas Wilayah Perkotaan				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Kandangan	Ha	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138
2	Loksado	Ha	-	-	-	926,00	926,00
3	Daha Selatan	Ha	-	-	-	-	3.923,40
4	Sungai Raya	Ha	-	-	-	-	1.960,12
Jumlah		Ha	2.138	2.138	2.138	3.064,00	8.947,2

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Fasilitas wilayah dan infrastruktur yang telah terbangun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55 Realisasi Indikator Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perhubungan						
1.1	Panjang jalan	KM	850,56	980,140	989,93	989,94	998,73
1.2	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	Orang	166.860	108.000	120.825	108.010	95.725
1.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	3.520	3.320	3.633	2.794	3.208
2.	Penataan Ruang						
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.2	Luas wilayah produktif	Ha	112.263,61	112.263,61	121.310,52	121.310,52	121.310,52
2.3	Luas wilayah industri	Ha					

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
2.4	Luas wialyah kebanjiran	Ha					
2.5	Luas wilayah kekeringan	Ha					
2.6	Luas wilayah perkotaan	Ha	2.138	2.138	2.138	3.064	8.947,52
3.	Bank, Asuransi dan Perhotelan						
3.1	Jenis dan jumlah bank dan Cabang	Bank					
3.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Perusahaan	3	7	7	6	6
3.3	Jenis, kelas dan jumlah restoran	Restoran	112	114	116	105	212
3.4	Jenis, kelas dan jumlah penginapan/ hotel	Hotel	12	14	13	13	19
4.	Lingkungan Hidup						
4.1	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	Rumah Tangga	13.641	14.812	15.382	16.276	16.906
5.	Jaringan Listrik						
5.1	Jumlah RumahTangga yang menggunakan listrik	Rumah Tangga	50.318	51.976	53.964	56.698	61.971

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2013-2018

Di bidang lembaga keuangan telah tumbuh cukup signifikan. Ketersediaan fasilitas bank dan non bank (perusahaan asuransi) sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah dan pembiayaan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Sedangkan indikator jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang tahun 2013 sejumlah 3 unit, tahun 2012-2013 meningkat menjadi 7 unit, dan tahun 2014 sejumlah 6 unit.

Ketersediaan restoran dan rumah makan pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Perkembangan restoran dan rumah makan adalah indikator tumbuhnya pariwisata daerah. Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi harus dibarengi dengan ketersediaan hotel, restoran dan rumah makan serta fasilitas akomodasi lainnya yang representatif. Untuk indikator Jenis, kelas dan jumlah restoran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014 sejumlah 114 unit, tahun 2015 sejumlah 116 unit, tahun 2016 sebanyak 105 unit dan 2017 meningkat menjadi 212 unit. Sedangkan untuk indikator jenis, kelas dan jumlah penginapan dan hotel Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sejumlah 12 unit, tahun 2014 sejumlah 14 unit, tahun 2015 sejumlah 13 unit, tahun 2016 sejumlah 13 unit, dan tahun 2017 sejumlah 19 unit.

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja indikator Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013 sebanyak 50.318 buah, pada tahun 2014 sebanyak 51.976 buah, pada tahun 2015 sebanyak 53.964 buah, pada tahun 2016 sebanyak 56.698 buah, dan pada tahun 2017 sebanyak 61.971 buah. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu mendorong akselerasi pembangunan jaringan listrik keseluruhan wilayah yang belum tersentuh oleh listrik.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Dalam kaitan tersebut peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Salah satu indikator yang berpengaruh adalah masalah keamanan suatu daerah, keamanan suatu daerah dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi setiap tahun.

Angka kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup fluktuatif, tahun 2013 sebesar 395 kasus, tahun 2014 sebanyak 290 kasus, tahun 2015 sebesar 148 kasus, tahun 2016 sebanyak 214 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 232 kasus. Selain angka kriminalitas, kejadian demonstrasi juga sangat berpengaruh terhadap faktor keamanan. Tahun 2011-2012 terjadi sebanyak 4 kegiatan demonstrasi, tahun 2013 meningkat menjadi sebanyak 7 kegiatan demonstrasi, dan tahun 2014 sebanyak 5 kegiatan demonstrasi. Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya, oleh karena itu penting bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan memiliki berbagai strategi dalam menjaga kestabilan penurunan angka kriminalitas.

Selain itu kegiatan demonstrasi yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu cerminan demokrasi di daerah, namun yang perlu ditekankan adalah kegiatan demonstrasi yang mengarah pada aksi anarkisme, brutalisme, maupun rasisme, yang mempunyai potensi kerusuhan massa. Maka perlu adanya sebuah sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Cerminan iklim investasi yang baik dapat dilihat dari angka pendapatan daerah melalui pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah,

realisasi pajak daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren yang positif meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2013 realisasi pajak daerah sebesar 6,548 milyar rupiah, tahun 2014 sebesar 8,891 milyar rupiah, tahun 2015 sebesar 10,042 milyar rupiah, tahun 2016 sebesar 10,804 milyar rupiah, dan tahun 2017 sebesar 11,313 milyar rupiah. Pendapatan pajak daerah berasal dari 10 macam pajak daerah, yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Pendapatan pajak daerah berasal dari 10 macam pajak daerah, yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk penerimaan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sebesar 7,741 milyar rupiah, meningkat secara drastis tahun 2014 sebesar 9,542 milyar rupiah, tahun 2015 sebanyak 7,538 milyar rupiah, tahun 2016 sebesar 8,250 milyar rupiah, dan tahun 2017 sebesar 9,799 milyar rupiah. Hal ini membuktikan bahwa iklim investasi di Hulu Sungai Selatan berkembang dengan cukup baik, dari tahun ke tahun telah memberikan sumbangan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan daerah baik dari pajak maupun retribusi daerah. Hal ini tentunya harus didukung dengan memperkuat peraturan daerah terkait dengan jaminan berinvestasi, sejauh ini perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 1 Perda yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2. 56 Perkembangan Faktor Yang Mempengaruhi Iklim berinvestasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.	Angka kriminalitas	395	290	148	214	232
2.	Pajak Daerah (milyar Rp)	6,548	8,891	10,042	10,804	11,313
3	Retribusi Daerah (milyar Rp)	7,741	9,542	7,538	8,250	9,799
4	Macam Pajak Daerah	9	10	10	10	10
5	Macam Retribusi Daerah	21	21	31	31	33
6	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	1	1	1	1	1

Sumber: LKPJ Bupati Hulu Sungai Selatan Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2013-2018

Persentase penyelesaian izin lokasi dapat dilihat pada tabel dibawah. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa peningkatan sangat signifikan terjadi pada tahun 2012. Persentase Penyelesaian izin lokasi pada tahun 2014 sampai dengan 2016 telah mencapai 100%, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan persentase capaian menjadi sebesar 75%.

Tabel 2.57 Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No.	Tahun	Persentase
1	2014	100
2	2015	100
3	2016	100
4	2017	75

Sumber: LKPJ Bupati Hulu Sungai Selatan Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2013-2018

Indikator perizinan juga berpengaruh terhadap daya saing suatu daerah, dengan memberikan kemudahan dalam perizinan usaha akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha. Pada tabel berikut dapat diketahui jenis perijinan dan jumlah yang diterbitkan pada tahun 2016.

Tabel 2.58 Jumlah Perijinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Tahun 2016

No	Jenis Perizinan	Jumlah
1	SIUP	213
2	TDP	208
3	Izin Gangguan	299
4	Domisili	262
5	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	43

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2017

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Keunggulan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci terciptanya daya saing tinggi daerah, dan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi suatu hal yang tidak dapat terelakkan lagi.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio Ketergantungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sebesar 50,38. Menurun ditahun 2014 menjadi 50,21. Tahun 2015 menurun menjadi 50,06 dan pada tahun 2016 menurun lagi menjadi 49,87 dan 2017 mengalami penurunan menjadi 49,67. Sedangkan untuk peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sebesar 65,49. Tahun 2014 sebesar 62,25. Tahun 2015 sebesar 67,52 dan 2016 sebesar 67,8 dan pada tahun 2017 sebesar 67,8. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun angka ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai cukup tinggi, namun pembangunan SDM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang cukup positif, sehingga daya saing daerah juga ikut meningkat.

Tabel 2.59 Perkembangan Rasio Ketergantungan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ketenagakerjaan					
1.1	Rasio ketergantungan	50,38	50,21	50,06	49,87	49,67
1.2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	65,49	62,25	66,31	67,52	67,8

Sumber: LKPJ Bupati Hulu Sungai Selatan Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2013-2017

Selanjutnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013-2017 menurut aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah dapat diketahui dari tabel berikut ini.

Tabel 2.60 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,68	5,79	6,05	6,08	6,13	5,29	Melampaui
2.	Laju inflasi (Kota Banjarmasin)	Persen	6,98	7,16	5,03	3,68	3,82	3,82	Belum Tercapai
3.	PDRB (ADHB)	Juta Rp	3.801.446,16	4.258.173,45	4.782.062,67	5.210.032,2	5.671.876,13	159.593.851,23	Belum Tercapai
4.	PDRB (ADHK)	Juta Rp	3.334.465,09	3.527.586,59	3.740.951,26	3.968.468,58	4.211.711,57	121.863.847,88	Belum Tercapai
5.	PDRB Perkapita (ADHB)	Rupiah	17.153.457	18.969.562	21.053.420	22.779.623	24.386,04	28.890,73	Belum Tercapai
6.	PDRB Perkapita (ADHK)	Rupiah	15.046.275	14.714.901	16.469.721	17.263.668	18.108,11	21.235,96	Belum Tercapai
7.	Indeks Gini	Indeks	0,264	0,269	0,312	0,355	0,336	0,347	Belum Tercapai
8.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	65,49	62,25	66,31	67,52	67,8	69,65	Belum Tercapai
9.	Angka Harapan Hidup	Tahun	63,55	63,64	64,14	65,38	65,39	68,02	Belum Tercapai
10.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,05	7,21	7,67	7,68	7,71	7,99	Belum Tercapai
11.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,35	11,68	11,83	12,02	12,05	12,46	Belum Tercapai
12.	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	11.006	11.007	11.161	11.623	11.890	11.600	Melampaui
13.	Garis Kemiskinan	Rupiah	332.312	351.691	365.097	409.235	431.296	402.424	Melampaui
14.	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,67	6,77	6,45	6,29	5,80	4,73	Belum Tercapai
15.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	0,76	0,81	0,76	0,62	0,83	0,72	Melampaui
16.	Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen	0,17	0,22	0,15	0,10	0,15	0,16	Melampaui
17.	Jumlah Penduduk Miskin	orang	14.836	15.233	14.590	14.420	13.450	-	Melampaui
18.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	68,82	65,27	69,65	-	71,37	-	Belum Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Angka Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Persen	4,73	5,80	43,83	31,36	38,42	70	Belum Tercapai
20.	Jumlah Penduduk Yang Bekerja	Orang	105.102	102.888	111.218	-	118.455	-	Belum Tercapai
21.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,22	2,64	2,84	-	2,02	4,77	Melampaui
22.	Angka kriminalitas yang tertangani	Kasus	395	290	148	214	232	232	sesuai
23.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	-	-	60,41	61,77	60,38	64,4	Belum Tercapai
24.	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Indeks	-	-	88,89	89,36	89,08	91	Belum Tercapai
25.	Status Kota Layak Anak	Katagori	-	-	-	-	Pratama	Madya	Belum Tercapai
26.	Angka Melek Huruf	Persen	96	98,14	98,83	98,19	99,06	100	Belum Tercapai
27.	Persentase PAUD formal terakreditasi A	Persen	-	-	-	-	1,25	100	Belum Tercapai
28.	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	Persen	-	-	-	-	4,76	100	Belum Tercapai
29.	APK SD	Persen	106,2	107,1	112,9	113,8	109,67	100	Belum Tercapai
30.	APK SMP/MTs	Persen	75,99	79,50	86,99	89,21	86,53	100	Belum Tercapai
31.	APK SMA/SMK/MA	Persen	57,50	65,51	57,34	80,24	65,76	100	Belum Tercapai
32.	APM SD/SDLB/MI:	Persen	98,06	98,73	95,37	98,09	99,28	100	Belum Tercapai
33.	APM SMP	Persen	73,15	74,27	71,05	74,74	77,15	100	Belum Tercapai
34.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jiwa	11,68	16,15	24,82	19,05	23,44	0	Belum Tercapai
35.	Jumlah Bayi Yang Dilahirkan	Jiwa	3854	3838	3667	3674	3498	-	Belum Tercapai
36.	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	45	62	91	70	62	-	Belum Tercapai
37.	Angka Kematian Ibu	Jiwa	259,47	223,46	163,62	108,87	142,94	81,81	Belum Tercapai
38.	Jumlah Ibu Hamil	Jiwa	4928	5117	4748	4498	4593	-	Belum Tercapai
39.	Jumlah Kematian Ibu Akibat Melahirkan	Jiwa	10	8	6	4	5	-	Belum Tercapai
40.	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	3854	3838	3667	3674	3498	-	Belum Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	Jumlah Grup Kesenian	Buah	88	92	115	135	156	156	sesuai
42.	Jumlah Gedung Kesenian	Buah	5	5	5	5	5	15	sesuai
43.	Jumlah klub olahraga	Buah	27	27	27	27	27	27	sesuai
44.	Jumlah Gedung Olahraga	Buah	6	8	9	13	14	14	Sesuai
B	URUSAN WAJIB								
I	TERKAIT PELAYANAN DASAR								
1.1	PENDIDIKAN								
1.1.1	APK PAUD Formal	Persen	76,55	77,8	79,05	80,3	81,55	100	Belum Tercapai
1.1.2	Persentase Pemenuhan SPM/SNP PAUD	Persen	1,25	1,87	2,5	3,12	3,75	100	Belum Tercapai
1.1.3	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	89,23	91,15	93,06	94,3	96,14	100	Belum Tercapai
1.1.4	Persentase pemenuhan Aspek SPM Dikmas	Persen	25,92	25,92	29,92	33,33	37,03	100	Belum Tercapai
1.1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	100	100	100	100	100	100	Belum Tercapai
1.1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	97,45	98	98,3	99	99,5	100	Belum Tercapai
1.1.7	Angka Putus Sekolah (APS) SD	Persen	28	25	23	20	15	0	Belum Tercapai
1.1.8	Persentase pemenuhan SPM/SNP SD	Persen	4,15	5,39	6,64	7,88	9,13	100	Belum Tercapai
1.1.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	89,17	90,49	91,37	92,25	93,13	100	Belum Tercapai
1.1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	79,45	79,9	80,25	82,15	85	100	Belum Tercapai
1.1.11	Angka putus Sekolah (APS) SMP	Persen	10	7	6	5	4	0	Belum Tercapai
1.1.12	Persentase pemenuhan SPM/SNP SMP	Persen	25	34	43,75	53,15	59,38	100	Belum Tercapai
1.2	KESEHATAN								
1.2.1	Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah dasar, ibu, dan lansia	persen	72,3	-	-	-	83	100	Belum Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2	Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah dasar, ibu, dan lansia	persen	79	-	-	-	80	100	Belum Tercapai
1.2.3	Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah dasar, ibu, dan lansia	Persen	-	81	82	83	84	100	Belum Tercapai
1.2.4	Persentase pemenuhan Akses Prasarana Kesehatan	persen	80	83	84	87	89	100	Belum Tercapai
1.2.5	Persentase pemenuhan Akses Sarana Kesehatan	persen	20,5	21,45	22,4	23,36	24,79	100	Belum Tercapai
1.2.6	Persentase pemenuhan Kualitas Prasarana Kesehatan	persen	98,18	72,73	77,27	86,36	90,91	100	Belum Tercapai
1.2.7	Persentase pemenuhan Kualitas sarana Kesehatan	Persen	38,1	52,38	66,67	80,95	90,48	100	Belum Tercapai
1.2.8	Persentase fasyankes yang terakreditasi paripurna	persen	4,35	4,35	8,7	13,04	17,39	100	Belum Tercapai
1.2.9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	82	82	82	82	100	Belum Tercapai
1.2.10	Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	Belum Tercapai
1.2.11	Persentase Pemenuhan Layanan Promosi Kesehatan	persen	20,64	21,15	18,71	14,74	100	100	Belum Tercapai
1.2.12	Persentase pemenuhan Pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Dasar, Penyakit Menular dan Tidak Menular	persen	48,52	52,38	55,4	58,43	60,67	100	Belum Tercapai
1.2.13	Persentase Pemenuhan Capaian Indikator Pengendalian Penyakit Menular	persen	55,33	57,21	58,46	63,23	65,97	100	Belum Tercapai
1.2.14	Pesentase Fasyankes Yang Terakreditasi Sempurna	Persen	4,35	4,35	8,7	13,04	17,79	100	Belum Tercapai
1.2.15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	82	82	82	82	100	Belum Tercapai
1.2.16	Persentase Pemenuhan Tingkat Kesehatan RSUD, Aspek IPP RSUD, Dan Akreditasi RSUD , Kategori > B	Persen	66,9	75,6	79	81	85	100	Belum Tercapai
			72,03	76,99	77,97	78,44	78,93	100	Belum Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			80,5	80,75	81	81,5	82	100	Belum Tercapai
1.2.17	Persentase Pemenuhan Aspek Prasarana IPP RSUD	Persen	3,57	3,93	4,29	5	5,71	100	Belum Tercapai
1.2.18	Persentase Pemenuhan Aspek Sarana IPP RSUD	Persen	0,89	0,98	1,07	1,25	1,43	100	Belum Tercapai
1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.3.1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	62,68	65,6	67,35	69,1	71,43	100	Belum Tercapai
1.3.2	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	49,71	55,44	60,22	65	69,78	100	Belum Tercapai
1.3.3	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	536,7	0,3	0,8	0,8	0,8	100	Belum Tercapai
1.3.4	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	536,7	546,58	556,46	565,44	575,77	100	Belum Tercapai
1.3.5	Jumlah bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	buah	5	5	4	4	3	100	Belum Tercapai
1.3.6	Persentase penduduk / rumah tangga yang terakses air bersih	Persentase	77,62	78,27	78,89	79,48	80,04	100	Belum Tercapai
1.3.7	Persentase drainase yang berfungsi dengan baik	Persentase	59	63	66	69	73	100	Belum Tercapai
1.3.8	Persentase KK yang terlayani air limbah domestik	Persentase	6,98	7,1	7,18	7,27	7,35	100	Belum Tercapai
1.3.9	Tingkat kesesuaian RTRW dengan pelaksanaan pembangunan	Persentase	9,09	18,18	27,27	36,36	54,55	100	Belum Tercapai
1.3.10	Persentase tenaga terampil yang bersertifikat	Persentase	1,81	3,63	5,44	7,26	9,07	100	Belum Tercapai
1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1.4.1	Persentase cakupan sampah yang dikelola secara Control landfill	Persen	52,53	48,38	46,97	45,59	44,06	100	Belum Tercapai
1.4.2	Persentase cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R	Persen	27,47	26,63	27,02	27,41	27,94	100	Belum Tercapai
1.4.3	Persentase luasan layanan persampahan	Persen	72,6	80,82	87,67	94,52	100	100	Belum Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4	Persentase kawasan perumahan dan permukiman sehat	Persen	53,05	59,98	67,43	74,88	82,32	100	Belum Tercapai
1.4.5	Persentase kecukupan RTH Publik	Persen	24,84	24,85	24,86	24,86	24,87	100	Belum Tercapai
1.4.6	Rasio jumlah titik PJU terhadap panjang jalan	Persen	23,97	28,98	33,99	39	44,01	100	Belum Tercapai
1.5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT								
1.5.1	Cakupan penyelesaian penegakkan perda	Persen	37,5	50	62,5	75	100	100	
1.5.2	Persentase Kawasan Ketertiban Umum Yang Diobservasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
1.5.3	Persentase Penanganan Kebakaran dan Pemenuhan Perlindungan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
1.6	SOSIAL								
1.6.1	Tingkat Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	5,72	7	7,07	7,16	7,25	100	Belum Tercapai
1.6.2	Cakupan Lembaga/Organisasi sosial, yang aktif dalam penanganan masalah sosial	Persen	38,67	42	45,33	48,67	52	100	Belum Tercapai
1.6.3	Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	6,02	6,74	6,78	6,83	6,87	100	Belum Tercapai
1.6.4	Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	3,54	3,85	4	4,13	4,26	100	Belum Tercapai
1.6.5	Tingkat Perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	74,64	77,13	79,87	82,88	86,2	100	Belum Tercapai
II	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR								
2.1	TENAGA KERJA								
2.1.1	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	Persen	42,96	43,03	43,34	43,63	48,5	100	Belum Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	Persen	80	85	90	95	95	100	Belum Tercapai
2.1.2	Persentase angkatan kerja yang di tempatkan	Persen	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	100	Belum Tercapai
2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK								
2.2.1	Persentase ARG terhadap Anggaran Belanja Langsung APBD	Persen	36,84	52,63	68,42	84,21	100	100	Belum Tercapai
2.2.2	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	Persen	8,11	21,08	33,51	45,41	52,97	100	Belum Tercapai
2.2.3	Persentase Institusi/lembaga yang mengimplementasikan pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak	Persen	77,55	83,67	89,8	95,92	100	100	Belum Tercapai
2.2.4	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis klaster	Persen	27,78	55,56	79,63	98,15	100	100	Belum Tercapai
2.3	PANGAN								
2.3.1	Jumlah Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	ton	102,092	117,092	132,092	147,092	162,092	100	Melampaui
2.3.2	Tingkat Fluktuasi harga	Persen	-	5,47	5,43	5,4	5,35	100	Belum Tercapai
2.3.3	Persentase Pangan Segar yang Tercemar	Persen	≤17%	≤15%	≤13%	≤12%	≤10%	100	Belum Tercapai
2.3.4	Skor PPH Konsumsi	Skor	82,82	83,65	84,48	85,32	86,17	100	Belum Tercapai
2.4	PERTANAHAN								
	Persentase penguasaan fisik tanah yang teradministrasi	Persen	12	24	36	48	60	100	Belum Tercapai
2.5	LINGKUNGAN HIDUP								
	Persentase indeks kualitas Udara titik pantau yang memenuhi standar	Persen	85	85	85	85	85	100	Belum Tercapai
	Persentase indeks kualitas air titik pantau yang memenuhi standar	Persen	51	51,5	52	52,5	53	100	Belum Tercapai
2.6	Persentase tutupan lahan pada areal bekas pertambangan	Persen	35,34	35,49	35,63	35,78	35,93	100	Belum Tercapai
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	Persen	98	99	99	99	99	100	Belum Tercapai
	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	90	91	91	92	92	100	Belum Tercapai
	Validitas database kependudukan	Persen	95	96	97	98	99	100	Belum Tercapai
2.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Persen	73,63	77,32	81,01	84,7	88,38	100	Belum Tercapai
	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang	Persen	13,88	21,52	29,16	36,8	44,44	100	Belum Tercapai
	Persentase Pemerintahan Desa/kel yang berkinerja baik	Persen	25,69	33,33	40,97	48,61	56,25	100	Belum Tercapai
2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Persen	9,92	29,76	49,6	69,44	89,28	100	Belum Tercapai
	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	79,6	80,5	81,4	82,4	83,3	100	Belum Tercapai
	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	Persen	60,2	65,22	70,23	75,25	80,27	100	Belum Tercapai
	Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	Persen	18,18	36,36	54,55	72,73	100	100	Belum Tercapai
2.9	PERHUBUNGAN								
	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi	persen	92,86	94,29	94,88	95,19	95,45	100	Belum Tercapai
	Persentase angkutan umum yang laik jalan		88,27	89,69	91,12	92,54	96,81	100	Belum Tercapai
	Persentase angkutan sungai dan danau yang laik layar	persen	57,53	60,27	63,01	65,75	68,49	100	Belum Tercapai
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Jumlah SKPD yang terkoneksi dengan intranet ke Server Center Diskominfo	SKPD	1	9	19	29	38	100	Belum Tercapai
	Jumlah Aplikasi e-Government yang berfungsi dengan baik	Aplikasi	5	15	25	35	38	100	Belum Tercapai
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	SKPD	100	100	100	100	100	100	sesuai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
	Persentase Koperasi Aktif	Persen	97,45	98,09	98,73	99,37	100	100	Belum Tercapai
	persentase SDM Koperasi aktif yang berkualitas	Persen	31,21	41,63	52,05	62,46	72,88	100	Belum Tercapai
	persentase SDM Usaha Kecil yang berkualitas	Persen	10,5	23	30,5	38	45,5	100	Belum Tercapai
2.12	PENANAMAN MODAL								
	Realisasi Investasi PMDN	Rupiah	580.000.000.000	600.000.000.000	650.000.000.000	700.000.000.000	770.000.000.000	100	Belum Tercapai
	Persentase kepatuhan investor terhadap per Undang-undangan.	Persen	55	75	90	100	100	100	Sesuai
	Persentase pemenuhan aspek penyelenggaraan pelayanan publik minimal baik (B)	Nilai	4,51	4,60	4,65	4,80	5,00	100	Belum Tercapai
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
	Persentase pemuda berprestasi dari unsur organisasi kepemudaan & pemuda berprestasi bidang kepaskibrakaan	Persen	77,78	88,89	88,89	100	100	100	Belum Tercapai
	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali pada POPDA tingkat provinsi	Persen	31,25	43,75	53,13	59,38	71,88	100	Belum Tercapai
2.14	STATISTIK								
	Persentase Dokumen aktif statistik sektoral yang tersedia	Persen	-	-	-	-	75	100	Belum Tercapai
2.15	PERSANDIAN								
	Persentase Informasi dari Pemerintah Daerah yang terproteksi dari Penyalahgunaan Pemberitaan	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	KEBUDAYAAN								
	Persentase tingkat pengembangan seni dan budaya	Persen	42,26	52,28	62,57	71	84,1	100	Belum Tercapai
2.17	PERPUSTAKAAN								
	Persentase Peningkatan bahan Pustaka	Persen	20	40	60	80	100	100	Belum Tercapai
	Persentase Jangkauan Layanan Perpustakaan	Persen	93,2	94,11	96,11	97,57	100	100	Belum Tercapai
	Persentase Perpustakaan Desa dan Kelurahan yang aktif	Persen	27,39	34,24	41,09	47,94	54,79	100	Belum Tercapai
2.18	KEARSIPAN							100	
	Persentase OPD yang mengelola Arsip	Persen	39,47	52,63	65,78	78,95	92,1	100	Belum Tercapai
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3.1.1	Produksi perikanan budidaya	Ton	4.791	5.270	5.797	6.376	7.014	-	Belum Tercapai
3.1.2	Produksi perikanan tangkap	Ton	9.579	10.058	10.863	12.057	13.625	-	Belum Tercapai
3.1.3	Persentasi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	Persen	3	5	5,5	6	7	-	Belum Tercapai
3.1.4	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	Persen	1	7	9	12	15	-	Belum Tercapai
3.2	PARIWISATA								
3.2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	orang/ wisatawan	255.470	268.244	268.244	295.739	310.526	-	Belum Tercapai
3.2.2	Jumlah kunjungan wisatawan	orang/ wisatawan	255.470	268.244	268.244	295.739	310.526	-	Belum Tercapai
	Lama tinggal wisatawan (Length of Stay)	malam	1,5	1,7	2	2,5	2,7	-	Belum Tercapai
3.3	PERTANIAN								Belum Tercapai
3.3.1	Produksi Padi	ton	242707	247335	253.506	255.048	258.133	-	Belum Tercapai
3.3.2	Produksi Jagung	ton	5.035	5.038	5.041	5.073	5.102	-	Belum Tercapai
3.3.3	Produksi Kacang Tanah	ton	530	533	539	542	545	-	Belum Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.4	Produksi Karet	ton	131.416	131.744	132.403	133.065	133.730	-	Belum Tercapai
3.3.5	Produksi Kayu Manis	ton	20.240	20.443	20.647	20.854	21.062	-	Belum Tercapai
3.3.6	Produksi Kelapa	ton	7.483	7.501	7.520	7.534	7.557	-	Belum Tercapai
3.3.7	Produksi Aren	ton	240,6	241,2	241,8	242,4	243	-	Belum Tercapai
3.3.8	Produksi Cabe	ton	5.976	6.036	6.096	6.156	6.216	-	Belum Tercapai
3.3.9	Produksi Tomat	ton	3.816	3.886	3.956	4.026	4.096	-	Belum Tercapai
3.3.10	Produksi Bawang Merah	ton	48	60	72	84	96	-	Belum Tercapai
3.3.11	Jumlah populasi ternak besar (sapi + kerbau)	ekor	6.840	7.040	7.100	7.375	7.375	-	Belum Tercapai
3.3.12	Jumlah populasi ternak kecil (kambing)	ekor	2.824	2.916	2.998	3.184	3.184	-	Belum Tercapai
3.3.13	Jumlah populasi ternak unggas (ayam ras+ayam broiler+itik)	ekor	3.014.446	3.015.781	3.018.429	3.019.791	3.019.791	-	Belum Tercapai
3.3.14	Terkendalnya kasus zoonosis	Ekor	7.037	7.137	7.237	7.337	7.437	-	Belum Tercapai
3.3.15	Persentase pengurangan hasil	Persen	0	0	0	0	0	0	Sesuai
3.3.16	Penambahan jumlah alat pasca panen	buah	5	10	15	20	25	-	Belum Tercapai
3.3.17	Kenaikan Kelas Kelompok Tani	kelas	4	4	4	4	4	-	Belum Tercapai
3.3.18	Jumlah pengembangan optimasi lahan dan pemulihan kesuburan tanah	ha	6.937	7.037	7.137	7.237	7.337	-	Belum Tercapai
3.4	KEHUTANAN								
3.5	SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERGI								
3.6	PERDAGANGAN								
3.6.1	Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal	Persen	11,05	9,54	8,06	6,61	5,19	100	Belum Tercapai
3.6.2	PAD sub sektor perdagangan (kemetrolgian)	Rupiah	35 jt	38 jt	41 jt	44 jt	45 jt	100	Belum Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6.3	Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Persen	97,42	97,43	97,44	97,45	97,46	100	Belum Tercapai
3.6.4	PAD sub sektor perdagangan (pelayanan pasar)	Rupiah	4,2M	4,3 M	4,4 M	4,5 M	4,6 M	-	Belum Tercapai
3.7	PERINDUSTRIAN								
3.7.1	Persentase produk industri yang bersertifikasi mutu	Persen	4,18	6,96	9,75	12,54	15,32	100	Belum Tercapai
3.7.2	Persentase Peningkatan Kapasitas Produk Industri Kecil	Persen	5,58	11,16	16,74	22,32	27,9	100	Belum Tercapai
3.7.3	Persentase Pengembangan Sentra Industri	persen	-	8,5	18	27	34	100	Belum Tercapai
IV	FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH								
4.1	SEKRETARIAT PADA PERANGKAT DAERAH								
4.1.1	Indeks kepuasan pelayanan	Indeks	82	82	83	83	84	82	Melampaui
4.1.2	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Nilai	79,41	82,55	83,79	86,42	89,06	100	Belum Tercapai
4.1.3	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Nilai	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.2	KECAMATAN								
4.2.1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya dilaksanakan dengan baik.	persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.3	PENGAWASAN								
4.3.1	Persentase Penurunan Temuan Bersifat Keuangan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS	Persen	36	25	23	20	18	0	Belum Tercapai
4.3.2	persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.3	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	Persen	64	75	77	80	82	100	Belum Tercapai
4.3.4	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.3.5	Persentase APIP yang memiliki Standar Kompetensi Jabatan	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.3.6	Persentase SOP Sesuai Standar.	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.3.7	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.4	SEKRETARIAT DPRD								
4.4.1	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.4.2	Persentase Fasilitasi Keluhan / Pengaduan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.4.3	Indeks Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.6	SEKRETARIAT DAERAH								
4.6.1	Nilai LPPD	Nilai	3,1173	3,1746	3,2100	3,2376	3,264	3,264	Sesuai
4.6.2	Persentase peningkatan administrasi pemerintahan dan kewilayahan	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.6.3	Persentase produk hukum daerah yang berkualitas	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.6.4	Persentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.6.5	Nilai / Predikat AKIP pada komponen pelaporan	Nilai	A	A	A	A	A	A	Sesuai
4.6.6	Jumlah inovasi yang lolos nasional	Jumlah	3	3	3	3	3	3	Sesuai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.6.7	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.6.8	Indeks kepuasan Pelayanan Pimpinan Daerah	Indeks	82	83	84	85	86	86	Sesuai
4.6.9	Indeks kepuasan Pelayanan Pimpinan Daerah	Indeks	82	83	84	85	86	86	Sesuai
4.6.10	Persentase PD yang melaksanakan PBJ melalui ULP	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.6.11	Persentase Pemenuhan Peningkatan standardisasi Sistem LPSE	Persen	70,59	88,24	100	100	100	100	Sesuai
4.6.12	Persentase policy brief bidang perekonomian dan Pembangunan yang dimanfaatkan Bupati	Persen	75	100	100	100	100	100	Sesuai
4.6.13	Persentase kerjasama pemerintah daerah yang diimplementasikan	Persentase	20	40	60	80	100	100	Sesuai
4.5	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								
4.5.1	Tingkat keselarasan terhadap dokumen perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.5.2	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	Persen	80	90	95	95	100	100	Sesuai
4.5.3	Persentase capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan daerah	Persen	90	90	90	90	90	100	Belum Tercapai
4.5.4	Persentase rekomendasi hasil perencanaan pembangunan sektoral yang ditindaklanjuti untuk kebijakan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.6	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
4.6.1	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti untuk kebijakan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.7	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
4.7.1	Jumlah Peningkatan Realisasi pajak daerah non PBB dan BPHTB	Rupiah	21.856.817.666	23.006.463.203	24.214.159.063	25.482.813.442	26.815.480.005	26.815.480.005	Sesuai
4.7.2	Jumlah Peningkatan Realisasi PBB-P2 dan BPHTB	Rupiah	1.420.116.328	1.434.317.491	1.448.660.666	1.463.147.273	1.477.778.746	1.477.778.746	Sesuai
4.7.3	Lama Waktu Penyusunan RAPBD	Bulan	7	7	7	7	7	7	Sesuai
4.7.4	Persentasi Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.7.5	Persentasi Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.7.6	Kesesuaian Data Total Neraca BMD dengan Neraca Keuangan	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.8	PENANGGULANGAN BENCANA								
4.8.1	Persentase pemenuhan prasarana penanggulangan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.8.2	Rata-rata tingkat waktu tanggap	Waktu	<1 Jam	<1 Jam	<1 Jam	<1 Jam	<1 Jam	<1 Jam	Sesuai
4.9	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
4.9.1	Cakupan kemitraan dengan kelembagaan organisasi masyarakat yang terdaftar	Persen	71	72	73	74	75	100	Belum Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.10	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
4.10.1	Persentase JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) yg melakukan kebijakan promosi terbuka untuk JPT sesuai dengan undang-undang ASN	Persen	37,5	18,75	9,38	18,75	28,13	100	Belum Tercapai
4.10.2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	Persen	64,33	67,67	71	72,67	74,5	100	Belum Tercapai
4.10.3	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	Persen	43,55	46,78	50,37	54,32	56,84	100	Belum Tercapai
4.10.4	Persentase tingkat penurunan pelanggaran disiplin PNS	Persen	20	20	20	20	20	100	Belum Tercapai
4.10.5	Persentase formasi jabatan pelaksana yang terisi sesuai kompetensi dan kualifikasi	Persen	91	93	95,5	97,5	100	100	Sesuai
4.10.6	Persentase Database PNS pada SAPK dan SIMPEG yang Update	Persen	89,5	92	94,8	97,5	100	100	Sesuai
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1.	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kelompok Makanan	rupiah	-	-	437.091	510.074	523.827	520.600	Melampaui
2.	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kelompok Non Makanan	rupiah	-	-	354.976	435.285	389.006	385.000	Melampaui
3.	Produktivitas Total Daerah	Persen	65	73,2	82,15	87,6	98	100	Belum Tercapai
4.	Ketaatan Terhadap RTRW	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sesuai
5.	Luas wilayah produktif	ha	112.263,61	112.263,61	121.310,52	121.310,52	121.310,52	121.310,52	Sesuai
6.	Luas wilayah perkotaan	Persen	2.138	2.138	2.138	3.064	8.947,52	8.947,52	Sesuai
7.	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	Orang	166.860	108.000	120.825	108.010	95.725	95.725	Sesuai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	3.520	3.320	3.633	2.794	3.208	3.208	Sesuai
9.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jumlah	10	12	14	17	20	20	sesuai
10.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang	Jumlah	1	2	2	2	3	11	BeLum Tercapai
11.	Jenis. Kelas. dan Jumlah Penginapan/Hotel	Jumlah	19	20	20	20	20	25	BeLum Tercapai
12.	Angka kriminalitas	Jumlah	395	290	148	214	232	0	Belum Tercapai
13.	Jumlah demonstrasi	Kali	7	5	0	0	0	0	Sesuai
14.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	macam	9	10	10	10	10	10	Sesuai
15.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	perda	1	1	1	1	1	1	Sesuai
16.	Rasio Ketergantungan	persen	50,38	50,21	50,06	49,87	49,67	25	Belum Tercapai

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam:

- (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2018, proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah

mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada periode di setiap tahun tersebut.

3.1.1 Pendapatan daerah

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode tahun 2014-2018, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 (Rupiah)

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
2014	85.095.560.247,13	909.876.489.441,13	9,35%
2015	101.673.712.146,28	1.127.291.876.404,28	9,02%
2016	115.118.953.303,00	1.419.363.905.565,00	8,11%
2017	142.495.389.593,66	1.143.549.114.799,66	12,46%
2018)*	148.089.290.190,42	1.302.970.322.831,42	11,37%
Rata-rata	118.494.581.096,10	1.180.610.341.808,30	10,06%

Sumber: Bakeuda Kab Hulu Sungai Selatan

Apabila dihitung prosentase pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan keseluruhan, tampak bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong sangat kecil yaitu rata-rata 10,06 persen. Namun pada Tahun 2017 terlihat pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal yang cukup signifikan, yaitu sebesar 12,46%. Keadaan ini salah satunya dipicu oleh masuknya komponen dana BOS yang dikelola oleh sekolah dalam APBD. Begitu juga dengan obyek PAD yang lain juga meningkat meskipun tidak signifikan. Di samping itu juga, faktor penyebab lainnya adalah berkurangnya alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Tabel 3.2 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun					RATA-RATA
	2014	2015	2016	2017	2018)*	
Pendapatan	909.876.489.441,13	1.127.291.876.404,28	1.419.363.905.565,00	1.143.549.114.799,66	1.302.970.322.831,42	8,64%
Pendapatan Asli Daerah	85.095.560.247,13	101.673.712.146,28	115.118.953.303,00	142.495.389.593,66	148.089.290.190,42	14,81%
Pajak Daerah	8.891.994.412,00	10.042.491.534,00	10.804.199.022,00	11.313.216.077,00	12.600.484.089,00	8,34%
Hasil Retribusi Daerah	9.542.429.034,00	7.538.477.605,00	8.250.374.185,00	9.799.649.224,00	12.000.576.046,00	5,15%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.221.701.769,00	5.789.715.300,00	4.809.249.871,00	6.920.129.530,00	7.793.951.775,00	9,85%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	61.439.435.032,13	78.303.027.707,28	91.255.130.225,00	114.462.394.762,66	115.694.278.280,42	17,66%
Dana Perimbangan	677.656.242.582,00	805.326.495.349,00	1.076.277.564.791,00	819.334.317.451,00	944.483.236.729,00	7,87%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	151.279.534.582,00	166.692.158.349,00	308.691.558.590,00	147.858.503.157,00	235.045.158.306,00	11,07%
Dana Alokasi Umum	478.093.768.000,00	482.751.537.000,00	532.162.390.000,00	522.814.008.000,00	522.814.008.000,00	1,87%
Dana Alokasi Khusus	48.282.940.000,00	155.882.800.000,00	235.423.616.201,00	148.661.806.294,00	186.624.070.423,00	57,30%
Lain-Lain Pendapatan Sah	147.124.686.612,00	220.291.668.909,00	227.967.387.471,00	181.719.407.755,00	210.397.795.912,00	8,60%
Pendapatan Hibah	1.890.411.322,00	5.158.463.403,00	5.627.213.533,00	3.398.436.590,00	274.382.800,00	-17,10%
Dana bagi hasil pajak dari provinsi	71.280.334.290,00	64.229.332.506,00	53.715.896.938,00	59.733.160.165,00	69.353.577.312,00	-0,54%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	71.453.941.000,00	150.903.873.000,00	168.624.277.000,00	118.587.811.000,00	140.769.835.800,00	19,40%
Bantuan Keu dari Provinsi	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00		-20,00%

Sumber: Bakeuda Kab Hulu Sungai Selatan ()*=angka sementara 23 Januari 2019)

Dari tabel di atas tampak bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong baik yaitu rata-rata 8,64 persen. Namun pertumbuhan pendapatan ini terlihat fluktuatif. Pada Tahun 2015 dan Tahun Anggaran 2016 pertumbuhan pendapatan terjadi cukup signifikan, yaitu sebesar 23,90% dan 25,91%. Namun pada Tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 19,43%.

Pertumbuhan pendapatan yang terbesar terjadi pada Tahun 2015 dan 2016, yaitu sebesar 23,90% dan 25,91%. Pada Tahun 2015 kenaikan yang signifikan disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat memberikan dana desa yang penyalurannya melalui APBD serta DAK Tambahan Usulan Daerah yang disetujui oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pada Tahun 2016 penyebabnya adalah mulai masuknya dana alokasi khusus non fisik dalam APBD, peningkatan DAU dan dana bagi hasil bukan pajak (*royalty*) dari pemerintah pusat (pembayaran kurang salur tahun-tahun sebelumnya) serta meningkatnya dana desa yang bersumber dari APBN.

Pada Tahun 2017 terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar 19,43% dibanding tahun sebelumnya. Kejadian ini disebabkan menurunnya alokasi DAK Fisik untuk infrastruktur jalan dan infrastruktur pemerintah daerah dibanding tahun 2016. Dimana pada Tahun 2016 DAK ini mendapat alokasi sebesar 205,6 Milyar, sedangkan pada Tahun 2017 menjadi 28 Milyar. Selain itu penurunan juga dipicu oleh penurunan DAU dan dana bagi hasil *royalty* penambangan batu bara.

3.1.2 Belanja Daerah

Secara umum komponen belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun					RATA-RATA
	2014	2015	2016	2017	2018)*	
Belanja	887.367.010.036,00	1.234.231.773.339,00	1.326.611.609.684,94	1.205.337.311.342,03	1.252.423.781.733,34	8,23%
Belanja Tidak Langsung	493.639.120.863,00	609.331.319.541,00	690.449.026.595,54	679.929.055.257,00	671.271.510.324,00	7,20%
Belanja Gaji	439.294.841.906,00	468.762.176.194,00	492.066.553.586,00	445.081.857.551,00	448.556.303.146,00	0,42%
Belanja Subsidi		4.423.320.000,00	4.388.088.000,00	3.945.384.000,00	0,00	0
Hibah	10.706.215.500,00	11.257.499.500,00	10.134.217.000,00	22.108.510.000,00	23.305.513.986,00	23,54%
Bantuan Sosial	17.186.173.250,00	17.852.053.500,00	20.114.417.500,00	28.895.189.400,00	20.077.652.500,00	3,36%
Bagi Hasil kepada Pemdes	1.221.146.060,00	1.454.306.186,00	1.749.992.600,00	1.962.372.000,00	2.284.000.000,00	17,41%
Bantuan Keuangan Pada Pemdes dan Parpol	25.230.744.147,00	105.575.828.337,00	161.826.064.149,54	177.935.742.306,00	176.962.925.292,00	120,28%
Belanja Tidak Terduga	0,00	6.135.824,00	169.693.760,00	0,00	85.115.400,00	0
Belanja Langsung	393.727.889.173,00	624.900.453.798,00	636.162.583.089,40	525.408.256.085,03	581.152.271.409,34	9,52%
Belanja Pegawai	25.176.402.092,00	36.106.770.609,00	21.595.868.761,00	30.834.913.878,00	36.431.611.483,00	8,94%
Belanja Barang dan Jasa	149.399.528.193,00	193.499.347.401,00	240.287.130.409,00	258.044.234.379,03	282.635.821.759,00	17,84%
Belanja Modal	219.151.958.888,00	395.294.335.788,00	374.279.583.919,40	236.529.107.828,00	262.084.838.167,34	3,92%

Sumber : Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan ()*=angka sementara 23 Januari 2019)

Pertumbuhan pendapatan dan belanja idealnya beriringan. Namun adanya perbedaan pertumbuhan antara pendapatan dan belanja tersebut dipengaruhi oleh pencapaian realisasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini akan terkait dengan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang kemudian dikumulasikan untuk menambah belanja pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan juga sehat. Salah satunya dengan cara menurunkan deviasi anggaran dan realisasi. Dimana muaranya akan berpengaruh pada prosentase SiLPA pada akhir tahun. Dan yang lebih penting lagi adalah memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dianggarkan mempunyai sumber dana yang cukup, sehingga tidak terjadi defisit transaksi berjalan yang mengakibatkan daerah tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertumpu pada alokasi anggaran yang berazaskan keadilan, dimana keadilan merupakan misi utama dalam melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran belanja telah dilakukan dengan baik. Selain itu dalam pengelolaan belanja daerah juga dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, hal ini dapat dilihat dari manfaat anggaran yang dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, maka dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2018, juga terdapat pembiayaan daerah yang pada dasarnya merupakan transaksi keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menutup defisit anggaran. Secara umum komponen pembiayaan terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta

Pada tabel berikut disajikan perkembangan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2014-2018:

Tabel 3.4 Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	RATA-RATA
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
Pembiayaan	196.889.211.218,00	205.330.724.935,13	102.029.717.976,41	191.704.557.856,47	137.961.811.314,10	-5,99%
Penerimaan Pembiayaan	211.976.212.034,00	222.827.724.935,13	124.522.217.976,41	195.304.557.856,47	137.961.811.314,10	-6,98%
SILPA	209.493.478.459,00	219.398.690.623,13	98.390.828.000,41	194.782.013.856,47	129.916.361.314,10	-7,60%
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	269.185.825,00	3.270.508.750,00	26.004.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-19,78%
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	158.525.562,00	127.389.976,00	35.694.000,00	42.450.000,00	0
Penerimaan hasil investasi non permanen	0,00	0,00	0,00	486.850.000,00	0,00	0
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2.213.547.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00%
Pengeluaran Pembiayaan	15.087.000.816,00	17.497.000.000,00	22.492.500.000,00	3.600.000.000,00	-	-20,00%
Pembentukan Dana Cadangan	-	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	-	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.000.000.816,00	14.497.000.000,00	17.492.500.000,00	3.600.000.000,00	-	-20,00%
Pemberian Pinjaman Daerah	3.087.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-20,00%
SILPA	219.398.690.623,13	98.390.828.000,41	194.782.013.856,47	129.916.361.314,10	188.508.352.412,18	-2,82%

Sumber : Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan ()*=angka sementara 23 Januari 2019)

Realisasi pembiayaan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2014-2018 fluktuatif. Pada Tahun Anggaran 2015 dan 2017 terjadi kenaikan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 dan 2018 mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan pembiayaan ini dipengaruhi oleh Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Dan hal ini sangat terkait dengan realisasi dari pendapatan dan belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai saat ini belum pernah melakukan hutang daerah. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko beban APBD di masa yang akan datang dan tidak ingin hutang daerah itu akan membebani pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa faktor penyebab mengapa SiLPA di Kabupaten Hulu Sungai relatif tinggi seperti karena adanya kenaikan yang cukup signifikan pada pendapatan dana bagi hasil dalam rangka pembayaran hutang pemerintah pusat pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pendapatan untuk tunjangan profesi guru yang belum habis tersalurkan dengan besaran cukup signifikan pada tahun yang bersangkutan pada TA.2016 sehingga mempengaruhi besaran SiLPA untuk TA.2017.

Khusus untuk belanja langsung pada TA 2014 sampai dengan TA. 2015 agregat antara anggaran dan realisasi masih di atas 10%. Namun pada Tahun Anggaran 2016 dan 2018 SiLPA sudah di bawah 10%. Dengan demikian pada tahun-tahun terakhir RPJMD 2014-2018 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), terutama untuk belanja langsung sudah relatif rendah di bawah 10%. Hal ini mengindikasikan proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah mulai membaik. Namun hal ini harus terus mendapat perhatian, terutama terkait efektifitas dan efisiensi APBD agar bisa menjadi lebih baik, stabil, dan ideal. Sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sehat.

3.1.4 Neraca Daerah

Neraca Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2017 mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan neraca ini terutama terkait dengan jumlah aset yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode tahun 2013 sampai 2017. Total aset dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami kenaikan dari semula Rp2.312.605.220.548,54 menjadi Rp 2.591.718.417.088,37.

Tabel 3.5 Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	ASET	2.312.605.220.548,54	2.553.001.822.919,36	2.230.223.904.849,67	2.610.035.459.283,53	2.591.718.417.088,37
	Aset Lancar	250.534.652.355,86	256.909.616.074,88	141.123.888.485,71	243.521.551.878,46	166.736.575.305,30
	Investasi Jangka Panjang	76.005.634.061,10	87.895.875.414,10	98.331.538.108,10	85.932.060.478,10	87.979.007.518,10
	Aset Tetap	1.985.116.553.151,47	2.198.777.245.081,27	1.987.349.181.412,89	2.225.155.244.126,69	2.326.971.482.700,97
	Dana Cadangan	0,00	0,00	3.033.534.245,74	8.000.000.000,00	8.267.656.255,00
	Aset Lainnya	948.380.980,11	9.419.086.349,11	385.762.597,23	47.426.602.800,28	1.763.695.309,00
2	HUTANG	25.088.634.928,00	7.767.012.102,00	10.746.293.000,00	18.318.738.983,00	13.599.301.578,00
	Hutang Jangka Pendek	25.088.634.928,00	7.767.012.102,00	10.746.293.000,00	18.318.738.983,00	13.599.301.578,00
	Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EKUITAS DANA	2.287.516.585.620,54	2.545.234.810.817,36	2.219.477.611.849,67	2.591.716.720.300,53	3.772.999.084.313,45
	Total Hutang Dan ekuitas Dana	2.312.605.220.548,54	2.553.001.822.919,36	2.230.223.904.849,67	2.610.035.459.283,53	3.786.598.385.891,45

Sumber: Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan

3.1.5 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam suatu wilayah administrasi merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut bertanggungjawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (BAKEUDA) dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing SKPD.

Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2014-2017, BAKEUDA menyusun laporan keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap SKPD dan dikoordinir oleh BAKEUDA yang mengemban fungsi sebagai SKPKD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh BAKEUDA sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh BAKEUDA.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikatakan telah mencapai target dengan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari positifnya hasil opini audit BPK Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

Tahun Terperiksa	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2013	Wajar Tanpa Pengecualian
2014	Wajar Tanpa Pengecualian
2015	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : Bakeuda Kabupaten Hulu Sungai Selatan

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Arah Kebijakan Keuangan

Berdasarkan dinamika kebutuhan masyarakat, pencapaian visi dan misi daerah, serta kebijakan Pemerintah Pusat, maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah pada RPJMD yang lalu ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah agar memperkuat kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, melalui upaya ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi penerimaan daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah agar mampu mengembangkan kreatifitas, inisiatif, kemampuan, dan memiliki motivasi yang kuat dalam menggali potensi dan sumber-sumber baru yang ada dalam meningkatkan penerimaan asli daerah dan mengelola keuangan daerah secara optimal, efisien dan efektif dan menghindari kebocoran.
- 3) Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah, agar lebih dimanfaatkan secara tepat waktu, tepat sasaran dan efisien.
- 4) Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro yang mampu meningkatkan dan mendorong pertumbuhan serta perkembangan usaha ekonomi masyarakat kecil secara merata.

Arah kebijakan belanja lebih ditekankan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat. Arah kebijakan belanja daerah meliputi :

- 1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi urusan wajib pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan social dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangundangan sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah.
- 2) Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada SKPD yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD).
- 3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dimana semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
- 4) pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
- 5) Anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.
- 6) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap SKPD serta pemeliharaan aset daerah melalui pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, diktum keenam, yang menginstruksikan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) agar melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap SKPD serta pemeliharaan aset daerah melalui pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, diktum keenam, yang menginstruksikan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) agar melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.

Kebijakan pendapatan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah yang diarahkan pada :
 - a) Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b) Pendekatan intensifikasi dalam bentuk perubahan regulasi guna peningkatan nilai objek pajak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
 - c) Peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang dibarengi dengan penerapan akuntabilitas dan pemantapan kinerja pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan dalam bentuk insentif, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
 - d) Perbaikan kinerja dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang efisien, efektif dan akuntabel dalam rangka peningkatan kontribusi laba terhadap pendapatan asli daerah.
 - e) Kebijakan pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang dikelola secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Konsep bagi hasil atas perimbangan keuangan Pusat dan Daerah memerlukan langkah-langkah pro aktif Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam :
 - a) Melakukan pemantauan, pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Provinsi.
 - b) Berkoordinasi serta melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan dengan

Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.

3. Upaya untuk memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada meningkatkan penyediaan data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Berdasarkan kebijakan DAK, terdapat beberapa bidang yang memiliki potensi memperoleh alokasi DAK meliputi : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Keluarga Berencana; (4) Infrastruktur Jalan; (5) Infrastruktur Irigasi; (6) Infrastruktur Air Minum; (7) Infrastruktur Sanitasi; (8) Prasarana Pemerintahan Daerah; (9) Kelautan dan Perikanan; (10) Pertanian; (11) Lingkungan Hidup; (12) Kehutanan; (13) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal; (14) Sarana Perdagangan; (15) Transportasi Perdesaan; (16) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; (17) Listrik Perdesaan; (18) Perumahan dan Permukiman; serta (19) Keselamatan Transportasi Darat.
4. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008, yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk tunjangan profesi guru (TPG), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Dana Insentif Daerah terutama ditujukan kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria keuangan dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, dana tambahan untuk TPG sejalan dengan telah ditetapkan PP Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen. Dana tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian kebijakan terhadap belanja daerah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui :

1. Pengalokasian belanja wajib mengikat yaitu besaran belanja tidak langsung kelompok belanja pegawai dengan memperhitungkan adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan penambahan formasi CPNS. PNS Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan pembangunan pedesaan dan peningkatan kinerja aparatur desa melalui Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta kelembagaan masyarakat desa termasuk.
3. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa diarahkan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan pemerintah dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Belanja bantuan sosial diarahkan dalam rangka pemberdayaan organisasi/ kelompok/ anggota masyarakat yang diarahkan pada penguatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, pembinaan kehidupan beragama yang secara nyata mendukung pencapaian IPM serta secara teknis dilakukan melalui mekanisme pengujian atas kelayakan proposal.
5. Belanja Subsidi diarahkan khususnya kepada lembaga pendidikan dasar dan menengah sebagai upaya mengurangi biaya pendidikan siswa serta dalam rangka akselerasi pencapaian wajib belajar 9 tahun.
6. Belanja Hibah diarahkan dalam rangka penguatan fungsi lembaga/ badan, perusahaan daerah maupun organisasi kemasyarakatan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Selanjutnya kebijakan terhadap pembiayaan daerah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui :

- 1) Pembiayaan daerah merupakan instrument Pemerintah Kabupaten HSS dalam menutup defisit maupun menggunakan surplus APBD.
- 2) Jika APBD defisit maka Pemerintah Kabupaten HSS memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
- 3) Jika APBD surplus maka Pemerintah Kabupaten HSS memanfaatkannya seperti untuk penyertaan modal dan investasi serta pembentukan dana cadangan.
- 4) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan saat ini menghindari untuk melaksanakan hutang daerah sebagai penutup defisit APBD.
- 5) Jika instrumen pembiayaan selain hutang tidak mampu menutupi defisit APBD, maka Pemerintah Kabupaten HSS akan mengupayakan rasionalisasi belanja dan pengeluaran daerah.

3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi realisasi antara belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap belanja daerah sejak tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

Tahun	Belanja Tidak langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Total (Rp)	Proporsi BTL terhadap Total APBD(%)	Proporsi BL terhadap Total APBD(%)
2014	493.639.120.863,00	393.727.889.173,00	887.367.010.036,00	55,63%	44,37%
2015	609.331.319.541,00	624.900.453.798,00	1.234.231.773.339,00	49,37%	50,63%
2016	690.449.026.595,54	636.162.583.089,40	1.326.611.609.684,94	52,05%	47,95%
2017	679.929.055.257,00	525.408.256.085,03	1.205.337.311.342,03	56,41%	43,59%
2018)*	671.271.510.324,00	581.152.271.409,34	1.252.423.781.733,34	53,60%	46,40%

Sumber : Bakeuda Kabupaten HSS ()*=angka sementara 23 Januari 2019)

Berdasarkan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan penggunaan anggaran belanja antara lain:

- a) Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tak langsung) dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap tahunnya rata-rata masih diatas 50% dari total belanja daerah, kecuali pada TA.2015 yang sedikit berada di bawah 50% yaitu sebesar 49,37%. Sementara arah yang diinginkan secara nasional mengenai proporsi belanja untuk lebih didominasi oleh pemenuhan kebutuhan di luar belanja untuk aparatur, terutama belanja modal dan infrastruktur.
- b) Faktor penyebab yang melatar belakangi masih dominannya proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tak langsung) antara lain karena di dalam belanja tak langsung teralokasi belanja bantuan sosial, belanja hibah, serta masih belum optimalnya pemanfaatan potensi serta rendahnya realisasi PAD menyebabkan masih sebagian besar alokasi DAU diserap untuk memenuhi kebutuhan belanja tak langsung khususnya pada belanja wajib, sehingga alokasi belanja langsung menjadi sangat terbatas.
- c) Tingginya potensi PAD yang bila dimanfaatkan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD, serta semakin terbukanya sistem perekonomian daerah untuk pengembangan perekonomian lokal di masa datang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih berpeluang diwujudkan.

Selain hal-hal yang diuraikan di atas, Pemerintah abupaten Hulu Sungai Selatan akan berupaya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban daerah yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pemenuhan alokasi belanja sebesar 20% dari pendapatan untuk urusan pendidikan.
2. Pemenuhan alokasi belanja langsung sebesar 10% dari pendapatan untuk urusan kesehatan
3. Pemenuhan alokasi dana desa yang berasal dari APBD sekurangnya 10% dari dana perimbangan (selain DAK).
4. Pemenuhan belanja infrastruktur yang berkaitan langsung dengan masyarakat sebesar 25% dari dana alokasi umum dan dana perimbangan dikurangi alokasi dana desa dari APBD.

5. Peningkatan alokasi untuk belanja modal yang diupayakan sampai dengan 20% dari total APBD.

3.3 Kerangka Pendanaan

Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Pendanaan program kegiatan yang diakomodir dalam periode tahun 2019-2023 sangat penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2019-2023.

3.3.1 Proyeksi Penerimaan Daerah

Keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah selama ini sangat dipengaruhi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal ini terkait dengan derajat fiskal daerah yang memang masih kecil. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan roda pembangunan di daerah masih tergantung pada kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan dana perimbangan. Karena itulah maka pertumbuhan pendapatan asli daerah harus menjadi salah satu prioritas dalam rangka meningkatkan derajat fiskal daerah. Diharapkan di tahun-tahun mendatang pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam APBD. Pertumbuhan pendapatan asli daerah yang baik pada lima tahun sebelumnya merupakan sebuah trend yang sangat baik. Hal ini akan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka meningkatkan derajat fiskal daerah.

Tren pertumbuhan pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan. Pertimbangan secara optimis dan hati-hati akan menghasilkan sebuah proyeksi yang realistis dan diharapkan akan mendekati

kenyataan. Pendapatan daerah dalam kurun waktu 2019-2023 diperkirakan akan tumbuh disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini serta fluktuasi perdagangan komoditi batu bara. Dalam hal ini ada beberapa asumsi yang dipakai dalam melakukan proyeksi keuangan daerah dalam kurun waktu 2019-2023, yaitu:

1. Pendapatan asli daerah diasumsikan rata-rata tumbuh setiap tahunnya sekitar 5%.
2. Pada Tahun Anggaran 2020 ada penurunan pada jenis pendapatan retribusi daerah yang diasumsikan dengan berpindahnya proyeksi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Daha Sejahtera ke objek pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dimana ini disebabkan asumsi pemberlakuan PPK-BLUD.
3. Pendapatan dana perimbangan pada jenis pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak dan dana alokasi umum diasumsikan tumbuh sekitar 4%.
4. Pendapatan dana perimbangan pada jenis dana alokasi khusus diasumsikan flat selama lima tahun anggaran. Hal ini dilakukan dengan melihat perkembangan yang terjadi selama lima tahun ke belakang, dimana alokasi pendapatan ini fluktuatif tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan melimpahkan urusan dan programnya ke daerah. Dengan alokasi yang tetap akan memudahkan daerah dalam melakukan penyesuaian pendapatannya.
5. Pendapatan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi diasumsikan tumbuh rata-rata 4% setiap tahunnya.
6. Dana insentif daerah diasumsikan flat sebesar dua puluh milyar rupiah setiap tahunnya.
7. Dana desa dari APBN diasumsikan tetap setiap tahunnya, karena dana ini merupakan dana yang otomatis akan berimbang dengan belanjanya.
8. Sisa lebih perhitungan anggaran diasumsikan sekitar 2% dari pelampauan target penerimaan tahun anggaran sebelumnya dan 5% sampai dengan 7% dari efisiensi pengeluaran tahun anggaran sebelumnya.

Berikut proyeksi penerimaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 2019-2023.

Tabel 3.8 Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019-2023

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pendapatan	1.315.557.442.000	1.359.966.229.000	1.402.456.203.000	1.446.730.842.000	1.492.865.785.000
Pendapatan Asli Daerah	158.400.259.000	149.770.759.000	158.277.395.000	167.209.363.000	176.587.928.000
Pajak Daerah	11.013.216.000	12.738.428.000	13.375.350.000	14.044.117.000	14.746.322.000
Retribusi Daerah	12.799.649.000	9.927.254.000	10.423.617.000	10.944.798.000	11.492.038.000
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	7.125.000.000	7.545.123.000	7.922.379.000	8.318.498.000	8.734.422.000
Lain-lain PAD yang sah	127.462.394.000	119.559.954.000	126.556.049.000	133.901.950.000	141.615.146.000
Dana Perimbangan	954.450.183.000	984.628.190.000	1.016.013.317.000	1.048.653.849.000	1.082.600.002.000
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	217.800.000.000	226.512.000.000	235.572.480.000	244.995.379.000	254.795.194.000
Dana Alokasi Umum	536.650.183.000	558.116.190.000	580.440.837.000	603.658.470.000	627.804.808.000
Dana Alokasi Khusus	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	202.707.000.000	225.567.280.000	228.165.491.000	230.867.630.000	233.677.855.000
Hibah	250.000.000	20.612.000.000	20.612.000.000	20.612.000.000	20.612.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya *)	62.457.000.000	64.955.280.000	67.553.491.000	70.255.630.000	73.065.855.000
Dana Desa	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
Dana Insentif Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan	187.000.000.000	131.490.169.000	116.386.708.000	118.879.698.000	122.571.249.000
SiLPA	187.000.000.000	131.490.169.000	116.386.708.000	118.879.698.000	122.571.249.000
	1.502.557.442.000	1.491.456.398.000	1.518.842.911.000	1.565.610.540.000	1.615.437.034.000
TOTAL JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.315.557.442.000	1.359.966.229.000	1.402.456.203.000	1.446.730.842.000	1.492.865.785.000

Sumber : Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan

3.3.2 Proyeksi Pengeluaran Daerah Yang Bersifat Wajib dan Mengikat

Proyeksi pengeluaran daerah selama Tahun Anggaran 2019-2023 diperhitungkan secara hati-hati. Selain melihat perkembangan realisasi selama lima tahun terakhir, proyeksi juga mencoba untuk memprediksi pengeluaran yang kemungkinan akan terjadi terkait dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat ini diasumsikan terangkum dalam kelompok belanja tidak langsung serta pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran ini diluar dari belanja yang diperuntukkan bagi program dan kegiatan SKPD pada kelompok belanja langsung.

Beberapa asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat pada Tahun Anggaran 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja pegawai diasumsikan meningkat sekitar 2% per-tahun.
2. Belanja hibah terutama diperuntukkan bagi organisasi-organisasi yang rutin menerima hibah untuk membantu program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti MUI, KONI, PMI, Pramuka, Baznas. Selain itu hibah diasumsikan untuk mensukseskan program pemberian dana bagi belanja operasional sekolah swasta di daerah.
3. Belanja bantuan sosial diasumsikan sebagai belanja yang disediakan untuk menyiapkan jaring pengaman social bagi masyarakat kurang mampu, seperti program rumah sejahtera, bantuan beasiswa siswa miskin dan yatim, serta keperluan hidup lainnya yang tujuannya untuk melindungi masyarakat dari bencana alam maupun bencana sosial.
4. Belanja bagi hasil pajak dan retribusi untuk desa diasumsikan sebesar 10% dari target pajak dan retribusi daerah.
5. Belanja bantuan keuangan untuk desa dan Parpol diasumsikan minimal sebesar 10% dari target pendapatan bagi hasil dari pemerintah pusat dan dana alokasi umum. Selain itu pula diperhitungkan besaran dana desa yang berasal dari APBN diproyeksikan sama dengan besaran pendapatannya.

Proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun Anggaran 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Perkiraan Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Belanja Tidak Langsung	790.063.305.000	806.447.107.000	821.157.634.000	835.973.508.000	861.154.516.000
Belanja Pegawai	549.500.000.000	560.490.000.000	571.699.800.000	583.133.796.000	594.796.471.000
Belanja Hibah	9.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	21.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	20.737.000.000	21.250.000.000	21.500.000.000	21.500.000.000	21.500.000.000
Belanja Bagi Hasil	2.381.287.000	2.266.568.000	2.379.897.000	2.498.892.000	2.623.836.000
Belanja Bantuan Keuangan	203.445.018.000	206.462.819.000	209.601.332.000	212.865.385.000	216.260.001.000
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Dana Cadangan	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
TOTAL JUMLAH PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT DAERAH	790.063.305.000	811.447.107.000	826.157.634.000	840.973.508.000	866.154.516.000

Sumber : Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan

3.3.3 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Dari perkiraan belanja gaji dan tunjangan serta belanja wajib dan mengikat tersebut dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil adalah dana yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan rumusan total penerimaan dikurangi pengeluaran yang wajib dan mengikat sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya.

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah disajikan pada table berikut ini:

Tabel 3.10 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

URAIAN	PROYEKSI				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan	1.315.557.442.000,00	1.359.966.229.000,00	1.402.456.203.000,00	1.446.730.842.000,00	1.492.865.785.000,00
Perkiraan SiLPA	187.000.000.000,00	131.490.169.000,00	116.386.708.000,00	118.879.698.000,00	122.571.249.000,00
Total Penerimaan	1.502.557.442.000,00	1.491.456.398.000,00	1.518.842.911.000,00	1.565.610.540.000,00	1.615.437.034.000,00
Dikurangi:					
Belanja Tidak Langsung	790.063.305.000,00	806.447.107.000,00	821.157.634.000,00	835.973.508.000,00	861.154.516.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Total Pengeluaran yang Mengikat	790.063.305.000,00	811.447.107.000,00	826.157.634.000,00	840.973.508.000,00	866.154.516.000,00
Kapasitas Riil Keuangan Daerah	712.494.137.000,00	680.009.291.000,00	692.685.277.000,00	724.637.032.000,00	749.282.518.000,00

Sumber : Bakeuda Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2019-2023. Hasil penghitungan kapasitas riil kemudian akan dijabarkan ke dalam pendanaan prioritas I, II dan III. Selain itu pula pemerintah daerah perlu memperhatikan kewajiban-kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (mandatory budget). Seperti misalnya pemenuhan alokasi 20% dari total belanja untuk urusan pendidikan, alokasi 10% untuk belanja urusan kesehatan, pemenuhan 25% alokasi dana perimbangan yang bersifat umum untuk infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan publik, dan juga alokasi belanja modal dalam APBD.

Dari tabel 3.10 di atas dapat dilihat bahwa kapasitas riil keuangan daerah diasumsikan naik setiap tahunnya rata-rata 3,19%. Ketersediaan dana ini cenderung tidak mencukupi untuk mencakup seluruh keinginan. Karena itulah diperlukan upaya yang cerdas, sistematis dan terukur dalam menyusun program dan kegiatan sesuai prioritasnya. Sehingga dana ini dapat dialokasikan dengan baik dan manfaatnya dapat optimal dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran pembangunan di Daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun disajikan sebagai berikut:

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional dan daerah. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Perspektif selama 5 tahun ke depan

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018–2023 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi kedepan. Prediksi dilakukan terhadap indikator - indikator pembangunan yang bersifat makro. Perspektif Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk lima tahun kedepan dijabarkan kedalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran strategis.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun disajikan sebagai berikut :

1. Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013 menunjukkan angka 5.68 persen dan naik menjadi 5.79 persen pada tahun 2014, meningkat pada tahun 2015 menjadi 6.05 persen. Kontribusi PDRB kategori pertambangan batubara yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi perekonomian yang mulai menanjak naik sejak tahun 2016 pada angka 6.05 persen dan berlanjut ke Tahun 2017 menjadi (6.13 persen) masih tetap membutuhkan dorongan yang besar untuk terus bertumbuh pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dibutuhkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang kuat dan inklusif, dimana dapat memberikan pengaruh yang luas bagi seluruh masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki Hulu Sungai Selatan.

- b. Persentase penduduk miskin di Hulu Sungai Selatan masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Hulu Sungai Selatan berada pada tahun 2013 berada pada angka 6,67 persen, jauh diatas provinsi yang berada di angka 4,73 persen, meningkat menjadi 6,77 persen pada tahun 2014, pada tahun 2015 menurun menjadi 6,45 persen, penurunan kembali terjadi pada tahun 2016 menjadi 6.29 persen, dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 5.8 persen. Walau demikian, terdapat sisi positif dari upaya pemerintah bersama seluruh stakeholder untuk penanggulangan masalah kemiskinan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Hulu Sungai Selatan pada periode 2014 sampai 2017.
- c. Angka kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sebesar 395 kasus, cenderung mengalami fluktuatif pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2014 dan 2015 angka kriminalitas menjadi 290 kasus dan 148 kasus dan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 214 kasus dan 232 kasus.

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebab banyaknya kasus kriminalitas yang belum tertangani bisa berakibat pada perkembangan psikologis masyarakat dan mengurangi rasa nyaman dan aman kehidupan masyarakat. Sedangkan masih tingginya angka kriminalitas perlu dikurangi dengan perbaikan masalah-masalah sosial ekonomi, pengurangan pengangguran, pendidikan moral maupun yang berhubungan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara.

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah karena tingkat pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan bidang Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah menurunnya tingkat pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang SD, masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/MA, menurunnya APS untuk jenjang SMP/MTs, adanya kecenderungan penurunan rasio sekolah terhadap murid sekolah dasar dan SMA/SMK :

- a. Pada tingkat SD/setara, persentase pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2015-2017 cenderung meningkat, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 36,49 persen.
- b. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 sebesar 58,11 persen. Penurunan ini tidak bertahan lama, sebab pada tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 69,60 persen. Pada tahun-tahun berikutnya, APM SMA/MA/SMK di Hulu Sungai Selatan mengalami fluktuasi dan mencapai 64,18 pada Tahun 2017.
- c. APS SMP/MTs di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu tahun 2013-2017 kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahun yaitu dari 99,12 persen sampai 99,49 persen. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 98,93 persen. Meskipun mengalami penurunan ditahun 2014, namun meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 99,49 persen.
- d. Rasio guru terhadap murid sekolah dasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2013-2017 masih cukup tinggi. Namun demikian rasio tersebut memiliki kecenderungan menaik pada tahun 2015 sampai tahun 2017, tahun 2013 sebesar 9,65%, tahun 2014 sebesar 10,51%, tahun 2015 sebesar 8,54%, tahun 2016 sebesar 8,58%, dan tahun 2017 sebesar 8,63%.
- e. Rasio guru terhadap murid tahun 2013 untuk jenjang SMP/MTs sebesar 9,56 persen, naik menjadi 10,03 persen pada tahun 2014, dan menurun menjadi 8,60 pada tahun 2015 kembali naik pada tahun 2016 menjadi 10,08 persen. Dan tetap naik pada tahun 2017 menjadi 13,10 persen.

- f. Rasio guru terhadap murid tahun 2013 untuk jenjang SMA/MA/ SMK sebesar 8,41 persen, meningkat menjadi 8,64 persen pada tahun 2014, dan meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 11,64 persen. Kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 13,59 persen. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 12,90 persen.

3. Bidang Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi pada bidang kesehatan yaitu:

- a. Sektor kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 2 (dua) tahun terakhir menggambarkan permasalahan kesehatan ibu dan anak menjadi masalah penting. Kematian ibu dan bayi semakin meningkat dari 2 tahun terakhir. Persalinan yang ditangani tenaga kesehatan mencapai target namun kematian ibu dan bayi masih tinggi yang mencerminkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan upaya kesehatan yang bersifat reformatif dan akseleratif yang ditujukan untuk peningkatan akses, kualitas pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan terutama dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan umur harapan hidup, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Meningkatnya persentase balita gizi buruk. Persentase bayi dengan gizi kurang pada tahun 2013 yaitu sebesar 2 dan tetap sampai tahun 2014, pada tahun 2015 menurun menjadi 1, dan naik lagi menjadi 3 pada tahun 2016, pada tahun 2017 menurun kembali menjadi 1, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih ditemukan balita gizi buruk, namun angkanya sangat rendah yaitu dibawah 1% (berdasarkan WHO dibawah 10% = rendah). Oleh karena itu, perlu digalakkan operasi timbang/sweeping/kunjungan rumah untuk balita yang tidak dibawa ke posyandu dengan harapan persentase balita gizi kurang terus mengalami penurunan. Kegiatan tersebut sampai saat ini masih terus dilaksanakan oleh kader dan petugas kesehatan di desa.

4. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aspek pelayanan umum dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga dapat dilihat dari sarana prasarana umum seperti jaringan jalan, irigasi. Permasalahan utama pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan untuk jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik masih sangat rendah, dari panjang jalan kabupaten sepanjang pada tahun 2014 sebesar 256,45 km, pada tahun 2015 menjadi 360,05 km, pada tahun 2016 menjadi 358,87 km, dan pada tahun 2017 menjadi 366,27 km. Adapun penyebab dari masih rendahnya persentasi jalan kabupaten yang dalam kondisi baik adalah karena (1) Besarnya panjang jalan yang harus dilakukan pemeliharaan (2) Kondisi fisik/tanah yang labil; (3) Terbatasnya biaya pemeliharaan jalan; dan (4) Seringnya terjadi genangan air di jalan akibat hujan yang dapat merusak jalan.
- b. Rasio dari Panjang seluruh saluran irigasi adalah 88,52 pada tahun 2014, pada tahun 2015 menjadi 89,72, pada tahun 2016 menjadi 85, dan pada tahun 2017 menjadi 89. Dari nilai tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian masih belum mencukupi, yang berakibat pada kawasan budidaya pertanian yang berada di luar saluran irigasi, proses pengairan/tata airnya menggunakan kondisi alami/kearifan lokal daerah.
- c. Rendahnya akses penduduk terhadap air bersih. Dimana persentase penduduk berakses air bersih pada tahun 2013 sebesar 13.641 dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 14.812, dan meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 15.382, dan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 16.276, pada tahun 2017 meningkat menjadi 16.906. Meskipun meningkat, akses penduduk terhadap air minum ini harus terus ditingkatkan karena berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Permasalahan umum pada bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman terjadi pada aspek pelayanan umum untuk Ruang Terbuka Hijau, Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memiliki Ruang Terbuka Hijau, namun Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB baru sebesar 12,534 pada tahun 2017. Untuk memenuhi ketentuan pada Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, selama 5 (lima) tahun ke depan Kabupaten Hulu Sungai Selatan membutuhkan RTH Publik yang lebih luas lagi.

Penanganan sampah masih belum optimal, hal ini terlihat dari Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk masih sangat rendah, yaitu pada kisaran 1,17. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena jika tidak segera dilakukan tindakan maka penumpukan timbulan sampah akan terus terjadi sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan lingkungan dan ekologi.

6. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah polisi pamong praja yaitu pada tahun 2013-2017 memang mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sebanyak 48 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 91 orang namun Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk masih rendah dan menjadi permasalahan utama di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini dapat berakibat kapasitas penda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah/perda dan keputusan Kepala Daerah akan mengalami hambatan.

7. Bidang Sosial

Permasalahan utama bidang sosial tidak terlepas dari masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permasalahan sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu meningkatnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013 jumlahnya mencapai 3.804 orang, pada tahun 2014 mencapai 4.333 orang, pada tahun 2015 mencapai 6.969, pada tahun 2016 mencapai 9.971, dan pada tahun 2017 mencapai 8.563. Masalah sosial ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah sebagai salah satu kewajiban untuk mengayomi masyarakat.

8. Bidang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja Permasalahan pada bidang tenaga kerja meliputi:

- a. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2014 yaitu sebesar 68,47 persen menjadi 65,27 persen, di tahun 2015 dan 2017 meningkat menjadi 69,65 dan 71,38 persen.
- b. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka tahun 2013 mencapai 4,42 persen menjadi 2,64 persen pada tahun 2014 dan meningkat pada

tahun 2015 menjadi 2,86 persen, sampai akhirnya pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 2,02 persen.

9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

- a. Tingginya Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2015 sebesar 88,89, pada tahun 2016 sebesar 89,36, pada tahun 2017 sebesar 89,08.
- b. Terkait status kota layak anak ; Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014 menyandang sebagai status kota layak anak Rintisan, artinya Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih harus berkomitmen menuju kota layak anak.
- c. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perempuan yang bekerja pada lembaga Pemerintah Daerah pada tahun 2013 sebanyak 3.815 orang, pada tahun 2014 sebanyak 3.561, pada tahun 2015 sebanyak 2.938, pada tahun 2016 sebanyak 2.919, dan pada tahun 2017 sebanyak 2.463 . Sebagian besar perempuan yang bekerja di Pemerintah adalah sebagai staf dan guru. Hal ini masih perlu ditingkatkan di tahun-tahun mendatang, sehingga peran serta perempuan dalam pemerintahan semakin nyata.

10. Bidang Pangan

Permasalahan bidang pangan adalah menurunnya ketersediaan pangan dari tahun ke tahun. Selain itu produksi pangan utama juga mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga 2014.

Masih perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk setempat dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

11. Bidang Pertanahan

Secara umum sertifikat hak milik (SHM) mengalami kenaikan setiap tahunnya, mengingat jumlah sertifikat pada tahun 2014 hanya 698 lembar dan pada tahun 2017 mencapai 4.460 lembar. Walaupun mengalami peningkatan luas lahan yang bersertifikat namun belum secara keseluruhan telah dapat

diselesaikan. Selain jumlah lahan yang bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara juga harus diselesaikan dengan baik.

12. Bidang Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan bidang lingkungan hidup yaitu:

- a. Seperti data yang tercantum pada grafik dibawah, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami tren penurunan.
- b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang fluktuatif dari tahun 2015 yang mencapai sebesar 58.86, turun menjadi 56.02 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 IKLH kembali turun walaupun tidak begitu signifikan sebesar 54.05 karena masih belum mampu melebihi IKLH tahun 2014, dan pada tahun 2017 naik menjadi 54.55. Sumbangan pencemaran udara dari NO₂ dan SO₂ yang meningkat menyebabkan penurunan IKLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

13. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan utama pada bidang ini pada indikator Pasangan Berakte Nikah yang masih mencapai angka 1537 pada tahun 2014, pada tahun 2015 sebanyak 1592, pada tahun 2016 sebanyak 1572, pada tahun 2017 sebanyak 1190. Hal ini mengindikasikan masih adanya pasangan menikah yang belum memiliki Akte Nikah.

14. Bidang Perhubungan

Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan transportasi publik, hal ini terlihat dari terjadinya Penurunan jumlah AKBD, angkutan perbatasan dan angkutan desa menjadi permasalahan utama di bidang perhubungan.

15. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan bidang KUKM adalah menurunnya partisipasi koperasi secara aktif, hal ini disebabkan adanya koperasi yang tidak dapat menjalankan kewajibannya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menjalankan usahanya.

16. Bidang Penanaman Modal

Peningkatan Investasi lebih banyak dipenuhi oleh sektor PMA, namun nilai investasi tersebut belum cukup besar sehingga masih diperlukan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana bagi tumbuhnya investasi hingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

17. Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama di bidang kelautan dan perikanan, antara lain menurunnya produktivitas kolam, produksi budidaya minapadi (budidaya ikan di sawah) dan produktivitas minapadi. Hal ini terjadi karena budidaya minapadi sangat tergantung pada ketersediaan lahan dan air dari usaha utama bercocok tanam padi. Kondisi ini mengakibatkan budidaya minapadi agak sulit untuk berkembang.

18. Bidang Pariwisata

Permasalahan utama bidang pariwisata adalah kontribusi sektor pariwisata hingga saat ini belum khusus menjadi kategori lapangan usaha PDRB. Selain itu, jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini karena obyek wisata alam dan obyek wisata buatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum dikelola secara profesional, terutama sarana dan prasarana, kualitas sumber daya pemandu wisata dan informasi kepariwisataan juga masih belum memadai sehingga belum bisa meningkatkan jumlah pengunjung dan belum dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah.

19. Bidang Pertanian

Permasalahan di bidang pertanian antara lain:

- a. Luas areal padi dari tahun 2012 sampai 2016 memiliki perkembangan yang fluktuatif. Hal ini disebabkan anomali iklim sehingga banyak areal pertanian yang tidak dapat ditanami karena tingginya genangan air. Dengan demikian, apabila ingin mempertahankan dan meningkatkan luas areal padi maka perlu diupayakan adanya tata air yang bagus terhadap lahan pertanian
- b. Terjadi penurunan produksi padi. Untuk produksi tertinggi didominasi oleh padi sebesar 210.442ton pada tahun 2015, pada tahun 2016 meningkat menjadi 231.859 ton dan di tahun 2017 menurun kembali menjadi sebesar 231.423 ton. Penurunan produksi tersebut disebabkan terjadi banjir pada lahan-lahan pertanian sehingga terjadi gagal tanam dan gagal panen, terutama di daerah selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Disamping itu penurunan produksi juga disebabkan karena terjadi iklim yang ekstrim, sehingga pada musim kemarau masih terjadi hujan terutama pada lahan lebak, yang berakibat tidak bisanya penanaman bibit padi.

- c. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2013 sebesar 16.861.73, pada tahun 2014 menjadi 18.752.98, pada tahun 2015 menjadi 20.438.35, pada tahun 2016 menjadi 21.813.14, dan pada tahun 2017 menjadi 23.169.68
- d. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB menurun. Peningkatan terjadi hingga tahun 2015 sebesar - namun di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi -.
- e. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masing-masing memiliki perkembangan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun terakhir. Pada awal periode tahun 2014 mencapai angka 99,83 persen, meningkat menjadi 99,99 persen pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 turun menjadi 97,52 persen, turun kembali menjadi 96,69 persen pada tahun 2017.

20. Bidang Kehutanan

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masing-masing memiliki perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada awal periode tahun 2012 mencapai angka - persen, menurun - persen pada tahun 2013 dan tahun 2014 menjadi - persen, dan meningkat kembali - persen di tahun 2015 dan 2016 menjadi - persen. Peningkatan tersebut belum signifikan sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kegiatan kehutanan yang lebih optimal agar komoditas yang dihasilkan (meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya) mampu memberi kontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

21. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan merupakan sektor utama dalam pemberian kontribusi perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang ternyata selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada awal periode tahun 2013 mencapai angka 33.385.62, meningkat pada tahun 2014 menjadi 34.434.08, menurun pada tahun 2015 menjadi 31.908.38, menurun pada tahun 2016 menjadi 30.542.40 dan naik kembali di tahun 2017 menjadi 32.846.85.

22. Bidang Perdagangan

Permasalahan utama bidang perdagangan adalah belum optimalnya angka kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Pada awal periode tahun

2013 mencapai angka 9.309.39, meningkat pada tahun 2014 menjadi 10.741.09, meningkat pada tahun 2015 menjadi 12.248.18, meningkat pada tahun 2016 menjadi 13.778.59 dan naik kembali di tahun 2017 menjadi 15.476.85. Peningkatan pelayanan guna mendorong kegiatan sektor perdagangan sangat diperlukan, salah satunya adalah kegiatan pembinaan dan pelayanan legalisasi usaha perdagangan.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis yang tersebut dapat dideskripsikan seperti uraian berikut ini.

4.2.1 Penelaahan Isu Internasional dan Isu/Kebijakan Nasional

Penentuan isu strategis didahului dengan review terhadap isu internasional dan kebijakan pembangunan nasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil review akan melengkapi isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi daerah.

4.2.1.1 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa Masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020. Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

1. Pasar Tunggal dan Basis Produksi

Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN terdiri dari atas lima elemen inti: (i) arus barang yang bebas; (ii) arus jasa yang bebas; (iii) arus investasi yang bebas; (iv) arus modal yang lebih bebas; dan (v) arus tenaga kerja terampil yang bebas. Komponen dalam pasar tunggal dan basis produksi adalah termasuk 12 (dua belas) sektor-sektor prioritas. Adapun 12 sektor-sektor prioritas yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa.

Tabel 4.1 Sektor Prioritas MEA

NO	SEKTOR BARANG INDUSTRI	NO	SEKTOR JASA
1	Produk Berbasis Pertanian	1	Transportasi Udara
2	Elektronik	2	E-Asean
3	Perikanan	3	Pelayanan Kesehatan
4	Produk Berbasis Karet	4	Turisme
5	Tekstil	5	Jasa Logistik
6	Otomotif,		
7	produk berbasis kayu		

Sumber : Bappenas Republik Indonesia, Tahun 2018

2. Kawasan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi

Perwujudan kawasan ekonomi yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi merupakan tujuan dari integrasi ekonomi ASEAN. Terdapat enam elemen inti bagi kawasan ekonomi yang berdaya saing ini, yaitu: (i) kebijakan persaingan; (ii) perlindungan konsumen; (ii) Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (iv) pembangunan infrastruktur; (v) perpajakan; (vi) ecommerce.

Negara-negara anggota ASEAN telah berkomitmen untuk memperkenalkan kebijakan dan hukum persaingan usaha secara nasional untuk menjamin tingkat kesetaraan dan menciptakan budaya persaingan usaha yang sehat untuk meningkatkan kinerja ekonomi regional dalam jangka panjang.

3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Yang Merata

Hal ini meliputi: (i) Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan (ii) Inisiatif untuk Integrasi ASEAN. Kedua inisiatif ini diarahkan untuk menjembatani jurang pembangunan baik pada tingkat UKM maupun untuk memperkuat integrasi ekonomi Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam agar semua anggotadapat bergerak maju secara serempak dan meningkatkan daya saing ASEAN sebagai kawasan yang memberikan manfaat dari proses integrasi kepada semua anggotanya.

4. Kawasan Yang Secara Penuh Terintegrasi ke dalam Perekonomian Global

ASEAN bergerak di sebuah lingkungan yang makin terhubung dalam jejaring global yang sangat terkait satu dengan yang lain, dengan pasar yang saling bergantung dan industri yang mendunia. Agar pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara global, untuk menjadikan ASEAN lebih dinamis sebagai mainstream pemasok dunia, dan untuk memastikan bahwa pasar domestik tetap menarik bagi investasi asing, maka ASEAN harus lebih menjangkau melampaui batas-batas MEA.

Dua pendekatan yang ditempuh ASEAN dalam berpartisipasi dalam proses integrasi dengan perekonomian dunia adalah: (i) pendekatan koheren menuju hubungan ekonomi eksternal melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Area/FTA) dan kemitraan ekonomi yang lebih erat (Closer Economic Partnership/CEP), dan (ii) partisipasi yang lebih kuat dalam jejaring pasokan global.

4.2.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Program SDGs aktif mulai tahun 2016 hingga tahun 2030.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.1.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, memiliki visi **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG - ROYONG”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka RPJMN menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas- aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi tersebut, maka agenda pembangunan nasional pada arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap ke-IV) yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan 3 kata kunci utama agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024 (Tahap ke-IV) yaitu :

1. Struktur perekonomian yang kokoh.
2. Keunggulan kompetitif wilayah.
3. Sumber daya manusia berkualitas.

4.2.1.4 Penelaahan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024

Tema rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, yaitu: **“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”**

Pembangunan periode 2020-2024 diarahkan pada beberapa fokus dalam rangka menjawab isu-isu strategis. Arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Teknokratik RPJMN 2020-2024, meliputi:

1. Arah Kebijakan Pembangunan manusia, dengan fokus: a. Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial, dan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

2. Arah Kebijakan Pembangunan ekonomi, dengan fokus: Pangan dan Pertanian; Energi, Mineral, dan Pertambangan; Kelautan dan Kemaritiman; Pariwisata; Ekonomi Kreatif dan Digital; dan Industri Manufaktur.
3. Arah Kebijakan Pembangunan infrastruktur
4. Arah Kebijakan Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
5. Arah Kebijakan Pembangunan kewilayahan.

Arah kebijakan pembangunan wilayah yang direncanakan oleh Bappenas untuk Pulau Kalimantan, dijelaskan sebagai berikut:

Tema Pembangunan Wilayah Kalimantan yaitu: **Pusat Produksi Dan Pengolahan Hasil Tambang, Kehutanan, Dan Lumbung Energi Nasional.**

Pusat-pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk :

- a. Operasionalisasi KEK MBTK, KI Landak, Batulicin dan Jorong.
- b. Peningkatan investasi di KI Ketapang.
- c. Pengembangan kawasan metropolitan Banjarbakula (Kota Banjarmasin dan sekitarnya).
- d. Pengembangan jalur kereta api Kalimantan.

Sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Kalimantan 2020-2024 yaitu:

- a. Industri Manufaktur
 - Sub sektor industri batu bara dan pengilangan migas
 - Sub sektor industri kayu, barang dari kayu, dan gabus, dan lain-lain
- b. Pertanian, kehutanan, perikanan
 - Sub sub sektor tanaman perkebunan
- c. Pertambangan dan Penggalian
 - Sub sektor pertambangan batu bara
- d. Transportasi dan pergudangan
 - Sub sektor angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

Perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk Pulau Kalimantan adalah 2020 sebesar 4,6% dan 2024 sebesar 5,2%. Target ini akan menjadi pertimbangan untuk penentuan target pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 juga menyajikan proyeksi target indikatif pembangunan pada periode berkenaan. Beberapa indikator kinerja makro diproyeksikan sampai 2024, sebagai berikut :

Tabel 4.2 Proyeksi Target Indikatif Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan	Pengangguran	Ketimpangan
Kondisi Saat Ini (2018)	5,27%*	9,82%	5,13%	0,389
Sasaran dalam RKP 2019	5,2-5,6%	8,5-9,5%	4,8-5,2%	0,38-0,39
Sasaran dalam RPJPN 2005-2025	4,5-5,5%**	≤5%	≤5%	0,36
Proyeksi Baseline SDGs 2024	4,2 %***	8,21%	5,02%	0,387
Sasaran Dalam RPJMN 2020-2024****	5,7%	5,0-5,7%	4,0-4,6%	0,371-0,373

Sumber: Bappenas, 2018

Keterangan:

*) Kuartal II 2018

**) Tertulis: setara negara berpendapatan menengah

***) Laju pertumbuhan PDB per kapita

****) Skenario moderat

4.2.2 RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

Telaahan dinamika pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021, dan beberapa isu atau kondisi terkini yang ada di Kalimantan Selatan.

Adapun berdasarkan penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, urgensi pembangunan pada kontekstual Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Beberapa Isu Strategis yang menjadi isu pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, disajikan sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Daya Saing Perekonomian Daerah.
3. Kualitas dan Kuantitas Lingkungan.
4. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomian dan Sosial.
5. Kinerja Pemerintahan Daerah.

Visi pembangunan Kalimantan Selatan yang ingin diwujudkan pada periode 2016–2021 adalah,

“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;
2. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya; dan
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Tujuan dari visi misi provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan kesejahteraan Sosial masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasiskan kearifan local;
5. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang;
6. Meningkatkan daya saing Perekonomian; dan
7. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Adapun sasaran pembangunan yang harus dicapai untuk mewujudkan visi dan misi, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja;
4. Meningkatnya pemahaman keagamaan;
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender;
6. Meningkatnya Kualitas Layanan publik;
7. Meningkatnya pendanaan daerah;
8. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah; dan

9. Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Professional dan Pemerintahan Akuntabel;
10. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan social;
11. Meningkatnya ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat;
12. Terselenggaranya PON;
13. Meningkatkan ketahanan budaya;
14. Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian;
15. Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama;
16. Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat;
17. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar;
18. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian;
19. Terwujudnya Mandiri Pangan;
20. Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian;
21. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa;
22. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata; dan
23. Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian.

4.2.3 Analisis Tahapan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, karena RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahapan ketiga pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan Jangka Panjang yang telah disusun Visi dari RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 **“Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagai Daerah Agropolitan yang Didasari Nilai-Nilai Agama”**. Dalam mewujudkan visi ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut.

Misi III. 1

Mewujudkan Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama serta Membangun Sikap Religius; yakni pembangunan yang diarahkan untuk : (a) membangun insan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, (b) tertanamnya nilai-nilai agama dan peningkatan pengamalan ajaran agama secara *kaffah* sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintahan dan bernegara, (c) terwujudnya kecerdasan spiritual bagi insan anggota masyarakat; (d) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan sarana untuk beribadah; (e) terwujudnya peningkatan kesalehan dan kepedulian sosial ummat; (f) terwujudnya kerukunan intern dan antar ummat beragama.

Ciri-ciri masyarakat yang sudah dapat melakukan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama sebagai indikator utamanya adalah : (a) taat beragama dan bersikap religius, (b) berakhlak mulia, (c) bersikap jujur dan amanah, (d) peduli kepada sesama serta peduli terhadap masa depan untuk menjaga keselamatan manusia dan bumi ciptaan Tuhan.

Misi III.2 :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing, yakni pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tingkat pendidikan dan menguasai Ipteks dengan tetap mampu menjaga keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. SDM berkualitas dan berdaya saing dicirikan dengan terbentuknya generasi yang cerdas, mempunyai derajat kesehatan yang tinggi; terampil; mandiri serta mempunyai kemampuan dalam mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupannya.

Misi III.3 :

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yakni memantapkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berkualitas dengan penegakan supremasi hukum untuk keamanan dan ketertiban yang ditunjang oleh keberadaan sumberdaya aparatur yang profesional dan sistim pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, transparan dan akuntabel di Kabupaten HSS dapat terwujud dalam upaya memberikan pelayanan publik yang baik.

Misi III.4 :

Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Pada Pengembangan Agribisnis-Agroindustri; yakni upaya pembangunan ekonomi yang mengoptimalkan potensi kategori pertanian dan ekonomi lokal yang ditunjang oleh sarana dan prasarana fisik sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, terciptanya struktur ekonomi yang kuat dengan kategori sekunder dan tersier sebagai tumpuannya guna kemandirian dan daya saing daerah.

Misi III.5 :

Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Pembangunan Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; yakni pembangunan yang diarahkan untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan yang didukung dan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RTRW) yang telah ditetapkan. Misi ini juga menuntut terwujudnya penegakan hukum secara konsisten terhadap perusak dan pencemar lingkungan serta terwujudnya kesadaran segenap komponen masyarakat untuk peduli pada lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosialnya.

Secara lebih khusus, tujuan yang diinginkan dari visi dan misi yang telah ditetapkan adalah : (a) adanya peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama untuk membangun insan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersikap religius sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintahan dan bernegara; (b) terwujudnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguasaan Ipteks yang didasari Imtaq; (c) terlaksananya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, terbentuknya kemandirian dan kedewasaan masyarakat di Kabupaten HSS dalam kehidupan politik serta terwujudnya keamanan dan ketertiban di masyarakat; (d) terciptanya perekonomian daerah Kabupaten HSS yang maju dan kuat berbasis pada agribisnis – agroindustri dengan didukung tersedianya sarana dan prasarana fisik secara optimal; (e), terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang efisien guna pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam upaya memudahkan partisipasi dari para *stakeholders* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya mewujudkan tujuan sesuai visi dan misi maka tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten HSS sampai tahun 2025 dikelompokkan kedalam 3 (tiga) pilar yaitu :

- (1) Mewujudkan kehidupan masyarakat berdasarkan Nilai-Nilai Agama;
- (2) Mewujudkan kemandirian daerah; dan
- (3) Mewujudkan kemampuan daya saing daerah.

Sasaran yang diinginkan dari visi dan misi diatas adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang religius, jujur, sehat, cerdas, produktif, berakhlak mulia yang ditunjang dengan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja melalui pemanfaatan sektor pertanian secara luas dan kategori-kategori penunjangnya; tingkat pendapatan perkapita yang tinggi dan kontinyu, terwujudnya pelayanan publik yang baik dan optimal, suasana kehidupan yang

tertib, aman dan damai, terselenggaranya kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang optimal dengan ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik; terwujudnya lingkungan hidup yang baik, terpelihara dan nyaman.

4.2.4 Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang Wilayah Nasional, ruang wilayah Provinsi dan Ruang Wilayah Kabupaten, yang mencakup kawasan-kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang wilayah berisikan tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan umum kebijaksanaan operasional dan kebijaksanaan pemantapan kawasan lindung, kawasan budidaya dan strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah. Untuk memperjelas dalam pemahaman Rencana Tata Ruang Wilayah ini dijabarkan beberapa hal mengenai tata ruang, penataan ruang, ruang lingkup penataan ruang, tujuan penataan ruang dan azas penataan ruang.

Menyadari pentingnya pengembangan dan pengendalian wilayah dalam skala yang lebih luas maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dapat mengakomodir berbagai macam kepentingan dan peraturan seperti :

- a. Distribusi kewenangan mengatur pada level yang setingkat, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sering kurang sinkron, sehingga kebijaksanaan pengembangan wilayah Kabupaten dirasakan kurang jelas;
- b. Perkembangan kawasan budidaya yang tidak seimbang akan mengakibatkan luas areal pertanian dan lahan potensial untuk tanaman pangan cenderung menurun, bertambah luasnya kawasan budidaya yang tidak tertata dengan baik serta tidak sinkron dengan produk tata ruang yang ada di atasnya.

Secara regional, Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu Wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki peran sebagai berikut :

1. Sebagai daerah penunjang Provinsi Kalimantan Selatan yang mendukung kategori Pariwisata khususnya cagar alam dan cagar budaya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus mengoptimalkan kinerja ekonomi wilayah yang telah berkembang.

2. Mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi perkotaan secara efektif yaitu peningkatan fungsi terminal angkutan kota, pengembangan dermaga di daerah Nagara, serta mendukung pembangunan Jalan Lingkar luar Kandangan.
3. Pengembangan wilayah penyangga antara lain pengembangan kegiatan pertanian, pengembangan pusat-pusat sub-regional dan pusat-pusat pelayanan masyarakat.
4. Memiliki potensi yang kuat terhadap pengembangan daerah kawasan rawa khususnya pengembangan ekonomi kawasan rawa yang merupakan suatu simbol tersendiri dari program pemerintah daerah, serta dituangkan ke dalam visi Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tersusun sebelumnya, telah direncanakan setiap fungsi kawasan, peruntukan lahan, struktur pelayanan, pengembangan kategori-kategori, dan pengembangan aktivitas lainnya, tetapi karena kedinamisan aktivitas/kegiatan penduduk maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan potensi dan permasalahan yang ada. Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah ini juga sangat perlu dilakukan mengingat adanya perkembangan kawasan pertumbuhan baru pada beberapa lokasi di kabupaten ini, yaitu :

1. Perkembangan kawasan di daerah Nagara yang akan dikembangkan menjadi salah satu kutub pertumbuhan skala regional dengan kegiatan basis kategori industri dan jasa serta pertanian lahan basah serta lahan rawa
2. Perkembangan kawasan Kandangan Baru yang segera di programkan oleh pemerintah daerah yang akan mengembangkan pola ruang kota modern yang sesuai dengan prinsip kota
3. Perkembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai suatu sub kawasan khususnya Kandangan sebagai kota transit, posisinya yang berada pada jalur trans Kalimantan.

Perkembangan kawasan wisata yang menjadi salah satu andalan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya kawasan daerah Loksado yang menjadi *ecotourism* Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap menyambut Program Pemerintah Pusat yaitu *visit year*.

4. Perkembangan kawasan kategori industri yang menciptakan sentra-sentra industri seperti dodol di Sungai Raya, Propeler di Daha Utara, Kerupuk di

Angkinang, Imitasi di Daha Selatan, Pandai Besi di Daha Selatan, Gerabah di Daha Selatan, Ikan Kering di Daha Selatan.

Selain faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah serta sejalan dengan kekritisannya dan peran serta masyarakat maka kebutuhan masyarakat pada Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu pengembangan wilayah-wilayah strategis dan potensi seperti wilayah di sepanjang jalan akses utama antara kawasan Terminal Baru dengan jalan lingkar dan kawasan Nagara sebagai area pengembangan industri dan pengembangan ekonomi rawa, perkembangan kawasan Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkembang ke arah selatan.

Misi Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat diakomodir sesuai dengan prospek dan arah pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 20 tahun mendatang, yakni :

“Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bertujuan Untuk Mewujudkan Keterpaduan Struktur Ruang Dan Pola Ruang Yang Efisien Dan Berkelanjutan Menuju Kabupaten Agropolitan“

Perumusan masalah yang terdapat pada kawasan sehubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

- a. Adanya perubahan struktur wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya berkembangnya beberapa *growth pole* baru di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan mempengaruhi pola dan skenario perkembangan kabupaten Hulu Sungai Selatan di masa mendatang
- b. Adanya perkembangan kebijakan baru yang perlu dikaji ulang untuk memperoleh penanganan secara optimal, meliputi :
 1. Pengembangan Kawasan Agropolitan untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 2. Pengembangan koridor jalan akses utama Trans Kalimantan dan akses jalan lingkar sehingga melewati jalur Kandangan Baru yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 3. Pengembangan kawasan ibukota kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 4. Pengembangan masing – masing wilayah IKK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan perkembangan masing – masing kategori ekonomi unggulan di dalamnya.
 5. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Loksado.
 6. Pengembangan kawasan perdesaan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang dirumuskan berdasarkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun strategi penataan ruang diuraikan sebagai berikut :

- (1) Strategi pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang terdiri atas:
 - a. memperkuat fungsi dan peran PKL dan PKLp;
 - b. memperkuat fungsi dan peran PPK;
 - c. memperkuat fungsi dan peran PPL; dan

- d. menguatkan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan secara sinergis.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan sistem pelayanan jaringan prasarana transportasi darat;
 - b. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan air baku;
 - c. meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan;
 - d. meningkatkan pengelolaan air limbah;
 - e. meningkatkan pengelolaan sistem drainase;
 - f. meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku; dan
 - g. mengembangkan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Strategi pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam, berdasarkan kesesuaian lahan;
 - b. mengembangkan mutu, produksi dan produktivitas komoditas unggulan;
 - c. mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah;
 - d. mengelola pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan secara optimal, proporsional dan berkelanjutan; dan
 - e. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana terpadu pada kawasan sentra-sentra produksi, kawasan industri, dan kawasan perdagangan dan jasa.
- (4) Strategi pengembangan agropolitan terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, perikanan yang berkelanjutan;
 - b. mengembangkan kegiatan industri pengolahan perdagangan dan jasa;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan agropolitan; dan
 - d. mempertahankan luasan lahan pertanian.
- (5) Strategi pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan wisata; dan
 - b. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata.
- (6) Strategi pemantapan dan pelestarian kawasan lindung terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan lindung;

- b. mempertahankan luasan kawasan hutan lindung dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan pada kawasan lindung;
 - c. mempertahankan ekosistem yang memberikan jasa lingkungan dan kelestarian keanekaragaman hayati ;
 - d. merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi fungsi lindung;
 - e. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak kawasan lindung;
 - f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelestarian kawasan lindung;
 - g. mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan formal otonom dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar;
 - h. melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan ilegal dalam kawasan lindung; dan
 - i. menyelenggarakan upaya terpadu dalam mengurangi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah terhadap kawasan lindung.
- (7) Strategi penanganan kawasan rawan bencana terdiri atas:
- a. mengidentifikasi kawasan rawan bencana;
 - b. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - c. mengendalikan kegiatan di sekitar kawasan kritis rawan bencana tanah longsor;
 - d. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain dalam pengendalian banjir; dan
 - e. mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
- (8) Strategi untuk pengembangan dan pengendalian kawasan strategis terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
 - b. mengembangkan kawasan strategis provinsi yang berada di kabupaten;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan kawasan strategis kabupaten; dan
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan strategis.
- (9) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;

- b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/militer.

4.2.5 Isu Strategis RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Berikut telaahan RPJMD daerah disekitar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 4. 3 Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
1	Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan	2017-2022	<p>Visi: “Hulu Sungai Utara MANTAP”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif. 2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing ditopang nilai-nilai agamis dan kultur budaya daerah. 3. Menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pengembangan ekonomi dan sumberdaya lokal dengan berlandaskan potensi daerah. 4. Membangun infrastruktur daerah yang terintegrasi dengan sektpr pendidikan, kesehatan dan ekonomi lokal. 5. Melaksanakan pembangunan secara arif dengan memperhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan sumberdaya alam. <p>Arah Kebijakan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2013–2017 yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemenuhan penyediaan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur kewilayahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan infrastruktur lainnya. 2. Meningkatkan pengembangan sarana prasarana pemukiman, kependudukan, air bersih dan penunjang lainnya. 3. Mewujudkan penataan ruang yang sesuai dan mampu mawadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomian 4. Meningkatkan pengembangan dan konservasi sumber daya air untuk pengoptimalan perlindungan dan pemanfaatan lahan rawa.

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
2	Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan	2016-2021	<p>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat”</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas kehidupan dan keserasian hubungan antara ulama dan umara; 2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian; 3. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan; 4. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan; 5. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem; 6. Peningkatan pelayanan masyarakat; dan 7. Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah. <p>Arah Kebijakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021 yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya 2. Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan 4. Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi
3	Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan	2016-2021	<p>Visi : Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera Dan Agamis.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa. 3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan. 4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).
			<p>Arah Kebijakan Kabupaten Tapin periode 2016-2021 yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan 3. Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
4	Kabupaten Kotabaru	2016-2021	<p>Visi “Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan Dibidang Agrobisnis dan Kepariwisataa Serta Kemandirian Menuju Masyarakat Yang Semakin Berkualitas dan Sejahtera”</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Dan Meningkatkan Sektorsektor Produksi di bidang pertanian, perkebunan,kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk menunjang Eko Wisata dan Agrobisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru. 2. Mewujudkan Struktur Ekonomi Yang Berdaya Saing Dan Pro Kerakyatan Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. 3. Mewujudkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Layak Dan Sejahtera 4. Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Dengan Pendekatan Partisipatif dan Gotong Royong 5. Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Sehat, Cerdas, Terampil 6. Mewujudkan Perbaikan Sistem Subsidi, Perlindungan Sosial Dan Penanggulangan/Pengentasan Kemiskinan 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
			<p>Arah Kebijakan Kabupaten Kotabaru periode 2016-2021 yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan 2. Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas 3. Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi

4.2.6 Platform Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Hulu Sungai Selatan Periode 2018-2023

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan terpilih periode 2018-2023, memiliki 4 pilar yaitu 1). Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Pertumbuhan Ekonomi; 3) Pengentasan Kemiskinan; 4) Reformasi Birokrasi.

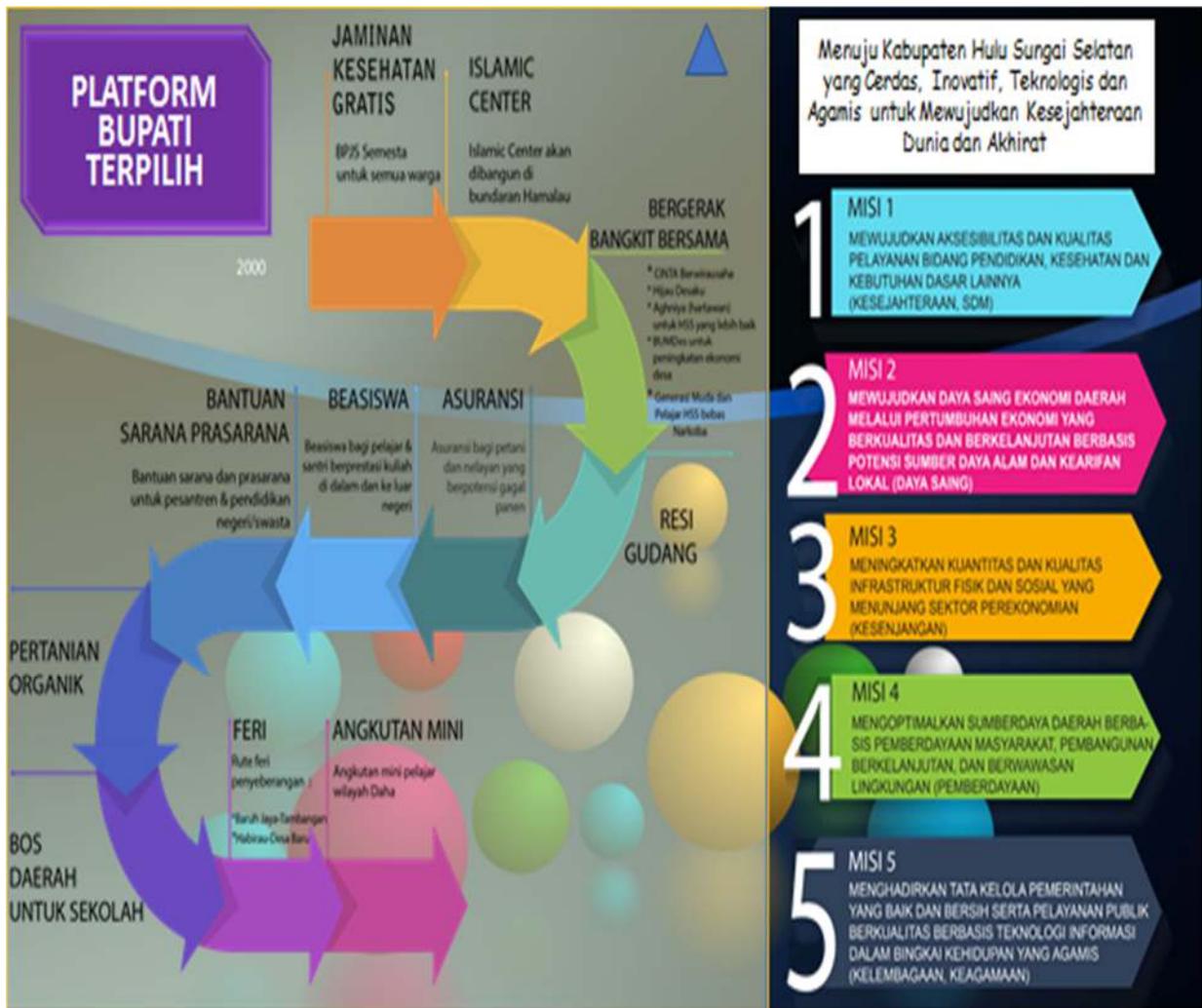
Dengan demikian maka, penekanan utama kebijakan umum pembangunan Kepala Daerah adalah mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan, memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga kelestarian sumber daya alam Kabupaten Hulu

Sungai Selatan agar bermanfaat bagi generasi sekarang maupun akan datang dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, Kepala Daerah terpilih menetapkan sembilan agenda pokok pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu:

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia;
2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;
3. Revitalisasi pertanian dan perikanan
4. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;
5. Penguatan UMKM dan koperasi;
6. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
7. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat;
8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial; dan
9. Peningkatan kualitas birokrasi , pelayanan publik dan keagamaan.

Sembilan agenda pokok pembangunan tersebut tertuang dalam program “SEHATI” sejumlah 15 poin dan program “SEHATI Plus CINTA” sejumlah 11 poin.



Gambar 4. 1 Platform Kepala Daerah Terpilih

4.2.5 Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sampai pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal. Seperti cakupan akses layanan PAUD misalnya, yang berdasarkan analisis disebutkan masih rendah. Begitupun halnya dengan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non-fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

Selain itu, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga masih rendah. Tidak hanya pada urusan pendidikan, pada urusan kesehatan beberapa permasalahan juga masih perlu untuk diperhatikan. Seperti halnya pelayanan kesehatan dasar misalnya yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya daerah perdesaan. Selain infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi-kondisi tersebut tentu memberikan *pressure* tersendiri terhadap pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga pembangunan manusia mengalami perlambatan. Dengan demikian maka, perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya perlu untuk dikedepankan mengingat sumber daya manusia yang baik merupakan wujud nyata dari cita-cita UUD 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu daerah rawan bencana banjir. Namun pada faktanya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga merupakan wilayah rawan tanah longsor, bencana kebakaran maupun angin puting beliung. Meskipun demikian, Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum memiliki sistem manajemen pelayanan korban bencana alam dan

bencana sosial serta kesiagaan bahaya bencana. Sistem ini dapat didukung salah satunya dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah yang mengedepankan pariwisata sebagai prioritas pembangunan harus mampu mengamankan modal sosial. Terlebih lagi mengingat pemberlakuan *ASEAN Community* yang semakin memperbesar intervensi budaya-budaya asing terhadap budaya dan nilai-nilai sosial lokal. Perlu adanya tindakan preventif dalam rangka mem-filter intervensi budaya yang mungkin mampu mempengaruhi nilai kearifan lokal Hulu Sungai Selatan melalui penguatan modal sosial. Selain itu, PMKS juga menjadi isu tersendiri yang perlu untuk menjadi perhatian. Akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS di Hulu Sungai Selatan masih terbilang lambat. Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PMKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial perlu ditingkatkan.

2. Peningkatan Pertumbuhan Daya Saing Ekonomi Daerah

Indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada di kategori sedang namun harus tetap dipantau oleh pemerintah daerah. Selain itu, sebaran penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum merata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran kapasitas SDM masih belum optimal pula. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Pada level nasional maupun regional provinsi, isu kesenjangan atau disparitas masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan. Sehingga, disamping perlu adanya pengupayaan kerjasama antar wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu pula peningkatan kerjasama antar daerah sekitar Hulu Sungai Selatan demi mengurangi indeks gini.

Dalam rangka merespon tingkat kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu distimulasi melalui penguatan *bargaining position* UMKM serta sumber daya wirausahawan. Namun sampai saat ini permasalahan-permasalahan mendasar berkenaan dengan UMKM dan sumberdaya wirausahawan belum dapat sepenuhnya terselesaikan. Seperti kualitas dan daya saing UMKM misalnya yang masih belum optimal. Selain itu, struktur pelaku usaha masih didominasi usaha mikro yang informal dengan produktivitas terbatas. Pembinaan dan pembekalan sumber daya wirausahawan masih rendah, hal ini melatar belakangi kualitas dan kuantitas SDM pelaku usaha cenderung rendah. Oleh karenanya perwujudan daya saing ekonomi daerah penting untuk diupayakan.

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan data yang telah dihimpun, masih berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi, konsistensi peningkatan investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum mampu menjawab tingginya permintaan yang ada. Disamping itu, sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi pertanian yang juga masih belum optimal. Kondisi-kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, serta berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal. Positifnya, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami konsistensi penurunan.

Pariwisata sebagai kategori unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah sepatutnya menjadi motor penggerak produktif perekonomian daerah. Berdasarkan data yang telah dihimpun, kontribusi penerimaan PDRB melalui komoditas pariwisata belum optimal. Hal ini dapat dipengaruhi perluasan jaringan kemitraan yang belum optimal atau daya dukung infrastruktur dan SDM lokal pariwisata yang masih lemah. Melihat kondisi tersebut, nampaknya peran masyarakat sangat vital untuk mendukung perkembangan pariwisata. Sehingga, sangat rasional bahwa pemberdayaan masyarakat dapat menjadi leverage pembangunan pariwisata, khususnya pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial Yang Menunjang Sektor Perekonomian

Fasilitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, kondisi infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan masih perlu ditingkatkan, hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Hulu Sungai.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki isu yang cukup serius dengan penyediaan air bersih. Beberapa isu yang perlu diperhatikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkenaan dengan akses air bersih dan lingkungan yang sehat adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya sarana dan prasarana air bersih;
2. Relatif besarnya cakupan wilayah yang berpotensi kekurangan air;
3. Masih tingginya wilayah yang belum terhubung oleh jembatan yang baik;

4. Meningkatnya kualitas perumahan yang terjangkau air bersih, sanitasi, layak huni dan tidak kumuh; dan
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Meskipun demikian, rumah dengan jangkauan air bersih, sanitasi, layak huni dan tidak kumuh dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sehingga dalam rangka mengakomodir banyaknya isu serta momentum positif tersebut perlu untuk memberikan afirmasi lebih terhadap isu ini. Oleh karenanya, penyediaan infrastruktur baik fisik, ekonomi maupun sosial sangat penting untuk ditingkatkan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai pada tahun 2017 masih belum mampu mengakomodir 20% RTH Publik dari total 30% RTH dari total luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Meskipun demikian, kualitas penataan ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah cukup baik. Dengan demikian maka, tuntutan untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas penataan ruang menjadi perhatian penting pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengingat pembangunan tanpa IMB masih relatif tinggi. Inilah sebabnya mengapa peningkatan kuantitas yang ekuivalen dengan kualitas sangat penting untuk diperhatikan pemerintah daerah. Hal ini agar peningkatan infrastruktur fisik diiringi dengan kualitas yang ada baik secara teknis maupun non teknis.

4. Peningkatan Optimalnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan

Administrasi perdesaan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi isu yang sangat penting untuk diakomodir. Disamping peran strategis pembangunan level *bottom* banyak diakomodir Desa, garda terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat adalah desa, sehingga kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karakter dan pondasi perekonomian serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya kapasitas kelembagaan di desa sehingga kualitas pengelolaan desa menjadi tidak begitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, perluasan jangkauan pelayanan melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar perlu untuk diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jika memperhatikan data, isu perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mengalami progress positif. Momentum positif terjadi khususnya pada peningkatan penyelesaian pengaduan perempuan dan anak

dari tindak kekerasan dan semakin meningkatnya peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan. Hal ini memberikan sinyal positif bahwa perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mendapat respon positif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kondisi ini tentu harus dipertahankan dan perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga momentum positif tersebut dapat *sustain* dan semakin berkualitas.

Berdasarkan data yang telah dihimpun, pencemaran lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2018. Hal ini menjadi distorsi terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alasannya adalah, bargaining position Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat terancam dengan adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi sangat strategis untuk diupayakan pemerintah daerah, mengingat topografi dan karakteristik fisiologi Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu modal utama pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program kepala daerah dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2017, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu untuk ditingkatkan

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut.

“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 5.1 Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Pilar-Pilar Visi	Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hulu Sungai Selatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia. 2. Layanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas
Meningkatnya Perekonomian dan Kemandirian	Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan

Pilar-Pilar Visi	Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD
Masyarakat Hulu Sungai Selatan	<p>ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Basis ekonomi Hulu Sungai Selatan diletakkan pada 3 komponen utama yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan (Perikanan tangkap dan perikanan budidaya), perkebunan, peternakan, dan hortikultura, 2. Pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Hulu Sungai Selatan, 3. UMKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat. <p>Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemandirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi kritis.</p>
Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik(<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan yang Bersih (<i>Clean Government</i>)	<p>Menghadirkan tata kelola yang efektif, bersih, dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>).</p>
Masyarakat Hulu Sungai Selatan yang Semakin Sejahtera dunia & akhirat berlandaskan semangat gotong royong	<p>Terciptanya keadaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis ditandai dengan suasana kondusif dan religius yang sudah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p> <p>Pembangunan kabupaten diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai selatan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.</p>

Pilar-Pilar Visi	Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD
	Semangat gotong royong didalamnya terkandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

5.2 Misi Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam segala bidang, guna menyiapkan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

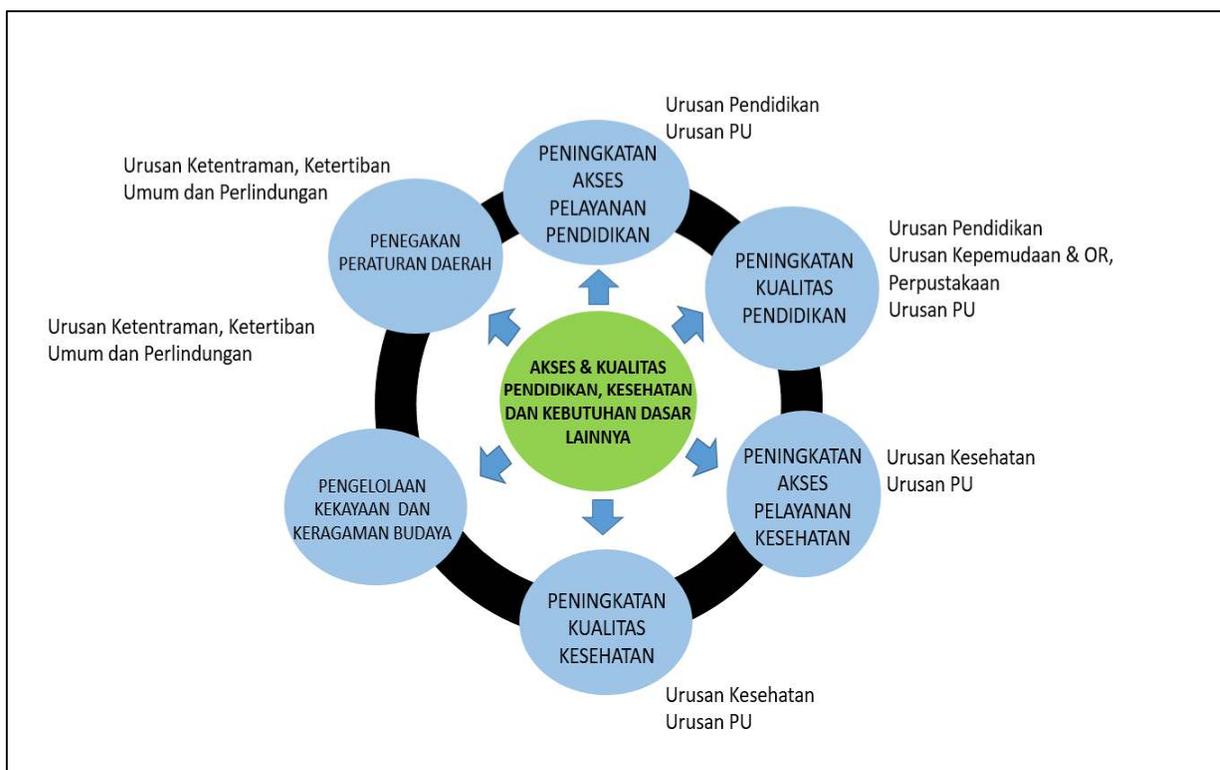
Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi ambiguitas dalam memahami butir misi maka penjabaran misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.

Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan

akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal.

Dalam upaya pencapaian misi ke-1 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-1 sebagai berikut.



Gambar 5.1 Logicframe Perencanaan Misi 1

Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di bumi Hulu Sungai Selatan baik yang tersimpan di dalam maupun dipermukaan bumi serta potensi sungai mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri.

Dalam upaya pencapaian misi ke-2 maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-2 sebagai berikut.

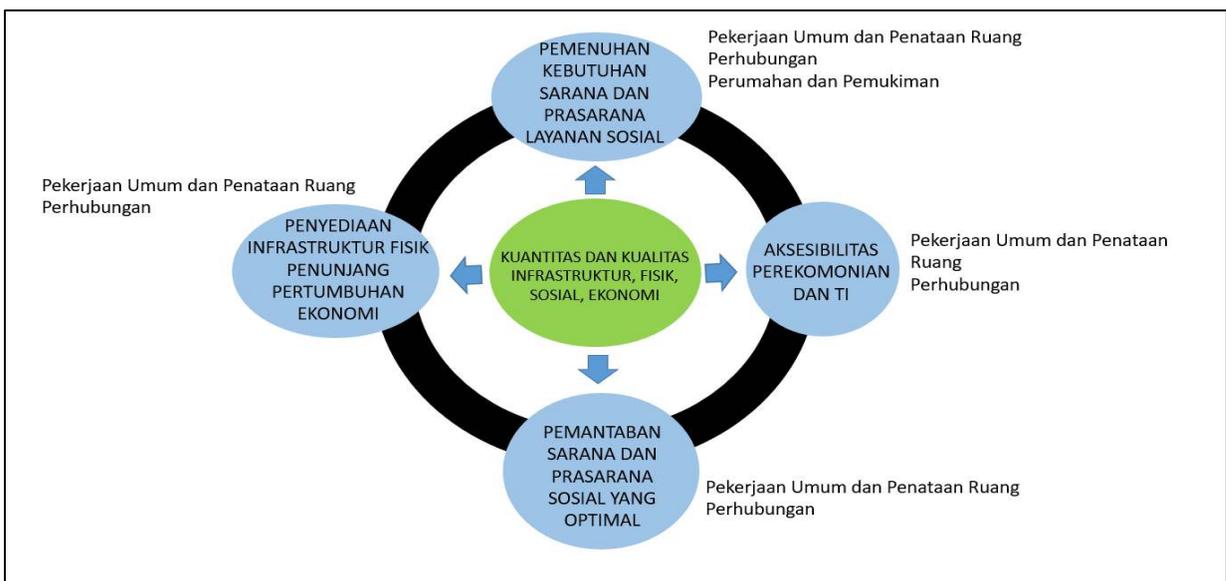


Gambar 5.2 Logicframe Perencanaan Misi 2

Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

Dalam upaya pencapaian misi ke-3 maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-3 sebagai berikut.

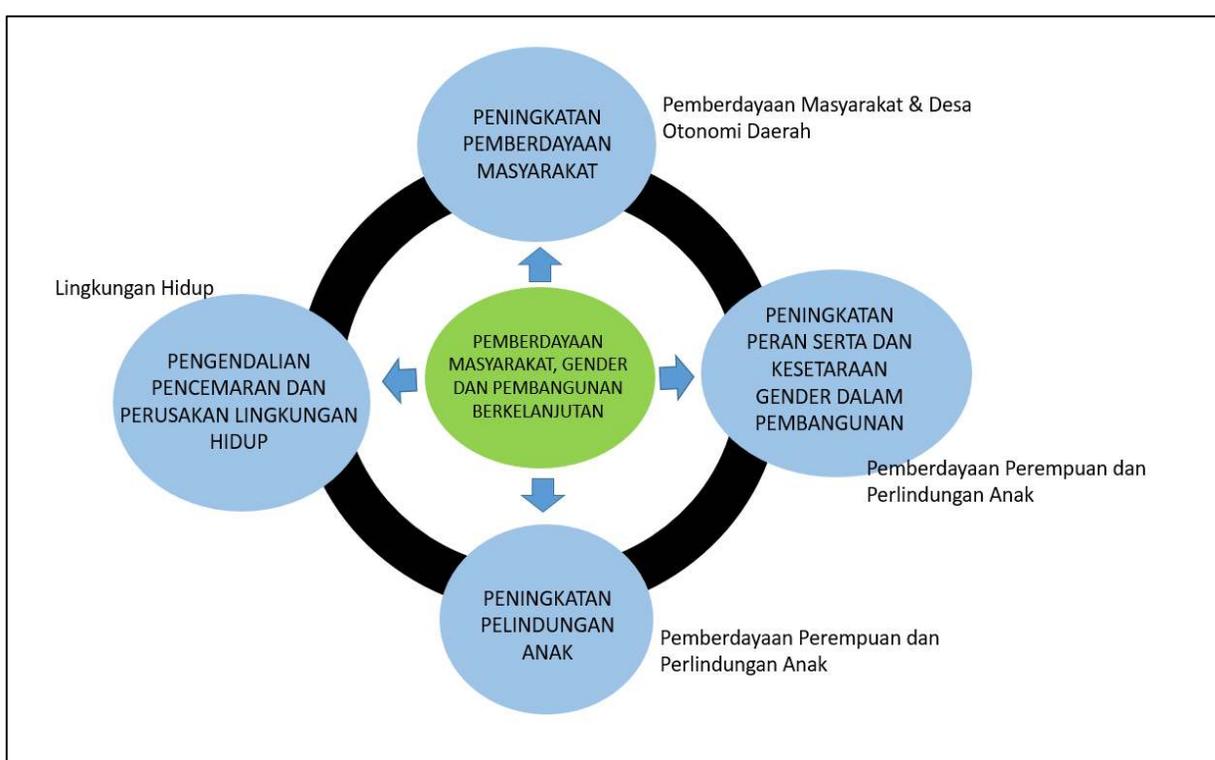


Gambar 5.3 Logicframe Perencanaan Misi 3

Misi 4 : Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat turut serta berperan aktif dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemberdayaan masyarakat sangat besar pengaruhnya terutama jika diarahkan kepada pengelolaan sumberdaya strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan tidak hanya berhenti di dalam proses perencanaan, akan tetapi dalam proses pelaksanaan hingga pengawasan masyarakat harus mampu bersinergi dengan pemerintah.

Dalam upaya pencapaian misi ke-4 maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-4 sebagai berikut.

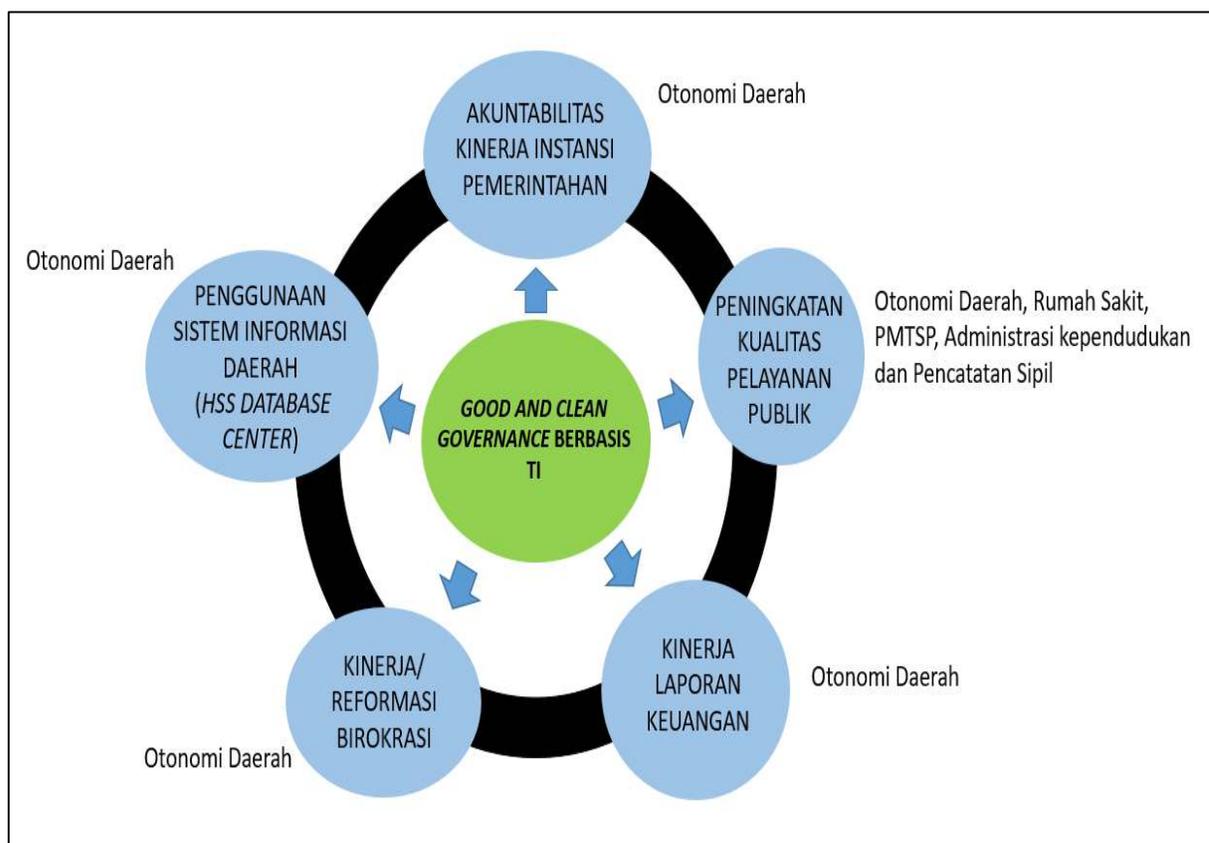


Gambar 5.4 Logicframe Perencanaan Misi 4

Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandas pada prinsip *good and clean governance*.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-5 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5 sebagai berikut.



Gambar 5.5 Logicframe Perencanaan Misi 5

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 2 prioritas wajib :
 1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia.
 2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan.
- Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan :
 3. Revitalisasi pertanian dan perikanan.
 4. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.
 5. Penguatan UMKM dan koperasi.
- Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian:
 6. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 7. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat.
 8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
 9. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan .

Selanjutnya, 9 Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian diinterpretasikan kedalam arsitektur Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar dalam pencapaian Visi, yang dapat dijelaskan melalui arsitektur berikut.



Gambar 5.6 Pondasi dan Pilar Misi Dalam Pencapaian Visi

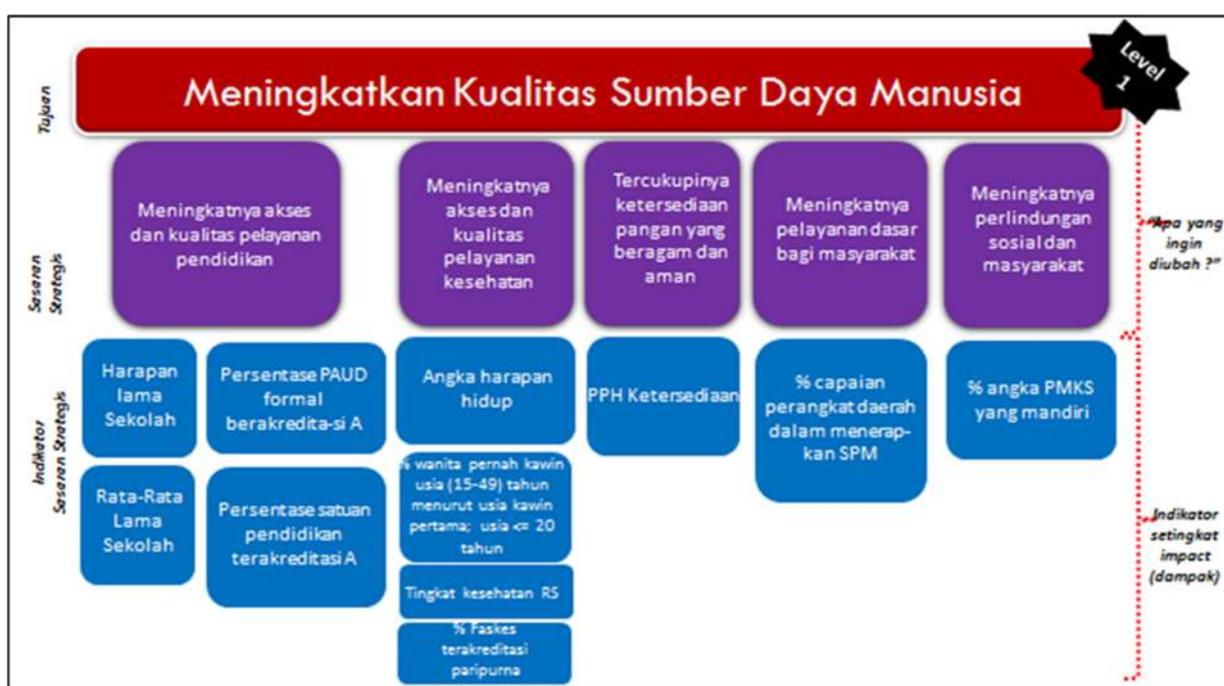
5.3 Tujuan dan Sasaran

Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih dirumuskan kedalam tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran pembangunan :
 1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan;
 2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan;
 3. Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman;
 4. Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat; dan
 5. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-1 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5.7 Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-1

Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan, dengan sasaran pembangunan :
 1. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah;
 2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
 3. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
 4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 5. Meningkatnya investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); dan
 6. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat

Pemahaman terhadap *linieritas* Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-2 yang disajikan sebagai berikut :

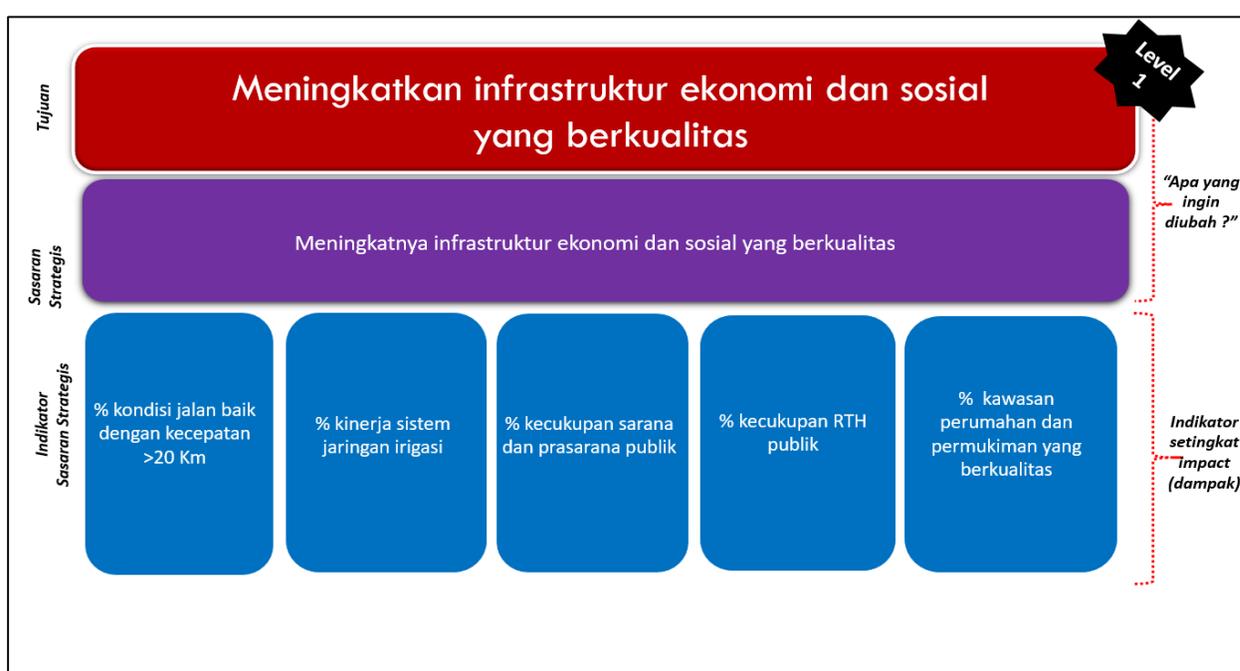


Gambar 5.8 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-2

Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu:
 1. Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas.

Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3 yang disajikan sebagai berikut.

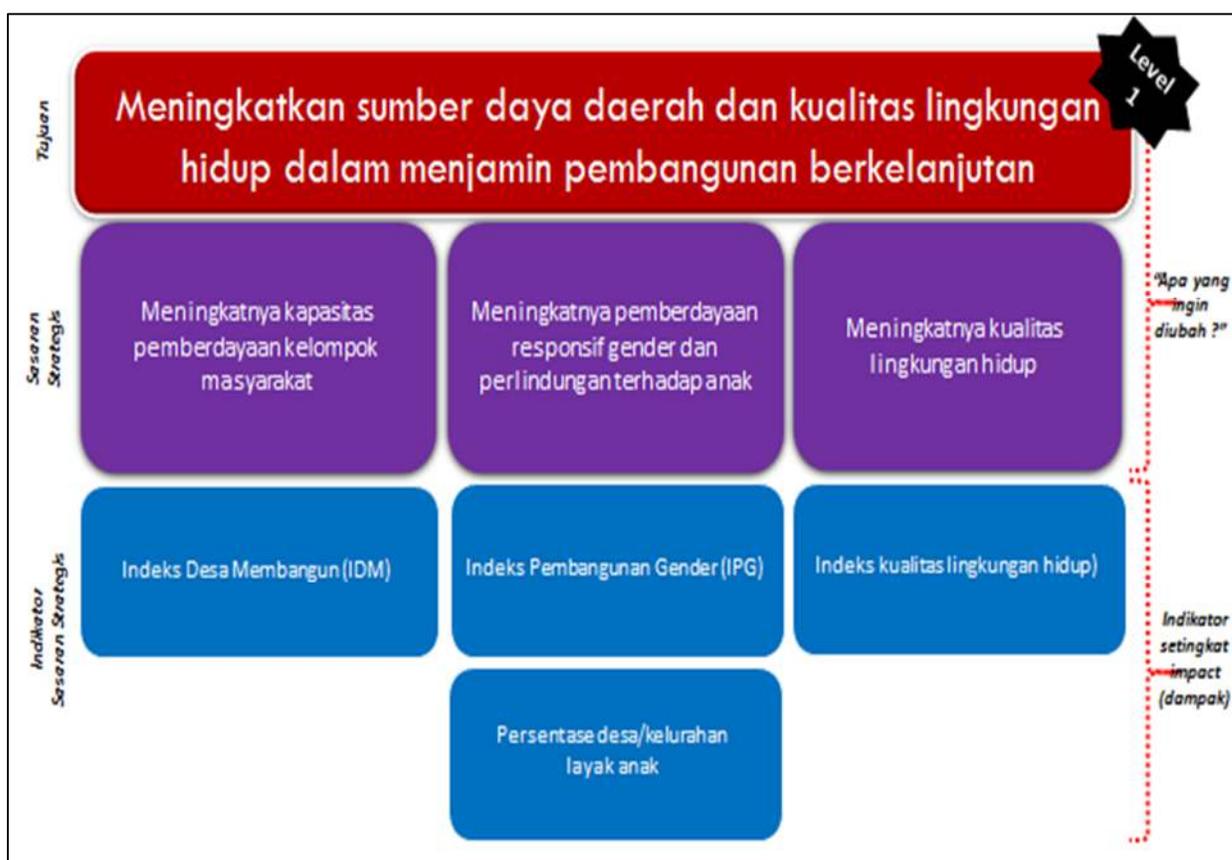


Gambar 5.9 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3

Dalam rangka pencapaian misi Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
 1. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat;
 2. Meningkatnya pemberdayaan reponsif gender dan perlindungan terhadap anak; dan
 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-4 yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 5.10 Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-4

Dalam rangka pencapaian misi Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran pembangunan yang meliputi:

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi;
3. Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi Daerah; dan
4. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5.11 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini :

Tabel 5.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat														
Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya														
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	67,8	68,59	69,41	70,25	71,08	71,86	72,57	72,57	Disdik	
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Tahun	12.05	12.49	12.70	12.89	13.08	13.29	13.52		13.52
			2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.71	7.83	8.00	8.17	8.33	8.44	8.53		8.53
			3	Persentase PAUD formal terakreditasi A	Persen	1.25	1.25	2,50	4,37	6,87	9,37	12,50		12,50
	4		Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	Persen	4,76	4,76	6,59	8,79	10,99	13,19	15,02	15,02		
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	5	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,39	65,59	66,05	66,54	67,04	67,51	67,87	67,87	Dinkes	
		6	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun	Persen	75.81	74.57	73.02	72.18	71.35	70.51	69.68	69.68	Dinas PPKBPP & PA	
		7	Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	Predikat	belum diukur	A	AA	AA	AA	AAA	AAA	AAA	RSUD Hasan Basry	
8		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	Persen	4.35	4.35	4.35	4.35	8.70	13.04	17.39	17.39	Dinas Kesehatan/UP T RS Daha Sejahtera/RSU D Hasan Basry		

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	9	PPH Ketersediaan	Skor	83,19	83.77	84.61	85.46	86.31	87.17	88.04	88.04	Dinas Ketahanan Pangan
		4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	10	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	Persen	52,00	54,00	57,00	61,00	67,00	72,00	75,00	75,00	Disdik/Dinkes /Dinsos/Satpo 1 PP/BPBD Kesbangpol/Dis.PUTR/Dis.PR LH
		5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	11	Persentase angka PMKS yang mandiri	Persen	54,97	49,84	56,58	60,00	62,03	64,50	67,20	67,20	Dinsos
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal															
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan		2. Tingkat kemiskinan			Persen	5,80	5,21	5,10	5,06	4,80	4,54	4,28	4,28	
		6	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	12	Tingkat kemiskinan	Persen	5.80	5.21	5.10	5.06	4.80	4.54	4.28	4.28	Dinsos
				13	Indeks Gini	Indeks	0.336	0.322	0.318	0.312	0.308	0.299	0.284	0.284	Dis TK, Kop dan UKP
		7	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	14	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,02	2.43	2.07	2.04	1.96	1.99	1.86	1.86	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		3. Laju pertumbuhan ekonomi		Persen	6,13	6,18	6,23	6,28	6,33	6,38	6,43	6,43	
8	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	15	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	Persen	5,27	4.41	4.47	4.98	5.27	5.56	5.85	5.85	Dis TK, Kop dan UKP
		16	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	5,41	5.27	5.38	5.50	5.61	5.72	5.83	5.83	Disdag
		17	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	2,06	3.73	4,28	4.51	4.86	4.92	5.63	5.63	Distan/Diskan
		18	Persentase koperasi sehat	Persen	1,18	1,76	2,35	3,18	3,82	4,46	5,10	5,10	Dis TK, Kop dan UKP
9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	Rupiah	21,10 Milyar	22,50 Milyar	23 Milyar	24 Milyar	25 Milyar	26 Milyar	28 Milyar	28 Milyar	Bakeuda
10	Meningkatnya investasi PMDN	20	Persentase peningkatan Penanaman Modal	Persen	3,00	4,20	4,80	5,00	5,50	6,00	7,00	7,00	Dis PMPTSP

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			Dalam Negeri (PMDN)											
	11	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	21	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	Rupiah	3.223.750.000	3.904.175.000	4.224.480.000	5.374.026.000	6.687.744.000	7.873.326.000	9.073.800.000	9.073.800.000	Disporapar
Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian														
3	Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	4. Persentase infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Persen			67,49	71,35	49,64	51,00	50,38	51,31	50,90	50,90	
	12	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	22	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	Persen	74.00	74.50	62,45	63,60	64,75	65,80	67,00	67,00	DisPUTR
			23	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Persen	80.00	85.00	62,68	65,60	67,35	69,10	71,43	71,43	
			24	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	Persen	10	14	24	48	67	86	100	100	
			25	Persentase kecukupan RTH publik	Persen	24.82	24.83	24.84	24.85	24.86	24.87	24.87	24.87	Dispera KPLH
			26	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Persen	40.16	40.66	53.05	59.98	67.43	74.88	82.32	82.32	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Misi 4 : Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan														
4	Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	5. Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,58	0,62	0,64	0.65	0.67	0.69	0.71	0.71			
	13	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	27	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,58	0,62	0,64	0.65	0.67	0.69	0.71	0.71	Dis.PMD
		6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Indeks	89,07	89,96	90,27	90,58	90,81	90,91	91,27	91,27		
	14	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,07	89,96	90,27	90,58	90,81	90,91	91,27	91,27	DPPKBPPA
			29	Persentase desa/kelurahan layak anak	Persen	0,68	0,68	2,03	3,38	4,73	6,08	7,43	7,43	
		7. Indeks kualitas lingkungan hidup		Indeks	54,55	54,94	55,08	55,27	55,44	55,6	55,77	55,77		
	15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	30	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,55	54,94	55,08	55,27	55,44	55,60	55,77	55,77	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis															
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,93	63,88	68	72	78	83	88	88				
		16	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	31	Predikat AKIP	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A	A	Seluruh SKPD	
				32	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Predikat	B	B	A	A	A	A	Setda (Bag. Orpad) /Disdukcatpil/ Dinkes/RSUD HHB/RSU Daha Sejahtera/Dis. PMPTSP		
		Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	33	Kualitas aspek perencanaan	Nilai	53,33	56,81	60,28	62,82	63,81	65,45	67,09	Bappelitbang da		
			34	Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Bakeuda		
			35	Indeks profesionalisme ASN	Indeks	48,63	49,04	69,77	73,17	74,42	78,12	81,33	81,33	BKD	
		18	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	36	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	Persen	7,89	7,89	13.16	39.47	65.79	92.11	100	100	Diskominfo
				37	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	Persen	0.60	0.60	8.33	15.97	23.61	31.25	38.88	38.88	38.88
		19	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	38	Persentase peningkatan penerimaan zakat	Persen	7	7,5	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	12,00	Koordinasi Setda Bag. Kesra dengan Baznas Kab. HSS

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman.

6.1 Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Hulu Sungai Selatan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagi Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan

masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advis aktifitas yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*. Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Dalam analisis SWOT menggunakan hasil telaahan isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini.

INTERNAL	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peningkatan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah 2. Meningkatnya kualitas perumahan yang terjangkau air bersih, sanitasi, layak huni dan tidak kumuh 3. Perlunya penguatan penataan ruang eksisting Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4. Meningkatkan peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan 5. Meningkatnya penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan 6. Hulu Sungai Selatan telah memiliki sistem informasi daerah yang cukup baik dalam pelaksanaan pemerintahan 7. Pola kepemimpinan yang visioner 8. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap tahun membaik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya tercapainya akses pendidikan wajib belajar 12 tahun 2. Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi 3. Kurang optimalnya layanan pendidikan inklusif 4. Belum optimalnya layanan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar 5. Belum optimalnya ketersediaan dan mutu sediaan farmasi, pembekalan dan alat kesehatan 6. Masih rendahnya akses dan kualitas lingkungan sehat 7. Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan di rumah sakit 8. Terlambatnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS 9. Belum optimalnya kualitas dan daya saing sektor UMKM 10. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM 11. Belum efektif dan efisiennya bisnis proses birokrasi pelayanan publik 12. Belum terlihatnya peran koperasi sebagai pelaku sektor riil 13. Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru yang berkualitas 14. Belum optimalnya pemasaran produksi pertanian 15. Belum efektif dan efisiennya sarana dan prasarana pertanian dalam menunjang produktifitas 16. Belum intensifnya pariwisata berbasis IT 17. Lemahnya daya dukung infrastruktur dan SDM lokal pariwisata 18. Belum Rendahnya kualitas fasilitas public 19. Rendahnya kuantitas fasilitas publik 	<ol style="list-style-type: none"> 20. Rendahnya panjang trotoar Kabupaten Hulu Sungai Selatan 21. Belum optimalnya kualitas infrastruktur perhubungan 22. Belum optimalnya kualitas sarana lalu lintas 23. Banyaknya kasus pengaduan masyarakat 24. Masih rendahnya cakupan fasilitas teknologi, informasi dan komunikasi 25. Belum optimalnya ketersediaan sanitasi dan air bersih 26. Masih rendahnya manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial 27. Masih rendahnya kesiagaan bahaya kebakaran 28. Belum tercukupinya RTH Publik 20% dari total 30% RTH Wilayah 29. Rendahnya kualitas infrastruktur perdesaan 30. Belum terbangunnya optimalisasi peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan 31. Masih rendahnya keberpihakan pembangunan terhadap anak 32. Lemahnya koordinasi lintas sektor aparaturnya 33. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparaturnya pemerintah daerah 34. Terbatasnya kapasitas pemerintahan pemerintah desa 35. Belum optimalnya pelayanan publik
EKSTERNAL	Opportunities (Kesempatan)	Threats (Ancaman)	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Momentum penurunan tingkat pengangguran terbuka 2. Besarnya afirmasi dan tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi 3. Banyaknya program prioritas pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah-daerah potensial yang berorientasi pada hasil 4. Banyaknya kunjungan Pemda lain untuk studi banding terkait tatakelola pemerintahan 5. Kekayaan dan potensi Wisata yang beragam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan potensi ancaman budaya asing terhadap budaya lokal 2. Besarnya tekanan dan tuntutan untuk mengakomodir pemberlakuan ASEAN Community 3. Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal dengan produktivitas terbatas 4. Belum terciptanya kondusifitas dan dominasi afirmasi terhadap Usaha Kecil Menengah 5. Konsistensi peningkatan investasi belum mampu menjawab tingginya permintaan 6. Masih relatif tingginya gini rasio 7. Belum meratanya sebaran penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan 8. Perlunya perluasan jaringan kemitraan pariwisata 9. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan 10. Masih relatif tingginya pembangunan tidak ber-IMB 11. Belum kuatnya karakter dan pondasi perekonomian perdesaan 12. Meningkatnya pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam 13. Besarnya tuntutan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Desa 14. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi 	

Gambar 6.1 Identifikasi Faktor Internal Dan Eksternal Dalam Analisis SWOT

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin membantu proses perumusan strategi pembangunan agar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut.

Strategi S-O	Strategi W-O
<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan Sistem Pemerintahan yang integratif melalui institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan vokasional yang berorientasi pada potensi daerah
Strategi S-T	Strategi W-T
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan membangun HSS <i>Database enter</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment melalui penguatan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan Pengarusutamaan budaya berbasis penguatan modal sosial kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah

Gambar 6.2 Strategi SWOT

Strategi S-O ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi yang harus diterapkan adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategi*). Strategi ini memberikan penekanan pada metode pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Kekuatan dominan yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah kepemimpinan visioner dan birokrasi yang solid yang menjadi kekuatan untuk melakukan inovasi dalam pembangunan serta pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah dalam segala aktivitas pemerintahan untuk mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Sementara peluang paling besar yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah kekayaan dan potensi wisata daerah yang sangat beragam, sebagai lokomotif perekonomian daerah. Sektor pariwisata dalam perekonomian Hulu Sungai Selatan hanya mempunyai kontribusi rata-rata 13.01%, namun mampu tumbuh

hingga 2 digit atau di atas 11%. Sedangkan sektor pertanian yang mempunyai kontribusi paling besar dalam perekonomian daerah (44,9%) hanya tumbuh rata-rata kurang dari 5%.

Oleh sebab itu strategi yang di tetapkan adalah mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan; dan Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi berbasis pariwisata. Institusionalisasi Inovasi diarahkan pada seluruh pelaku pembangunan untuk melakukan inovasi, baik pemerintah, swasta dan masyarakat guna mengangkat nama Hulu Sungai Selatan dalam konstelasi regional Kalimantan Selatan, Nasional dan bahkan Internasional.

Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertanggungjawabkan hasil-hasil (*outcome*) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang *inklusif*, dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor pariwisata. Pariwisata didesain menjadi salah satu tujuan Investasi pemerintah dan swasta di Hulu Sungai Selatan, peningkatan surplus perdagangan daerah, serta pembangunan infrastruktur merupakan pilar meningkatkan makro ekonomi Hulu Sungai Selatan.

Namun demikian, upaya ini dapat melebarkan kesenjangan kepada masyarakat menengah kebawah yang mengandalkan unit usaha ditingkat mikro, kecil dan menengah yang notabene masyarakat sebagai pelaku ekonomi

sesungguhnya. Oleh karenanya perlu afirmasi yang seimbang kepada seluruh pelaku ekonomi. UMKM didesain sebagai sabuk pengaman perekonomian arus bawah, untuk menjadi pilar pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Menciptakan *integrated farming* dalam wadah ekonomi kreatif, yang mampu mengintegrasikan pertanian- pariwisata- UMKM. Termasuk didalamnya pengembangan wirausaha baru, standarisasi, sertifikasi, pengendalian, pengawasan produk dan peningkatan akses permodalan, merupakan bentuk nyata dari strategi ini.

Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada pemerintah di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki. Berdasarkan identifikasi faktor diatas, Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih memiliki banyak tantangan/ancaman pembangunan. Sementara kekuatan utamanya hanya terletak pada komitmen pelaksanaan sistem pemerintahan yang inovatif. Pada Kondisi dibutuhkan strategi yang mampu merespon kebutuhan pembangunan secara cepat dan tepat, yang berorientasi pada kinerja hasil pembangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga strategi yang dibutuhkan adalah Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan membangun *HSS Database Center*, pengendalian dan evaluasi yang berorientasi pada hasil. Hal ini mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh 2 hal yaitu perencanaan yang akurat dan pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat sebagaimana perencanaan yang telah disusun. Data dan informasi yang valid merupakan basis penyusunan rencana pembangunan yang akurat, serta menjadi *early warning* untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pembangunan daerah yang sedang dijalankan senantiasa tepat sebagaimana perencanaan yang telah disusun. Kompleksitas penyelenggaraan sistem pemerintahan saat ini, dapat disederhanakan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan instrument penting dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pengendalian dan pengawasan harus mampu menyediakan informasi yang *real-time* (cepat, akurat dan bisa diakses kapanpun dibutuhkan) yang mampu memberikan gambaran hasil dan dampak pembangunan secara nyata.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/ kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat *investment* dan yang bersifat *divestment*. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kabupaten Hulu Sungai Selatan bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa *competitive* atau memiliki daya saing. Sehingga strategi yang dibutuhkan adalah Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan vokasional yang berorientasi pada potensi daerah; dan Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (*partnership*) pembiayaan pembangunan.

Membangun generasi yang handal ini sejalan dengan *concern* Presiden dalam RPJMN dengan serius menaruh perhatian kepada anak. Di Hulu Sungai Selatan bentuk nyata dukungan terhadap masalah tersebut adalah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang bekerja merespon laporan kekerasan kepada anak dengan cepat dan tanggap. Termasuk juga dengan memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui program jaminan kesehatan gratis (BPJS semesta untuk semua warga). Sementara untuk percepatan pembangunan Infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektifitas antar wilayah (*pusat-hinterland*) dan penurunan kesenjangan (*disparitas*), serta infrastruktur strategis penunjang perekonomian. Mengingat *coverage* wilayah Hulu Sungai Selatan yang cukup luas, penetapan prioritas dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi penting.

Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat *defensive* atau strategi untuk *survive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai *damage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan

penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki. Strategi yang ditetapkan dalam kondisi ini diantaranya Pengarustamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah; dan Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada *pro-job*, *pro-growth*, *pro-equity*, *pro-environment* melalui penguatan interkoneksi spasial.

Melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) dan pengarusutamaan budaya dengan membentuk kelompok-kelompok penggerak sosial berbasis pemberdayaan yang mampu mempertahankan nilai lokalitas. Yang diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial, pencegahan pelanggaran hukum dan menjaga kondusifitas pembangunan. Sedangkan pembangunan yang *pro-job*, *pro-growth*, *pro-equity* adalah orientasi pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya sekedar tumbuh, namun pertumbuhannya yang memperhatikan kapasitas partisipasi masyarakat dalam membangun, keadilan antara daerah kota dan daerah terpencil, antara yang miskin dan yang kaya. Serta pembangunan yang berorientasi pada lingkungan (*pro-environment*), agar kelestarian tetap terjaga dan kapasitas daya dukung dan daya tampung pembangunan masih dapat dinikmati anak cucu masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sejalan dengan semangat membangun dari pinggiran, dan implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Hulu Sungai Selatan giat membangun desa melalui peningkatan rata-rata Indeks Desa Membangun Kabupaten. Desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan. Sebab unit terkecil orientasi pembangunan adalah desa, maka ketika desa telah terbangun dengan baik, sejatinya pembangunan daerah telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut (Strategi dianalogikan dengan “St”) :

- St.1. Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan;
- St.2. Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan membangun HSS *Database Center*, pengendalian yang berorientasi pada hasil;

- St.3. Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah;
- St.4. Pengarusutamaan budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah;
- St.5. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (*partnership*) pembiayaan pembangunan;
- St.6. Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata;
- St.7. Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada *pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment* melalui penguatan interkoneksi spasial.

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

Melalui strategi (St.1) Mengembangkan sistem Pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam Proses Bisnis di semua level Pemerintahan; dan Strategi (St.2) Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi informasi dan membangun HSS Database Center pengendalian yang berorientasi pada hasil;, diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini:

- a) Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
 - 1. Nilai/Predikat AKIP
 - 2. Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik(UPP)
 - 3. Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan
- b) Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi
 - 1. Opini WTP BPK terhadap LKPD
 - 2. Indeks profesionalisme ASN
- c) Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah.

1. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik
 2. Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan
- d) Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

1. Persentase peningkatan penerimaan zakat

Melalui strategi (St.3) Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan vokasional yang berorientasi pada potensi daerah; dan Strategi (St.4) Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah; diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini :

- a) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan :

1. Angka Harapan Lama Sekolah
2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
3. Persentase PAUD formal terakreditasi A
4. Persentase satuan pendidikan terakreditasi A

- b) Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan :

1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
3. Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia \leq 20 tahun
4. Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)
5. Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna

- c) Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman

1. PPH ketersediaan

- d) Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat

1. Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM

- e) Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat

1. Persentase angka PMKS yang mandiri

Melalui strategi (St.5) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (partnership) pembiayaan pembangunan, diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini :

- a) Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas

1. Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan >40 km/jam

2. Persentase kinerja sistem jaringan irigasi
3. Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik
4. Persentase kecukupan RTH publik
5. Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas

Melalui strategi (St.6) Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata; diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini:

- a. Menurunnya kemiskinan dan kesejangan antar wilayah
 1. Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)
 2. Indeks gini
- b. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
 1. Tingkat pengangguran terbuka
- c. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
 1. Persentase pertumbuhan sektor industri dalam PDRB
 2. Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB
 3. Persentase pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan dalam PDRB
 4. Persentase koperasi sehat
- d. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 1. Persentase peningkatan retribusi dan pajak daerah
- e. Meningkatnya investasi PMDN
 1. Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- f. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat
 1. Tingkat pengeluaran wisatawan (*Spending of Money*)

Melalui strategi (St.7) Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada *pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment* melalui penguatan inter-konektivitas spasial, diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini:

- a) Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat
 1. Indeks Desa Membangun (IDM)
- b) Meningkatnya pemberdayaan responsive gender dan perlindungan terhadap anak
 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 2. Persentase desa/kelurahan layak anak
- c) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 1. Indeks kualitas lingkungan hidup

6.2 Arah Kebijakan

Strategi merupakan kesatuan skenario-skenario dalam periode 5 (lima) tahunan, terdiri dari tema pembangunan yang secara simultan saling melengkapi membentuk skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan program –program agar lebih sistematis dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Gambar berikut ini adalah strategi pelaksanaan arah kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 6. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN				
	2019	2020	2021	2022	2023
S.16 T.5 S.17 T.5 S.18 T.5 S.19 T.5	Mengembangkan Sistem Pemerintahan yang integratif melalui institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi pada sistem perencanaan dan pelayanan publik				
S.1 T.1 S.2 T.1 S.3 T.1 S.4 T.1 S.5 T.1	Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan vokasional yang berorientasi pada potensi daerah Pengarusutamaan budaya berbasis penguatan modal sosial kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah				
S.12 T.3	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (Partnership) pembiayaan pembangunan				
S.6 T.2 S.7 T.2 S.8 T.2 S.9 T.2 S.10 T.2 S.11 T.2	Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis pertanian, UMKM dan				
S.13 T.4 S.14 T.4 S.15 T.4	Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment melalui				

Tabel 6.2 Tema Pembangunan Pertahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	
	Prioritas Karena Wajib dengan Sendirinya	Prioritas Pendukung Strategi Pembangunan
Tahun 2019: Pemerataan Pembangunan Untuk pertumbuhan Yang berkualitas	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	Pemantapan Pencapaian 100 Hari Janji Kepala Daerah
		Reformasi Manajemen Pembangunan Berbasis Hasil
		Profesionalitas Aparatur Dan Perilaku Birokrasi
		Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi Terintegratif Yang Berorientasi Hasil
		Mendesain Perencanaan Dan Penganggaran Yang Berorientasi Pada Program Prioritas
		Meredefinisikan Organisasi Perangkat Daerah Yang Berorientasi Pada Efektifitas Pencapaian Visi-Misi Bupati
Tahun 2020 Peningkatan Layanan Dasar dan Infrastruktur yang Menunjang Sektor Perekonomian Serta Reformasi Birokrasi	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	Melengkapi Sarana Prasarana Aparatur Dan Sistem Pendukung Layanan Dasar Pemerintahan Hingga Ke Desa
		Mempercepatan Agenda Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Mempunyai Daya Ungkit Perekonomian
		Infrastruktur Aksesibilitas Antar Kawasan Perdesaan Dan Pertanian
		Infrastruktur Besar Berbasis Kawasan Dan Pusat Pertumbuhan Baru
		Infrastruktur Sistem Informasi Sosial Dalam Penguatan City Branding Hulu Sungai Selatan
		Perencanaan Akses Destinasi Pariwisata Unggulan
Tahun 2021 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Pertanian Dan Pariwisata Melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha Dan Ekonomi Kreatif	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	Mempercepat Kemudahan Investasi Pembangunan Yang Berorientasi Pada Pertanian Dan Pariwisata
		Menjalankan Sistem Inovasi Daerah Untuk Produk Unggulan Hingga Wilayah Perdesaan
		Penguatan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta
		Pemberdayaan Kelompok Usaha Dan Pelaku Ekonomi Kreatif
		Pengembangan Dan Penguatan Pasar Untuk Produk Pertanian Yang Integratif Dengan Pariwisata

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	
	Prioritas Karena Wajib dengan Sendirinya	Prioritas Pendukung Strategi Pembangunan
Tahun 2022 Pemantapan Kontribusi Sektor Pertanian Dan Pariwisata Terhadap Perekonomian Regional Dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	Penguatan Produktivitas Pertanian Dan Produk Olahan Turunan
		Pengembangan Dan Pemasaran Produk Unggulan Kabupaten
		Pengembangan Pelaku Usaha Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Mempermudah Akses Modal
		Membangun Keterpaduan Antar Wilayah Untuk Pengembangan Pariwisata Dan Pertanian
Tahun 2023 Kemandirian Ekonomi Diseluruh Wilayah Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	Memantapkan Sistem Terintegratif Perekonomian Berbasis Pertanian Dan Pariwisata
		Membangun Alternatif Industri Hasil Pertanian Dan Pariwisata
		Membangun Keberlanjutan Pengendalian Pembangunan Unggulan
		Memperluas Pasar Dan Produk Olahan Hasil Pertanian
		Menjamin Sistem Pasar Yang Berorientasi Pada Masyarakat Kelas Bawah

Arah kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan arah kebijakan, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan arah kebijakan agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar arah kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, arah kebijakan dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan;
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong

- proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah;
 4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Hubungan antara arah kebijakan dan empat perspektif diatas, sekaligus berdasarkan atas strategi pembangunan daerah, guna menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
NO	Sasaran	Strategi 1: Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah	
		Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	a. Memberikan jaminan akan akses dan kualitas Pendidikan bagi seluruh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat 4. Program Peningkatan Budaya Baca 5. Program Peningkatan Akses Perpustakaan
		b. Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar 3. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	a. Memberikan jaminan akan akses dan kualitas Kesehatan bagi seluruh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga 2. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 3. Program peningkatan akses sarana dan prasarana kesehatan 4. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi masyarakat 6. Program Pengendalian dan pencegahan penyakit 7. Program Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Layanan 8. Program Peningkatan kualitas layanan rumah sakit 9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (BLUD)
		b. Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kesehatan ibu hamil bersalin, nifas, dan anak 2. Program Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas dan Jaringannya 3. Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kesehatan

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal			
Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan			
NO	Sasaran	Strategi 3: Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata	
		Arah Kebijakan	Program
6	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	a. Peningkatan kemudahan usaha melalui stimulasi penguatan sektor pertanian, UMKM dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3. Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja 4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 5. Program Peningkatan Mutu Produk Industri 6. Program Pengembangan Sentra Industri 7. Program Peningkatan usaha sektor perdagangan 8. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 9. Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan 10. Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan 11. Program Peningkatan Produksi Perkebunan 12. Program Peningkatan Produksi Hortikultura 13. Program Peningkatan Populasi Ternak 14. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 15. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian 16. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 17. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 18. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan 19. Program Peningkatan Kualitas Koperasi
7	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka		
8	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan		
9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	a. Penguatan databased objek pajak melalui pemutakhiran data dan pemberian insentif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan 2. Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB
10	Meningkatnya investasi PMDN	a. Penguatan investasi dalam negeri, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Realisasi Investasi 2. Program Penguatan Iklim Investasi
11	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	a. Pengembangan perencanaan terintegratif terhadap potensi pariwisata, industri olahan dan pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan 4. Program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya 5. Program Pengembangan sentra Industri 6. Program peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal			
Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan			
NO	Sasaran	Strategi 3: Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata	
		Arah Kebijakan	Program
6	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	a. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui perencanaan terintegratif yang melibatkan seluruh elemen	1. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
7	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	a. Meningkatkan kompetensi, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1. Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
8	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	a. Peningkatan kemudahan usaha melalui stimulasi penguatan sektor pertanian, UMKM dan Ekonomi Kreatif	1. Program Peningkatan usaha sektor perdagangan 2. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 3. Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan 4. Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan 5. Program Peningkatan Produksi Perkebunan 6. Program Peningkatan Produksi Hortikultura 7. Program Peningkatan Populasi Ternak 8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 9. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian 10. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 11. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 12. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan
9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	a. Penguatan databased objek pajak melalui pemutakhiran data dan pemberian insentif	1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan 2. Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB
10	Meningkatnya investasi PMDN	a. Penguatan investasi dalam negeri, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership	1. Program Peningkatan Realisasi Investasi 2. Program Penguatan Iklim Investasi
11	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	a. Pengembangan perencanaan terintegratif terhadap potensi pariwisata, industri olahan dan pertanian	1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan 4. Program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya 5. Program Pengembangan sentra Industri 6. Program peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal			
Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan			
NO	Sasaran	Strategi 3: Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata	
		Arah Kebijakan	Program
			7. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		b. Penguatan kelembagaan ekonomi dan menjamin kemudahan usaha melalui regulasi yang afirmatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Koperasi 2. Program Peningkatan Kualitas Usaha Micro dan Usaha Kecil 3. Program Peningkatan Mutu Produk Industri 4. Program Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian			
Tujuan 3 : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas			
NO	Sasaran	Strategi 4: Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (<i>partnership</i>) pembiayaan pembangunan	
		Arah Kebijakan	Program
12	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	a. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 4. Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase 5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 6. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya 7. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan 9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau

	b. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur sosial untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat 2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman 3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik 5. Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang 6. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
	c. Menegakkan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik 2. Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang 3. Program Pembinaan Jasa Konstruksi 4. Program Penataan dan Penguasaan Tanah

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi : Mengoptimalkan Sumber Daya Daerah, Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan			
Tujuan 4 : Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan			
Strategi 5: Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment melalui penguatan interkoneksi spasial			
NO	Sasaran	Arah Kebijakan	Program
13	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	a. Menjamin pemerataan pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 3. Program Pengembangan Kemitraan 4. Program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya 5. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 6. Program Peningkatan Prestasi dan Pemasarakatan Olahraga
14	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	a. Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 2. Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 3. Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan 4. Program Peningkatan Perlindungan Anak
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a. Menjamin pemerataan pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 5 : Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis			
Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			
NO	Sasaran	Strategi 6: Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	
		Arah Kebijakan	Program
16	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	a. Mengkaji, merumuskan kembali SOTK, tupoksi organisasi dan sistem ketatalaksanaan pemerintah daerah sehingga mencerminkan visi, misi, target dan prioritas pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah 2. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah 3. Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Program Pengendalian Pembangunan Daerah 6. Program Evaluasi Pembangunan Daerah
17	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	a. Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah 4. Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah 5. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
		a. Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi, menjamin tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan penegakan peraturan daerah efisien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 3. Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan 4. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 5. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 6. Program Penguatan Iklim Investasi 7. Standarisasi Pelayanan Kesehatan (BLUD) 8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah 10. Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan 11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 5 : Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis			
Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			
NO	Sasaran	Strategi 7: Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi pada sistem perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil	
		Arah Kebijakan	Program
18	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan yang berorientasi pada hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Informasi dan Media Massa 2. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi 3. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
		b. Mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah 3. Program Pelayanan Informasi dan Media Massa 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Program Pengendalian Pembangunan Daerah 6. Program Evaluasi Pembangunan Daerah 7. Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah 8. Program Pengelolaan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah 9. Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah 10. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah
		c. Memfasilitasi dan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa 2. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 5 : Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis			
Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			
NO	Sasaran	Strategi 8 : Mengembangkan sistem pembiayaan terpadu yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat	
		Arah Kebijakan	Program
19	Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan	a.Peningkatan penggunaan instrumen pembiayaan non-konvensional	Program ditentukan pada level kebijakan

6.3 Program Prioritas

Setelah arah kebijakan dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri, yang mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah merupakan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Kepala Daerah terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Kepala Daerah terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam kegiatan atau program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, atau kedalam arah kebijakan maupun strategi. Jika janji dari Kepala Daerah terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam arah kebijakan maupun strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 6.3 Ilustrasi Transformasi Agenda Politik Kepala Daerah

Berdasarkan penjelasan diatas, dan ilustrasi yang digambarkan diatas maka dapat dijabarkan pendefinisian program-program prioritas pembangunan daerah melalui janji-janji kampanye Kepala Daerah terpilih. Adapun keterangan definisi tersebut dapat diamati pada tabel berikut ini

Tabel 6.4 Penjabaran Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Pada Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI 1	Beasiswa bagi pelajar dan santri berprestasi kuliah di dalam dan ke luar negeri	Bansos/ <i>*level arah kebijakan*</i>
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah untuk sekolah	Program peningkatan mutu PAUD
		Program Peningkatan mutu Pendidikan Sekolah Dasar
		Program peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah pertama
	Generasi muda dan pelajar HSS bebas narkoba	Bansos/ <i>*level arah kebijakan*</i>
Program Peningkatan mutu Pendidikan Masyarakat		
Program peningkatan peran serta kepemudaan		
BPJS semesta untuk semua warga	Program Peningkatan Prestasi dan Pemasyarakatan Olahraga	
	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat <i>*level arah kebijakan*</i>	
MISI 2	CINTA Berwirausaha	Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja
		Peningkatan mutu produk industri
	Resi Gudang	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
		Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan
	Asuransi bagi petani dan nelayan yang berpotensi gagal panen	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ikan Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat
Pertanian Organik	Program peningkatan produksi tanaman pangan Program peningkatan produksi hortikultura Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	
MISI 3	Islamic Center	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman
		<i>*level arah kebijakan*</i>
	Bantuan sarana dan prasarana untuk pesantren dan pendidikan negeri/ swasta	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik <i>*level arah kebijakan*</i>
	Feri Penyeberangan	<i>*level arah kebijakan*</i>
MISI 4	Hijau Desaku	Program peningkatan akses PAUD
		Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar
		Program peningkatan Akses pendidikan sekolah menengah pertama
		Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat
	BUMDes untuk peningkatan ekonomi desa	Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman		
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata APBDes		
MISI 5	Aghniya (Hartawan) untuk HSS yang lebih baik	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
		Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa
		APBDes
		<i>*level arah kebijakan*</i>

Melalui arah kebijakan diperoleh instrumen berupa program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Arah kebijakan diatas memuat beberapa fungsi, diantaranya:

1. Membantu menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
2. Membantu mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
3. Membantu mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Suatu program pembangunan daerah, secara teknokratis diterjemahkan dalam program prioritas yang pada dasarnya dijabarkan dari strategi yang telah dirumuskan. Berdasarkan arah kebijakan pada masing-masing perspektif dan indikator kinerja (*outcome*) yang dipersyaratkan maka dirumuskan berbagai jenis program terkait. Bagi suatu perspektif yang tidak ada kebijakannya maka program prioritas pada perspektif tersebut tidak perlu dibuat.

Setiap strategi mengandung berbagai program yang *inherent* dan spesifik untuk mencapai sasaran masing-masing. Penentuan program diupayakan merata ditiap perspektif untuk menjaga kepaduan dan daya ungkit strategi terhadap target indikator kinerja sasaran pokok. Namun demikian, tidak selalu tiap perspektif terdapat program prioritas, tergantung strategi untuk mencapai sasaran.

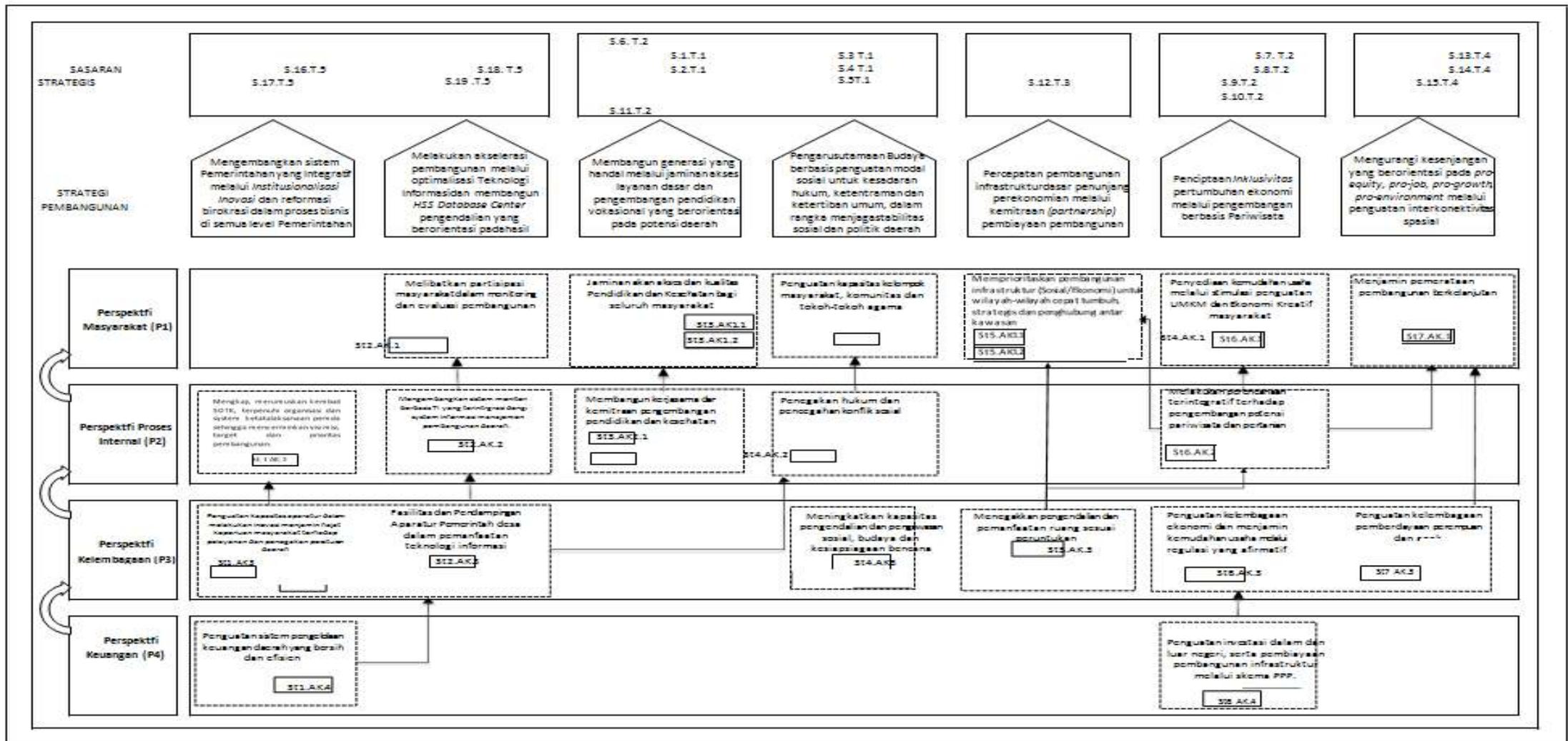
Selanjutnya, kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara *lagging indicators* dan *leading indicators*. *Lagging indicators* adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain.

Adapun *leading indicators* adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil (*outcome measures*) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (*performance drivers*).

Penetapan program dalam setiap arah kebijakan disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, yaitu harus memperhitungkan bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Selain itu program juga harus meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian kinerja program oleh pelaksana (SKPD). Penetapan program harus mampu berperan untuk mencapai target kinerja sasaran strategis melalui strategi dan arah kebijakan.

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap alur berfikir dari masing- masing strategi yang dirumuskan kedalam arah kebijakan serta program prioritas, maka berikut dipaparkan *logical framework* masing-masing strategi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang di rangkum dalam arsitektur-arsitektur pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023. Adapun arsitektur yang dimaksud adalah sebagai berikut :



Gambar 6.4 Arsitektur Pemetaan Strategi Dalam Kebijakan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**Tabel 6.5 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Misi 1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Dasar lainnya.																
	Tujuan 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Pelayanan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,80	69,41	259.826.578.068	70,25	251.455.177.717	71,08	259.643.041.738	71,86	262.062.928.299	72,57	260.619.610.322	72,57	1.293.607.336.144	
	Sasaran 1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1. Harapan lama sekolah	Tahun	12,05	12,70	15.598.510.850	12,89	16.595.684.600	13,08	16.595.684.600	13,29	16.595.684.600	13,52	16.595.684.600	13,52	81.981.249.250	
		2. Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,71	8,00		8,17		8,33		8,44		8,53		8,53		
		3. Persentase PAUD Formal berakreditasi A	Persen	1,25	2,50		4,37		6,87		9,37		12,50		12,50		
		4. Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	Persen	4,76	6,59		8,79		10,99		13,19		15,02		15,02		
1	Program Peningkatan Akses	APK PAUD Formal	Persen	72,98	76,55	958.800.000	77,80	958.800.000	79,05	958.800.000	80,30	958.800.000	81,55	958.800.000	81,55	4.794.000.000	Dinas Pendidika n

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pendidikan Anak Usia Dini																
2	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pemenuhan SPM/SNP PAUD	Persen	0,62	1,25	528.579.000	1,87	528.579.000	2,50	528.579.000	3,12	528.579.000	3,75	528.579.000	3,75	2.642.895.000	
3	Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	85,38	89,23		91,15	200.000.000	93,06	200.000.000	94,30	200.000.000	96,14	200.000.000	96,14	800.000.000	
4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	Persentase pemenuhan Aspek SPM Dikmas	Persen	18,51	25,92	1.723.775.000	25,92	1.723.775.000	29,92	1.723.775.000	33,33	1.723.775.000	37,03	1.723.775.000	40,74	8.618.875.000	
5	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase pemenuhan SPM/SNP SD	Persen	2,90	4,15	7.809.574.600	5,39	7.809.574.600	6,64	7.809.574.600	7,88	7.809.574.600	9,13	7.809.574.600	9,13	39.047.873.000	
6	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	93,14	89,17	-	90,49	450.000.000	91,37	450.000.000	92,25	450.000.000	93,13	450.000.000	93,13	1.800.000.000	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	76,29	79,45		79,9		80,25		82,15		85,00		85,00	-	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Angka putus Sekolah (APS) SMP	Persen	15	10		7		6		5		4		4	-	
7	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pemenuhan SPM/SNP SMP	Persen	31,25	25,00	3.077.396.000	34,00	3.077.396.000	43,75	3.077.396.000	53,15	3.077.396.000	59,38	3.077.396.000	59,38	15.386.980.000	
8	Program Peningkatan Budaya Baca	Persentase Peningkatan bahan Pustaka	Persen	0	20	277.850.000	40	415.350.000	60	415.350.000	80	415.350.000	100	415.350.000	100	1.939.250.000	
9	Program Peningkatan Akses Perpustakaan	Persentase Jangkauan Layanan Perpustakaan	Persen	93,20	93,20	136.325.000	94,00	230.500.000	96,00	230.500.000	98,00	230.500.000	100	230.500.000	100	1.058.325.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase Perpustakaan Desa dan Kelurahan yang aktif	Persen	27,39	27,39	86.211.250	34	201.710.000	41	201.710.000	48	201.710.000	55	201.710.000	55	893.051.250	
	Sasaran 2 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	5. Angka Harapan Hidup	Nilai (jumlah)	65,39	66,05	58.627.647.560	66,54	40.607.647.560	67,04	40.607.647.560	67,51	40.607.647.560	67,87	40.607.647.560	67,87	221.058.237.800	
10	Program Perbaikan Gizi masyarakat	Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia	persen	61,55	72,30	314.051.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0	314.051.000	Dinas Kesehatan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		sekolah dasar, ibu, dan lansia																
11	Program Peningkatan Kesehatan ibu hamil bersalin, nifas, dan anak	Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah dasar, ibu, dan lansia	persen	61,55	79,00	22.195.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0	22.195.000.000		
12	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah dasar, ibu, dan lansia	Persen	61,55	-	-	81	2.509.051.000	82	2.509.051.000	83	2.509.051.000	84	2.509.051.000,00	84	10.036.204.000		
13	Program peningkatan akses sarana dan prasarana kesehatan	Persentase pemenuhan Akses Prasarana Kesehatan	persen	77,08	80	-	83	1.800.000.000	84	1.800.000.000	87	1.800.000.000	89	1.800.000.000	89	7.200.000.000		
		Persentase pemenuhan Akses Sarana Kesehatan	persen	17,64	20,50	850.990.735	21,45	850.990.735	22,40	850.990.735	23,36	850.990.735	24,79	850.990.735	24,79	4.254.953.675		
14	Program peningkatan mutu sarana	Persentase pemenuhan Kualitas	persen	40,91	98,18	4.796.514.265	72,73	4.796.514.265	77,27	4.796.514.265	86,36	4.796.514.265	90,91	4.796.514.265	90,91	23.982.571.325		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	dan prasarana kesehatan	Prasarana Kesehatan															
		Persentase pemenuhan Kualitas sarana Kesehatan	Persen	14,29	38,10	-	52,38	180.000.000	66,67	180.000.000	80,95	180.000.000	90,48	180.000.000	90,48	720.000.000	
15	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	persen	100	100	30.326.614.400	100	30.326.614.400	100	30.326.614.400	100	30.326.614.400	100	30.326.614.400	100	151.633.072.000	
16	Program Pengendalian dan pencegahan penyakit	Persentase pemenuhan Pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Dasar, Penyakit Menular dan Tidak Menular	persen	60,36	48,52	144.477.160	52,38	144.477.160	55,40	144.477.160	58,43	144.477.160	60,67	144.477.160	60,67	722.385.800	
		Persentase Pemenuhan Capaian Indikator Pengendalian Penyakit Menular	persen	20,06	55,33		57,21		58,46		63,23		65,97		65,97	-	
		6. Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut kawin	Persen	75.81	73.02	4.522.722.500	72.18	4.522.722.500	71.35	4.522.722.500	70.51	4.522.722.500	69.68	4.522.722.500	69.68	22.613.612.500	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Anak
17	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan	Persen	6,67	9,92	39.978.600	29,76	39.978.600	49,60	39.978.600	69,44	39.978.600	89,28	39.978.600	89,28	199.893.000	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Reproduksi Remaja (KRR)	usia perkawinan																
		Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	79,60	79,60	4.482.743.900	80,50	4.482.743.900	81,40	4.482.743.900	82,40	4.482.743.900	83,30	4.482.743.900	83,30	22.413.719.500		
		7. Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	Predikat	BB	AA	42.405.095.400	AA	42.405.095.400	AA	42.405.095.400	AA	42.405.095.400	AAA	42.405.095.400	AAA	212.025.477.000		
18	Program Pembangunan /Pemeliharaan Gedung Layanan	Persentase Pemenuhan Aspek Prasarana IPP RSUD	Persen	2,86	3,57	42.405.095.400	3,93	42.405.095.400	4,29	42.405.095.400	5	42.405.095.400	5,71	42.405.095.400	5,71	212.025.477.000	RSUD H. Hasan Basry	
		8. Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	Persen	4,35	4,35	132.458.828.957	4,35	132.458.828.957	8,7	133.646.692.978	13,04	137.066.579.539	17,39	140.623.261.562	17,39	676.254.191.993		
19	Program Peningkatan kualitas layanan rumah sakit	Persentase fasyankes yang terakreditasi paripurna	persen	4,35	4,35	15.358.773.713	4,35	15.358.773.713	8,7	15.358.773.713	13,04	15.358.773.713	17,39	15.358.773.713	17,39	76.793.868.565	Dinas Kesehatan	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,87	82		82		82		82		82		82			
20	Program Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas dan Jaringannya	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi Sempurna	Persen	4,35	4,35	32.790.755.244	4,35	32.790.755.244	8,70	32.790.755.244	13,04	32.790.755.244	17,79	32.790.755.244	17,79	163.953.776.220		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,87	82	-	82	-	82	-	82	-	82	-	82	-		
21	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Persentase Pemenuhan Tingkat Kesehatan RSUD, Aspek IPP RSUD, Dan Akreditasi RSUD , Kategori > B	Persen	-55	-66,9	84.309.300.000	-75,6	84.309.300.000	-79	85.497.164.021	-81	88.917.050.582	-85	92.473.732.605	-85	435.506.547.208	RSUD H. Hasan Basry	
				-68	-72,03		-76,99		-77,97		-78,44		-78,93		-78,93			
				-80	-80,5		-80,75		-81		-81,5		-82		-82			
	Sasaran 3 Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	9. PPH Ketersediaan	Skor	83,19	84.61	814.022.500	85.46	814.022.500	86.31	814.022.500	87.17	814.022.500	88.04	814.022.500	88.04	4.070.112.500		
22	Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	ton	59,653	102,103	814.022.500	0	-	0	-	0	-	0	0	0	814.022.500		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
23	Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	ton	59,653	0	-	125,103	814.022.500	148,103	814.022.500	171,103	814.022.500	194,103	814.022.500	194,103	3.256.090.000		
		Tingkat Fluktuasi harga	Persen	4,03	3,83	-	3,77		3,68		3,52		3,02		3,02			
	Sasaran 4 : Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat	10. Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	Persen	52	57		5.263.780.301	61	13.915.206.200	67	20.915.206.200	72	19.915.206.200	75	14.915.206.200	75	74.924.605.101	
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pemenuhan SPM/SNP PAUD	Persen	0,62	1,25				1,87		2,50		3,12		3,75		-	
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	Persentase pemenuhan Aspek SPM Dikmas	Persen	18,51	25,92				25,92		29,92		33,33		37,03		40,74	-
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase pemenuhan SPM/SNP SD	Persen	2,9	4,15				5,39		6,64		7,88		9,13		9,13	-
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pemenuhan SPM/SNP SMP	Persen	31,25	25				34		43,75		53,15		59,38		59,38	-

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah dasar, ibu, dan lansia	Persen	61,55	-		81		82		83		84		84	-	Dinas Kesehatan
24	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	5,63	6,02	389.935.000	6,74	389.935.000	6,78	389.935.000	6,83	389.935.000	6,87	389.935.000	6,87	1.949.675.000	Dinas Sosial
		Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	1,11	3,54	200.211.200	3,85	200.211.200	4	200.211.200	4,13	200.211.200	4,26	200.211.200	4,26	1.001.056.000	
25	Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih	Persentase penduduk / rumah tangga yang terakses air bersih	Persen	76,94	77,62	3.208.377.500	78,27	10.000.000.000	78,89	15.000.000.000	79,48	15.000.000.000	80,04	10.000.000.000	80,04	53.208.377.500	DINAS
26	Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	Persentase drainase yang berfungsi dengan baik	Persen	59	59	1.140.196.601	63	3.000.000.000	66	5.000.000.000	69	4.000.000.000	73	4.000.000.000	73	17.140.196.601	PUTR
		Persentase KK yang terlayani air limbah domestik	Persen	79,68	6,98		7,1		7,18		7,27		7,35		7,43	-	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	Persentase kawasan perumahan dan permukiman sehat	Persen	40,16	53,05		59,98		67,43		74,88		82,32		82,32		-	
27	Program Penegakan Peraturan Daerah	Cakupan penyelesaian penegakkan perda	Persen	25	37,50	86.030.000	50	86.030.000	63	86.030.000	75	86.030.000	100	86.030.000,00	100,00	430.150.000	Satpol PP	
28	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana	persentase pemenuhan prasarana penanggulangan bencana	Persen	100	100	137.880.000	100	137.880.000	100	137.880.000	100	137.880.000	100	137.880.000		689.400.000	Badan Penanggunan Bencana, Kesatuan Bangsa dan politik	
29	Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	Rata-rata tingkat waktu tanggap	Waktu	<1 Jam	<1 Jam	101.150.000	<1 Jam	101.150.000	<1 Jam	101.150.000	<1 Jam	101.150.000	<1 Jam	101.150.000		505.750.000		
	Sasaran 5 : Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	11. Persentase Angka PMKS yang mandiri	Persen	54,97	56,58	135.970.000	60,00	135.970.000	62,03	135.970.000	64,50	135.970.000	67,20	135.970.000	67,20	679.850.000		
30	Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Cakupan Lembaga/Organisasi sosial, yang aktif dalam penanganan masalah sosial	Persen	35,33		135.970.000	42	135.970.000	45,33	135.970.000	48,67	135.970.000	52	135970000	52	679.850.000	Dinas Sosial	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi 2: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal																	
2	Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	2. Tingkat Kemiskinan	Persen	5,80	5,32	6.781.750.500	5,06	6.781.750.500	4,80	6.781.750.500	4,54	6.781.750.500	4,28	6.781.750.500	4,28	33.908.752.500	
	Sasaran 6. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	12. Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	Persen	5,80	5,14	6.781.750.500	5,06	6.781.750.500	4,80	6.781.750.500	4,54	6.781.750.500	4,28	6.781.750.500	4,28	33.908.752.500	
		13. Indeks Gini	Indeks	0,336	0,318		0,312		0,308		0,299		0,284		0,284	-	
31	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tingkat Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	4,85	5,72	399.336.500	7,00	399.336.500	7,07	399.336.500	7,16	399.336.500	7,25	399.336.500	7,25	1.996.682.500	Dinas Sosial
32	Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tingkat Perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	74,64	74,64	6.382.414.000	77,13	6.382.414.000	79,87	6.382.414.000	82,88	6.382.414.000	86,2	6.382.414.000	86,2	31.912.070.000	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3. Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	6,13	6,23	20.959.563.055	6,28	24.955.782.155	6,33	25.759.772.155	6,38	26.373.832.155	6,43	31.504.914.875	6,43	129.553.864.395	
	Sasaran 7. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	14. Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,02	2,07	212.645.500	2,04	212.645.500	1,96	212.645.500	1,99	212.645.500	1,86	212.645.500	1,86	1.063.227.500	
33	Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	Persen	3,1	3,18	184.554.250	3,35	184.554.250	3,56	184.554.250	3,81	184.554.250	4,11	184.554.250	4,11	922.771.250	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil, Koperasi dan Perindustrian
		Persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	Persen	75	80	14.340.000	85	14.340.000	90	14.340.000	95	14.340.000	95	14.340.000	85	71.700.000	
34	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase angkatan kerja yang di tempatkan	Persen	0,73	0,75	13.751.250	0,76	13.751.250	0,77	13.751.250	0,78	13.751.250	0,79	13.751.250	0,79	68.756.250	
	Sasaran 8. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	15. Persentase laju pertumbuhan kategori industri pengolahan	Persen	5,27	4,47	188.970.000	4,98	2.688.970.000	5,27	2.588.970.000	5,56	2.588.970.000	5,85	2.088.970.000	5,85	10.144.850.000	
35	Program Peningkatan Mutu Produk Industri	Persentase produk industri yang bersertifikasi mutu	Persen	3,94	4,18	71.005.000	6,96	71.005.000	9,75	71.005.000	12,54	71.005.000	15,32	71.005.000	13,92	355.025.000	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil, Koperasi

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Peningkatan Kapasitas Produk Industri Kecil	Persen		5,58	117.965.000	11,16	117.965.000	16,74	117.965.000	22,32	117.965.000	27,90	117.965.000	27,90	589.825.000	dan Perindustrian
36	Program Pengembangan Sentra Industri	Persentase Pengembangan Sentra Industri	Persen	-	-	-	8,5	2.500.000.000	18	2.400.000.000	27	2.400.000.000	34	1.900.000.000	34	9.200.000.000	
		16. Persentase laju pertumbuhan kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	5,41	5,38	7.509.351.000	5,5	7.509.351.000	5,61	7.509.351.000	5,72	7.509.351.000	5,83	7.509.351.000	5,83	37.546.755.000	
37	Program Peningkatan usaha sektor perdagangan	Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal	Persen	11,05	11,05	817.098.000	10	817.098.000	8	817.098.000	7	817.098.000	5	817.098.000,00	5	4.085.490.000	
38	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	PAD sub sektor perdagangan (kemetrologian)	Rupiah	10 jt	35 jt	1.584.983.000	38 jt	1.584.983.000	41 jt	1.584.983.000	44 jt	1.584.983.000	45 jt	1.584.983.000,00	45 jt	7.924.915.000	Dinas perdagangan
39	Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan	Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Persen	97,42	97,42	4.282.832.000	97	4.282.832.000	97	4.282.832.000	97	4.282.832.000	97	4.282.832.000,00	97	21.414.160.000	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PAD sub sektor perdagangan (pelayanan pasar)	Rupiah	3,9 M	4,2M	824.438.000	4,3 M	824.438.000	4,4 M	824.438.000	4,5 M	824.438.000	4,6 M	824.438.000	4,6 M	4.122.190.000	
		17. Persentase laju pertumbuhan kategori pertanian dan perikanan	Persen	2,06	3.27	5.275.141.555	4.86	5.279.066.655	5.63	5.283.056.655	4.51	5.287.116.655	4.92	10.500.868.375	4.92	31.625.249.895	
40	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Produksi Padi	ton	253653	242707	446.812.500	247.335	446.812.500	253.506	446.812.500	255.048	446.812.500	258.133	474.180.000	256.620	2.261.430.000	Dinas Pertanian
		Produksi Jagung	ton	4.973	5.035	31.010.000	5.038	31.010.000	5.041	31.010.000	5.073	31.010.000	5.102	31.010.000	5.102	155.050.000	
		Produksi Kacang Tanah	ton	619,00	530	20.305.000	533	20.305.000	539	20.305.000	542	20.305.000	545	20.305.000	545	101.525.000	
41	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Karet	ton	124.692	115.568	221.150.000	115.637	221.150.000	115.705	221.150.000	115.774	221.150.000	115.842	221.150.000	115.842	1.105.750.000	
		Produksi Kayu Manis	ton	29.040	29.340	98.607.000	29.564	98.607.000	29.789	98.607.000	30.013	98.607.000	30.328	98.607.000	30.328	493.035.000.	
		Produksi Kelapa	ton	79.464	80.875	8.502.500	81.074	8.502.500	81.276	8.502.500	81.473	8.502.500	81.672	8.502.500	81.672	42.512.500	
		Produksi Aren	ton	2400	2376	78.850.000	2388	78.850.000	2.400	78.850.000	2.412	78.850.000	2.424	78.850.000	2.424	394.250.000	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi Cabe	ton	6.617	5.976	161.800.000	6.036	161.800.000	6.096	161.800.000	6.156	161.800.000	6.216	161.800.000	6.216	809.000.000	
		Produksi Tomat	ton	2.838	3.816	143.000.000	3.886	143.000.000	3.956	143.000.000	4.026	143.000.000	4.096	143.000.000	4.096	715.000.000	
		Produksi Bawang Merah	ton	38	48	79.735.500	60	79.735.500	72	79.735.500	84	79.735.500	96	79.735.500	96	396.877.500	
43	Program Peningkatan Populasi Ternak	Jumlah populasi ternak besar (sapi + kerbau)	ekor	6.680	6.840	756.800.000	7.040	756.800.000	7.100	756.800.000	7.375	756.800.000	7.375	756.800.000	6.680	3.784.000.000	
		Jumlah populasi ternak kecil (kambing)	ekor	2.713	2.824	340.000.000	2.916	340.000.000	2.998	340.000.000	3.184	340.000.000	3.184	340.000.000	2.713	1.700.000.000	
		Jumlah populasi ternak unggas (ayam ras+ayam broiler+itik)	ekor	3.012.120	3.014.446	198.768.000	3.015.781	198.768.000	3.018.429	198.768.000	3.019.791	198.768.000	3.019.791	198.768.000	3.012.120	993.840.000	
44	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kenaikan Kelas Kelompok Tani	kelas	0	4	263.534.900	4	267.460.000	4	271.450.000	4	275.510.000	4	279.620.000	4	1.357.574.900	
45	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	Jumlah pengembangan optimasi lahan dan pemulihan kesuburan tanah	ha	6.760	6.937	62.200.000	7.037	62.200.000	7.137	62.200.000	7.237	62.200.000	7.337	62.200.000	7.437	311.000.000	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	3.959	4.791	766.980.000	5.270	766.980.000	5.797	766.980.000	6.376	766.980.000	7.014	766.980.000	7.014	3.834.900.000	Dinas Perikanan
47	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	8.454	9.579	1.580.894.000	10.058	1.580.894.000	10.863	1.580.894.000	12.057	1.580.894.000	13.625	1.580.894.000	13.625	7.904.470.000	
48	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	Persen	1	1	16.551.600	7	16.551.600	9	16.551.600	12	16.551.600	15	16.551.600	15	82.758.000	
		18. Persentase koperasi sehat	Persen	1,18	2,35	142.669.000	3,18	142.669.000	3,82	142.669.000	4,46	142.669.000	5,10	90.000.000	5,10	660.676.000	
49	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen	85,62	97,45	52.669.000	98,09	52.669.000	98,73	52.669.000	99,37	52.669.000	100	0	100	210.676.000	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil, Koperasi dan Perindustrian
		persentase SDM Koperasi aktif yang berkualitas	Persen	30,50	31,21	90.000.000	41,63	90.000.000	52,05	90.000.000	62,46	90.000.000	72,88	90.000.000	72,88	450.000.000	
	Sasaran 9. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19. Persentase peningkatan retribusi dan pajak daerah	Rupiah	21,10 Milyar	23 Milyar	1.110.908.000	24 Milyar	1.110.908.000	25 Milyar	1.110.908.000	26 Milyar	1.110.908.000	28 Milyar	1.110.908.000	28 Milyar	5.554.540.000	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan	Jumlah Peningkatan Realisasi pajak daerah non PBB dan BPHTB	Rupiah	19.720.730.875	21.856.817.666	389.573.000	23.006.463.203	389.573.000	24.214.159.063	389.573.000	25.482.813.442	389.573.000	26.815.480.005	389.573.000	26.815.480.005	1.947.865.000	Badan Keuangan Daerah
51	Program Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	Jumlah Peningkatan Realisasi PBB-P2 dan BPHTB	Rupiah	1.392.134.426	1.420.116.328	721.335.000	1.434.317.491	721.335.000	1.448.660.666	721.335.000	1.463.147.273	721.335.000	1.477.778.746	721.335.000	1.477.778.746	3.606.675.000	
	Sasaran 10. Meningkatkan investasi PMDN	20. Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Persen	3,00	4,80	124.113.000	5,00	124.113.000	5,50	124.113.000	6,00	124.113.000	7,00	124.113.000	7,00	620.565.000	
52	Program Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi PMDN	Rupiah	57.151.000.000	580.000.000.000	124.113.000	600.000.000.000	124.113.000	650.000.000.000	124.113.000	700.000.000.000	124.113.000	770.000.000.000	124.113.000	770.000.000.000	620.565.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
	Sasaran 11. Meningkatkan pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	21. Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	Rupiah	3.223.750.000	4.224.480.000	6.395.765.000	5.374.026.000	7.888.059.000	6.687.744.000	8.788.059.000	7.873.326.000	9.398.059.000	9.073.800.000	9.868.059.000	9.073.800.000	42.338.001.000	
53	Program Pengembangan		orang/wisatawan	243.305	255.470	3.725.206.000	268.244	4.700.415.000	281.045	5.450.415.000	295.739	5.900.415.000	310.526	6.200.415.000	310.526	25.976.866.000	Dinas Pemuda Olahraga

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan																& Pariwisata
54	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		217.170.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	3.617.170.000										
55	Program Pengembangan Kemitraan	Lama tinggal wisatawan (Length of Stay)	malam	1	2,2	867.915.000	3	902.170.000	3	952.170.000	3	1.012.170.000	4	1.082.170.000	4	4.816.595.000		
56	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase tingkat pengembangan seni dan budaya	Persen	34,78	42,26	1.585.474.000	52,28	1.585.474.000	62,57	1.585.474.000	71	1.585.474.000	84,1	1.585.474.000	84,1	7.927.370.000		Dinas Pendidika n
Misi 3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian																		
	Tujuan 3 : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	4. Persentase infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Persen	67,49	49,64	103.176.464.475	51,00	181.035.097.500	50,38	165.535.097.500	51,31	150.535.097.500	50,90	140.535.097.500	50,90	740.816.854.475		
	Sasaran 12. Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	22. Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥40 Km/jam	Persen	74,00	62,45	42.382.391.975	63,6	49.500.000.000	64,75	44.000.000.000	65,8	44.000.000.000	67	44.000.000.000	67	223.882.391.975		
57	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	629,91	536,7	24.486.571.500	0,3	7.500.000.000	0,8	2.000.000.000	0,8	2.000.000.000	0,8	2.000.000.000	0,8	37.986.571.500		DINAS PUTR

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
58	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	629,91	536,7	17.895.820.475	546,58	42.000.000.000	556,46	42.000.000.000	565,44	42.000.000.000	575,77	42.000.000.000	575,77	185.895.820.475	
		23. Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Persen	80.00	62,68	10.078.240.000	65,6	10.078.240.000	67,35	10.078.240.000	69,1	10.078.240.000	71,43	10.078.240.000	71,43	50.391.200.000	Dinas PU dan Tata Ruang
59	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	80	62,68	6.210.990.000	65,6	6.210.990.000	67,35	6.210.990.000	69,1	6.210.990.000	71,43	6.210.990.000	71,43	31.054.950.000	DINAS PUTR
60	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	30	49,71	3.867.250.000	55,44	3.867.250.000	60,22	3.867.250.000	65	3.867.250.000	69,78	3.867.250.000	69,78	19.336.250.000	DINAS PUTR
		24. Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	Persen	10	24	21.221.855.500	48	91.962.880.500	67	81.962.880.500	86	66.962.880.500	100	56.962.880.500	100	319.073.377.500	Dinas PU dan Tata Ruang
61	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	Jumlah bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	buah	4	5	14.258.975.000	5	85.000.000.000	4	75.000.000.000	4	60.000.000.000	3	50.000.000.000	3	284.258.975.000	DINAS PUTR

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
62	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Rasio jumlah titik PJU terhadap panjang jalan	Persen	40,16	23,97	6.962.880.500	28,98	6.962.880.500	33,99	6.962.880.500	39	6.962.880.500	44,01	6.962.880.500	44,01	34.814.402.500	DISPERA KPLH
		25. Persentase kecukupan RTH publik	Persen	24,82	24,84	14.427.251.000	24,85	14.427.251.000	24,86	14.427.251.000	24,87	14.427.251.000	24,87	14.427.251.000	24,87	72.136.255.000	
63	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman	Persentase kecukupan RTH Publik	Persen	24,82	24,84	3.523.951.000	24,85	3.523.951.000	24,86	3.523.951.000	24,86	3.523.951.000	24,87	3.523.951.000	24,87	17.619.755.000	DISPERA KPLH
64	Program Penataan dan Penguasaan Tanah	Persentase penguasaan fisik tanah yang teradministrasi	Persen	0	12	10.903.300.000	24	10.903.300.000	36	10.903.300.000	48	10.903.300.000	60	10.903.300.000	60	54.516.500.000	
		26. Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Persen	40,16	53,05	15.066.726.000	59,98	15.066.726.000	67,43	15.066.726.000	74,88	15.066.726.000	82,32	15.066.726.000	82,32	75.333.630.000	
65	Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	Persentase kawasan perumahan dan permukiman sehat	Persen	40,16	53,05	15.066.726.000	59,98	15.066.726.000	67,43	15.066.726.000	74,88	15.066.726.000	82,32	15.066.726.000	82,32	75.333.630.000	DISPERA KPLH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi 4. Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan																	
	Tujuan 4 Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	5. Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,58	0,64	240.440.500	0,65	240.440.500	0,67	240.440.500	0,69	240.440.500	0,71	240.440.500	0,71	1.202.202.500	
	Sasaran 13. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	27. Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,58	0,64	240.440.500	0,65	240.440.500	0,67	240.440.500	0,69	240.440.500	0,71	240.440.500	0,71	1.202.202.500	
66	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakata n Desa yang aktif	Persen	70,00	73,63	201.275.500	77,32	201.275.500	81,01	201.275.500	84,7	201.275.500	88,38	201.275.500	88,38	1.006.377.500	Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa
67	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang	Persen	4,16	13,88	39.165.000	21,52	39.165.000	29,16	39.165.000	36,8	39.165.000	44,44	39.165.000	44,44	195.825.000	
		6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,07	90,27	165.232.800	90,58	165.232.800	90,81	165.232.800	90,91	165.232.800	91,27	165.232.800	91,27	826.164.000	
	Sasaran 14. Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan	28. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,07	90,28	48.542.500	90,58	48.542.500	90,81	48.542.500	90,91	48.542.500	91,27	48.542.500	91,27	242.712.500	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	perlindungan terhadap anak																
68	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase ARG terhadap Anggaran Belanja Langsung APBD	Persen	36,84	36,84	38.497.500	52,63	38.497.500	68,42	38.497.500	84,21	38.497.500	100	38.497.500	100	192.487.500	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Anak
69	Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	Persen	8,11	8,11	10.045.000	21,08	10.045.000	33,51	10.045.000	45,41	10.045.000	52,97	10.045.000	52,97	50.225.000	
		29. Persentase desa/kelurahan layak anak	Persen	0,68	2,03	116.690.300	3,38	116.690.300	4,73	116.690.300	6,08	116.690.300	7,43	116.690.300	7,43	583.451.500	
70	Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Institusi/lembaga yang mengimplemen tasikan pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak	Persen	77,55	77,55	92.724.300	83,67	92.724.300	89,8	92.724.300	95,92	92.724.300	100	92.724.300	100	463.621.500	
71	Program Peningkatan Pelindungan Anak	Tingkat pemenuhan aspek Desa/Kelurahan Layak Anak berbasis kluster	Persen	18,52	27,78	23.966.000	55,56	23.966.000	79,63	23.966.000	98,15	23.966.000	100	23.966.000	100	119.830.000	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,55	55,08	9.028.264.200	55,27	9.028.264.200	55,44	9.028.264.200	55,6	9.028.264.200	55,77	9.028.264.200	55,77	45.141.321.000	
	Sasaran 15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	30. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,55	55.08	9.028.264.200	55.27	9.028.264.200	55.44	9.028.264.200	55.60	9.028.264.200	55.77	9.028.264.200	55.77	45.141.321.000	
72	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase indeks kualitas Udara titik pantau yang memenuhi standar	Persen	85	85	2.203.478.200	85	2.203.478.200	85	2.203.478.200	85	2.203.478.200	85	2.203.478.200	85	11.017.391.000	
		Persentase indeks kualitas air titik pantau yang memenuhi standar	Persen		51		51,5		52		52,5		53		53	-	DISPERA KPLH
		Persentase tutupan lahan pada areal bekas pertambangan	Persen		35,34		35,49		35,63		35,78		35,93		35,93	-	
73	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan sampah yang dikelola secara Control landfill	Persen	52	52,53	6.824.786.000	48,38	6.824.786.000	46,97	6.824.786.000	45,59	6.824.786.000	44,06	6.824.786.000	44,06	34.123.930.000	
		Persentase cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R	Persen	27	27,47		26,63		27,02		27,41		27,94		27,94	-	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase luasan layanan persampahan	Persen	72	72,6		80,82		87,67		94,52		100		100	-	
Misi 5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis																	
	Tujuan 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,93	68	34.493.888.946	72	34.820.013.946	78	35.853.513.946	83	35.331.013.946	88	36.276.013.946	88	176.774.444.730	
	Sasaran 16. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	31. Predikat AKIP	Predikat	BB	BB	924.396.260	A	1.304.396.260	A	1.304.396.260	A	1.304.396.260	A	1.304.396.260	A	6.141.981.300	
74	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP pada komponen pelaporan	Nilai	10,66	12,06	255.731.260	12,4	255.731.260	12,52	255.731.260	13,45	255.731.260	14,38	255.731.260	14,38	1.278.656.300	Setda (Bag. Orpad)
75	Program Peningkatan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,0356	3,1173	272.800.000	3,1746	272.800.000	3,2100	272.800.000	3,2376	272.800.000	3,264	272.800.000	3,264	1.364.000.000	Setda (Bag. Pemerinta han)

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur	Persentase SOP Sesuai Standar.	Persen	100	100	15.865.000	100	15.865.000	100	15.865.000	100	15.865.000	100	15.865.000	100	79.325.000	Inspektora t
77	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Nilai	70,03	79,41	190.000.000	83	380.000.000	84	380.000.000	86	380.000.000	89	380.000.000	89	1.710.000.000	SEMUA SKPD
		Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Nilai	100	100	190.000.000	100	380.000.000	100	380.000.000	100	380.000.000	100	380.000.000	100	1.710.000.000	
		32. Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Predikat	B	A	20.481.619.536	A	20.481.619.536	A	20.481.619.536	A	20.481.619.536	A	20.481.619.536	A	102.408.097.680	
78	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah inovasi yang lolos nasional	Jumlah	3	3	285.715.900	3	285.715.900	3	285.715.900	3	285.715.900	3	285.715.900	3	1.428.579.500	Setda (Bag. Orpad)
79	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Persentase pemenuhan aspek penyelenggaraa n pelayanan publik minimal baik (B)	Nilai	3,90	4,51	167.075.000	4,60	167.075.000	4,65	167.075.000	4,80	167.075.000	5,00	167.075.000	5,00	835.375.000	Dinas.PM PTSP

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medik/Non Medik	Persentase Pemenuhan Aspek Sarana IPP RSUD	Persen	0,71	0,89	17.025.339.636	0,98	17.025.339.636	1,07	17.025.339.636	1,25	17.025.339.636	1,43	17.025.339.636	1,43	85.126.698.180	RSUD H. Hasan Basry
81	Prog.Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	Persen	98	98	1.717.805.000	99	1.717.805.000	99	1.717.805.000	99	1.717.805.000	99	1.717.805.000	99	8.589.025.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
82	Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	90	90	197.010.000	91	197.010.000	91	197.010.000	92	197.010.000	92	197.010.000	92	985.050.000	
83	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti	Persen	100	100	1.088.674.000	100	1.088.674.000	100	1.088.674.000	100	1.088.674.000	100	1.088.674.000	100	5.443.370.000	
		33. Persentase kualitas aspek perencanaan	Persen	54,33	60,29	2.817.875.000	62,82	2.764.000.000	63,81	3.322.500.000	65,45	3.100.000.000	67,09	4.045.000.000	67,09	16.049.375.000	
84	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan terhadap dokumen perencanaan	Persen	100	100	1.067.150.000	100	539.000.000	100	1.075.000.000	100	800.000.000	100	1.330.000.000	100	4.811.150.000	Bappelitbangda
85	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	80	86.800.000	90	100.000.000	95	110.000.000	95	120.000.000	100	120.000.000	100	536.800.000	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86	Program Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan daerah	Persen	80	90	209.100.000	90	270.000.000	90	275.000.000	90	280.000.000	90	280.000.000	90	1.314.100.000	
87	Program Perencanaan Pembangunan Sektoral	Persentase rekomendasi hasil perencanaan pembangunan sektoral yang ditindaklanjuti untuk kebijakan daerah	Persen	100	100	211.050.000	100	290.000.000	100	292.500.000	100	325.000.000	100	335.000.000	100	1.453.550.000	
88	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti untuk kebijakan daerah	Persen	100	100	598.125.000	100	815.000.000	100	820.000.000	100	825.000.000	100	980.000.000	100	4.038.125.000	
89	Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Tingkat kesesuaian RTRW dengan pelaksanaan pembangunan	Persen	0	9,09	645.650.000	18	750.000.000	27	750.000.000	36	750.000.000	55	1.000.000.000	55	3.895.650.000	DINAS PUTR
	Sasaran 17. Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	34. Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	4.549.098.000	WTP	4.549.098.000	WTP	4.549.098.000	WTP	4.549.098.000	WTP	4.549.098.000	WTP	22.745.490.000	Bakeuda

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas	Persen	100	100	244.038.000	100	244.038.000	100	244.038.000	100	244.038.000	100	244.038.000	100	1.220.190.000	
91	Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kesesuaian Data Total Neraca BMD dengan Neraca Keuangan	Persen	100	100	3.096.475.000	100	3.096.475.000	100	3.096.475.000	100	3.096.475.000	100	3.096.475.000	100	15.482.375.000	
92	Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penurunan Temuan Bersifat Keuangan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS	Persen	56	36	1.208.585.000	25	1.208.585.000	23	1.208.585.000	20	1.208.585.000	18	1.208.585.000	18	6.042.925.000	Inspektora t
		persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugikan keuangan negara/daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		100	-	
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	Persen	75,79	64		75		77		80		82		82	-	
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi	Persen	93,75	100		100		100		100		100		100	-	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu																
		35. Indeks profesionalism e ASN	Indeks	48,63	69,77	3.214.993.150	73,17	3.214.993.150	74,42	3.214.993.150	78,12	3.214.993.150	81,33	3.214.993.150	81,33	16.074.965.750		
93	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) yg melakukan kebijakan promosi terbuka untuk JPT sesuai dengan undang- undang ASN	Persen	21,87	37,5	2.327.123.000	19	8.254.909.600	9	2.567.123.000	19	2.447.123.000	28	2.507.123.000	28	18.103.401.600		
		Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	Persen	50,89	66,43		68		71		73		75		75		BKD,DIKL AT	
		Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	Persen	28,1	43,55		47		50		54		57		57		-	
94	Program Pembinaan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat penurunan	Persen	Kenaikan 22%	20	117.063.000	20	117.063.000	20	117.063.000	20	117.063.000	20	117.063.000,00	100	585.315.000		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		pelanggaran displin PNS															
95	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawain	Persentase formasi jabatan pelaksana yang terisi sesuai kompetensi dan kualifikasi	Persen	88,4	91	623.394.400	93	623.394.400	96	623.394.400	98	623.394.400	100	623.394.400	100	3.116.972.000	
		Persentase Database PNS pada SAPK dan SIMPEG yang Update	Persen	86,8	89,5		92		95		98		100		100	-	
96	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraa n Organisasi dan Aparatur Daerah	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100	100	147.412.750	100	147.412.750	100	147.412.750	100	147.412.750	100	147.412.750	100	737.063.750	Setda (Bag. Orpad)
	Sasaran 18. Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	36. Persentase perangkat daerah yang mengimplemen tasikan teknologi informasi dengan baik	Persen	7,89	13.16	2.285.070.000	39.47	2.285.070.000	65.79	2.760.070.000	92.11	2.460.070.000	100	2.460.070.000	100	12.250.350.000	
97	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah SKPD yang terkoneksi dengan intranet ke Server Center Diskominfo	SKPD	0	1	1.460.070.000	9	1.460.070.000	19	1.460.070.000	29	1.460.070.000	38	1.460.070.000	38	7.300.350.000	Dinas Kominfo

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jumlah Aplikasi e-Government yang berfungsi dengan baik	Aplikasi	0	5	825.000.000	15	825.000.000	25	1.300.000.000	35	1.000.000.000	38	1.000.000.000	38	4.950.000.000	
		78. Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	Persen	0,60	8.33	220.837.000	15.97	220.837.000	23.61	220.837.000	31.25	220.837.000	38.88	220.837.000	38.88	1.104.185.000	
98	Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa/kel yang berkinerja baik	Persen	10,41	25,69	220.837.000	33,33	220.837.000	40,97	220.837.000	48,61	220.837.000	56,25	220.837.000	56,25	1.104.185.000	Dinas Pemberda yaan Masyarakat dan Desa
	Sasaran 19. Meningkatkan Kehidupan Sosial Keagamaan	Persentase peningkatan penerimaan zakat	Persen	7	8	64.650.000.	9	64.650.000.	10	64.650.000.	11	64.650.000.	12	64.650.000.	12	323.250.000	
	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah (Pada Setda Kab. HSS)	38. Persentase peningkatan penerimaan zakat	Persen	9	9	64.650.000.	10	64.650.000.	11	64.650.000.	12	64.650.000.	13	64.650.000.	13	323.250.000	Bagian Kesra Setda kab HSS
	JUMLAH					434.672.182.544		508.481.759.318		503.007.113.339		490.518.559.900		485.151.324.643		2.421.830.939.744	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah terpilih. Pagu indikatif

sebagai wujud ancar-ancar kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan ancar-ancar jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kerangka, sebagai berikut.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20%. Tabel dibawah merupakan pagu indikatif pada program prioritas I.

Tabel 7. 1 Pagu Indikatif Program Prioritas I

Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Prioritas I	480.665.367.544	494.321.149.168	488.508.716.589	475.750.163.150	470.342.927.893

Sumber : Hasil dan Perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program Prioritas I, sebagai berikut :

Tabel 7. 2 Nama Program Prioritas I dan Pagu Indikatif Per Program Tahun 2019-2023

No	Nama Program	Pagu Indikatif
1	Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	4.794.000.000
2	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	2.642.895.000
3	Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	800.000.000
4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	8.618.875.000
5	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	39.047.873.000
6	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.800.000.000
7	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15.386.980.000
8	Program Peningkatan Budaya Baca	1.389.250.000
9	Program Peningkatan Akses Perpustakaan	1.112.681.250
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	314.051.000
11	Program Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil Bersalin, Nifas, Dan Anak	22.195.000.000
12	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	10.036.204.000
13	Program Peningkatan Akses Sarana Dan Prasarana Kesehatan	11.454.953.675
14	Program Peningkatan Mutu Sarana Dan Prasarana Kesehatan	24.702.571.325
15	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	151.633.072.000
16	Program Pengendalian Dan Pencegahan Penyakit	722.385.800
17	Program Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	22.613.612.500
18	Program Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Layanan	212.025.477.000
19	Program Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Sakit	76.793.868.565
20	Program Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas Dan Jaringannya	163.953.776.220
21	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (BLUD)	435.506.547.208
22	Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda Dan Masyarakat	814.022.500
23	Program Ketersediaan Dan Distribusi Pangan	3.256.090.000
24	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.950.731.000
25	Program Peningkatan Akses Dan Mutu Air Bersih	53.208.377.500

No	Nama Program	Pagu Indikatif
26	Program Pengelolaan Air Limbah Dan Drainase	17.140.196.601
27	Program Penegakan Peraturan Daerah	430.150.000
28	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bencana	689.400.000
29	Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	505.750.000
30	Program Peningkatan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	679.850.000
31	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	1.996.682.500
32	Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	31.912.070.000
33	Program Peningkatan Kualitas Dan Perlindungan Tenaga Kerja	994.471.250
34	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	68.756.250
35	Program Peningkatan Mutu Produk Industri	944.850.000
36	Program Pengembangan Sentra Industri	9.200.000.000
37	Program Peningkatan Usaha Sektor Perdagangan	4.085.490.000
38	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	7.924.915.000
39	Program Peningkatan Sarana Dan Jaringan Distribusi Perdagangan	25.536.350.000
40	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	2.518.005.000
41	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	2.035.547.500
42	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	1.920.877.500
43	Program Peningkatan Populasi Ternak	11.660.116.995
44	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.357.574.900
45	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	311.000.000
46	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3.834.900.000
47	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	7.904.470.000
48	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	82.758.000
49	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	660.676.000
50	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan PAD Dan Dana Perimbangan	1.947.865.000
51	Program Peningkatan Pengelolaan PBB Dan BPHTB	3.606.675.000
52	Program Peningkatan Realisasi Investasi	620.565.000
53	Program Penguatan Iklim Investasi	2.102.055.000

No	Nama Program	Pagu Indikatif
54	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	25.976.866.000
55	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.617.170.000
56	Program Pengembangan Kemitraan	4.816.595.000
57	Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	7.927.370.000
58	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	54.486.571.500
59	Program Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	42.178.173.475
60	Program Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	236.658.979.900
61	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	143.848.835.000
62	Program Pengembangan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Lainnya	19.336.250.000
63	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Publik	284.258.975.000
64	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	34.814.402.500
65	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dan Areal Pemakaman	17.619.755.000
66	Program Penataan Dan Penguasaan Tanah	54.516.500.000
67	Program Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Sehat	75.333.630.000
68	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1.006.377.500
69	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	195.825.000
70	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	192.487.500
71	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	50.225.000
72	Program Pemenuhan Hak Anak Dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	463.621.500
73	Program Peningkatan Pelindungan Anak	119.830.000
74	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	11.017.391.000
75	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	34.123.930.000
76	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dan Instansi Pemerintah	1.278.656.300
77	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.364.000.000
78	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur	79.325.000
79	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	3.420.000.000
80	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.428.579.500

No	Nama Program	Pagu Indikatif
81	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	835.375.000
82	Program Peningkatan Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medik/Non Medik	85.126.698.180
83	Prog.Peningkatan Pelayanan Kependudukan	8.589.025.000
84	Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	985.050.000
85	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	5.443.370.000
86	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.811.150.000
87	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	536.800.000
88	Program Evaluasi Pembangunan Daerah	1.314.100.000
89	Program Perencanaan Pembangunan Sektoral	1.453.550.000
90	Program Penelitian Dan Pengembangan	4.038.125.000
91	Program Perencanaan Dan Pengendalian Tata Ruang	3.895.650.000
92	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	1.220.190.000
93	Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	15.482.375.000
94	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6.042.925.000
95	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18.103.401.600
96	Program Pembinaan Disiplin Aparatur	585.315.000
97	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawain	3.116.972.000
98	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi Dan Aparatur Daerah	737.063.750
99	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	12.250.350.000
100	Program Pembinaan Dan Pelayanan Pemerintahan Desa	1.104.185.000
	Jumlah	2.409.588.324.344

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar. Tabel dibawah merupakan pagu indikatif pada program prioritas II:

Tabel 7.3 Pagu Indikatif Program Prioritas II

Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Prioritas II	36.850.484.975	33.976.355.725	33.976.355.725	33.976.355.725	35.030.272.525

Sumber : Hasil dan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program **Prioritas II**, sebagai berikut:

Tabel 7.4 Nama Program Prioritas II dan Pagu Indikatif Per Program Tahun 2019-2023

No	Nama Program	Pagu Indikatif
1	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar	5.026.750.000
2	Program Promosi kesehatan	581.162.500
3	Program Pembinaan Jasa Kontruksi	374.806.250
4	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	383.000.000
5	Program Penanganan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	3.601.959.750
6	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	1.055.705.500
7	Program Pelayanan Informasi Data Kependudukan	1.229.890.000
8	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	315.043.250
9	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	864.544.000
10	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau	362.979.700
11	Program Pelayanan Informasi dan Media Massa	21.746.100.000
12	Program peningkatan peran serta kepemudaan	2.398.405.000
13	Program Peningkatan Prestasi dan Permasalahatan Olahraga	4.764.078.750
14	Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah	500.725.000
15	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	1.657.934.000
16	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	139.500.000
17	Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak	62.200.000
18	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	464.758.400
19	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	15.738.525.000

No	Nama Program	Pagu Indikatif
20	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	199.140.625
21	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.580.500.000
22	Program Peningkatan Pelayanan Perundang - Undangan dan Hubungan Masyarakat	2.279.425.000
23	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan	96.207.800.000
24	Program Perumusan Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan	3.455.224.800
25	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	3.975.000.000
26	Program Pelayanan Keprotokolan dan Kehumasan Pimpinan Daerah	11.598.712.500
27	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	7.492.968.000
28	Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan	568.125.000
29	Implementasi Kerjasama Pemerintahan Daerah	62.250.000,00
30	Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	2.352.620.000
31	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	561.975.000
32	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar	5.026.750.000
	Jumlah	170.886.441.525

Program Prioritas III merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas III berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar. Tabel dibawah merupakan pagu indikatif pada program prioritas III:

Tabel 7.5 Pagu Indikatif Program Prioritas III

Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Prioritas III	19.810.829.200	19.810.829.200	19.810.829.200	19.810.829.200	19.810.829.200

Sumber : Hasil dan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program Prioritas III, sebagai berikut:

Tabel 7.6 Nama Program Prioritas III dan Pagu Indikatif Per Program Tahun 2019-2023

No	Nama Program	Pagu Indikatif
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	56.850.192.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21.751.194.000
3	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	20.452.760.000
	Jumlah	99.054.146.000

Tabel 7.7 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

Kode	Kapasitas Riil/ Belanja	Proyeksi				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	BELANJA					
	Belanja Tidak Langsung	790,063,305,000	806,447,107,000	821,157,634,000	835,973,508,000	861,154,516,000
	Belanja Pegawai	549.500.000.000	560.490.000.000	571.699.800.000	583.133.796.000	594.796.471.000
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	9.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	21.000.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	20.737.000.000	21.250.000.000	21.500.000.000	21.500.000.000	21.500.000.000
	Belanja Bagi Hasil	2.381.287.000	2.244.288.000	2.356.502.000	2.474.327.000	2.598.044.000
	Belanja Bantuan Keuangan	203.445.018.000	206.462.819.000	209.601.332.000	212.865.385.000	216.260.001.000
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	Belanja Langsung	712.494.137.000	680.009.291.000	692.685.277.000	724.637.032.000	749.282.517.400
	Belanja Pegawai	40.879.123.000	41.219.245.000	37.244.650.000	36.999.874.000	38.485.187.400
	Belanja Barang Dan Jasa	306.086.103.000	261.733.250.000	265.074.378.000	275.114.797.000	276.706.385.000
	Belanja Modal	365.528.911.000	377.056.796.000	390.366.249.000	412.522.361.000	434.090.945.000

Sumber : Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

Tabel 7.8 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
	URUSAN WAJIB																		
	TERKAIT PELAYANAN DASAR																		
	PENDIDIKAN																		
	Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD Formal	Persen	72,98	76,55	958.800.000	77,8	958.800.000	79,05	958.800.000	80,3	958.800.000	81,55	958.800.000	81,55	4.794.000.000	Dinas Pendidikan		
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pemenuhan SPM/SNP PAUD	Persen	0,62	1,25	528.579.000	1,87	528.579.000	2,50	528.579.000	3,12	528.579.000	3,75	528.579.000	3,75	2.642.895.000	Dinas Pendidikan		
	Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	85,38	89,23	1000.000.000	91,15	1.200.000.000	93,06	1.200.000.000	94,30	1.200.000.000	96,14	1.200.000.000	96,14	5.800.000.000	Dinas Pendidikan		
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	Persentase pemenuhan Aspek SPM Dikmas	Persen	18,51	25,92	1.723.775.000	25,92	1.723.775.000	29,92	1.723.775.000	33,33	1.723.775.000	37,03	1.723.775.000	40,74	8.618.875.000	Dinas Pendidikan		
	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	109,67	100	1.005.350.000	100	1.005.350.000	100	1.005.350.000	100	1.005.350.000	100	1.005.350.000	100	1.005.350.000	100	5.026.750.000	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	94,29	97,45		98,00		98,30		99,00		99,50						
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	Persen	34,00	28,00		25,00		23,00		20,00		15,00		15,00				
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase pemenuhan SPM/SNP SD	Persen	2,90	4,15	7.809.574.600	5,39	7.809.574.600	6,64	7.809.574.600	7,88	7.809.574.600	9,13	7.809.574.600	9,13	39.047.873.000	Dinas Pendidikan		
	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	93,14	89,17	-	90,49	450.000.000	91,37	450.000.000	92,25	450.000.000	93,13	450.000.000	93,13	1.800.000.000	Dinas Pendidikan		

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	76,29	79,45		79,90		80,25		82,15		85,00		85,00		Dinas Pendidikan
		Angka putus Sekolah (APS) SMP	Persen	15,00	10,00		7,00		6,00		5,00		4,00		4,00		Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persen	31,25	25,00	3.077.396.000	34,00	3.077.396.000	43,75	3.077.396.000	53,15	3.077.396.000	59,38	3.077.396.000	59,38	15.386.980.000	Dinas Pendidikan
KESEHATAN																	
		Program Perbaikan Gizi masyarakat	persen	61,55	72,30	314.051.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kesehatan ibu hamil bersalin, nifas, dan anak	persen	61,55	79,00	22.195.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	Persen	61,55	-	-	81	2.509.051.000	82	2.509.051.000	83	2.509.051.000	84	2.509.051.000,	84	10.036.204.000,	Dinas Kesehatan

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		dasar, ibu, dan lansia															
	Program peningkatan akses sarana dan prasarana kesehatan	Persentase pemenuhan Akses Prasarana Kesehatan	persen	77,08	80	-	83	1.800.000.000	84	1.800.000.000	87	1.800.000.000	89	1.800.000.000	89	7.200.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase pemenuhan Akses Sarana Kesehatan	persen	17,64	20,50	850.990.735	21,45	850.990.735	22,4	850.990.735	23,36	850.990.735	24,79	850.990.735	24,79	4.254.953.675	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kesehatan	Persentase pemenuhan Kualitas Prasarana Kesehatan	persen	40,91	98,18	4.796.514.265	72,73	4.796.514.265	77,27	4.796.514.265	86,36	4.796.514.265	90,91	4.796.514.265	90,91	23.982.571.325	Dinas Kesehatan
		Persentase pemenuhan Kualitas sarana Kesehatan	Persen	14,29	38,10	-	52,38	180.000.000	66,67	180.000.000	80,95	180.000.000	90,48	180.000.000	90,48	900.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan kualitas layanan rumah sakit	Persentase fasyankes yang terakreditasi paripurna	persen	4,35	4,35	15.358.773.713	4,35	15.358.773.713	8,7	15.358.773.713	13,04	15.358.773.713	17,39	15.358.773.713	17,39	76.793.868.565	Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,87	82		82		82		82		82		82		Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	persen	100	100	30.326.614.400	100	30.326.614.400	100	30.326.614.400	100	30.326.614.400	100	30.326.614.400	100	151.633.072.000	Dinas Kesehatan
	Program Promosi kesehatan	Persentase Pemenuhan Layanan Promosi Kesehatan	persen	17,19	20,64	116.232.500	21,15	116.232.500	18,71	116.232.500	14,74	116.232.500	100	116.232.500	100	581.162.500	Dinas Kesehatan
	Program Pengendalian dan pencegahan penyakit	Persentase pemenuhan Pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Dasar,	persen	60,36	48,52	144.477.160	52,38	144.477.160	55,4	144.477.160	58,43	144.477.160	60,67	144.477.160	60,67		Dinas Kesehatan

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		Penyakit Menular dan Tidak Menular															
		Persentase Pemenuhan Capaian Indikator Pengendalian Penyakit Menular	persen	20,06	55,33		57,21		58,46		63,23		65,97		65,97		Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas dan Jaringannya	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi Sempurna	Persen	4,35	4,35	32.790.755.244	4,35	32.790.755.244	8,7	32.790.755.244	13,04	32.790.755.244	17,79	32.790.755.244	17,79	163.953.776.20	Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,87	82	-	82	-	82	-	82	-	82	-	82	-	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Persentase Pemenuhan Tingkat Kesehatan RSUD, Aspek IPP RSUD, Dan Akreditasi RSUD, Kategori > B	Persen	- 55 - 68 - 80	- 66,9 - 72,03 - 80,5	84.309.300.000	- 75,6 - 76,99 - 80,75	84.309.300.000	- 79 - 77,97 - 81	85.497.164.021	- 81 - 78,44 - 81,5	88.917.050.582	- 85 - 78,93 - 82	92.473.732.605	- 85 - 78,93 - 82	435.506.547.208	RSUD H. Hasan Basry
	Program Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Layanan	Persentase Pemenuhan Aspek Prasarana IPP RSUD	Persen	2,86	3,57	42.405.095.400	3,93	42.405.095.400	4,29	42.405.095.400	5,00	42.405.095.400	5,71	42.405.095.400	5,71	212.025.477.000	RSUD H. Hasan Basry
	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medik/Non Medik	Persentase Pemenuhan Aspek Sarana IPP RSUD	Persen	0,71	0,89	17.025.339.636	0,98	17.025.339.636	1,07	17.025.339.636	1,25	17.025.339.636	1,43	17.025.339.636	1,43	85.126.698.180	RSUD H. Hasan Basry
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	80	62,68	28.769.767.000	65,60	28.769.767.000	67,35	28.769.767.000	69,10	28.769.767.000	71,43	28.769.767.000	71,43	143.848.835.000	DINAS PUTR

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	30	49,71	3.867.250.000	55,44	3.867.250.000	60,22	3.867.250.000	65,00	3.867.250.000	69,78	3.867.250.000	69,78	19.336.250.000	DINAS PUTR
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	629,91	536,70	24.486.571.500	0,30	7.500.000.000	0,80	2.000.000.000	0,80	2.000.000.000	0,80	2.000.000.000	0,80	37.986.571.500	DINAS PUTR
	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	629,91	536,70	42.178.173.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.178.173.475	DINAS PUTR
	Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	-	-	-	546,58	59.164.744.975	556,46	59.164.744.975	565,44	59.164.744.975	575,77	59.164.744.975	575,77	236.658.979.900	DINAS PUTR
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	Jumlah bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	buah	4	5	14.258.975.000	5	85.000.000.000	4	75.000.000.000	4	60.000.000.000	3	50.000.000.000	3	284.258.975.000	DINAS PUTR
	Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih	Persentase penduduk / rumah tangga yang terakses air bersih	Persen	76,94	77,62	7.090.993.500	78,27	7.090.993.500	78,89	7.090.993.500	79,48	7.090.993.500	80,04	7.090.993.500	80,04	35.454.967.500	DINAS PUTR
	Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	Persentase drainase yang berfungsi dengan baik	Persen	59	59	8.808.384.601	63	8.808.384.601	66	8.808.384.601	69	8.808.384.601	73	8.808.384.601	73	44.041.923.005	DINAS PUTR
		Persentase KK yang terlayani air limbah domestik	Persen	79,68	6,98		7,1		7,18		7,27		7,35		7,43		DINAS PUTR
	Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Tingkat kesesuaian RTRW dengan pelaksanaan pembangunan	Persen	0,00	9,09	645.650.000	18,18	750.000.000	27,27	750.000.000	36,36	750.000.000	54,55	1.000.000.000	54,55	3.895.650.000	DINAS PUTR
	Program Pembinaan Jasa Kontruksi	Persentase tenaga terampil yang bersertifikat	Persen	1,09	1,81	74.806.250	3,63	75.000.000	5,44	75.000.000	7,26	75.000.000	9,07	75.000.000	9,07	374.806.250	DINAS PUTR

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Pencegahan Tindak Kriminal	Umum Yang Diobservasi															
				Program Penanganan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Kebakaran dan Pemenuhan Perlindungan Masyarakat	Persen	100	100	720.391.950.	100	720.391.950.	100	720.391.950.	100	720.391.950.	100	720.391.950.	100	3.601.959.750	Satpol PP
				SOSIAL																
				Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tingkat Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	4,85	5,72	399.336.500	7,0	399.336.500	7,07	399.336.500	7,16	399.336.500	7,25	399.336.500	7,25	1.996.682.500	Dinas Sosial
				Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Cakupan Lembaga/Organisasi sosial, yang aktif dalam penanganan masalah sosial	Persen	35,33	38,67	135.970.000	42	135.970.000	45,33	135.970.000	48,67	135.970.000	52	135.970.000	52	679.850.000	Dinas Sosial
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	5,63	6,02	389.935.000	6,74	389.935.000	6,78	389.935.000	6,83	389.935.000	6,87	389.935.000	6,87	1.949.675.000	Dinas Sosial

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	1,11	3,54	200.211.200	3,85	200.211.200	4	200.211.200	4,13	200.211.200	4,26	200.211.200	4,26	1.001.056.000	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tingkat Perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	74,64	74,64	6.382.414.000	77,13	6.382.414.000	79,87	6.382.414.000	82,88	6.382.414.000	86,20	6.382.414.000	86,20	31.912.070.000	Dinas Sosial
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																	
TENAGA KERJA																	
	Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	Persen	42,76	42,96	184.554.250	43,03	184.554.250	43,34	184.554.250	43,63	184.554.250	48,50	184.554.250	48,50	922.721.250	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil, Koperasi dan Perindustrian
		Persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	Persen	75	80	14.340.000	85	14.340.000	90	14.340.000	95	14.340.000	95	14.340.000	85	71.700.000	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil, Koperasi dan Perindustrian
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase angkatan kerja yang di tempatkan	Persen	0,73	0,75	13.751.250	0,76	13.751.250	0,77	13.751.250	0,78	13.751.250	0,79	13.751.250	0,79	68.756.250	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil, Koperasi

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
																	dan Perindustrian
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK																	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase ARG terhadap Anggaran Belanja Langsung APBD	Persen	36,84	36,84	38.497.500	52,63	38.497.500	68,42	38.497.500	84,21	38.497.500	100	38.497.500	100	192.487.500	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Anak
	Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	Persen	8,11	8,11	10.045.000	21,08	10.045.000	33,51	10.045.000	45,41	10.045.000	52,97	10.045.000	52,97	50.225.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Institusi/ lembaga yang mengimplem entasikan pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak	Persen	77,55	77,55	92.724.300	83,67	92.724.300	89,8	92.724.300	95,92	92.724.300	100	92.724.300	100	463.621.500	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Anak
	Program Peningkatan Perlindungan Anak	Tingkat pemenuhan aspek desa/ Kelurahan layak anak berbasis klaster	Persen	18,52	27,78	23.966.000	55,56	23.966.000	79,63	23.966.000	98,15	23.966.000	100	23.966.000	100	119.830.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Anak
PANGAN																	

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	ton	59,653	102,092	814.022.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814.022.500	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	ton	59,653	102,092	-	117,092	677.451.000	132,092	677.451.000	147,092	677.451.000	162,092	677.451.000	162,092	2.709.804.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Tingkat Fluktuasi harga	Persen	5,87	-	-	5,47	158.971.500	5,43	158.971.500	5,40	158.971.500	5,35	158.971.500	5,35	635.886.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Tercemar	Persen	≤20%	≤17%	154.585.500	≤15%	177.850.400	≤13%	177.850.400	≤12%	177.850.400	≤10%	177.850.400	≤10%	865.987.100	Dinas Ketahanan Pangan
		Skor PPH Konsumsi	Skor	80,90	82,82	-	83,65	47.429.600	84,48	47.429.600	85,32	47.429.600	86,17	47.429.600	86,17	189.718.400	Dinas Ketahanan Pangan
PERTANAHAN																	
	Program Penataan dan Penguasaan Tanah	Persentase penguasaan fisik tanah yang teradministrasi	Persen	0	12	10.903.300.000	24	10.903.300.000	36	10.903.300.000	48	10.903.300.000	60	10.903.300.000	60	54.516.500.000	DISPERA KPLH
LINGKUNGAN HIDUP																	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase indeks kualitas Udara titik pantau yang memenuhi standar	Persen	85	85	2.203.478.200	85	2.203.478.200	85	2.203.478.200	85	2.203.478.200	85	2.203.478.200	85	11.017.391.000	DISPERA KPLH
		Persentase indeks kualitas air	Persen		51		51,50		52		52,50		53		53		DISPERA KPLH

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		titik pantau yang memenuhi standar															
		Persentase tutupan lahan pada areal bekas pertambangan	Persen		35,34		35,49		35,63		35,78		35,93		35,93		DISPERA KPLH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
		Prog.Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Persen	98	98	1.717.805.000	99	1.717.805.000	99	1.717.805.000	99	1.717.805.000	99	1.717.805.000	99	8.589.025.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	Persen	90	90	197.010.000	91	197.010.000	91	197.010.000	92	197.010.000	92	197.010.000	92	985.050.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pelayanan Informasi Data Kependudukan	Persen	80	95	245.978.000	96	245.978.000	97	245.978.000	98	245.978.000	99	245.978.000	99	1.229.890.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	70,00	73,63	201.275.500	77,32	Rp 201.275.500	81,01	Rp 201.275.500	84,70	Rp 201.275.500	88,38	Rp 201.275.500	88,38	1.006.377.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persen	4,16	13,88	Rp 39.165.000	21,52	Rp 39.165.000	29,16	Rp 39.165.000	36,80	Rp 39.165.000	44,44	Rp 39.165.000	44,44	195.825.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persen	10,41	25,69	Rp 220.837.000	33,33	Rp 220.837.000	40,97	Rp 220.837.000	48,61	Rp 220.837.000	56,25	Rp 220.837.000	56,25	1.104.185.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		berkinerja baik															at dan Desa
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Persen	0	9,92	39.978.600	29,76	39.978.600	49,6	39.978.600	69,44	39.978.600	89,28	39.978.600	89,28	199.893.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Anak
		Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	79,6	79,6	4.482.743.900	80,5	4.482.743.900	81,4	4.482.743.900	82,4	4.482.743.900	83,3	4.482.743.900	83,3	22.413.719.500	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Anak
	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	Persen	60,2	60,2	63.008.650	65,22	63.008.650	70,23	63.008.650	75,25	63.008.650	80,27	63.008.650	80,27	315.043.250	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Anak
		Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	Persen	18,18	18,18		36,36		54,55		72,73		100		100		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Anak
PERHUBUNGAN																	

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi	persen	93,33	92,86	864.544.000	94,29	864.544.000	94,88	864.544.000	95,19	864.544.000	95,45	864.544.000	95,45	864.544.000	Dinas Perhubungan
		Persentase angkutan umum yang laik jalan		85,42	88,27		89,69		91,12		92,54	96,81		56,95		Dinas Perhubungan	
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau yang laik layar	persen	54,79	57,53	362.979.700	60,27	362.979.700	63,01	362.979.700	65,75	362.979.700	68,49	362.979.700	68,49	362.979.700	Dinas Perhubungan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah SKPD yang terkoneksi dengan intranet ke Server Center Diskominfo	SKPD	0	1	1.460.070.000	9	1.460.070.000	19	1.460.070.000	29	1.460.070.000	38	1.460.070.000	38	7.300.350.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Aplikasi e-Government yang berfungsi dengan baik	Aplikasi	0	5	825.000.000	15	825.000.000	25	1.300.000.000	35	1.000.000.000	38	1.000.000.000	38	4.950.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pelayanan Informasi dan Media Massa	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	SKPD	0	100	124.345.000	100	124.345.000	100	124.345.000	100	124.345.000	100	124.345.000	100	621.725.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi	Persen	100	100	4.224.875.000	100	4.224.875.000	100	4.224.875.000	100	4.224.875.000	100	4.224.875.000	100	21.124.375.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen	85,62	97,45	52.669.000	98,09	52.669.000	98,73	52.669.000	99,37	52.669.000	100	-	100	210.676.000	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil, Koperasi dan Perindustrian
		persentase SDM Koperasi aktif yang berkualitas	Persen	30,5	31,21	90.000.000	41,63	90.000.000	52,05	90.000.000	62,46	90.000.000	72,88	90.000.000	72,88	450.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil, Koperasi dan Perindustrian
		persentase SDM Usaha Kecil yang berkualitas	Persen	9,1	10,5	90.737.000	23,00	90.737.000	30,5	90.737.000	38,00	90.737.000	45,5	90.737.000	45,5	453.685.000	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil, Koperasi dan Perindustrian
PENANAMAN MODAL																	
	Program Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi PMDN	Rupiah	57.151.000.000	580.000.000.000	124.113.000	600.000.000.000	124.113.000	650.000.000.000	124.113.000	700.000.000.000	124.113.000	770.000.000.000	124.113.000	770.000.000.000	620.565.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
	Program Penguatan Iklim Investasi	Persentase kepatuhan investor terhadap perundang-undangan.	Persen	20	55	152.055.000	75	700.000.000	90	550.000.000	100	400.000.000	100	300.000.000	100	2.102.055.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Persentase pemenuhan aspek penyelenggaraan pelayanan publik minimal baik (B)	Nilai	3,90	4,51	167.075.000	4,60	167.075.000	4,65	167.075.000	4,80	167.075.000	5,00	167.075.000	5,00	760.375.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																	
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase pemuda berprestasi dari unsur organisasi kepemudaan & pemuda berprestasi bidang kepaskibraan	Persen	66,67	77,78	479.681.000	88,89	479.681.000	88,89	479.681.000	100	479.681.000	100	479.681.000	100	2.398.405.000	Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata
	Program Peningkatan Prestasi dan Permasalahan Olahraga	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali pada POPDA tingkat provinsi	Persen	31,25	31,25	952.815.750	43,75	952.815.750	53,13	952.815.750	59,38	952.815.750	71,88	952.815.750	71,88	4.764.078.750	Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata
STATISTIK dan PERSANDIAN																	
	Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah	Persentase Pengamanan dan Layanan Informasi yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100.145.000	100	100.145.000	100	100.145.000	100	100.145.000	100	100.145.000	100	500.725.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
KEBUDAYAAN																	

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
				Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase tingkat pengembangan seni dan budaya	Persen	34,78	42,26	1.585.474.000	52,28	1.585.474.000	62,57	1.585.474.000	71,00	1.585.474.000	84,10	1.585.474.000	84,10	7.927.370.000	Dinas Pendidikan
				PERPUSTAKAAN																
				Program Peningkatan Budaya Baca	Persentase Peningkatan bahan Pustaka	Persen	0	20	277.850.000	40	415.350.000	60	415.350.000	80	415.350.000	100	415.350.000	100	1.939.250.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Akses Perpustakaan	Persentase Jangkauan Layanan Perpustakaan	Persen	93,20	93,20	136.325.000	94,11	230.500.000	96,11	230.500.000	97,57	230.500.000	100	230.500.000	100	1.058.325.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Persentase Perpustakaan Desa dan Kelurahan yang aktif	Persen	27,39	27,39	86.211.250	34,24	201.710.000	41,09	201.710.000	47,94	201.710.000	54,79	201.710.000	54,79	893.051.250	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				KEARSIPAN																
				Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase OPD yang mengelola Arsip	Persen	26,00	39,47	102.096.000	52,63	388.959.500	65,78	388.959.500	78,95	388.959.500	92,10	388.959.500	92,10	1.657.934.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
				KELAUTAN DAN PERIKANAN																
				Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	3.959	4.791	766.980.000	5.270	766.980.000	5.797	766.980.000	6.376	766.980.000	7.014	766.980.000	7.014	3.834.900.000	Dinas Perikanan
				Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	8.454	9.579	1.580.894.000	10.058	1.580.894.000	10.863	1.580.894.000	12.057	1.580.894.000	13.625	1.580.894.000	13.625	7.904.470.000	Dinas Perikanan

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	Persen	2	3,00	27.900.000	5,00	27.900.000	5,50	27.900.000	6,00	27.900.000	7,00	27.900.000	7,00	139.500.000	Dinas Perikanan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	Persen	0,6	1	16.551.600	7	16.551.600	9	16.551.600	12	16.551.600	15	16.551.600	15	82.758.000	Dinas Perikanan
PARIWISATA																	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang/wisatawan	243.305	255.470	2.700.415.000	268.244	2.000.000.000	268.244	2.750.000.000	295.739	3.200.000.000	310.526	3.500.000.000	310.526	14.150.415.000	Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang/wisatawan	243.305	255.470	217.170.000	268.244	700.000.000	268.244	800.000.000	295.739	900.000.000	310.526	1.000.000.000	310.526	3.617.170.000	Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kemitraan	Lama tinggal wisatawan (Length of Stay)	malam	1	1,5	867.915.000	1,7	902.170.000	2	952.170.000	2,5	1.012.170.000	2,7	1.082.170.000	2,7	4.816.595.000	Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata
PERTANIAN																	
	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Produksi Padi	ton	253653	242707	446.812.500	247335	446.812.500	253.506	446.812.500	255.048	446.812.500	258.133	474.180.000	256.620	2.301.962.500	Dinas Pertanian
		Produksi Jagung	ton	4.973	5.035	31.010.000	5.038	31.010.000	5.041	31.010.000	5.073	31.010.000	5.102	31.010.000	5.102	155.050.000	Dinas Pertanian
		Produksi Kacang Tanah	ton	619	530,00	20.305.000	533,00	20.305.000	539,00	20.305.000	542,00	20.305.000	545,00	20.305.000	545,00	101.525.000	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Karet	ton	124.692	115.568	221.150.000	115.637	221.150.000	115.705	221.150.000	115.774	221.150.000	115.842	221.150.000	115.842	1.105.750.000	Dinas Pertanian

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		Produksi Kayu Manis	ton	29.040	29.340	98.607.000	29.564	98.607.000	29.789	98.607.000	30.013	98.607.000	30.328	98.607.000	30.328	493.035.000.	Dinas Pertanian
		Produksi Kelapa	ton	79.464	80.875	8.502.500	81.074	8.502.500	81.276	8.502.500	81.473	8.502.500	81.672	8.502.500	81.672	42.512.500	Dinas Pertanian
		Produksi Aren	ton	2400	2376	78.850.000	2388	78.850.000	2.400	78.850.000	2.412	78.850.000	2.424	78.850.000	2.424	394.250.000	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi Cabe	ton	6.617	5.976	161.800.000	6.036	161.800.000	6.096	161.800.000	6.156	161.800.000	6.216	161.800.000	6.216	809.000.000	Dinas Pertanian
		Produksi Tomat	ton	2.838	3.816	143.000.000	3.886	143.000.000	3.956	143.000.000	4.026	143.000.000	4.096	143.000.000	4.096	715.000.000	Dinas Pertanian
		Produksi Bawang Merah	ton	38	48	79.735.500	60	79.735.500	72	79.735.500	84	79.735.500	96	79.735.500	96	396.877.500	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Populasi Ternak	Jumlah populasi ternak besar (sapi + kerbau)	ekor	6.680	6.840	756.800.000	7.040	756.800.000	7.100	756.800.000	7.375	756.800.000	7.375	756.800.000	6.680	3.784.000.000	Dinas Pertanian
		Jumlah populasi ternak kecil (kambing)	ekor	2.713	2.824	340.000.000	2.916	340.000.000	2.998	340.000.000	3.184	340.000.000	3.184	340.000.000	2.713	1.700.000.000	Dinas Pertanian
		Jumlah populasi ternak unggas (ayam ras+ayam broiler+itik)	ekor	3.012.120	3.014.446	198.768.000	3.015.781	198.768.000	3.018.429	198.768.000	3.019.791	198.768.000	3.019.791	198.768.000	3.012.120	993.840.000	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak	Terkendalnya kasus zoonosis	Ekor	6.937	7.037	62.200.000	7.137	62.200.000	7.237	62.200.000	7.337	62.200.000	7.437	62.200.000	6.937	311.000.000	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Persentase pengurangan hasil	Persen	0	0	201.279.200	0	201.279.200	0	201.279.200	0	201.279.200	0	1.006.396.000	0	201.279.200	Dinas Pertanian

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		Penambahan jumlah alat pasca panen	buah	5	5	10		15		20		25		25		Dinas Pertanian	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kenaikan Kelas Kelompok Tani	kelas	0	4	263.534.900	4	267.460.000	4	271.450.000	4	275.510.000	4	279.620.000	4	1.357.574.900	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	Jumlah pengembangan optimasi lahan dan pemulihan kesuburan tanah	ha	6.760	6.937	62.200.000	7.037	62.200.000	7.137	62.200.000	7.237	62.200.000	7.337	62.200.000	7.437	311.000.000	Dinas Pertanian
KEHUTANAN																	
SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERGI																	
PERDAGANGAN																	
	Program Peningkatan usaha sektor perdagangan	Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal	Persen	11,05	11,05	817.098.000,00	9,54	817.098.000,00	8,06	817.098.000,00	6,61	817.098.000,00	5,19	817.098.000,00	5,19	4.085.490.000	Dinas perdagangan
	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	PAD sub sektor perdagangan (kemetrologan)	Rupiah	10 jt	35 jt	1.584.983.000,00	38 jt	1.584.983.000,00	41 jt	1.584.983.000,00	44 jt	1.584.983.000,00	45 jt	1.584.983.000,00	45 jt	7.924.915.000	Dinas perdagangan
	Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan	Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Persen	97,42	97,42	4.282.832.000,00	97,43	4.282.832.000,00	97,44	4.282.832.000,00	97,45	4.282.832.000,00	97,46	4.282.832.000,00	97,46	21.414.160.000	Dinas perdagangan

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
		PAD sub sektor perdagangan (pelayanan pasar)	Rupiah	3,9 M	4,2M	824.438.000	4,3 M	824.438.000	4,4 M	824.438.000	4,5 M	824.438.000	4,6 M	824.438.000	4,6 M	4.122.190.000	Dinas perdagangan	
PERINDUSTRIAN																		
		Program Peningkatan Mutu Produk Industri	Persentase produk industri yang bersertifikasi mutu	Persen	3,94	4,18	71.005.000	6,96	71.005.000	9,75	71.005.000	12,54	71.005.000	15,32	71.005.000	13,92	355.025.000	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil, Koperasi dan Perindustrian
			Persentase Peningkatan Kapasitas Produk Industri Kecil	Persen	5,58	5,58	117.965.000	11,16	117.965.000	16,74	117.965.000	22,32	117.965.000	27,9	117.965.000	27,9	589.825.000	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil, Koperasi dan Perindustrian
		Program Pengembangan Sentra Industri	Persentase Pengembangan Sentra Industri	persen	-	-	-	8,50	2.500.000.000	18,00	2.400.000.000	27,00	2.400.000.000	34,00	1.900.000.000	34,00	9.400.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil, Koperasi dan Perindustrian
FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH																		
SEKRETARIAT PADA PERANGKAT DAERAH																		

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan	Indeks	82	82	11.370.038.400	82	11.370.038.400	83	11.370.038.400	83	11.370.038.400	84	11.370.038.400	84	56.850.192.000	SEMUA SKPD
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks kepuasan pelayanan	Indeks	82	82	4.350.238.800	82	4.350.238.800	83	4.350.238.800	83	4.350.238.800	84	4.350.238.800	84	21.751.194.000	SEMUA SKPD
				Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan	Indeks	82	82	4.090.552.000	82	4.090.552.000	83	4.090.552.000	83	4.090.552.000	84	4.090.552.000	84	20.452.760.000	SEMUA SKPD
				Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Nilai	70,03	79,41	190.000.000	82,55	190.000.000	83,79	190.000.000	86,42	190.000.000	89,06	190.000.000	89,06	1.710.000.000	SEMUA SKPD
					Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Nilai	100	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	1.710.000.000	SEMUA SKPD
KECAMATAN																				
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya dilaksanakan dengan baik.	persen	100	100	2.892.508.000	100	3.147.705.000	100	3.147.705.000	100	3.147.705.000	100	3.147.705.000	100	15.483.328.000	Semua Kecamatan

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
PENGAWASAN																	
	Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penurunan Temuan Bersifat Keuangan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS	Persen	56	36	1.208.585.000	25	1.208.585.000	23	1.208.585.000	20	1.208.585.000	18	1.208.585.000	18	6.042.925.000	Inspektora t
		persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugikan keuangan negara/daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Inspektora t
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	Persen	75,79	64		75		77		80		82		82		Inspektora t
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	Persen	93,75	100		100		100		100		100		100		Inspektora t
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang memiliki Standar Kompetensi Jabatan	Perse n	61,11	100	274.828.125	100	274.828.125	100	274.828.125	100	274.828.125	100	274.828.125	100	1.374.140.625,00	Inspektora t
	Program Penataan dan Penyempurnaan	Persentase SOP Sesuai Standar.	Perse n	100	100	15.865.000	100	15.865.000	100	15.865.000	100	15.865.000	100	15.865.000	100	79.325.000	Inspektora t

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Kebijakan Sistem dan Prosedur																
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti	Persen	100	100	1.088.674.000	100	1.088.674.000	100	1.088.674.000	100	1.088.674.000	100	1.088.674.000	100	5.443.370.000	Inspektora t
SEKRETARIAT DPRD																	
	Program Peningkatan Pelayanan Perundang-Undangan dan Hubungan Masyarakat	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan Tepat Waktu	Persen	100	100	455.885.000,00	100	455.885.000	100	455.885.000	100	455.885.000	100	455.885.000	100	2.279.425.000	Sekretaria t DPRD
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi Keluhan / Pengaduan Masyarakat	Persen	100	100	17.638.260.000,00	100	19.241.560.000	100	19.241.560.000	100	19.241.560.000	100	19.241.560.000	100	96.207.800.000	Sekretaria t DPRD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	316.100.000,00	100	316.100.000	100	316.100.000,00	100	316.100.000	100	316.100.000	100	1.580.500.000	Sekretaria t DPRD
SEKRETARIAT DAERAH																	
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,0356	3,1173	272.800.000	3,1746	272.800.000	3,2100	272.800.000	3,2376	272.800.000	3,264	272.800.000	3,264	1.364.000.000	Setda (Bag. Pemerinta han)
		Persentase peningkatan administrasi pemerintahan dan kewilayahan	Persen	100	100	350.095.000	100	350.095.000	100	350.095.000	100	350.095.000	100	350.095.000	100	1.750.475.000	Setda (Bag. Pemerinta han)
	Program Perumusan Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang berkualitas	Persen	100	100	490.404.800	100	490.404.800	100	490.404.800	100	490.404.800	100	490.404.800	100	2.452.024.800	Setda (Bag. Hukum dan perundan g-undangan)
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani	Persen	100	100	200.640.000	100	200.640.000	100	200.640.000	100	200.640.000	100	200.640.000	100	1.003.200.000	Setda (Bag. Hukum dan perundan g-undangan)

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		dan diselesaikan															g-undangan)
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP pada komponen pelaporan	Nilai	BB	A	255.731.260	A	255.731.260	A	255.731.260	A	255.731.260	A	255.731.260	A	1.278.656.300	Setda (Bag. Orpad)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah inovasi yang lolos nasional	Jumlah	3	3	285.715.900	3	285.715.900	3	285.715.900	3	285.715.900	3	285.715.900	3	1.428.579.500	Setda (Bag. Orpad)
	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100	100	147.412.750,00	100	147.412.750,00	100	147.412.750,00	100	147.412.750,00	100	147.412.750,00	100	737.063.750	Setda (Bag. Orpad)
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	Indeks kepuasan Pelayanan Pimpinan Daerah	Indeks	81	82	791.400.000,00	83	791.400.000,00	84	791.400.000,00	85	791.400.000,00	86	791.400.000,00	86	3.975.000.000	Setda (Bag. Protokol dan Kehumasan)
	Program Pelayanan Keprotokolan dan Kehumasan Pimpinan Daerah	Indeks kepuasan Pelayanan Pimpinan Daerah	Indeks	81	82	2.319.742.500,00	83	2.319.742.500,00	84	2.319.742.500,00	85	2.319.742.500,00	86	2.319.742.500,00	86	11.598.712.500	Setda (Bag. Protokol dan Kehumasan)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase PD yang melaksanakan PEJ melalui ULP	Persen	100	100	618.089.000	100	718.089.000	100	758.089.000	100	789.089.000	100	789.089.000	100	3.672.445.000	Setda (Bag. PBJ)
		Persentase Pemenuhan Peningkatan Standardisasi Sistem LPSE	Persen	58,82	70,59	541.115.000	88,24	758.089.000	100	789.089.000	100	841.115.000	100	891.115.000	17	3.820.523.000	Setda (Bag. PBJ)
	Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan	Persentase policy brief bidang perekonomian dan Pembangunan yang dimanfaatkan Bupati	Persen	50	75	113.625.000	100	113.625.000	100	113.625.000	100	113.625.000,00	100	113.625.000	100	568.125.000	Setda (Bag Ekobang & TU)

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Program Implementasi Kerjasama Pemerintahan Daerah	Persentase kerjasama pemerintah daerah yang diimplementasikan	Persentase	10	20	62.250.000,00	40	62.250.000,00	60	62.250.000,00	80	62.250.000,00	100	62.250.000,00	100	62.250.000,00	Setda (Bag. Pemerintahan)
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan terhadap dokumen perencanaan	Persen	100	100	1.067.150.000	100	539.000.000	100	1.075.000.000	100	800.000.000	100	1.330.000.000	100		Bappelitbangda
	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	80	86.800.000	90	100.000.000	95	110.000.000	95	120.000.000	100	120.000.000	100		Bappelitbangda
	Program Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan daerah	Persen	80	90	209.100.000	90	270.000.000	90	275.000.000	90	280.000.000	90	280.000.000	90		Bappelitbangda
	Program Perencanaan Pembangunan Sektoral	Persentase rekomendasi hasil perencanaan pembangunan sektoral yang ditindaklanjuti untuk kebijakan daerah	Persen	100	100	211.050.000	100	290.000.000	100	292.500.000	100	325.000.000	100	335.000.000	100		Bappelitbangda
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																	
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti untuk	Persen	100	100	598.125.000	100	815.000.000	100	820.000.000	100	825.000.000	100	980.000.000	100		Bappelitbangda

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
		kebijakan daerah																
PENGLOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan	Jumlah Peningkatan Realisasi pajak daerah non PBB dan BPHTB	Rupiah	19.720.730.875	21.856.817.666	389.573.000	23.006.463.203	389.573.000	24.214.159.063	389.573.000	25.482.813.442	389.573.000	26.815.480.005	389.573.000	26.815.480.005	1.947.865.000	Badan Keuangan Daerah
		Program Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	Jumlah Peningkatan Realisasi PBB-P2 dan BPHTB	Rupiah	1.392.134.426	1.420.116.328	721.335.000	1.434.317.491	721.335.000	1.448.660.666	721.335.000	1.463.147.273	721.335.000	1.477.78.746	721.335.000	1.477.778.746	3.606.675.000	Badan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	Lama Waktu Penyusunan RAPBD	Bulan	7	7	470.524.000	7	470.524.000	7	470.524.000	7	470.524.000	7	470.524.000	7	2.352.620.000	Badan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persen	100	100	58.100.000	100	58.100.000	100	58.100.000	100	58.100.000	100	58.100.000	100	290.500.000	Badan Keuangan Daerah
		Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas	Persen	100	100	244.038.000	100	244.038.000	100	244.038.000	100	244.038.000	100	244.038.000	100	1.220.190.000	Badan Keuangan Daerah
		Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kesesuaian Data Total Neraca BMD dengan Neraca Keuangan	Persen	100	100	3.096.475.000	100	3.096.475.000	100	3.096.475.000	100	3.096.475.000	100	3.096.475.000	100	15.482.375.000	Badan Keuangan Daerah
PENANGGULANGAN BENCANA																		

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								2019		2020		2021		2022				2023			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
				Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana	persentase pemenuhan prasarana penanggulangan bencana	Persen	100	100	100	137.880.000	100	137.880.000	100	137.880.000	100	137.880.000	100	137.880.000		Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan politik	
				Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	Rata-rata tingkat waktu tanggap	Waktu	<1 Jam	<1 Jam	<1 Jam	101.150.000	<1 Jam	101.150.000		Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan politik							
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																					
				Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan kemitraan dengan kelembagaan organisasi masyarakat yang terdaftar	Persen	70	71	72	112.395.000	72	112.395.000	73	112.395.000	74	112.395.000	75	112.395.000		Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan politik	
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																					
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) yg melakukan kebijakan promosi terbuka untuk JPT sesuai dengan undang-undang ASN	Persen	21,87	37,5	18,75	558.660.000	18,75	558.660.000	9,38	558.660.000	18,75	558.660.000	28,13	558.660.000	28,13	2.793.300.000	BKD,DIKLAT
					Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diikat peningkatan	Persen	50,89	64,33	67,67	390.000.000	67,67	510.000.000	71,00	630.000.000	72,67	510.000.000	74,50	570.000.000	74,50	2.610.000.000	BKD,DIKLAT

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		kompetensi manajerial															
		Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	Persen	28,10	43,55	1.378.463.000	46,78	7.186.249.600	50,37	1.378.463.000	54,32	1.378.463.000	56,84	1.378.463.000	56,84	12.700.101.600	BKD,DIKLAT
	Prog Pembinaan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat penurunan pelanggaran disiplin PNS	Persen	Kenaikan 22%	20	117.063.000,00	20	117.063.000,00	20	117.063.000,00	20	117.063.000,00	20	117.063.000,00	100	585.315.000	BKD,DIKLAT
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependidikan	Persentase formasi jabatan pelaksana yang terisi sesuai kompetensi dan kualifikasi	Persen	88,4	91	541.826.900	93	541.826.900	95,5	541.826.900	97,5	541.826.900	100	541.826.900	100	2.709.134.500	BKD,DIKLAT
		Persentase Database PNS pada SAPK dan SIMPEG yang Update	Persen	86,8	89,5	81.567.500	92	81.567.500	94,8	81.567.500	97,5	81.567.500	100	81.567.500	100	407.837.500	BKD,DIKLAT

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Berdasarkan Program Prioritas dan Pagu indikatif Program, maka selanjutnya perlu menetapkan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Hulu Sungai Selatan diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel 8.1.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat													
Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya													
1	<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i>	<i>Indeks</i>	Menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM = (akar pangkat 3 dari (Indeks kesehatan x indeks pendidikan x indeks pengeluaran)) x 100 	67,80	68,59	69,41	70,25	71,08	71,86	72,57	72,57	BPS HSS	
2	Harapan lama sekolah	Tahun	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$	12.05	12.49	12.70	12.89	13.08	13.29	13.52	13.52		Disdik
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$	7.71	7.83	8.00	8.17	8.33	8.44	8.53	8.53		
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang maish dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. $\frac{\text{penjumlahan usia yang meninggal tahun itu}}{\text{jumlah orang yang meninggal tahun itu}} \times 100\%$	65,39	65,59	66,05	66,54	67,04	67,51	67,87	67,87		Dinkes
5	PPH Ketersediaan	Skor	Skor PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) disajikan angka rata-rata jumlah jenis Bahan Makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita pertahun dalam kilogram serta per kapita per hari dalam satuan gram, pada kurun waktu tertentu.	83,19	83.77	84.61	85.46	86.31	87.17	88.04	88.04		Dinas Ketahanan Pangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
6	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	Persen	$\frac{\sum \text{Jumlah SPM yang terpenuhi}}{\sum \text{SPM perangkat daerah di kab. HSS}} \times 100\%$	52,00	54,00	57,00	61,00	67,00	72,00	75,00	75,00	Bappelitb angka	Disdik/Dinkes /Dinsos/Satpo 1 PP/BPBD Kesbangpol/Dis.PUTR/Dis.PR LH
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal													
7	Tingkat kemiskinan	Persen	Persentase penduduk miskin (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan)	5.80	5.21	5.14	5.06	4.80	4.54	4.28	4.28	BPS HSS	Dinsos
8	Indeks Gini	Indeks	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ Dimana : Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini rasio berkisar antara 0 dan 1, jika : G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi	0.336	0.322	0.318	0.312	0.308	0.299	0.284	0.284		Dis TK, Kop dan UKP
9	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	$\frac{\sum \text{Penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\sum \text{Penduduk angkatan kerja}} \times 100$	2,02	2.43	2.07	2.04	1.96	1.99	1.86	1.86		
10	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang tertentu $\frac{\text{PDRB}(t) - \text{PDRB}(t-1)}{\text{PDRB}(t-1)} \times 100\%$ = tahun berjalan t-1 = tahun sebelumnya tahun t	6,13	6,18	6,23	6,28	6,33	6,38	6,43	6,43		
11	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	Persen	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori industri pengolahan tahun N} - \sum \text{Nilai tambah kategori industri pengolahan tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori pengolahan tahun (N-1)}} \times 100\%$	5,27	4.41	4.47	4.98	5.27	5.56	5.85	5.85		Dis TK, Kop dan UKP

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
12	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (tahun N)} - \sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Tahun (N-1)}} \times 100\%$	5,41	5.27	5.38	5.50	5.61	5.72	5.83	5.83		Disdag
13	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun N} - \sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun (N-1)}} \times 100\%$	2,06	3.73	3.27	4.86	5.63	4.51	4.92	4.92		Distan/Diskan
14	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	Rupiah	$\frac{\sum \text{Retribusi dan Pajak Daerah Thn N} - \sum \text{Retribusi dan Pajak Daerah Thn (N-1)}}{\sum \text{Retribusi dan Pajak Daerah Thn N-1}} \times 100\%$	21,10 milyar	22,50 milyar	23 milyar	24 milyar	25 milyar	26 milyar	28 milyar	28 milyar	Bakeuda	Bakeuda
15	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Persen	$\sum \text{Retribusi dan Pajak Daerah Thn N}$	3,00	4,20	4,80	5,00	5,50	6,00	7,00	7,00	Dis PMPTSP	Dis PMPTSP
16	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	Rupiah	Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah pengeluaran wisatawan untuk konsumsi akhir dan transfer sosial bekerjasama dengan dinas / instansi / stakeholders terkait dan perhitungan akhir yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik Kab. HSS	3.223.750.000	3.904.175.000	4.224.480.000	5.374.026.000	6.687.744.000	7.873.326.000	9.073.800.000	9.073.800.000	Disporapar	Disporapar
Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian													
17	Persentase infrastruktur ekonomi	Persen	$\frac{\text{Jumlah infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas} \times 100\%}{\text{Total infrastruktur ekonomi dan sosial yang dibutuhkan}}$	67,49	71,35	49,64	51,00	50,38	51,31	50,90	50,90		

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
	dan sosial yang berkualitas												
18	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan >20 Km/jam	Persen	$\frac{\sum \text{Panjang jalan kondisi mantap}}{\text{total jumlah panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	74.00	74.50	62,45	63,60	64,75	65,80	67,00	67,00	DisPUTR	DisPUTR
19	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Persen	$\frac{\sum \text{ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam}}{\sum \text{ketersediaan air irigasi seluruh hektar}} \times 100\%$	80.00	85.00	62,68	65,60	67,35	69,10	71,43	71,43		
20	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	Persen	$\frac{\sum \text{Sarana dan prasarana publik yang terbangun}}{\sum \text{sarana dan prasarana publik yang dibutuhkan}} \times 100\%$	10	14	24	48	67	86	100	100		
21	Persentase kecukupan RTH publik	Persen	$\frac{\sum \text{RTH publik yang terbangun}}{\sum \text{RTH publik yang dibutuhkan}} \times 100\%$	24.82	24.83	24.84	24.85	24.86	24.87	24.87	24.87	Dispera KPLH	Dispera KPLH
22	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Persen	$\frac{\text{Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas}}{100\%} \times \frac{\text{Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang ada}}{\text{Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang ada}}$	40.16	40.66	53.05	59.98	67.43	74.88	82.32	82.32		

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Misi 4 : Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan														
23	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	$IDM = \frac{\sum IDM \text{ se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$ IDM = rata-rata Indeks Desa Membangun Kab.HSS	$\sum IDM \text{ se Kab.HSS} : \text{Jumlah IDM Desa se Kab.HSS}$ $\sum \text{Desa se Kab.HSS} : \text{Jumlah Desa se Kab.HSS}$	0,58	0,62	0,64	0,65	0,67	0,69	0,71	0,71	Dis.PMD	Dis.PMD
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	IPG : 1) Umur panjang dan sehat: 1. indikator angka harapan hidup perempuan 2. indeks dimensi : indeks harapan hidup perempuan 3. indeks sebaran merata : indeks /harapan hidup dengan sebaran merata 2) Pengetahuan: 1. indikator AMH perempuan, MYS perempuan 2. Indeks dimensi : indeks pendidikan perempuan 3. Indeks sebaran merata : indeks pendidikan dengan sebaran merata 3) Kehidupan yang layak : 1. Indikator perkiraan pendapatan perempuan 2. Indeks dimensi : indeks pendapatan perempuan 3. Indeks sebaran merata : indeks dengan pendapatan sebaran merata		89,07	89,96	90,27	90,58	90,81	90,91	91,27	91,27	BPS HSS	DPPKBPPA
25	Persentase desa/kelurahan layak anak	Persen	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan layak anak}}{\text{Jumlah desa/kelurahan yang ada}} \times 100$		0,68	0,68	2,03	3,38	4,73	6,08	7,43	7,43		
26	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	IKLH dibentuk oleh komponen, IPA,IPU,dan ITL * IPA=Indeks Pencemaran Air. * IPU = Indeks Pencemaran Udara * ITL = Indeks Tutupan Lahan.		54,55	54,94	55,08	55,27	55,44	55,60	55,77	55,77	ESDM Provinsi	Dispera KPLH

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis													
27	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	62,93	63,88	68	72	78	83	88	88	Kemendagri	
28	Predikat AKIP	Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	BB	BB	BB	A	A	A	A	A		Bagian Orpad Setda/Inspektorat/Seluruh SKPD/bappelit bangsa
29	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Predikat	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri dari 6 aspek penilaian yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.	B	B	A	A	A	A	A	A		Setda (Bagian Orpad)/Dukcapil/ Dinkes/RSUD Hasan Basry/RSU Daha Sejahtera/Dis. PMLTSP
30	Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	Hasil Audit BPK RI yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah, penyajian laporan keuangan, meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, penguatan dan pengendalian internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPK RI	Bakeuda
31	Indeks profesionalisme ASN	Indeks	Indeks Profesionalitas ASN merupakan salah satu cara mengukur profesionalisme ASN. Pengukuran dihitung dari data-data : SAPK, E-PUPNS, Sistem Informasi Kepegawaian, Daftar Gaji dan Tunjangan ASN, sasaran kerja pegawai dan pegawai yang terkena hukuman.	48,63	49,04	69,77	73,17	74,42	78,12	81,33	81,33	BKD	BKD
32	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	Persen	$\frac{\sum \text{Perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik}}{\sum \text{Perangkat daerah Se - Kab. HSS}} \times 100\%$	7,89	7,89	13,16	39,47	65,79	92,11	100	100	Dis. Kominfo	Dis. Kominfo

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
33	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	Persen	$\frac{\sum \text{Desa yang menggunakan aplikasi TI}}{\sum \text{Desa Se - Kab. HSS}} \times 100\%$	0.60	0.60	8.33	15.97	23.61	31.25	38.88	38.88	Dis.PMD	Dis.PMD

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	6,13	6,18	6,23	6,28	6,33	6,38	6,43	6,43	
2	Laju inflasi	Persen		2,09	1,98	1,77	1,58	1,42	1,27	1,14	
3	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rp	66.534	67.620	68.707	70.951	73.268	75.661	78.132	80.683	
4	PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rp	55.981	56.503	57.024	58.086	59.169	60.271	61.394	62.538	
5	Pengeluaran Perkapita										
6	Indeks Gini	Indeks	0.336	0.322	0.318	0.312	0.308	0.299	0.284	0.284	
7	Indeks Williamson										
8	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	67,8	67,8	68,59	69,41	70,25	71,08	71,86	71,86	
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,80	5,21	5,10	5,06	4,80	4,54	4,28	4,28	Dinas Sosial
10	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks									
11	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks									
12	Penduduk miskin	orang	13.490	12.118	12.374	11.769	11.164	10.559	9.955	9.955	
13	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	-	87,88	90,83	97,14	100	100	100	100	Satpol PP
14	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	-	69,6	70,16	71,32	72,49	73,68	74,89	76,12	Dinas PPKBPPA
15	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Point	-	85,06	85,32	85,84	86,36	86,89	87,42	87,95	
16	Status Kota Layak Anak	Katagori	Pratama		Madya	Madya	Madya				
17	Angka Melek Huruf	Persen	99,35	99,57	99,79	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
18	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.71	7.83	8.00	8.17	8.33	8.44	8.53	8.53	

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.05	12.49	12.70	12.89	13.08	13.29	13.52	13.52	
20	APK SD	Persen	109,35	109,64	109,94	110,52	111,12	111,71	112,31	112,91	
21	APK SMP/MTs	Persen	83,75	84,3	84,84	85,95	87,07	88,2	89,35	90,51	
22	APK SMA/SMK/MA	Persen	84,82	85,21	85,6	86,39	87,18	87,98	88,79	89,6	
23	Angka pendidikan yang ditamatkan:	Persen									
	- SD	Jumlah		4.313	4.414	4.627	4.851	5.085	5.330	5.588	
	- SMP/MTs	Jumlah		2.565	2.610	2.701	2.796	2.895	2.996	3.102	
	- SMA/SMK/MA	Jumlah		2.613	2.637	2.687	2.738	2.790	2.843	2.897	
24	APM SD/SDLB/MI:	Persen	99,65	99,75	99,85	100	100	100	100	100	
25	APM SMP	Persen	75,55	75,72	75,9	76,24	76,59	76,94	77,29	77,64	
26	Angka Kematian Bayi/Angka kelangsungan hidup bayi	Jiwa		9.7/1.016	10.0/1.040	10.4/1.090	10.9/1.143	11.5/1.198	12.0/1.256	12.6/1.316	
27	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,39	65,59	66,05	66,54	67,04	67,51	67,87	67,87	
28	Persentase Balita Gizi buruk	Persen		0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	Dinas Kesehatan
29	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	71,74	71,97	72,21	72,68	73,15	73,63	74,11	74,59	
30	Jumlah Grup Kesenian	Buah		40	40	41	41	41	42	42	Dinas Pendidikan
31	Jumlah Gedung	Buah		1	1	1	1	1	1	1	Setda Umum/DPUTR
32	Jumlah klub olahraga	Buah		76	77	77	78	79	79	80	Disporapar
33	Jumlah Gedung Olahraga	Buah		27	27	29	30	32	34	36	Setda Umum/DPUTR/Kecamatan

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	URUSAN WAJIB										
I	TERKAIT PELAYANAN DASAR										
1.1	PENDIDIKAN										
1.1.1	APK PAUD Formal	Persen	72,98		76,55	77,8	79,05	80,3	81,55	81,55	Dinas Pendidikan
1.1.2	Persentase Pemenuhan SPM/SNP PAUD	Persen	0,62		1,25	1,87	2,5	3,12	3,75	3,75	
1.1.3	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	85,38		89,23	91,15	93,06	94,3	96,14	96,14	
1.1.4	Persentase pemenuhan Aspek SPM Dikmas	Persen	18,51		25,92	25,92	29,92	33,33	37,03	40,74	
1.1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	109,67		100	100	100	100	100	100	
1.1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	94,29		97,45	98	98,3	99	99,5	99,5	
1.1.7	Angka Putus Sekolah (APS) SD	Persen	34		28	25	23	20	15	15	
1.1.8	Persentase pemenuhan SPM/SNP SD	Persen	2,9		4,15	5,39	6,64	7,88	9,13	9,13	
1.1.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	93,14		89,17	90,49	91,37	92,25	93,13	93,13	
1.1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	76,29		79,45	79,9	80,25	82,15	85	85,00	
1.1.11	Angka putus Sekolah (APS) SMP	Persen	15		10	7	6	5	4	4	
1.1.12	Persentase pemenuhan SPM/SNP SMP	Persen	31,25		25	34	43,75	53,15	59,38	59,38	
1.2	KESEHATAN										
1.2.1	Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah dasar, ibu, dan lansia	persen	61,55		72,3	-	-	-			Dinas Kesehatan
1.2.2	Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah dasar, ibu, dan lansia	persen	61,55		79	-	-	-	-	-	

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3	Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah dasar, ibu, dan lansia	Persen	61,55		-	81	82	83	84	84	
1.2.4	Persentase pemenuhan Akses Prasarana Kesehatan	persen	77,08		80	83	84	87	89	89	
1.2.5	Persentase pemenuhan Akses Sarana Kesehatan	persen	17,64		20,5	21,45	22,4	23,36	24,79	24,79	
1.2.6	Persentase pemenuhan Kualitas Prasarana Kesehatan	persen	40,91		98,18	72,73	77,27	86,36	90,91	90,91	
1.2.7	Persentase pemenuhan Kualitas sarana Kesehatan	Persen	14,29		38,1	52,38	66,67	80,95	90,48	90,48	
1.2.8	Persentase fasyankes yang terakreditasi paripurna	persen	4,35		4,35	4,35	8,7	13,04	17,39	17,39	
1.2.9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,87		82	82	82	82	82	82	
1.2.10	Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	persen	100		100	100	100	100	100	100	
1.2.11	Persentase Pemenuhan Layanana Promosi Kesehatan	persen	17,19		20,64	21,15	18,71	14,74	100	100	
1.2.12	Persentase pemenuhan Pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Dasar, Penyakit Menular dan Tidak Menular	persen	60,36		48,52	52,38	55,4	58,43	60,67	60,67	
1.2.13	Persentase Pemenuhan Capaian Indikator Pengendalian Penyakit Menular	persen	20,06		55,33	57,21	58,46	63,23	65,97	65,97	
1.2.14	Pesentase Fasyankes Yang Terakreditasi Sempurna	Persen	4,35		4,35	4,35	8,7	13,04	17,79	17,79	
1.2.15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,87		82	82	82	82	82	82	

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.16	Persentase Pemenuhan Tingkat Kesehatan RSUD, Aspek IPP RSUD, Dan Akreditasi RSUD , Kategori > B	Persen	-55		-66,9	-75,6	-79	-81	-85	-85	RSUD H. Hasan Basry
			-68		-72,03	-76,99	-77,97	-78,44	-78,93	-78,93	
			-80		-80,5	-80,75	-81	-81,5	-82	-82	
1.2.17	Persentase Pemenuhan Aspek Prasarana IPP RSUD	Persen	2,86		3,57	3,93	4,29	5	5,71	5,71	
1.2.18	Persentase Pemenuhan Aspek Sarana IPP RSUD	Persen	0,71		0,89	0,98	1,07	1,25	1,43	1,43	
1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.3.1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	80		62,68	65,6	67,35	69,1	71,43	71,43	DINAS PUTR
1.3.2	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	30		49,71	55,44	60,22	65	69,78	69,78	
1.3.3	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	629,91		536,7	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	
1.3.4	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	629,91		536,7	546,58	556,46	565,44	575,77	575,77	
1.3.5	Jumlah bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	buah	4		5	5	4	4	3	3	
1.3.6	Persentase penduduk / rumah tangga yang terakses air bersih	Persentase	76,94		77,62	78,27	78,89	79,48	80,04	80,04	
1.3.7	Persentase drainase yang berfungsi dengan baik	Persentase	59		59	63	66	69	73	73	
1.3.8	Persentase KK yang terlayani air limbah domestik	Persentase	79,68		6,98	7,1	7,18	7,27	7,35	7,43	
1.3.9	Tingkat kesesuaian RTRW dengan pelaksanaan pembangunan	Persentase	0		9,09	18,18	27,27	36,36	54,55	54,55	
1.3.10	Persentase tenaga terampil yang bersertifikat	Persentase	1,09		1,81	3,63	5,44	7,26	9,07	9,07	

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.4.1	Persentase cakupan sampah yang dikelola secara Control landfill	Persen	52		52,53	48,38	46,97	45,59	44,06	44,06	DISPERA KPLH
1.4.2	Persentase cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R	Persen	27		27,47	26,63	27,02	27,41	27,94	27,94	
1.4.3	Persentase luasan layanan persampahan	Persen	72		72,6	80,82	87,67	94,52	100	100	
1.4.4	Persentase kawasan perumahan dan permukiman sehat	Persen	53		53,05	59,98	67,43	74,88	82,32	82,32	
1.4.5	Persentase kecukupan RTH Publik	Persen	24,82		24,84	24,85	24,86	24,86	24,87	24,87	
1.4.6	Rasio jumlah titik PJU terhadap panjang jalan	Persen	40,16		23,97	28,98	33,99	39	44,01	44,01	
1.5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT										
1.5.1	Cakupan penyelesaian penegakkan perda	Persen	25		37,5	50	62,5	75	100	100	Satpol PP
1.5.2	Persentase Kawasan Ketertiban Umum Yang Diobservasi	Persen	100		100	100	100	100	100	100	
1.5.3	Persentase Penanganan Kebakaran dan Pemenuhan Perlindungan Masyarakat	Persen	100		100	100	100	100	100	100	
1.6	SOSIAL										
1.6.1	Tingkat Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	4,85		5,72	7	7,07	7,16	7,25	7,25	Dinas Sosial
1.6.2	Cakupan Lembaga/Organisasi sosial, yang aktif dalam penanganan masalah sosial	Persen	35,33		38,67	42	45,33	48,67	52	52	

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.3	Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	5,63		6,02	6,74	6,78	6,83	6,87	6,87	
1.6.4	Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	1,11		3,54	3,85	4	4,13	4,26	4,26	
1.6.5	Tingkat Perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	74,64		74,64	77,13	79,87	82,88	86,2	86,2	
II TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR											
2.1	TENAGA KERJA										
2.1.1	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	Persen	42,76		42,96	43,03	43,34	43,63	48,5	48,5	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil, Koperasi dan Perindustrian
2.1.2	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	Persen	75		80	85	90	95	95	85	
2.1.2	Persentase angkatan kerja yang di tempatkan	Persen	0,73		0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,79	
2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK										
2.2.1	Persentase ARG terhadap Anggaran Belanja Langsung APBD	Persen	36,84		36,84	52,63	68,42	84,21	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Anak
2.2.2	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	Persen	8,11		8,11	21,08	33,51	45,41	52,97	52,97	

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.3	Persentase Institusi/lembaga yang mengimplementasikan pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak	Persen	77,55		77,55	83,67	89,8	95,92	100	100	
2.2.4	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis klaster	Persen	18,52		27,78	55,56	79,63	98,15	100	100	
2.3	PANGAN										
2.3.1	Jumlah Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	ton	59,653		102,092	0	0	0	0	0	
2.3.2	Jumlah Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	ton	59,653		102,092	117,092	132,092	147,092	162,092	162,092	
2.3.3	Tingkat Fluktuasi harga	Persen	5,87		-	5,47	5,43	5,4	5,35	5,35	Dinas Ketahanan Pangan
2.3.4	Persentase Pangan Segar yang Tercemar	Persen	≤20%		≤17%	≤15%	≤13%	≤12%	≤10%	≤10%	
2.3.5	Skor PPH Konsumsi	Skor	80,9		82,82	83,65	84,48	85,32	86,17	86,17	
2.4	PERTANAHAN										
	Persentase penguasaan fisik tanah yang teradministrasi	Persen	0		12	24	36	48	60	60	DISPERA KPLH
2.5	LINGKUNGAN HIDUP										
	Persentase indeks kualitas Udara titik pantau yang memenuhi standar	Persen	85		85	85	85	85	85	85	
	Persentase indeks kualitas air titik pantau yang memenuhi standar	Persen			51	51,5	52	52,5	53	53	DISPERA KPLH
2.6	Persentase tutupan lahan pada areal bekas pertambangan	Persen			35,34	35,49	35,63	35,78	35,93	35,93	

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	Persen	98		98	99	99	99	99	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	90		90	91	91	92	92	92	
	Validitas database kependudukan	Persen	80		95	96	97	98	99	99	
2.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Persen	70,00		73,63	77,32	81,01	84,7	88,38	88,38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang	Persen	4,16		13,88	21,52	29,16	36,8	44,44	44,44	
	Persentase Pemerintahan Desa/kel yang berkinerja baik	Persen	10,41		25,69	33,33	40,97	48,61	56,25	56,25	
2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan < 18 Tahun	Persen	0		9,92	29,76	49,6	69,44	89,28	89,28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Anak
	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤15 tahun	Persen									
	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	79,6		79,6	80,5	81,4	82,4	83,3	83,3	
	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	Persen	60,2		60,2	65,22	70,23	75,25	80,27	80,27	

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	Persen	18,18		18,18	36,36	54,55	72,73	100	100	
2.9	PERHUBUNGAN										
	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi	persen	93,33		92,86	94,29	94,88	95,19	95,45	95,45	Dinas Perhubungan
	Persentase angkutan umum yang laik jalan		85,42		88,27	89,69	91,12	92,54	96,81	56,95	
	Persentase angkutan sungai dan danau yang laik layar	persen	54,79		57,53	60,27	63,01	65,75	68,49	68,49	
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	Jumlah SKPD yang terkoneksi dengan intranet ke Server Center Diskominfo	SKPD	0		1	9	19	29	38	38	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah Aplikasi e-Government yang berfungsi dengan baik	Aplikasi	0		5	15	25	35	38	38	
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	SKPD	0		100	100	100	100	100	100	
	Persentase kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi	Persen	100		100	100	100	100	100	100	
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
	Persentase Koperasi Aktif	Persen	85,62		97,45	98,09	98,73	99,37	100	100	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil,

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	persentase SDM Koperasi aktif yang berkualitas	Persen	30,5		31,21	41,63	52,05	62,46	72,88	72,88	Kopersi dan Perindustrian
	persentase SDM Usaha Kecil yang berkualitas	Persen	9,1		10,5	23	30,5	38	45,5	45,5	
2.12	PENANAMAN MODAL										
	Realisasi Investasi PMDN	Rupiah	57.151.000.000		580.000.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000	770.000.000	770.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
	Persentase kepatuhan investor terhadap per Undang-undangan.	Persen	20		55	75	90	100	100	100	
	Persentase pemenuhan aspek penyelenggaraan pelayanan publik minimal baik (B)	Nilai	3,90		4,51	4,60	4,65	4,80	5,00	5,00	
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA										
	Persentase pemuda berprestasi dari unsur organisasi kepemudaan & pemuda berprestasi bidang kepaskibraan	Persen	66,67		77,78	88,89	88,89	100	100	100	Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata
	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali pada POPDA tingkat provinsi	Persen	31,25		31,25	43,75	53,13	59,38	71,88	71,88	
2.14	STATISTIK dan PERSANDIAN										
	Persentase Pengamanan dan Layanan Informasi yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100		100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15	KEBUDAYAAN										
	Persentase tingkat pengembangan seni dan budaya	Persen	34,78		42,26	52,28	62,57	71	84,1	84,1	Dinas Pendidikan
2.16	PERPUSTAKAAN										
	Persentase Peningkatan bahan Pustaka	Persen	0		20	40	60	80	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Persentase Jangkauan Layanan Perpustakaan	Persen	93,2		93,2	94,11	96,11	97,57	100	100	
	Persentase Perpustakaan Desa dan Kelurahan yang aktif	Persen	27,39		27,39	34,24	41,09	47,94	54,79	54,79	
2.17	KEARSIPAN										
	Persentase OPD yang mengelola Arsip	Persen	26		39,47	52,63	65,78	78,95	92,1	92,1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.1.1	Produksi perikanan budidaya	Ton	3.959		4.791	5.270	5.797	6.376	7.014	7.014	Dinas Perikanan
3.1.2	Produksi perikanan tangkap	Ton	8.454		9.579	10.058	10.863	12.057	13.625	13.625	
3.1.3	Persentasi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	Persen	2		3	5	5,5	6	7	7	
3.1.4	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	Persen	0,6		1	7	9	12	15	15	
3.2	PARIWISATA										
3.2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	orang/ wisatawan	243.305	283.947	255.470	268.244	268.244	295.739	310.526	310.526	Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata
3.2.2	Lama tinggal wisatawan (Length of Stay)	malam	1	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2	

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3	PERTANIAN										
3.3.1	Produksi Padi	ton	253653		242707	247335	253.506	255.048	258.133	256.620	Dinas Pertanian
3.3.2	Produksi Jagung	ton	4.973		5.035	5.038	5.041	5.073	5.102	5.102	
3.3.3	Produksi Kacang Tanah	ton	619		530	533	539	542	545	545	
3.3.4	Produksi Karet	ton	9.546		131.416	131.744	132.403	133.065	133.730	133.730	
3.3.5	Produksi Kayu Manis	ton	2.335		20.240	20.443	20.647	20.854	21.062	21.062	
3.3.6	Produksi Kelapa	ton	6.722		7.483	7.501	7.520	7.534	7.557	7.557	
3.3.7	Produksi Aren	ton	191		240,6	241,2	241,8	242,4	243	243	
3.3.8	Produksi Cabe	ton	9.980,6 0		5.976	6.036	6.096	6.156	6.216	6.216	
3.3.9	Produksi Tomat	ton	3.300,6 0		3.816	3.886	3.956	4.026	4.096	4.096	
3.3.10	Produksi Bawang Merah	ton	38,1		48	60	72	84	96	96	
3.3.11	Jumlah populasi ternak besar (sapi + kerbau)	ekor	6.680		6.840	7.040	7.100	7.375	7.375	6.680	
3.3.12	Jumlah populasi ternak kecil (kambing)	ekor	2.713		2.824	2.916	2.998	3.184	3.184	2.713	
3.3.13	Jumlah populasi ternak unggas(ayam ras+ayam broiler+itik)	ekor	3.012.1 20		3.014.4 46	3.015.781	3.018.4 29	3.019.791	3.019.7 91	3.012.120	
3.3.14	Terkendalinya kasus zoonosis	Ekor	6.937		7.037	7.137	7.237	7.337	7.437	6.937	
3.3.15	Persentase pengurangan hasil	Persen	0		0	0	0	0	0	0	
3.3.16	Penambahan jumlah alat pasca panen	buah	5		5	10	15	20	25	25	
3.3.17	Kenaikan Kelas Kelompok Tani	kelas	0		4	4	4	4	4	4	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3.18	Jumlah pengembangan optimasi lahan dan pemulihan kesuburan tanah	ha	6.760		6.937	7.037	7.137	7.237	7.337	7.437	
3.4	KEHUTANAN										
3.5	SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERGI										
3.6	PERDAGANGAN										
3.6.1	Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal	Persen	11,05		11,05	9,54	8,06	6,61	5,19	5,19	Dinas perdagangan
3.6.2	PAD sub sektor perdagangan (kemetrolgian)	Rupiah	10 jt		35 jt	38 jt	41 jt	44 jt	45 jt	45 jt	
3.6.3	Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Persen	97,42		97,42	97,43	97,44	97,45	97,46	97,46	
3.6.4	PAD sub sektor perdagangan (pelayanan pasar)	Rupiah	3,9 M		4,2M	4,3 M	4,4 M	4,5 M	4,6 M	4,6 M	
3.7	PERINDUSTRIAN										
3.7.1	Persentase produk industri yang bersertifikasi mutu	Persen	3,94		4,18	6,96	9,75	12,54	15,32	13,92	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil, Koperasi dan Perindustrian
3.7.2	Persentase Peningkatan Kapasitas Produk Industri Kecil	Persen	5,58		5,58	11,16	16,74	22,32	27,9	27,9	

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.7.3	Persentase Pengembangan Sentra Industri	persen	-		-	8,5	18	27	34	34	
IV	FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH										
4.1	SEKRETARIAT PADA PERANGKAT DAERAH										
4.1.1	Indeks kepuasan pelayanan	Indeks	82		82	82	83	83	84	84	SEMUA SKPD
4.1.2	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Nilai	70,03		79,41	82,55	83,79	86,42	89,06	89,06	SEMUA SKPD
4.1.3	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Nilai	100		100	100	100	100	100	100	SEMUA SKPD
4.2	KECAMATAN										
4.2.1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya dilaksanakan dengan baik.	persen	100		100	100	100	100	100	100	Semua Kecamatan
4.3	PENGAWASAN										
4.3.1	Persentase Penurunan Temuan Bersifat Keuangan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS	Persen	56		36	25	23	20	18	18	Inspektorat
4.3.2	persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah	Persen	100		100	100	100	100	100	100	
4.3.3	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	Persen	75,79		64	75	77	80	82	82	

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3.4	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	Persen	93,75		100	100	100	100	100	100	
4.3.5	Persentase APIP yang memiliki Standar Kompetensi Jabatan	Persen	61,11		100	100	100	100	100	100	
4.3.6	Persentase SOP Sesuai Standar.	Persen	100		100	100	100	100	100	100	
4.3.7	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti	Persen	100		100	100	100	100	100	100	
4.4	SEKRETARIAT DPRD										
4.4.1	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan Tepat Waktu	Persen	100		100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
4.4.2	Persentase Fasilitasi Keluhan / Pengaduan Masyarakat	Persen	100		100	100	100	100	100	100	
4.4.3	Indeks Kepuasan Pelayanan	Persen	100		100	100	100	100	100	100	
4.6	SEKRETARIAT DAERAH										
4.6.1	Nilai LPPD	Nilai	3,0356		3,1173	3,1746	3,2100	3,2376	3,264	3,264	Setda (Bag. Pemerintahan)
4.6.2	Persentase peningkatan administrasi pemerintahan dan kewilayahan	Persen	100		100	100	100	100	100	100	
4.6.3	Persentase produk hukum daerah yang berkualitas	Persen	100		100	100	100	100	100	100	Setda (Bag. Hukum dan perundang-undangan)
4.6.4	Persentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100		100	100	100	100	100	100	

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.6.5	Nilai / Predikat AKIP pada komponen pelaporan	Nilai	BB		A	A	A	A	A	A	Setda (Bag. Orpad)
4.6.6	Jumlah inovasi yang lolos nasional	Jumlah	3		3	3	3	3	3	3	
4.6.7	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100		100	100	100	100	100	100	
4.6.8	Indeks kepuasan Pelayanan Pimpinan Daerah	Indeks	81		82	83	84	85	86	86	Setda (Bag. Protokol dan Kehumasan)
4.6.9	Indeks kepuasan Pelayanan Pimpinan Daerah	Indeks	81		82	83	84	85	86	86	
4.6.10	Persentasi PD yang melaksanakan PBJ melalui ULP	Persen	100		100	100	100	100	100	100	Setda (Bag. PBJ)
4.6.11	Persentase Pemenuhan Peningkatan standardisasi Sistem LPSE	Persen	58,82		70,59	88,24	100	100	100	17	
4.6.12	Persentase policy brief bidang perekonomian dan Pembangunan yang dimanfaatkan Bupati	Persen	50		75	100	100	100	100	100	Setda (Bag Ekobang & TU)
4.6.13	Persentase kerjasama pemerintah daerah yang diimplementasikan	Persentase	10		20	40	60	80	100	100	Setda (Bag. Pemerintahan)
4.5	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										
4.5.1	Tingkat keselarasan terhadap dokumen perencanaan	Persen	100		100	100	100	100	100	100	Bappelitbangda
4.5.2	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	Persen	70		80	90	95	95	100	100	

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5.3	Persentase capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan daerah	Persen	80		90	90	90	90	90	90	
4.5.4	Persentase rekomendasi hasil perencanaan pembangunan sektoral yang ditindaklanjuti untuk kebijakan daerah	Persen	100		100	100	100	100	100	100	
4.6	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										
4.6.1	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti untuk kebijakan daerah	Persen	100		100	100	100	100	100	100	Bappelitbangda
4.7	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
4.7.1	Jumlah Peningkatan Realisasi pajak daerah non PBB dan BPHTB	Rupiah	19.720.7 30.875		21.856.8 17.666	23.006.463 .203	24.214.1 59.063	25.482.813 .442	26.815.4 80.005	26.815.480 .005	
4.7.2	Jumlah Peningkatan Realisasi PBB-P2 dan BPHTB	Rupiah	1.392.13 4.426		1.420.11 6.328	1.434.317. 491	1.448.66 0.666	1.463.147. 273	1.477.77 8.746	1.477.778. 746	
4.7.3	Lama Waktu Penyusunan RAPBD	Bulan	7		7	7	7	7	7	7	
4.7.4	Persentasi Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persen	100		100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan Daerah
4.7.5	Persentasi Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas	Persen	100		100	100	100	100	100	100	
4.7.6	Kesesuaian Data Total Neraca BMD dengan Neraca Keuangan	Persen	100		100	100	100	100	100	100	

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.8	PENANGGULANGAN BENCANA										
4.8.1	Persentase pemenuhan prasarana penanggulangan bencana	Persen	100		100	100	100	100	100		Badan Penanggulanagn Bencana, Kesatuan Bangsa dan politik
4.8.2	Rata-rata tingkat waktu tanggap	Waktu	<1 Jam		<1 Jam	<1 Jam	<1 Jam	<1 Jam	<1 Jam		
4.9	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
4.9.1	Cakupan kemitraan dengan kelembagaan organisasi masyarakat yang terdaftar	Persen	70		71	72	73	74	75		Badan Penanggulanagn Bencana, Kesatuan Bangsa dan politik
4.10	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
4.10.1	Persentase JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) yg melakukan kebijakan promosi terbuka untuk JPT sesuai dengan undang-undang ASN	Persen	21,87		37,5	18,75	9,38	18,75	28,13	28,13	BKD,DIKLAT
4.10.2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	Persen	50,89		64,33	67,67	71	72,67	74,5	74,5	
4.10.3	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	Persen	28,1		43,55	46,78	50,37	54,32	56,84	56,84	
4.10.4	Persentase tingkat penurunan pelanggaran disiplin PNS	Persen	Kenaikan 22%		20	20	20	20	20	100	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.10.5	Persentase formasi jabatan pelaksana yang terisi sesuai kompetensi dan kualifikasi	Persen	88,4		91	93	95,5	97,5	100	100	
4.10.6	Persentase Database PNS pada SAPK dan SIMPEG yang Update	Persen	86,8		89,5	92	94,8	97,5	100	100	
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	ribu rupiah	10977	1033847/ 11106	107141 0/1123 4	1152201/ 11497	123908 3/1176 7	1332518/ 12042	143299 8/1232 4	1541054/ 12613	
2.	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	ribu rupiah		46,99	47,67	49,07	50,51	51,99	53,51	55,08	
3.	Produktivitas Total Daerah	Persen									
4.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio									
5.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang									
6.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	orang									
7.	Ketaatan Terhadap RTRW	persen		84	86	90	94	98	103	107	
8.	Luas wilayah produktif	ha									
9.	Luas wilayah industri	persen									
10.	Luas wilayah banjir	persen									
11.	Luas wilayah kekeringan	Persen									
12.	Luas wilayah perkotaan	Persen									

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jumlah		9	10	12	14	17	20	24	
14.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang	Jumlah		1	1	2	2	2	3	4	
15.	Jenis. Kelas. dan Jumlah Restoran	Jumlah									
16.	Jenis. Kelas. dan Jumlah Penginapan/Hotel	Jumlah		19	19	20	20	20	20	21	
17.	Angka kriminalitas	Jumlah	0,00139	0,00138	0,00136	0,00134	0,00131	0,00129	0,00126	0,00124	
18.	Jumlah demonstrasi	Kali		0	0	0	0	0	0	0	
19.	Lama Proses Perizinan	Jumlah									
20.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	macam									
21.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	perda		5	5	5	5	5	5	5	
22.	Presentase Desa Berstatus swasembada Terhadap Total Desa	persen									
23.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	orang		383	418	503	503	503	503	503	
24.	Rasio Ketergantungan	persen		47	51	62	62	62	62	62	

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program Pembangunan Daerah dan program Perangkat Daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dokumen ini juga merupakan pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam perannya sebagai pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode tersebut diatas.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan serta RPJM Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya RPJMD ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Oleh karena itu seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan kebutuhan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018–2023.
2. Renstra Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.
3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah.

4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 ini adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Program Pembangunan Daerah serta Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah. Sebagai pelaksana maka Perangkat Daerah wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut.
5. Program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional, dalam hal ini apabila pemerintah daerah tidak mampu untuk membiayainya, maka dapat dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Kalimantan Selatan, serta kerjasama kemitraan dengan lembaga non pemerintah lainnya baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Terhadap Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD ini.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD beserta indikatornya kedalam Renstra Perangkat Daerah serta ketercapaian dalam pelaksanaannya.

9.2 Pedoman Transisi

Tahun 2023 merupakan tahun transisi pemerintahan Bupati Drs. H. Achmad Fikry, M.AP. dan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, S.AP.,M.A. Untuk itu diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2024, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024 disusun pada tahun 2023.

Program-program pembangunan daerah pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktifitas dan capaian program pembangunan daerah.

Program pembangunan daerah dan program perangkat daerah pada tahun 2024 dapat melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu setiap perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2024 dapat tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY